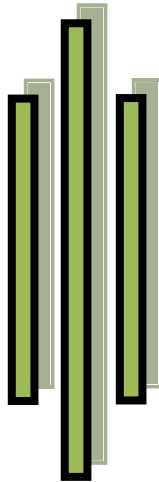




**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023**



**Jalan Datu Nuraya RT.01 Kel. Rangda Malingkung Kawasan Rantau Baru
Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 71114**



KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai sub sistem pemerintahan negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dimana secara konstitusional telah diatur pada Pasal 69 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Kepala Daerah Wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah melalui Gubernur paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. LPPD merupakan informasi utama dan data dasar untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD), perumusan kebijakan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Pembuatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023 ini juga dimaksudkan sebagai sebuah wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat Kabupaten Tapin. Laporan ini tidak terlepas dari kekurangan dan untuk penyempurnaannya dengan mengacu pada ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.2.7/8697/OTDA Tanggal 11 Desember 2023 Perihal Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023, yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari capaian kinerja makro, urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kunci pada masing-masing urusan, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, penerapan dan pencapaian standar pelayanan



minimal pada urusan wajib pelayanan dasar, serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023 yang didukung dengan data bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Instansi terkait lainnya di Kabupaten Tapin yang memberikan data dan masukannya, maka pembuatan laporan ini dapat diselesaikan. Untuk itu, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapin Tahun 2023 ini disampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dijadikan bahan untuk penilaian dan evaluasi yang berguna bagi perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin di masa yang akan datang dengan harapan terwujudnya Tapin Maju, Sejahtera yang Agamis dapat terus berjalan dan tercipta dengan baik.

PENJABAT BUPATI TAPIN,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M.Pd

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1 Penjelasan Umum	3
A. Undang-Undang Pembentukan Daerah	3
B. Data Geografis Wilayah.....	4
C. Jumlah Penduduk.....	9
D. Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	17
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat	
Daerah dan Pegawai Pemerintah.....	22
F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	32
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	42
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	42
B. Visi dan Misi Kepala Daerah	49
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan	
Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	66
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan	
Dokumen Perencanaan Tahunan.....	103
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	297
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
PEMERINTAHAN DAERAH.....	308
2.1. Capaian Kinerja Makro	308
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	321
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah.....	387
A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	388
B. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan Dengan.....	
Target Capaian Kinerja.....	390
C. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan	
Tahun Sebelumnya	393



D. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan..... Target dalam Pembangunan Jangka Menengah.....	402
E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan ... Dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai.....	405
F. Analisis Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja	408
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS	
PEMBANTUAN	446
1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.....	446
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	447
3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan	448
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan Oleh	
Daerah Kabupaten	453
3.1. 1 Target Kinerja	453
3.1. 2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	457
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan Oleh	
Daerah Kabupaten	481
3.2.1 Target Kinerja	481
3.2.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	482
3.3 Permasalahan dan Kendala	497
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	498
BAB. IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR	
PELAYANAN MINIMAL	499
4.1 Bidang Urusan Pendidikan	499
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	499
4.1.2 Target Pencapaian SPM	501
4.1.3 Realisasi	503
4.1.4 Alokasi Anggaran	526
4.1.5 Dukungan Personil.....	534
4.1.6 Permasalahan dan Solusi	535
4.2 Bidang Urusan Kesehatan.....	536
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	536



4.2.2 Target Pencapaian SPM	554
4.2.3 Realisasi	555
4.2.4 Alokasi Anggaran	556
4.2.5 Dukungan Personil	557
4.2.6 Permasalahan dan Solusi	558
4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum	560
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar	560
4.3.2 Target Pencapaian	561
4.3.3 Realisasi	562
4.3.4 Alokasi Anggaran	562
4.3.5 Dukungan Personil	565
4.3.6 Pemasalahan dan Solusi	565
4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat	566
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar	566
4.4.2 Target Pencapaian SPM	567
4.4.3 Realisasi	568
4.4.4 Alokasi Anggaran	569
4.4.5 Dukungan Personil	570
4.4.6 Permasalahan dan Solusi	572
4.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	573
a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	573
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar	573
4.5.2 Target Pencapaian SPM	573
4.5.3 Realisasi	574
4.5.4 Alokasi Anggaran	574
4.5.5 Dukungan Personil	576
4.5.6 Permasalahan dan Solusi	576
b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	577
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar	577
4.5.2 Target Pencapaian SPM	578
4.5.3 Realisasi	579



4.5.4 Alokasi Anggaran.....	580
4.5.5 Dukungan Personil.....	581
4.5.6 Permasalahan dan Solusi	584
4.6 Bidang Urusan Sosial	584
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar	584
4.6.2 Target Pencapaian SPM.....	585
4.6.3 Realisasi	587
4.6.4 Alokasi Anggaran.....	589
4.6.5 Dukungan Personil	591
4.6.6 Permasalahan dan Solusi.....	592
4.7 Program dan kegiatan	593
4.7.1 Urusan Pendidikan	599
4.7.2 Urusan Kesehatan	604
4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum.....	605
4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat.....	605
4.7.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	606
4.7.6 Urusan Sosial	610
BAB. V PENUTUP	614



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan maksud sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Hal ini selaras dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan hukum ditetapkannya Kabupaten Tapin sebagai daerah otonom sebagaimana uraian di atas adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756). Berdasarkan undang-undang tersebut, yang semula Kewedanaan Tapin yang semula termasuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah diberikan Hak Otonomi sebagai Daerah tingkat II Kabupaten Tapin dan diresmikan pada tanggal 30 Nopember 1965 dengan ibu kota Kabupaten di Rantau. Dalam pembuatan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 ini, sejumlah peraturan yang digunakan sebagai rujukan, diantaranya yang utama adalah :



1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Lembaran



Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);

7. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin Tahun 2023.

1.1.1. PENJELASAN UMUM

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Tapin pada awalnya merupakan Kewedanaan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian memisahkan diri pada Tahun 1965. Kabupaten Tapin dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong. Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan. Berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Tapin berkedudukan di Rantau dan terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tapin Utara, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Bnuang, Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan.

Dalam perkembangannya Kabupaten Tapin sekarang mempunyai 12 kecamatan yang terdiri dari 126 desa dan 9 kelurahan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Desa dan Kelurahan Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
1	Bnuang	8	3
2	Hatungun	8	-
3	Tapin Selatan	10	1
4	Salam Babaris	6	-
5	Tapin Tengah	17	-
6	Bungur	12	-
7	Piani	8	-
8	Lokpaikat	8	1
9	Tapin Utara	12	4
10	Bakarangan	12	-
11	Candi Laras Selatan	12	-



12	Candi Laras Utara	13	-
Kabupaten Tapin		126	9

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka, BPS, 2023

B. Data Geografis Wilayah

Secara Astronomis Kabupaten Tapin terletak diantara 20.32'.43" – 30.00'.43" Lintang Selatan dan antara 1140.46'.13"– 1150.30'33" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Tapin memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara = Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Sebelah Timur = Kabupaten Banjar
- Sebelah Selatan = Kabupaten Banjar
- Sebelah Barat = Kabupaten Barito Kuala

Selain itu, Kabupaten Tapin merupakan pintu gerbang menuju kawasan yang dinamakan Banua Enam.

Wilayah pemerintahan Kabupaten Tapin terbagi atas 12 kecamatan yang meliputi 126 Desa dan 9 Kelurahan dengan luas wilayah 2.155,939 km², yang merupakan 5,8% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 1.2
Sebaran Luas Wilayah Kecamatan Tahun 2023

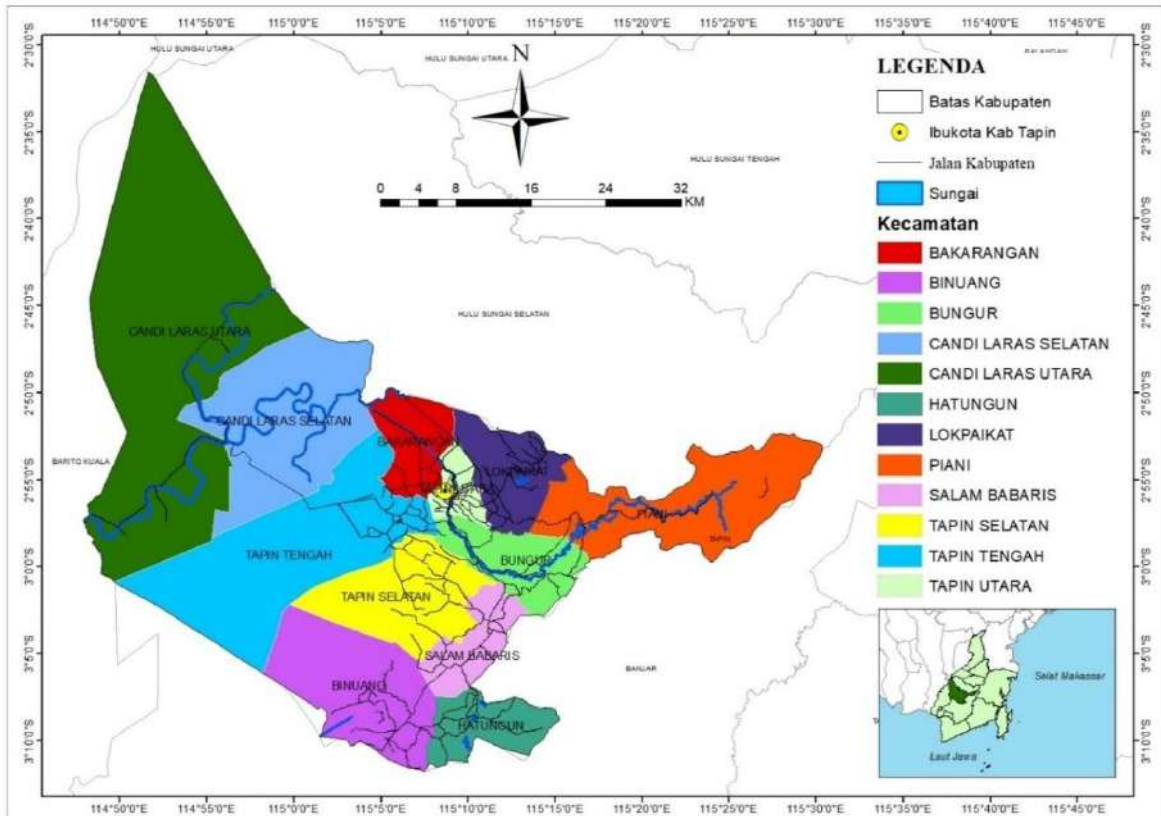
No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km ²)	% Terhadap Luas Wilayah Kabupaten Tapin
1	Binuang	Binuang	179,652	8.38
2	Hatungun	Hatungun	66,971	3.12
3	Tapin Selatan	Tambarangan	141,158	6.60
4	Salam Babaris	Salam Babaris	66,234	3.09
5	Tapin Tengah	Pematang Karang Hulu	325,938	15.23
6	Bungur	Bungur	88,979	4.16
7	Piani	Miawa	190,313	8.89
8	Lokpaikat	Lokpaikat	99,335	4.64
9	Tapin Utara	Rangda Malingkung	34,325	1.60
10	Bakarangan	Bakarangan	70,792	3.30
11	Candi Laras Selatan	Baringin	257,079	12.01
12	Candi Laras Utara	Margasari Hilir	622,512	29.09
Kabupaten Tapin			2155.939	100,00

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka, BPS, 2023



Peta orientasi Kabupaten Tapin terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan batas administrasi Kabupaten Tapin dapat dilihat pada peta di bawah ini :

Peta Administrasi Kabupaten Tapin



Sumber: RTRW Kabupaten Tapin Tahun 2014 – 2034

Tinjauan kondisi fisik dasar wilayah meliputi tinjauan aspek topografi dan kemiringan, jenis tanah, kemampuan tanah, kondisi iklim dan hidrologi.

1. Topografi dan Kemiringan

Kabupaten Tapin sebagian besar terletak pada ketinggian antara 0-7 m di atas permukaan air laut yang meliputi 67,34% dari luas wilayah. Berdasarkan ketinggiannya, Wilayah Kabupaten Tapin dapat dibagi menjadi dua bagian wilayah, yaitu :

- Wilayah yang merupakan dataran tinggi yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Piani dan sebagian



Kecamatan Binuang.

- Wilayah yang merupakan dataran rendah yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Binuang, sebagian Kecamatan Piani, Kecamatan Tapin Selatan, Tapin Tengah, Kecamatan Tapin Utara, Bungur, Lokpaikat, Bakarangan, Candi Laras Selatan, dan Candi Laras Utara.

Tabel 1.3
Luas Wilayah Kecamatan Menurut Kelas Ketinggian dari Permukaan Air Laut di Kabupaten Tapin Tahun 2023

No	Kecamatan	Kelas Ketinggian (m/dpl)						Jumlah (ha)
		0-7 m	>7-25 m	>25-100 m	>100-150 m	>150-500 m	>500 m	
1	Binuang	8.258	3.911	940	130	0	0	13.239
2	Hatungun	0	0	3.344	4.093	2.123	0	9.560
3	Tapin Selatan	6.566	2.975	5.803	0	0	0	15.344
4	Salam Babaris	0	0	6.411	869	0	0	7.280
5	Tapin Tengah	29.552	1.404	0	0	0	0	30.956
6	Bungur	0	3.747	4.182	1.197	0	0	9.126
7	Piani	0	0	3.640	7.260	6.488	2.621	20.009
8	Lokpaikat	1.854	3.495	3.719	321	0	0	9.389
9	Tapin Utara	867	2.143	224	0	0	0	3.234
10	Bakarangan	6.257	0	0	0	0	0	6.257
11	Candi Laras Selatan	24.961	0	0	0	0	0	24.961
12	Candi Laras Utara	68.140	0	0	0	0	0	68.140
Jumlah		146.455	17.675	28.263	13.870	8.611	2.621	217.495
Persentase		67,34	8,13	12,99	6,38	3,96	1,21	100,00

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka, BPS, 2023

Lahan di Kabupaten Tapin sebagian besar termasuk datar. Sekitar 82 % dari seluruh wilayah Kabupaten Tapin merupakan lahan dengan kemiringan 0 – 2 persen. Wilayah yang agak bergelombang dengan kemiringan lebih dari 2 persen sekitar 18 persen dari luas wilayah.

Tabel 1.4
Luas Wilayah Kecamatan Menurut Kelas Ketinggian dari Permukaan Air Laut di Kabupaten Tapin Tahun 2023

No	Kecamatan	Kelas Lereng/Kemiringan						Jumlah (ha)
		0-2%	>2-8%	>8-15%	>15-25 %	>25-40%	>40%	
1	Binuang	12.915	0	0	30	294	0	13.239
2	Hatungun	0	264	6.070	2.110	250	860	9.560
3	Tapin Selatan	15.184	160	0	0	0	0	15.344
4	Salam Babaris	4.854	576	730	500	160	460	7.280
5	Tapin Tengah	30.956	0	0	0	0	0	30.956
6	Bungur	5.476	0	0	2.780	440	430	9.126
7	Piani	0	1.090	3.510	8.909	2.360	4.140	20.009
8	Lokpaikat	7.369	250	860	580	330	0	9.389



No	Kecamatan	Kelas Lereng/Kemiringan					Jumlah (ha)	
		0-2%	>2-8%	>8-15%	>15-25 %	>25-40%		>40%
9	Tapin Utara	3.234	0	0	0	0	0	3.234
10	Bakarangan	6.257	0	0	0	0	0	6.257
11	Candi Laras Selatan	24.961	0	0	0	0	0	24.961
12	Candi Laras Utara	68.140	0	0	0	0	0	68.140
Jumlah		179.346	2.340	11.170	14.909	3.840	5.890	217.495
Persentase		82,46	1,08	5,14	6,85	1,76	2,71	100,00

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka, BPS, 2023

2. Jenis tanah

Jenis Tanah di Kabupaten Tapin terdiri dari organosol gleyhumus, sebesar 73,50% sebagian besar terletak di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Binuang, Tapin Selatan dan Tapin Tengah; podsolik merah kuning, sebesar 18,23% sebagian besar terletak di Kecamatan Piani, Bungur, Tapin Selatan dan Lokpaikat; alluvial, sebesar 5,7% sebagian besar terletak di Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Lokpaikat dan Tapin Utara; serta kompleks podsolik merah kuning, Litosol, Latosol sebesar 2,57% terletak di Kecamatan Piani.

3. Kemampuan Tanah

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapin kecuali Kecamatan Tapin Utara tanahnya mempunyai tekstur sedang, yang berarti tanah di wilayah ini relatif mudah diolah dan baik untuk usaha pertanian. Sebagian besar (sekitar 88 persen) diantaranya merupakan tanah dengan tekstur sedang, 0,45 persen bertekstur kasar yang terdapat disebagian Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Tapin Utara, Lokpaikat, Bungur dan Piani. Tanah dengan tekstur halus terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Tapin.

Kedalaman efektif tanah berhubungan dengan kemungkinan perkembangan akar tanaman yang ada di atasnya. Semakin besar kedalaman efektif tanah, umumnya semakin baik bagi usaha pertanian.

Kedalaman efektif tanah di Kabupaten Tapin sebagian besar



lebih dari 30 cm. Bahkan sekitar 85% diantaranya mempunyai kedalaman >90 cm terdapat di seluruh kecamatan, dan tidak ada yang mempunyai kedalaman <30 Cm. Dengan demikian, ditinjau dari kedalaman tanah, Kabupaten Tapin mempunyai potensi yang relatif baik.

4. Iklim dan Hidrologi

Curah hujan merupakan salah satu indikator wilayah untuk mengetahui kondisi tanah dalam suatu wilayah. Keadaan cuaca ini banyak mempengaruhi semua kegiatan pembangunan, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang bersangkutan dengan wadah pembangunan itu sendiri yang berupa tanah. Tercatat curah hujan rata-rata berkisar antara 10,40-22,08 mm/hari dimana rata-rata curah hujan terendah pada bulan Januari dan tertinggi pada bulan April.

Kelembaban udara dan temperatur dipengaruhi oleh ketinggian dan jarak dari permukaan air laut. Rata-rata temperatur udara sebesar 28 - 32 °C Rata-rata suhu terendah pada bulan Februari, April, Juni, Juli, Agustus, September, November, dan Desember. Adapun rata-rata suhu tertinggi pada bulan Maret. Rata-rata kelembaban udara berkisar antara 68,4 – 85,2%. Rata-rata kelembaban terendah pada bulan Oktober, dan rata-rata kelembaban tertinggi pada Desember.

Kondisi hidrologi di wilayah Tapin dipengaruhi oleh Sungai Negara (beserta anak-anak sungai) yang merupakan anak Sungai Barito dan Sungai Tapin (beserta anak-anak sungai). Sungai Negara beserta anak sungainya yaitu Sungai Muning mengalir melalui wilayah bagian barat Kabupaten Tapin, seperti pada Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan serta sebagian Kecamatan Tapin Tengah. Sedangkan Sungai Tapin mengalir dari bagian timur hingga barat wilayah Kabupaten Tapin melalui Kecamatan Piani, Kecamatan Bungur, Kota Rantau, Kecamatan Tapin Utara serta Kecamatan Bakarangan. Kondisi



hidrologi khas wilayah Kabupaten Tapin adalah rawa. Luas rawa di wilayah Kabupaten Tapin (berdasarkan perhitungan secara digital) relatif luas yaitu seluas 28.243,313 hektar. Sebagian besar rawa yang ada di wilayah Kabupaten Tapin berada di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Bakarangan serta Tapin Tengah.

Kondisi hidrologi juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi drainase tanah yang ada wilayah Kabupaten Tapin. Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Tapin tergenang secara permanen yaitu berupa rawa dengan luas wilayah sekitar 133.058 hektar atau 6 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tapin. Wilayah yang tidak pernah tergenang air hanya seluas 63.300 Hektar atau sekitar 29 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tapin. Dengan demikian kondisi wilayah Kabupaten Tapin sebagian besar didominasi daerah lahan basah.

Berdasarkan kondisi lereng dan topografi di wilayah Kabupaten Tapin mempunyai tingkat bahaya erosi relatif kecil. Daerah dengan tingkat bahaya erosi sedang sampai tinggi hanya seluas 19.727 Hektar atau setara 9 persen total luas wilayah Kabupaten Tapin. Hal ini menunjukkan secara alami kondisi fisik permukaan tanah di Kabupaten Tapin relatif baik.

C. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pembangunan jika memiliki kualitas yang memadai, namun sebaliknya akan menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu, penanganan kependudukan tidak hanya pada upaya pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Jumlah penduduk Kabupaten Tapin berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada Laporan semester II Tahun 2023 berjumlah 197.893 jiwa, terdiri dari 99.527 jiwa laki – laki dan 98.366 jiwa perempuan. Ditinjau dari persebarannya, penduduk Kabupaten Tapin lebih banyak bertempat



tinggal Kecamatan Binuang (16,44%), Kecamatan Tapin Utara (13,17%) dan Kecamatan Tapin Tengah (10,88%). Sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Piani (3,20%).

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Tapin Utara (806 jiwa/km²), Kecamatan Binuang (246 jiwa/km²), Kecamatan Bakarangan (175 jiwa/km²), Kecamatan Salam Babaris (173 jiwa/km²), Kecamatan Bungur (158 jiwa/km²), Kecamatan Tapin Selatan (139 jiwa/km²), Kecamatan Lokpaikat (132 jiwa/km²), Kecamatan Hatungun (104 jiwa/km²). Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Candi Laras Utara (25 jiwa/km²), Kecamatan Piani (32 jiwa/km²), Kecamatan Candi Laras Selatan (51 jiwa/km²), Kecamatan Tapin Tengah (70 jiwa/km²). Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Tapin adalah 91 jiwa/ km².

Tabel 1.5
Luas wilayah, Jumlah Desa / Kelurahan dan Jumlah Penduduk
Kabupaten Tapin Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah		Jumlah Penduduk
			Desa	Kel	
1	Binuang	132,39	8	3	32.536
2	Hatungun	95,60	8	-	9.912
3	Tapin Selatan	153,44	10	1	21.282
4	Salam Babaris	72,80	6	-	12.583
5	Tapin Tengah	309,56	17	-	21.523



No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah		Jumlah Penduduk
			Desa	Kel	
6	Bungur	91,26	12	-	14.404
7	Piani	200,09	8	-	12.583
8	Lokpaikat	93,89	8	1	12.396
9	Tapin Utara	32,34,	12	4	26.054
10	Bakarangan	62,57	12	-	10.978
11	Candi Laras Selatan	249,61	12	-	12.608
12	Candi Laras Utara	681,40	13	-	17.283
Kabupaten Tapin		2.155,939	126	9	197.893

Sumber : DKB Semester II TA. 2023, Dukcapil Kabupaten Tapin

a) Struktur Penduduk

Pada Tahun 2023 dilihat dari tabel menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Kondisi ini menggambarkan bahwa penduduk Kabupaten Tapin sedang mengalami pertumbuhan, tingkat kelahiran dan kematian masih cukup tinggi serta pertumbuhan penduduk tinggi.

Ditinjau dari kelompok umur, penduduk di Kabupaten Tapin termasuk penduduk muda, artinya sebagian besar terdiri dari penduduk dengan usia muda. Hal ini berarti, pemerintah daerah harus menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang cukup untuk penduduk usia mudanya. Disamping itu, program Keluarga Berencana untuk mengendalikan jumlah penduduk juga harus mendapat perhatian khusus.

Untuk klasifikasi penduduk Tapin menjadi 3 (tiga) kelompok umur, yaitu kelompok usia muda (0-14 tahun) adalah 24,37 persen, kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 70,04 persen dan kelompok usia lanjut (65 tahun keatas) adalah 5,59 persen.

Berdasarkan kelompok umur tersebut dapat dihitung besarnya Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang belum produktif (umur dibawah 15 tahun) dan kelompok umur yang sudah dianggap tidak produktif (70 tahun keatas) dengan banyaknya orang yang

termasuk kelompok usia produktif (umur 15-69 tahun). Rasio ini menyatakan jumlah penduduk non produktif yang menjadi beban atau menjadi tanggungan penduduk usia produktif, atau dengan kata lain proporsi penduduk usia non produktif dibanding dengan usia produktif. Angka ini masih Cukup Baik karena jumlah penduduk yang produktif di Kabupaten Tapin masih lebih banyak dibanding yang tidak produktif.

Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Tapin Tahun 2023

NO	UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0-4	6.975	6.704	13.679
2	5-9	8.725	7.854	16.579
3	10-14	9.254	8.708	17.962
4	15-19	7.476	7.162	14.638
5	20-24	8.357	8.019	16.376
6	25-29	7.627	7.231	14.858
7	30-34	7.948	7.954	15.902
8	35-39	7.933	7.939	15.872
9	40-44	8.038	7.927	15.965
10	45-49	7.072	7.338	14.410
11	50-54	6.377	6.375	12.752
12	55-59	4.934	5.219	10.153
13	60-64	3.820	3.862	7.682
14	65-69	2.422	2.569	4.991
15	70-74	1.325	1.556	2.881
16	>75	1.244	1.949	3.193
JUMLAH		99,527	98,366	197,893

Sumber : DKB Semester II TA. 2023, Dukcapil Kabupaten Tapin

b) Jenis Pekerjaan

Dalam kehidupan sehari-hari manusia dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan salah satu hal yang terpenting untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bekerja. Pada tahun 2023 penduduk Kabupaten Tapin menurut lapangan usaha utama paling banyak bekerja pada jenis pekerjaan Pertanian, Industri Pengolahan dan Jasa. Berdasarkan data bahwa Sektor Pertanian sangat besar serta sumbangan yang diberikan oleh



Sektor Pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Tapin juga sangat besar maka sudah selayaknya Sektor Pertanian mendapat perhatian khusus.

Adapun untuk rincian jenis pekerjaan yang ada di Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7
Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Usaha Utama
di Kabupaten Tapin

NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Belum/ Tidak Bekerja	25.645	22.606	48.251
2.	Mengurus Rumah Tangga	8	33.845	33.853
3.	Pelajar/ Mahasiswa	16.919	14.142	31.061
4.	Pensiunan	722	457	1.179
5.	Pewagai Negeri Sipil	2.022	2.159	4.181
6.	Tentara Nasional Indonesia	183	0	183
7.	Kepolisian RI	294	17	311
8.	Perdagangan	334	340	674
9.	Petani/ Pekebun	18.154	11.910	30.064
10.	Peternak	24	5	29
11.	Nelayan/ Perikanan	25	3	28
12.	Industri	3	3	6
13.	Konstruksi	2	0	2
14.	Transportasi	26	0	26
15.	Karyawan Swasta	5.291	777	6.068
16.	Karyawan BUMN	128	46	174
17.	Karyawan BUMD	62	29	91
18.	Karyawan Honoror	491	955	1.446
19.	Buruh Harian Lepas	751	56	807
20.	Buruh Tani/ Perkebunan	1.041	652	1.693
21.	Buruh Nelayan/ Perikanan	3	3	6
22.	Buruh Peternakan	5	4	9
23.	Pembantu Rumah Tangga	0	40	40
24.	Tukang Cukur	12	0	12
25.	Tukang Listrik	7	0	7
26.	Tukang Batu	94	0	94
27.	Tukang Kayu	142	8	150
28.	Tukang Sol Sepatu	2	0	2
29.	Tukang Las/ Pandai Besi	18	0	18
30.	Tukang Jahit	27	57	84
31.	Tukang Gigi	1	0	1
32.	Penata Rias	4	7	11
33.	Penata Busana	0	1	1
34.	Penata Rambut	3	3	6
35.	Mekanik	100	0	100
36.	Seniman	5	0	5



NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
37.	Tabib	0	0	0
38.	Paraji	0	1	1
39.	Perancang Busana	0	0	0
40.	Penterjemah	1	0	1
41.	Imam Masjid	2	0	2
42.	Pendeta	10	4	14
43.	Pastor	0	0	0
44.	Wartawan	6	0	6
45.	Ustadz/ Mubaligh	27	1	28
46.	Juru Masak	1	3	4
47.	Promotor Acara	0	0	0
48.	Anggota DPR-RI	0	0	0
49.	Anggota DPD	0	0	0
50.	Anggota BPK	0	0	0
51.	Presiden	0	0	0
52.	Wakil Presiden	0	0	0
53.	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0	0
54.	Anggota Kabinet/ Kementerian	0	0	0
55.	Duta Besar	0	0	0
56.	Gubernur	0	0	0
57.	Wakil Gubernur	0	0	0
58.	Bupati	1	0	1
59.	Wakil Bupati	0	0	0
60.	Walikota	0	0	0
61.	Wakil Walikota	0	0	0
62.	Anggota DPRD Provinsi	0	0	0
63.	Anggota DPRD Kab/ Kota	6	1	7
64.	Dosen	7	3	10
65.	Guru	101	202	303
66.	Pilot	0	0	0
67.	Pengacara	1	0	1
68.	Notaris	0	1	1
69.	Arsitek	0	0	0
70.	Akuntan	0	0	0
71.	Konsultan	3	1	4
72.	Dokter	8	19	27
73.	Bidan	0	77	77
74.	Perawat	27	34	61
75.	Apoteker	2	13	15
76.	Psikiater/ Psikolog	0	0	0
77.	Penyiar Televisi	0	1	1
78.	Penyiar Radio	0	1	1
79.	Pelaut	5	0	5
80.	Peneliti	1	0	1
81.	Sopir	804	0	804



NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
82.	Pialang	2	1	3
83.	Paranormal	0	0	0
84.	Pedagang	1.019	1.277	2.296
85.	Perangkat Desa	70	28	98
86.	Kepala Desa	12	0	12
87.	Biarawati	0	0	0
88.	Wiraswasta	24.851	8.562	33.413
89.	Anggota Lemb. Tinggi Lainnya	6	5	11
90.	Artis	0	0	0
91.	Atlet	0	0	0
92.	Chef	0	0	0
93.	Manajer	0	0	0
94.	Tenaga Tata Usaha	0	0	0
95.	Operator	0	0	0
96.	Pekerja Pengolahan Kerajinan	1	0	1
97.	Teknisi	0	0	0
98.	Asisten Ahli	0	0	0
99.	Pekerjaan Lainnya	5	6	11
TOTAL		99.527	98.366	197.893

*) Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2023

c) Pendidikan

Kondisi lembaga penyelenggara pendidikan setelah terbitnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mulai Tahun 2017 terkait pengelolaan dan kewenangan pendidikan sekolah tingkat SMA dan SMK di Pemerintah Kabupaten maupun Kota sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi. Pemerintah Daerah hanya terkait pengelolaan dan kewenangan pendidikan Tingkat SD dan SMP.

Terkait hal tersebut untuk pendidikan baik negeri maupun swasta dan jumlah siswa pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah pertama, berdasarkan data tahun pelajaran 2023/2024 se-Kabupaten Tapin.

Adapun untuk data perkembangan Pendidikan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 1.8
Data Perkembangan Pendidikan
Kabupaten Tapin Tahun 2023

No.	Uraian	Tingkat Jenjang Pendidikan					
		PAUD		SD / MI		SMP / MTs	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Jumlah Sekolah	182	205	195	195	41	41
2.	Jumlah Kelas (Rombel)	401	475	1.277	1.289	256	304
3.	Jumlah Perpustakaan	-	-	182	191	35	40
4.	Jumlah Murid	6.961	7.368	20.699	20.645	7.259	7.438
5.	Rasio Murid : Guru	10	14	11	12	11	13
6.	Jumlah Lulusan	2.872	3.654	3.470	3.323	2.247	2.237

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tapin, 2023.

Perkembangan PAUD dari tahun 2022 ke 2023 mengalami peningkatan pada jumlah sekolah, kelas, siswa, rasio guru terhadap murid dan lulusan PAUD. Untuk Jumlah sekolah PAUD yaitu tahun 2022 sebanyak 182 satuan pendidikan dan tahun 2023 sebanyak 205 satuan pendidikan. Peningkatan ini terjadi karena data jumlah sekolah PAUD ditambah data terbaru dari data Kementerian Agama sebanyak 10 RA (Raudhatul Athfal) dan 13 PAUD yang baru didaftarkan di data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Akibat baru ditambahkan data sekolah tersebut sehingga berpengaruh terhadap peningkatan yang lainnya pada jenjang PAUD. Peningkatan ini tidak terlepas dari sudah banyaknya masyarakat yang memahami pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini, hal ini juga didukung pula mulai meningkatnya kualitas lembaga PAUD di Kabupaten Tapin baik Negeri maupun Swasta.

Untuk jenjang SMP/MTs juga mengalami peningkatan dikarenakan banyaknya SMP/MTs bersekolah di Kabupaten Tapin dan penambahan ruang perpustakaan untuk menunjang standar sarana dan prasarana di satuan pendidikan SMP. Hanya saja untuk di data siswa dan data kelulusan SD/MI mengalami penurunan dikarenakan adanya siswa yang mutasi ke luar



Kabupaten Tapin, masuk ke pondok pesantren di luar Kabupaten Tapin dan putus sekolah karena faktor ekonomi.

D. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Adapun di Kabupaten Tapin memiliki 12 (dua Belas) Kecamatan, 9 (sembilan) Kelurahan dan 126 (seratus dua puluh enam) Desa.

Tabel 1.9
Jumlah Kecamatan, Desa / Kelurahan
Kabupaten Tapin Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
1	Binuang	8	3
2	Hatungun	8	-
3	Tapin Selatan	10	1
4	Salam Babaris	6	-
5	Tapin Tengah	17	-
6	Bungur	12	-
7	Piani	8	-
8	Lokpaikat	8	1
9	Tapin Utara	12	4
10	Bakarangan	12	-
11	Candi Laras Selatan	12	-
12	Candi Laras Utara	13	-
Kabupaten Tapin		126	9

Sumber : KDA Kabupaten Tapin, BPS, 2023

Dalam perkembangannya, untuk Desa dan Kelurahan selama kurun waktu 15 tahun di Kabupaten Tapin belum ada pemekaran Desa/Kelurahan, sedangkan untuk pemekaran Kecamatan terkendala persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008. Salah satu diantaranya adalah desa untuk memekarkan Kecamatan minimal 10 desa dengan usia desa 5 (lima) tahun.

Kelurahan yang ada di Kabupaten Tapin berjumlah 9 (sembilan) adalah :

- I. Kecamatan Binuang
 - 1) Kelurahan Binuang
 - 2) Kelurahan Karang Putih



- 3) Kelurahan Raya Belanti
- II. Kecamatan Tapin Selatan
 - 1) Kelurahan Tambarangan
- III. Kecamatan Lokpaikat
 - 1) Kelurahan Bitahan
- IV. Kecamatan Tapin Utara
 - 1) Kelurahan Kupang
 - 2) Kelurahan Rangda Malingkung
 - 3) Kelurahan Rantau Kanan
 - 4) Kelurahan Rantau Kiwa

Desa yang ada di Kabupaten Tapin berjumlah 126 Desa sebagai berikut :

- I. Kecamatan Benuang
 - 1) Desa Tungkap
 - 2) Desa A. Yani Pura
 - 3) Desa Pulau Pinang
 - 4) Desa Pualam Sari
 - 5) Desa Gunung Batu
 - 6) Desa Pulau Pinang Utara
 - 7) Desa Padang Sari
 - 8) Desa Mekar Sari
- II. Kecamatan Hatungun
 - 1) Desa Tarungin
 - 2) Desa Matang Batas
 - 3) Desa Hatungun
 - 4) Desa Burakai
 - 5) Desa Batu Hapu
 - 6) Desa Kambang Kuning
 - 7) Desa Asam Randah
 - 8) Desa Bagak
- III. Kecamatan Tapin Selatan
 - 1) Desa Tatakan
 - 2) Desa Suato Tatakan
 - 3) Desa Sawang



- 4) Desa Lawahan
- 5) Desa Timbaan
- 6) Desa Rumintin
- 7) Desa Cempaka
- 8) Desa Harapan Masa
- 9) Desa Tandui
- 10) Desa Hatiwin

IV. Kecamatan Salam Babaris

- 1) Desa Salam Babaris
- 2) Desa Suato Lama
- 3) Desa Kambang Habang lama
- 4) Desa Pantai Cabe
- 5) Desa Suato Baru
- 6) Desa Kambang Habang Baru

V. Kecamatan Tapin Tengah

- 1) Desa Pandulangan
- 2) Desa Labung
- 3) Desa Mandurian
- 4) Desa Serawi
- 5) Desa Pematang Karang Hulu
- 6) Desa Pematang Karang
- 7) Desa Pandahan
- 8) Desa P. Karang Hilir
- 9) Desa Hiyung
- 10) Desa Andhika
- 11) Desa Sukaramai
- 12) Desa Tirik
- 13) Desa Kepayang
- 14) Desa Batang Lantik
- 15) Desa Mandurian Hilir
- 16) Desa Sungai Bahalang
- 17) Desa Papagan Makmur

VI. Kecamatan Bungur

- 1) Desa Kalumpang
- 2) Desa Banua Padang



- 3) Desa Bungur
- 4) Desa Banua Padang Hilir
- 5) Desa Shabah
- 6) Desa Hangui
- 7) Desa Rantau Bungur
- 8) Desa Purut
- 9) Desa Bungur Baru
- 10) Desa Timbung
- 11) Desa Paring Guling
- 12) Desa Linuh

VII. Kecamatan Piani

- 1) Desa Pipitak Jaya
- 2) Desa Miawa
- 3) Desa Batu Ampar
- 4) Desa Harakit
- 5) Desa Batung
- 6) Desa Balawaian
- 7) Desa Baramban
- 8) Desa Buniin Jaya

VIII. Kecamatan Lokpaikat

- 1) Desa Binderang
- 2) Desa Parandakan
- 3) Desa Lokpaikat
- 4) Desa Bataratat
- 5) Desa Bitahan Baru
- 6) Desa Puncak Harapan
- 7) Desa Budi Mulya
- 8) Desa Ayunan Papan

IX. Kecamatan Tapin Utara

- 1) Desa Keramat
- 2) Desa Antasari
- 3) Desa Jingah Babaris
- 4) Desa Banua Hanyar
- 5) Desa Banua Halat Kiri
- 6) Desa Banua Halat Kanan



- 7) Desa Perintis Raya
- 8) Desa Kakaran
- 9) Desa Antasari Hilir
- 10) Desa Lumbu Raya
- 11) Desa Banua Hanyar Hulu
- 12) Desa Badaun

X. Kecamatan Bakarangan

- 1) Desa Parigi Kacil
- 2) Desa Bakarangan
- 3) Desa Parigi
- 4) Desa Paul
- 5) Desa Gadung
- 6) Desa Bundung
- 7) Desa Tangkawang
- 8) Desa Waringin
- 9) Desa Gadung Kamarat
- 10) Desa Masta
- 11) Desa Ketapang
- 12) Desa Tangkawang Baru

XI. Kecamatan Candi Laras Selatan

- 1) Desa Margasari Hulu
- 2) Desa Candi Laras
- 3) Desa Baringin A
- 4) Desa Marampiaou
- 5) Desa Pabaungan Hilir
- 6) Desa Pabaungan Hulu
- 7) Desa Sungai Rutas
- 8) Desa Baringin B
- 9) Desa Marampiaou Hilir
- 10) Desa Sungai Rutas Hulu
- 11) Desa Baulin
- 12) Desa Pabaungan Pantai

XII. Kecamatan Candi Laras Utara

- 1) Desa Keladan
- 2) Desa Sungai Salai



- 3) Desa Pariok
- 4) Desa Margasari Hilir
- 5) Desa Batalas
- 6) Desa Rawana
- 7) Desa Buas-Buas
- 8) Desa Teluk Haur
- 9) Desa Sungai Puting
- 10) Desa Sawaja
- 11) Desa Sungai Salai Hilir
- 12) Desa Buas-Buas Hilir
- 13) Desa Rawana Hulu

E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Susunan Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sebagai berikut :

(1) Susunan Perangkat Daerah terdiri atas:

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat;
- 4) Dinas Daerah;
- 5) Badan Daerah; dan
- 6) Kecamatan.

(2) Susunan Unit Perangkat Daerah terdiri atas:

- 1) Sekretariat Daerah;

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas:

a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:

1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas:

- a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;



- b) Subbagian Administrasi Kewilayahan; dan
- c) Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah;
- 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
 - a) Subbagian Bina Mental Spiritual; dan
 - b) Subbagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat;
- 3. Bagian Hukum, terdiri atas:
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
 - 1. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b) Subbagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - c) Subbagian Administrasi Pembangunan;
 - 2. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas:
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - 3. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan; dan
 - c) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - 4. Bagian Organisasi, terdiri atas:
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan



- c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- 5. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri atas:
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Subbagian Komunikasi Pimpinan; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan;
- 6. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, terdiri atas:
 - a) Subbagian Rumah Tangga;
 - b) Subbagian Perlengkapan; dan
 - c) Subbagian Pemeliharaan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat;
- 4) Dinas Daerah;
 - a. Dinas Pendidikan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Dinas Sosial
 - e. Dinas Pertanian
 - f. Dinas Pemuda dan Olahraga
 - g. Dinas Lingkungan Hidup
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - l. Dinas Perhubungan
 - m. Dinas Perdagangan
 - n. Dinas Perikanan
 - o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - p. Dinas Ketahanan Pangan
 - q. Dinas Tenaga Kerja
 - r. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



- s. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
- t. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- v. Dinas Komunikasi dan Informatika
- w. Dinas Perindustrian
- 5) Badan Daerah; dan
 - a. Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - b. Badan Pendapatan Daerah
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 6) Kecamatan.
 - a. Kecamatan Tapin Utara
 - b. Kecamatan Tapin Tengah
 - c. Kecamatan Tapin Selatan
 - d. Kecamatan Salam Babaris
 - e. Kecamatan Piani
 - f. Kecamatan Lokpaikat
 - g. Kecamatan Hatungun
 - h. Kecamatan Candi Laras
 - i. Kecamatan Candi Laras Utara
 - j. Kecamatan Binuang
 - k. Kecamatan Bakarangan
 - l. Kecamatan Bungur

Adapun tipe dari Unit Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sekretariat DPRD Tipe C.
- (3) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Inspektorat Tipe A.



- (4) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Dinas Sosial Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial;
 - e. Dinas Pertanian Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian;
 - f. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 - g. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - k. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B yang menyelenggarakan Urusan



Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- l. Dinas Perhubungan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
- m. Dinas Perdagangan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan;
- n. Dinas Perikanan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;
- o. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- p. Dinas Ketahanan Pangan Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan;
- q. Dinas Tenaga Kerja Tipe C yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
- r. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan;
- s. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Sub Kebakaran);
- t. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan;



- v. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian; dan
 - w. Dinas Perindustrian Tipe A yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (5) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - b. Badan Pendapatan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan pengembangan;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian; dan
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan intensitas dan beban kerja besar yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (6) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. Kecamatan Tapin Utara dengan Tipe A;
 - b. Kecamatan Tapin Tengah dengan Tipe A;
 - c. Kecamatan Tapin Selatan dengan Tipe A;
 - d. Kecamatan Salam Babaris dengan Tipe A;
 - e. Kecamatan Piani dengan Tipe A;
 - f. Kecamatan Lokpaikat dengan Tipe A;
 - g. Kecamatan Hatungun dengan Tipe A;
 - h. Kecamatan Candi Laras Selatan Tipe A;



- i. Kecamatan Candi Laras Utara Tipe A;
- j. Kecamatan Benuang Tipe A;
- k. Kecamatan Bakarangan Tipe A; dan
- l. Kecamatan Bungur Tipe A;

(3) Pegawai Pemerintahan

Data Umum Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Kabupaten Tapin per 31 Desember 2023, sebagai berikut :

1. Jumlah PNS se – Kabupaten Tapin per 31 Desember 2023 sebesar 3.358 orang, yang terdiri dari 1.503 pria dan 1.855 wanita. Jumlah PPPK se-Kabupaten Tapin per 31 Desember 2023 sebesar 457 orang, terdiri dari 127 pria dan 330 wanita.

2. Berdasarkan Golongan, terdiri dari :

- Golongan I : 13 orang
- Golongan II : 292 orang
- Golongan III : 2.333 orang
- Golongan IV : 720 orang

Dan Golongan untuk PPPK terdiri dari :

- Golongan VII: 75 orang
- Golongan IX : 358 orang
- Golongan X : 24 orang

3. Berdasarkan Eselon, terdiri dari :

- Eselon II : 38 orang
- Eselon III : 173 orang
- Eselon IV : 251 orang
- Eselon V : 0 orang

4. Berdasarkan Pendidikan, terdiri dari :

- Sampai dengan Sekolah Dasar (SD) : 13 orang
- SLTP/ sederajat : 20 orang
- SMA/ sederajat : 373 orang
- Diploma I, II/Akta I,II : 124 orang
- Diploma III/Akta III/Sarjana Muda : 578 orang PNS,



75 orang PPPK

- Tingkat Sarjana/ Doktor/Ph.D : 2.250 orang PNS,
382 orang PPPK

5. Jenjang Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, terdiri dari :

- Struktural sebanyak : 462 orang
- Fungsional Tertentu terdiri dari :
 - PNS sebanyak 2.402 orang, dan
 - PPPK sebanyak 457 orang
- Fungsional Umum : 494 orang

Tabel 1.10
Rekap Pegawai Per Urusan
Kabupaten Tapin Tahun 2023

NO.	URUSAN	SKPD	PEGAWAI
1	2	3	4
A.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	1.549 (PNS) 324 (PPPK)
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	477 (PNS) 81 (PPPK)
		BLUD RSUD Datu Sanggul	268 (PNS) 12 (PPPK)
3	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Dinas PU & PR	71 (PNS) 3 (PPPK)
4	- Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman - Pertanahan	Disperkimtan	15
5	Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	Satpol PP & Kebakaran	39
		BPBD	14
6	Sosial	Dinas Sosial	17
B.	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	21
2	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	DP3A	13 (PNS) 1 (PPPK)
3	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	16



NO.	URUSAN	SKPD	PEGAWAI
1	2	3	4
5	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	26
6	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil	Dukcapil	18
7	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	DPMD	20
8	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	DPPKB	18
9	Perhubungan	Dinas Perhubungan	24 (PNS) 1 (PPPK)
10	- Komunikasi & Informatika	Dinas Kominfo	22
	- Statistik		
	- Persandian		
11	Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Perindustrian	Dinas Perindustrian	21
12	Penanaman Modal	DPMPSTSP	15
13	Kepemudaan & Olah Raga	DispORA	22
16	- Kebudayaan	Disbudpar	22
	- Pariwisata		
17	- Perpustakaan	Disputarda	19 (PNS)
	- Kearsipan		3 (PPPK)
C.	URUSAN PEMERINTAH PILIHAN		
1	Kelautan & Perikanan	Dinas Perikanan	30
3	Pertanian	Dinas Pertanian	97 (PNS) 23 (PPPK)
4	Kehutanan	-	
5	Energi & Sumber Daya Mineral	-	
6	Perdagangan	Dinas Perdagangan	26
D.	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH		
		Sekretaris Daerah	1
		Staf Ahli Bupati	3
		Asisten	3
		- Bagian Umum dan Keuangan	6 (PNS) 1 (PPPK)
		- Bagian Organisasi	7 (PNS) 1 (PPPK)
		- Bagian Hukum	7
		- Bagian Kesra	3
		- Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	8
		- Bagian Pemerintahan	6 (PNS) 1 (PPPK)



NO.	URUSAN	SKPD	PEGAWAI
1	2	3	4
		- Bagian Perekonomian & Administrasi Pembangunan	5
		- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	9
		- Bagian Pengadaan Barang & Jasa	23
		Kec. Piani	10
		Kec. Taput	43
		Kec. Lokpaikat	20
		Kec. Bakarangan	13
		Kec. Candi Laras Selatan	15
		Kec. Candi Laras Utara	15
		Kec. Hatungun	14
		Kec. Salam Babaris	8
		Kec. Tapin Tengah	13
		Kec. Tapin Selatan	23
		Kec. Binuang	27
		Kec. Bungur	18
		Sekretariat DPRD	24
		Inspektorat	38
		BKAD	33 (PNS) 1 (PPPK)
		BAPENDA	23 (PNS) 1 (PPPK)
		BKPSDM	22
		Bapelitbang	22 (PNS) 2 (PPPK)
D.	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Bakesbangpol	16
TOTAL			3.815

Sumber : BKPSDM Kabupaten Tapin, 2024

F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan



memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien serta dilaksanakan melalui keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Keuangan Daerah meliputi:

1. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan jumlah Penerimaan Daerah yang diterima. Daerah Kabupaten Tapin mengalami perubahan yang cukup fluktuatif dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Pendapatan Daerah tahun 2023 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Belanja Daerah tahun 2023 dialokasikan untuk menunjang Prioritas Daerah yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah, kebijakan Pemerintahan Provinsi dan kebijakan Pemerintah Pusat. Belanja Daerah tersebut dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan

daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Proyeksi keuangan daerah yang akurat dan cermat perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan, sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah dihasilkan suatu kebijakan yang akurat dan cermat serta tepat sasaran. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,

1) Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

PAD sampai akhir tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar



Rp. 108.997.935.127 apabila dibandingkan dengan target awal PAD APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 108.997.935.127 yang berarti angka stagnan baik di APBD tahun 2023 maupun pada APBD Perubahan tahun 2023.

Tetapnya Pendapatan Asli Daerah ini disebabkan oleh tetapnya nilai anggaran Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 23.635.000.000, Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 4.695.700.000, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah Rp. 5.404.791.545 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak mengalami peningkatan atau tetap berada pada target di APBD murni tahun 2023 yaitu pada angka sebesar Rp. 75.262.443.582.

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah. Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Desa. Dana Perimbangan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antar pemerintah daerah. Adapun Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil, yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Jumlah Pendapatan Transfer yang dialokasikan untuk Kabupaten Tapin dan telah ditetapkan dalam APBD 2023 sampai dengan penyusunan LPPD ini mengalami perubahan, yaitu meningkat sebesar Rp. 3.630.692.000 atau 0,17 persen yang



semula sebesar Rp. 2.069.541.563.024 menjadi Rp. 2.073.172.255.024.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Pemerintah Daerah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 adalah Rp. 9.208.444.282. dan dalam Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 9.208.444.282.

Data perubahan pendapatan daerah selengkapnya dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Data perubahan pendapatan daerah selengkapnya dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 1.11
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
PENDAPATAN DAERAH	2.187.747.942.433	2.191.378.634.433	3.630.692.000	0,16 %
PENDAPATAN ASLI DAERAH	108.997.935.127	108.997.935.127	0	0 %
Pajak Daerah	23.635.000.000	23.635.000.000	0	0 %
Retribusi Daerah	4.695.700.000	4.695.700.000	0	0 %
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.404.791.545	5.404.791.545	0	0 %
Lain-lain Pendapatan PAD yang Sah	75.262.443.582	75.262.443.582	0	0 %
PENDAPATAN TRANSFER	2.069.541.563.024	2.073.172.255.024	3.630.692.000	0,17%



URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.869.087.052.502	1.872.717.744.502	3.630.692.000	0,19 %
Pendapatan Transfer Antar Daerah	200.454.510.522	200.454.510.522	0	0 %
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.208.444.282	9.208.444.282	0	0 %
Pendapatan Hibah	38.220.000	38.220.000	0	0 %
Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	9.170.224.282	9.170.224.282	0	0 %

Sumber : BKAD Tahun 2023

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023, Target Pendapatan Daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp. 2.191.378.634.433 Sedangkan jumlah Realisasi Pendapatan Daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin sampai dengan akhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.568.179.734.365,12 atau 71,56 persen dari target pendapatan.

Tabel 1.12
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)
Pendapatan Asli Daerah	108.997.935.127	98.787.063.426,12	10.210.871.700,88	90,63
Pendapatan Transfer	2.073.172.255.024,00	1.461.137.554.194,00	612.034.700.830,00	70,48
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9.208.444.282,00	8.255.116.745,00	953.327.537,00	89,65
JUMLAH	2.191.378.634.433,00	1.568.179.734.365,12	623.198.900.067,88	71,56

Sumber : BKAD Tahun 2023



Untuk lebih jelasnya secara terinci, target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada tabel berikut

Tabel 1.13
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023

URAIAN	TARGET	REALISASI	(%)
PENDAPATAN DAERAH	2.191.378.634.433,00	1.568.179.734.365,12	71,56
PENDAPATAN ASLI DAERAH	108.997.935.127,00	98.787.063.426,12	90,63
Pajak Daerah	23.635.000.000,00	28.394.827.563,25	120,14
Retribusi Daerah	4.695.700.000,00	4.376.818.354,01	93,21
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.404.791.545,00	5.404.791.545,00	100
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75.262.443.582,00	60.610.625.963,86	80,53
PENDAPATAN TRANSFER	2.073.172.255.024,00	1.461.137.554.194,00	70,48
Pendapatan Tansfer Pemerintah Pusat	1.872.717.744.502,00	1.306.807.562.807,00	69,78
Pendapatan Transfer Antar Daerah	200.454.510.522,00	154.329.991.387,00	79,99
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.208.444.282,00	8.255.116.745,00	89,65
Pendapatan Hibah	38.220.000,00	34.400.000,00	90,06
Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	9.170.224.282,00	8.220.716.745,00	89,65

Sumber : BKAD Tahun 2023

Namun jika dilihat secara lebih terperinci berdasarkan objek pendapatan, realisasi pencapaian target pendapatan daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 hanya terjadi pada sektor tertentu. Masih terdapat sektor lainnya dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah yang realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan sebagaimana



digambarkan dalam tabel berikut ini :

a. Pendapatan Pajak Daerah

Tabel 1.14
Target dan Realisasi Jenis Pajak
Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023

NO	JENIS PAJAK	TARGET	REALISASI	(%)
1	Pajak Hotel	150.000.000,00	123.577.700,00	82,39
2	Pajak Restoran	3.475.000.000,00	5.087.981.514,00	146,42
3	Pajak Hiburan	60.000.000,00	89.589.400,00	149,32
4	Pajak Reklame	575.000.000,0	425.321.334,40	73,97
5	Pajak Penerangan Jalan	12.900.000.000,00	13.724.549.129,00	106,39
6	Pajak Parkir	50.000.000,00	49.577.400,00	99,15
7	Pajak Air Tanah	25.000.000,00	27.320.600,00	109,28
8	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	9.500.000,00	19,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	1.500.000.000,00	1.604.325.952,85	106,96
10	Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.100.000.000,00	1.447.013.051,00	131,55
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.750.000.000,00	5.806.071.482,00	154,83
JUMLAH		23.635.000.000,00	28.394.827.563,25	120,14

Sumber : BKAD Tahun 2023

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Tabel 1.15
Target dan Realisasi Jenis Retribusi Daerah
Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023

	JENIS RETRIBUSI DAERAH	TARGET	REALISASI	(%)
1	Retribusi Jasa Umum	1.866.500.000,00	1.675.517.000,00	89,77
2	Retribusi Jasa Usaha	2.528.200.000,00	2.486.439.141,00	98,35
3	Retribusi Perizinan Tertentu	301.000.000,00	214.862.213,01	71,38
JUMLAH		4.695.700.000,00	4.376.818,354,01	93,21

Sumber : BKAD Tahun 2023

c. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Merupakan bagian laba yang dibagikan kepada



Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.16
Target dan Realisasi Pendapatan
Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023

NO	PENDAPATAN DARI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	TARGET	REALISASI	(%)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.404.791.545,00	5.404.791.545,00	100
	JUMLAH	5.404.791.545,00	5.404.791.545,00	100

Sumber : BKAD Tahun 2023

d. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Tabel 1.17
Target dan Realisasi Pendapatan Dari Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA. 2023

NO	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	TARGET	REALISASI	(%)
1	Jasa Giro	7.500.000.000,00	6.594.991.807,32	87,93
2	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	218.960.826,60	0
3	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	247.321.562,00	0
4	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	7.446.380,00	0
5	Pendapatan BLUD	67.762.443.582,00	50.182.071.111,07	74,06
6	Pendapatan Zakat, Infaq Shadaqah, dan Wakaf	0,00	3.359.834.276,87	0
	JUMLAH	75.262.443.582,00	60.610.625.963,86	80,53

Sumber : BKAD Tahun 2023

2) Target dan Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023 (Unaudited), Anggaran Belanja Daerah setelah perubahan adalah sebesar



Rp. 2.300.926.495.433,00. Sedangkan jumlah Realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp. 1.717.847.668.369,45 atau sebesar 74,66 persen dari anggaran yang telah ditetapkan.

Adapun anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.18
Target dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

URAIAN BELANJA	TARGET	REALISASI	(%)
BELANJA DAERAH	2.300.926.495.433,00	1.717.847.668.369,45	74,66
BELANJA OPERASI	1.415.914.438.212,00	1.177.387.365.210,00	83,15
Belanja Pegawai	492.558.132.557,00	462.501.391.423,00	93,90
Belanja Barang dan Jasa	758.642.096.470,00	589.711.964.185,00	77,73
Belanja Bunga	9.500.000.000,00	7.252.202.772,00	76,34
Belanja Hibah	133.893.009.185,00	98.754.806.830,00	73,76
Belanja Bantuan Sosial	21.321.200.000,00	19.167.000.000,00	89,90
BELANJA MODAL	597.569.173.099,00	331.157.629.123,45	55,42
Belanja Modal Tanah	11.539.660.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.636.359.116,00	55.029.514.339,00	74,73
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	145.401.734.749,00	94.152.883.520,90	64,75
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	361.826.440.334,00	179.002.281.236,55	49,47
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.164.978.900,00	2.972.950.027,00	57,56
BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000,00	8.943.655.185,00	35,77
Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	8.943.655.185,00	35,77
BELANJA TRANSFER	262.442.884.122,00	200.359.018.851,00	76,34
Belanja Bagi Hasil	2.833.070.000,00	2.830.448.193,00	99,91
Belanja Bantuan Keuangan	259.609.814.122,00	197.528.570.658,00	76,09

Sumber : BKAD Tahun 2023

3) Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023, anggaran penerimaan Pembiayaan daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp. 209.902.861.000,00. Jumlah Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 (Unaudited) adalah sebesar Rp. 227.707.810.529,53 atau sebesar 108,48 persen dari anggaran

yang telah ditetapkan.

Sedangkan anggaran Pengeluaran Pembiayaan daerah adalah sebesar Rp.100.355.000.000,00. Jumlah Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 (Unaudited) adalah sebesar Rp.74.830.382.073,00 atau sebesar 74,57 persen dari anggaran yang telah ditetapkan.

Adapun anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.19
Target dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan
Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023

URAIAN BELANJA	TARGET	REALISASI	(%)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	209.902.861.000,00	227.707.810.529,53	108,48
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun Sebelumnya	208.402.861.000,00	227.687.810.529,53	109,25
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	20.000.000,00	1,33
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	100.355.000.000,00	74.830.382.073,00	74,57
Penyertaan Modal Daerah	30.000.000.000,00	15.999.219.061,00	53,33
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	68.855.000.000,00	58.831.163.012,00	85,44
Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	0,00	0,00

Sumber : BKAD Tahun 2023

1.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah kemudian dihubungkan dengan program pembangunan daerah



sebagaimana termuat pada RPJMD pada tahun rencana.

Suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya merupakan program-program unggulan SKPD yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi isu strategis permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas. Isu- isu strategis Kabupaten Tapin yaitu:

1. Perekonomian

Kinerja perekonomian Kabupaten Tapin mengalami penurunan pada tahun 2018-2020. Hal tersebut, terlihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin tahun 2018 sebesar 5,01%, tahun 2019 sebesar 4,25%, tahun 2020 sebesar -1,5%, tahun 2021 sebesar 3,41% dan tahun 2022 sebesar 4,91%, atau naik sebesar 1,48% dibandingkan tahun 2021. Tahun 2022 bila dibandingkan Dari target RPJMD sebesar 5.4% pada tahun tersebut masih dibawah target dengan selisih angka 0,49% sehingga perlu mencari cara atau metode untuk mencapai target pada tahun 2023 yang sebesar 5,6%. Dan juga bila dibandingkan Provinsi masih dibawah laju pertumbuhan ekonomi provinsi yang mencapai 5,11%, pada tahun 2022 tersebut juga Kabupaten Tapin berada diperingkat ke tujuh dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan. Untuk meningkatkan perekonomian diharapkan bisa dikembangkan Kawasan kawasan yang potensial di Kabupaten Tapin seperti Bendungan Tapin sebagai tempat Wisata, Kawasan Pertanian Cabai Hiyung di Desa Hiyung dan lain-lain. Hal ini diharapkan dapat menambah laju pertumbuhan ekonomi tersebut dengan upaya dan komitmen pemerintah, pemangku kebijakan,



masyarakat dan dunia bisnis, yang bekerja sama untuk kemajuan Kabupaten Tapin.

2. Pelayanan Publik

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Nilai SPBE di Kabupaten Tapin menurun dari tahun 2019-2021 dari indeks 2,31 sampai indeks 1,89 dan naik kembali menjadi 2,29 hal ini menjadi perhatian penting untuk diperbaiki.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia

IPM Kabupaten Tapin tahun 2023 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2022, yang semula 72,61 naik menjadi 73,52. Angka IPM tersebut masih rendah bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan adalah 74,66%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapin merupakan yang tertinggi keenam se-Kalimantan Selatan yaitu setelah Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Permasalahan yang dihadapi dalam Sumber Daya Manusia

khususnya pembangunan bidang Pendidikan yaitu Harapan lama sekolah Kabupaten Tapin cenderung meningkat setiap tahunnya akan tetapi masih berada dibawah target RPJMD. Pada tahun 2023 Harapan Lama Sekolah sebesar 12,86 dan berada di urutan ke-12 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Tapin dalam upaya peningkatan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tapin.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 10/M.PPN/HK/02/2021 Tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022 Kabupaten Tapin ditetapkan sebagai Lokus Nasional Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2022. Dan diperkuat oleh Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/120/KUM/2022 Tentang Penetapan desa/kelurahan lokasi fokus pencegahan dan penanganan Stunting serta intervensi gizi spesifik dan sensitif di Kabupaten Tapin tahun 2023.

Pernikahan anak di bawah umur masih banyak terjadi di Kabupaten Tapin jumlah pernikahan anak dari tahun 2018 sampai dengan 2020 naik sangat drastis, akan tetapi pada tahun 2020 sampai 2022 menurun kembali kembali. Banyak faktor yang mungkin berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan anak. Faktor ekonomi dan pendidikan, keluarga yang hidup dalam keadaan sosial ekonomi rendah cenderung memiliki pendidikan yang rendah juga, anak dianggap menjadi beban ekonomi bagi keluarga dan ketidak mampuan orang tua untuk membiayai pendidikan anak, termasuk pada masa pandemi Covid-19 ini dimana kondisi kesejahteraan yang terus menurun.

4. Infrastruktur Pelayanan Dasar

Dalam sektor infrastruktur, pada tahun 2022, kondisi jalan



dalam kondisi baik hanya sebesar 28,22%, kondisi Jembatan dalam keadaan mantap hanya sebesar 43,03%. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Minum Bersih di Kabupaten Tapin pada tahun 2022 juga masih yaitu sebesar 70,14%. Hal ini terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih dengan penyediaan anggaran baik yang bersumber dari APBD, APBD Provinsi, APBN, serta dari pihak swasta guna mendukung target pemerintah cakupan air minum layak 100% di tahun 2024.

IKLH di Kabupaten Tapin dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuatif dari 64,20 poin pada tahun 2018 menjadi 65,25 poin pada tahun 2022. Tutupan Lahan juga trennya menaik dari 46,51 poin pada tahun 2018 menjadi 46,52 poin pada tahun 2019 akan tetapi turun kembali pada tahun 2019-2022 menjadi 30,09 poin. Kualitas air juga fluktuatif dari 54,67 poin tahun 2018 menjadi 56,84 poin pada tahun 2022. Sedangkan Kualitas Udara dari tahun 2018-2022 fluktuatif dari 91,32 poin tahun 2018 menjadi 92,05 poin pada tahun 2022. Dari target RPJMD tahun 2023 sebesar 55 poin untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sudah tercapai akan tetapi melihat tren turunnya sangat tajam pada tahun 2020-2021 dan naik sedikit pada tahun 2022 sehingga perlu diwaspadai.

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program-program unggulan PD yang relevan dengan pencapaian target sasaran pembangunan daerah. Elemen-elemen utama program unggulan memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan, pagu pendanaan dan PD yang bertanggung jawab. Program yang disusun dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas, dan sumberdaya yang dimiliki.

Prioritas pembangunan daerah ditetapkan berdasarkan isu strategis pembangunan daerah pada tahun 2023 yang



teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan. Selain itu, penentuan prioritas pembangunan daerah juga dengan mempertimbangkan beberapa hal lain seperti kebijakan pembangunan provinsi dan nasional serta perkembangan ekonomi, sosial secara nasional serta dampak dari pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Tahun 2023 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari periode RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Dengan memperhatikan capaian pembangunan, isu strategis dan mempedomani RPJMD Kabupaten IV – 10 Tapin Tahun 2018-2023, prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023, serta RKP Tahun 2023 (RPJMN 2020- 2024) yang memuat program prioritas pembangunan nasional, maka Tema RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2023 adalah **“PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGUATAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN DASAR UNTUK PEREKONOMIAN BERKELANJUTAN”** tema tersebut dijabarkan pada empat prioritas daerah yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Mendukung Pelayanan Publik
2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup
3. Peningkatan infrastruktur yang mendukung pelayanan dasar dan perekonomian berkelanjutan
4. Pembangunan Kawasan strategis potensial

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023, maka arah kebijakan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.20
Prioritas dan Arah Kebijakan Kabupaten Tapin

No	Prioritas	Arah Kebijakan	Program Prioritas Daerah
1	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan pelayanan kepada masyarakat	1. Peningkatan Pelayanan Administrasi 2. Peningkatan layanan terpadu



No	Prioritas	Arah Kebijakan	Program Prioritas Daerah
	dalam rangka mendukung pelayanan publik		satu pintu
		Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan Kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi
			Percepatan perbaikan gizi masyarakat;
			Peningkatan pengendalian penyakit;
			Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (germas);
			Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
			Pencegahan dan penanganan pandemi Covid – 19
			Penurunan Stunting terintegrasi
			Peningkatan dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
		Pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun	
		Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;	
		Penjaminan mutu pendidikan	
		Peningkatan tata kelola pendidikan	
		Peningkatan kapabilitas iptek dan penciptaan inovasi; dan prestasi olahraga.	
		Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Pemenuhan hak dan perlindungan anak
			Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta kesetaraan gender
			Peningkatan kualitas pemuda.
			Penurunan perkawinan anak usia dini
		Revolusi Mental dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif
			Pengembangan teknologi informasi dan komputer serta inovasi dalam pelayanan publik
2	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
			Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;



No	Prioritas	Arah Kebijakan	Program Prioritas Daerah
		perubahan iklim	
3	Peningkatan infrastruktur yang mendukung pelayanan dasar dan perekonomian berkelanjutan	Memperkuat kuantitas dan kualitas infrastruktur untuk mendukung pengembangan dan menunjang pelayanan dasar dan perekonomian	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang menunjang pelayanan dasar dan perekonomian serta mendukung potensi wilayah
			Pengembangan infrastruktur berbasis teknologi informasi dan komputer
			Rehabilitasi sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan dasar dan perekonomian
			Peningkatan kuantitas dan kualitas SDA untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
		Peningkatan nilai tambah produk produk daerah dan pemulihan ekonomi	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM), dan koperasi yang mendukung penyerapan tenaga kerja
			Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
		Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas produksi bidang pertanian	
4	Pengembangan wilayah pemerataan pembangunan	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Bantuan sosial tepat sasaran
			Pelaksanaan bedah rumah bagi rumah tidak layak huni
			Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata
		Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
			Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;
		Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	Bantuan sosial tepat sasaran
Pelaksanaan bedah rumah bagi rumah tidak layak huni			

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2023

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023. Sehingga dengan demikian tahun 2023 menjadi tahapan akhir rencana kerja tahunan

pemerintah daerah Kabupaten Tapin untuk memenuhi target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholder pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

1) Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) berdasarkan masalah utama ke dalam satu-dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud.

Suatu pernyataan visi dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, lugas, dan jelas serta memenuhi kriteria atau karakteristik visi sebagaimana telah dijelaskan di awal. Suatu pernyataan visi dapat berupa satu atau lebih pernyataan atau kalimat yang merangkum atau menggabungkan berbagai pokok visi terpilih. Dengan kesederhanaan kalimat, diupayakan misi merupakan satu kalimat dengan pokok-pokok visi dapat lebih dari satu.

Kata kunci untuk perumusan pernyataan visi dan misi Kabupaten Tapin secara ilmiah dengan berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan pada RPJPD. Hal lain yang tidak kalah penting diperhatikan dalam merumuskan pernyataan visi yaitu isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Adapun perumusan visi Kabupaten Tapin disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.21
Perumusan Visi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Tapin 2019 - 2023

VISI RPJMD PROVINSI KALSEL 2006-2023	VISI RPJPD KABUPATEN TAPIN 2005-2023	ISU STRATEGIS KABUPATEN TAPIN 2018-2023	POKOK- POKOK VISI	PERNYATAAN VISI
Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera , Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing	Tapin Yang Religius dan Sejahtera Ada dua kata kunci dalam visi pembangunan Kabupaten Tapin 2005-2025: "Kabupaten Tapin yang Religius" mengandung makna bahwa visi Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2005-2025 mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat akan arah dan tujuan kehidupan yang makmur secara lahir dan bathin. "Sejahtera" mengandung makna bahwa suatu tata kehidupan dan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat. 2) Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya. 3) Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing. 4) Pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian dan pariwisata secara optimal dan lestari untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 5) Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan penyanggah kesejahteraan social. 6) Peningkatan pelayanan infrastruktur yang merata dan berkeadilan. 7) Pengelolaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. 8) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima. 	<ul style="list-style-type: none"> • Maju • Sejahtera • Agamis 	BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS



VISI RPJMD PROVINSI KALSEL 2006-2023	VISI RPJPD KABUPATEN TAPIN 2005-2023	ISU STRATEGIS KABUPATEN TAPIN 2018-2023	POKOK- POKOK VISI	PERNYATAAN VISI
Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera , Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing	Tapin Yang Religius dan Sejahtera Ada dua kata kunci dalam visi pembangunan Kabupaten Tapin 2005-2025: “Kabupaten Tapin yang Religius” mengandung makna bahwa visi Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2005-2025 mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat akan arah dan tujuan kehidupan yang makmur secara lahir dan bathin. “Sejahtera” mengandung makna bahwa suatu tata kehidupan dan	9) Peningkatan kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat. 10) Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya . 11) Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing. 12) Pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian dan pariwisata secara optimal dan lestari untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat . 13) Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan penyandang kesejahteraan social . 14) Peningkatan pelayanan infrastruktur yang merata dan berkeadilan. 15) Pengelolaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. 16) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima.	<ul style="list-style-type: none"> • Maju • Sejahtera • Agamis 	BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS



VISI RPJMD PROVINSI KALSEL 2006-2023	VISI RPJPD KABUPATEN TAPIN 2005-2023	ISU STRATEGIS KABUPATEN TAPIN 2018-2023	POKOK- POKOK VISI	PERNYATAAN VISI
Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera , Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing	Tapin Yang Religius dan Sejahtera Ada dua kata kunci dalam visi pembangunan Kabupaten Tapin 2005-2025: “Kabupaten Tapin yang Religius” mengandung makna bahwa visi Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2005-2025 mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat akan arah dan tujuan kehidupan yang makmur secara lahir dan bathin. “Sejahtera” mengandung makna bahwa suatu tata kehidupan dan	17) Peningkatan kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat. 18) Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya . 19) Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing. 20) Pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian dan pariwisata secara optimal dan lestari untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat . 21) Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan penyandang kesejahteraan social . 22) Peningkatan pelayanan infrastruktur yang merata dan berkeadilan. 23) Pengelolaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. 24) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima.	<ul style="list-style-type: none"> • Maju • Sejahtera • Agamis 	BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS





VISI RPJMD PROVINSI KALSEL 2006-2023	VISI RPJPD KABUPATEN TAPIN 2005-2023	ISU STRATEGIS KABUPATEN TAPIN 2018-2023	POKOK- POKOK VISI	PERNYATAAN VISI
	penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.			

Sumber : RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023



Dengan penjelasan di atas, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, adalah:

“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”

Penjelasan visi dibuat untuk menjelaskan masing-masing pokok visi. Dengan demikian, penjelasan visi pada dasarnya menguraikan kembali pokok-pokok visi yang telah disepakati ke dalam perwujudan visi dengan merinci lebih baik berbagai atribut atau penjelasan masing-masing pokok visi.

Tabel 1.22
Penyusunan Penjelasan Visi

Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	• Bersama	Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.
	• Mewujudkan	Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
	• Maju	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
	• Sejahtera	Mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
	• Agamis	Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

**2) Misi**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Perumusan misi harus mampu menerjemahkan visi kedalam bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapin disusun sebagai berikut.

Tabel 1.23
Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Tapin 2019-2023

Pernyataan Visi	Kata Kunci Visi	Misi
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	MAJU	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing
		2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa
	SEJAHTERA	3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan
		4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat
	AGAMIS	5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government)

Sumber : RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Berdasarkan proses perumusan misi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018- 2023, sebagai berikut:



Tabel 1.24
Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Tapin 2019-2023

Pernyataan Visi	Kata Kunci Visi	Misi
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	MAJU	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing
		2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa
	SEJAHTERA	3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan
		4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat
	AGAMIS	5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government)

Sumber : RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Berdasarkan proses perumsuan misi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018- 2023, sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.**
- 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.**
- 3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.**
- 4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.**
- 5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).**

Penjelasan masing-masing misi diperlukan untuk lebih memberi gambaran yang jelas mengenai makna yang dimiliki setiap misi. Berikut ini disajikan penjelasan dari 5 (lima) misi Kabupaten Tapin 2018-2023:



1. **Mewujudkan sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.**
 - a. **Agamis** bermakna segala perilaku masyarakat bernafaskan keagamaan, tidak hanya pada penghayatan dan pengamalan ajaran agama tetapi juga perwujudan dalam kehidupan bermasyarakat.
 - b. **Sehat** bermakna masyarakat yang sehat secara fisik yang ditunjukkan dengan meningkatnya usia harapan hidup.
 - c. **Cerdas** bermakna meningkatnya kemampuan berfikir dan bertindak masyarakat yang berlandaskan kemampuan intelektual, kemampuan emosional dan kemampuan spiritual.
 - d. **Berbudaya** bermakna perilaku masyarakat yang dijalankan sesuai dengan moral, norma-norma yang berlaku di masyarakat, sesuai dengan perintah di setiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum Negara yang berlaku.
 - e. **Berdaya saing** bermakna meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memproduksi dibandingkan dengan modal yang digunakan. Masyarakat memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.
2. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.**
 - a. **Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas** adalah pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan gini ratio.
 - b. **Agrobisnis** merupakan upaya memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Terkandung semangat untuk mempertahankan predikat sebagai lumbung padi Provinsi Kalimantan Selatan dan penyangga pangan nasional.
 - c. **Pariwisata** merupakan salah satu sektor yang diunggulkan sebagai pengungkit perekonomian di Tapin untuk masa yang akan datang.



d. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Pembangunan diarahkan untuk mendorong pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.

a. Infrastruktur meliputi transportasi, irigasi, air bersih, persampahan, limbah, bangunan, energi. Pengelolaan infrastruktur secara berkelanjutan meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mewujudkan rencana struktur ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin.

b. Pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan berarti memanfaatkan dan memelihara lingkungan secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin.

4. Mengembangkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Iklim investasi yang kondusif dicapai dengan kondisi sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga, birokrasi yang berorientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta dukungan infrastruktur Dengan iklim yang kondusif maka akan meningkatkan penanaman modal yang memadai pada calon lokasi investasi yang ada dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).

Bermakna peningkatan sikap mental Aparatur Sipil Negara yang berorientasi kepada hasil (outcome) dan pelayanan kepada masyarakat serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



3) Tujuan dan sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten tapin Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas, Berbudaya dan Berdaya Saing

Tujuan 1.1: Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Kabupaten Tapin.

Sasaran:

- a. Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan.
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- c. Meningkatnya daya beli masyarakat
- d. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan
- e. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender.

Misi 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata yang Dimulai dari Desa.

Tujuan 2.1: Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah.

Sasaran:

- a. Meningkatnya Sektor Agrobisnis.
- b. Meningkatnya Sektor Pariwisata
- c. Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM
- d. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Meningkatnya kemandirian pangan daerah
- f. Menurunnya Pengangguran



Misi 3: Memantapkan Pengelolaan Infrastruktur Dan Lingkungan Secara Berkelanjutan

Tujuan 3.1: Meningkatkan kualitas infrastruktur.

Sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
- b. Meningkatnya kualitas jaringan air bersih
- c. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi
- d. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik
- e. Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi

Tujuan 3.2: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran:

- a. Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan

Misi 4: Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Demi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan 4.1: Meningkatnya investasi.

Sasaran: Meningkatkan keamanan daerah.

Misi 5: Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik Yang Maksimal (Good and Clean Government)

Tujuan 5.1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat.

Sasaran:

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.
- b. Meningkatnya kualitas ASN
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapin disajikan pada Tabel berikut. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah.

Tabel 1.25
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
		2017	2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin	Indeks pembangunan manusia (poin)	68.7	68.7	69.2	69.7	70.2	70.7	71.2	71.2
Sasaran 1: Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (poin)	7.53	7.53	7.91	8.3	8.72	9.15	9.61	9.61
	Harapan lama sekolah (poin)	11.52	11.52	12.1	12.7	13.34	13.74	14	14
	Rasio budaya baca (poin)	0.002665	0.002665	0.002672	0.002677	0.002679	0.002685	0.002691	0.002691
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (poin)	69.72	69.72	70.42	71.12	71.83	72.55	73.28	73.28
Sasaran 3: Meningkatnya daya beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	1,141,745	1,141,745	1,176,000	1,211,280	1,274,615	1,285,045	1,323,595	1,323,595
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang diselesaikan (%)	75	78	80	80	85	80	86.67	86.67
Sasaran 5: Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	83.87	83.87	84.54	84.73	84.92	85.11	85.3	85.3
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	72.99	72.99	73.17	73.25	73.32	73.39	73.47	73.47
Tujuan 1: Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah	Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	4.85	4.85	4.9	5	5.2	5.4	5.6	5.6



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	
				Target	Target	Target	Target	Target	
	Indeks Gini (poin)	0.33	0.33	0.3	0.3	0.29	0.29	0.28	0.28
	Indeks Ketimpangan Regional (poin)	0.32	0.32	0.31	0.3	0.29	0.28	0.27	0.27
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	5,895,173	6,072,028	6,254,189	6,441,815	6,635,069	6,834,121	7,039,145	7,039,145
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	7,433,273	7,656,271	7,885,959	8,122,538	8,366,214	8,617,201	8,875,717	8,875,717
Sasaran 1: Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	21.71	21.75	22.78	23.15	23.53	23.91	24.3	24.3
	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	2.1	2.3	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.9
	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8
	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	6.99	7.03	7.2	7.4	7.6	7.8	8	8
Sasaran 2: Meningkatnya Sektor Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	2.5	2.7	3	3.2	3.5	3.7	4	4
Sasaran 3: Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM	Kontribusi sektor Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7





Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
		2017	2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
Sasaran 4: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun (poin)	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.6	0.6
Sasaran 5: Meningkatnya kemandirian pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (poin)	83.9	86.2	85	86	87	88	90	90
Sasaran 6: Menurunnya Kemiskinan	Persentase penduduk miskin (%)	3.77	3.76	3.75	3.65	3.55	3.45	3.35	3.35
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (poin)	0.4	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.46
	Indeks Keparahan Kemiskinan (poin)	0.08	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03
Sasaran 7: Menurunnya Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4.39	4.25	4	3.8	3.6	3.4	3.2	3.2
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas infrastruktur	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap (%)	43.49	44.55	46.67	52.33	55.33	60.67	64.33	67,67
Sasaan 1: Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	54.32	54.32	60	63	66	70	75	75
	Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	47	49	52	55	58	60	65	65
Sasaan 2: Meningkatnya kualitas jaringan air bersih	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih (%)	55.48	55.65	56	58	60	62	64	64
Sasaan 3: Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Luas areal sawah yang terairi (%)	65	66	67	69	71	73	75	75
Sasaan 4: Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Persentase bangunan gedung negara (gedung kantor dan gedung pelayanan publik) dalam kondisi baik (%)	28	29	32	44	48	60	64	64

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	
				Target	Target	Target	Target	Target	
Sasaan 5: Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi	Persentase desa yang tersambung dengan jaringan komunikasi (%)	80	85	90	92	94	96	98	98
Tujuan 2: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	1.39	1.48	0.56	0.11	2.69	0.01	0.32	0.32
Sasaran 1: Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	53.03	53.71	53.329	53.389	54.829	54.835	55.015	55.015
	Tingkat ketaatan terhadap RTRW (%)	45	46	48	57	63	69	75	75
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Persentase rumah layak huni (%)	97.5	97.62	97.74	97.86	97.98	98.1	98.22	98.22
Tujuan 1: Meningkatnya investasi	Laju pertumbuhan investasi daerah (%)	4	4.6	5	5.2	5.5	5.7	6	6
Sasaran 1: Meningkatnya keamanan daerah	Indeks rasa aman (poin)	0	0	0.49	0.5	0.51	0.52	0.53	0.53
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat	Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi (poin)	0	0	C	CC	CC	B	BB	BB
Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP (predikat)	CC	B	B	B	B	BB	BB	BB
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda (predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (poin)	0	0	99	99	99	99	99	99
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	75	76	77	79	81	83	85	85





C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan mempertimbangkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, maka dipilih beberapa program perangkat daerah untuk menjadi program pembangunan daerah.

Penyajian secara sistematis dari misi, tujuan dan sasaran hingga ke program pembangunan daerah untuk pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, ditampilkan pada Tabel. Program yang disajikan merupakan sekumpulan program prioritas pemerintah daerah Kabupaten Tapin yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Lebih lanjut, program pembangunan daerah juga memuat program dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, maka dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 dimuat program untuk penerapan SPM. Hal ini disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 1.26
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Tapin Tahun 2019 - 2023

Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing					102,589,329,881		106,843,265,817		124,735,937,639		134,372,840,908		143,448,318,662		616,180,092,907	
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin	Indeks pembangunan manusia (poin)	68.7	68.7	69.2	102,589,329,881	69.7	106,843,265,817	70.2	124,735,937,639	70.7	134,372,840,908	71.2	143,448,318,662	71.2	616,180,092,907	
Sasaran 1: Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (poin)	7.53	7.53	7.91	30,228,456,500	8.3	31,640,440,253	8.72	36,949,628,011	9.15	39,477,305,991	9.61	42,244,182,891	9.61	180,540,013,646	
	Harapan lama sekolah (poin)	11.52	11.52	12.1		12.7		13.34		13.74		14		14		
	Rasio budaya baca (poin)	0.002665	0.002665	0.002672		0.002677		0.002679		0.002685		0.002691		0.002691		
Program:																
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik (%)	64	67	74	882,758,500	77	923,100,563	80	1,078,366,078	84	1,151,155,789	88	1,231,161,116	88	5,266,542,046	DI NAS PENDIDIKAN
	Persentase PAUD yang terakreditasi (%)	0	15	30		45		60		75		90		90		
Program Pembinaan SD	Angka Putus Sekolah Dasar (%)	0,075	0,039	0,034	20,619,402,650	0,029	21,561,709,351	0,024	25,188,388,864	0,019	26,888,605,112	0,014	28,757,363,168	0,014	123,015,469,145	DI NAS PENDIDIKAN
	Angka Mengulang Sekolah Dasar (%)	0,023	0,021	0,020		0,015		0,010		0,005		0,002		0,002		
	Persentase sekolah yang terakreditasi jenjang SD	72	90	82		95		100		100		100		100		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SD (%)	78	89	90		91		92		93		94		94		
Program Pembinaan SMP	Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (%)	0,43	0,40	0,38	7,315,40 4,450	0,30	7,649,71 8,433	0,25	8,936,40 1,074	0,20	9,539,60 8,146	0	10,202,6 10,913	0	43,643,7 43,016	DINAS PENDIDIKAN
	Angka Mengulang Sekolah Menengah Pertama (%)	1,29	1,31	1,12		1,01		0,72		0,33		0		0		
	Persentase sekolah yang terakreditasi jenjang SMP	62	63	70		80		90		95		100		100		
	Persentase sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SMP (%)	72,89	73,07	76,92		84,60		92,31		96,15		100		100		
Program Pendidikan Non Formal	Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 yang mengikuti program Pendidikan Non Formal (%)	0,0049	0,0050	0,0051	752,533, 900	0,0053	786,924, 699	0,0055	919,285, 434	0,0057	981,337, 200	0,0059	1,049,54 0,136	0,0060	4,489,62 1,369	DINAS PENDIDIKAN
	Persentase pendidikan non formal yang terakreditasi (%)		7,69	19,20		30,70		42,30		57,60		76,90		76,90		
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	74	74	79	446,022, 000	84	466,405, 205	89	544,854, 561	94	581,632, 244	100	622,055, 685	100	2,660,96 9,695	DINAS PENDIDIKAN
	Persentase pemenuhan jumlah guru pada satuan pendidikan SD dan SMP (%)	82,15	82,15	85,70		89,25		92,80		96,35		100		100		
Program Pelayanan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Persentase Perpustakaan yang dapat diakses pemustaka (%)	3,98		3,98	95,200,0 00	4,48	119,000, 000	4,97	148,750, 000	5,47	185,937, 500	5,97	232,421, 875	5,97	781,309, 375	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan Perpustakaan yang aktif sesuai SNP (%)	30	33.33	100	117,135,000	100	133,582,000	50	133,582,000	33.33	149,030,000	25	149,030,000	25	682,359,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Persentase peningkatan tenaga pengelola Perpustakaan yang terampil	30	33.33	100		100		50		33.33		25		25		
	Persentase peningkatan jumlah koleksi bahan perpustakaan (%)	4.17	0	3.84		4.23		4.06		4.39		4.20		4.20		
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (poin)	69.72	69.72	70.42	67,875,050,516	71.12	68,997,768,128	71.83	81,560,641,383	72.55	87,411,416,231	73.28	93,879,838,855	73.28	403,915,115,114	
Program:																
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang terakreditasi madya (%)	76,25	82,28	100	762,309,600	100	820,220,000	100	861,234,000	100	733,267,000	100	931,746,000	100	4,108,776,600	DINAS KESEHATAN
Program Bebas Berobat	Persentase masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan (%)	79,54	95,89	100	13,069,000,000	100	18,069,000,000	100	23,069,000,000	100	23,412,500,000	100	23,412,500,000	100	101,032,000,000	DINAS KESEHATAN
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase pelayanan gizi masyarakat (%)	58,13	89,72	100	40,798,000	82	716,080,000	86	733,580,000	90	751,080,000	92	766,580,000	92	3,008,118,000	DINAS KESEHATAN
Program Kesehatan Keluarga	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	31,17	86,12	100	148,300,000	54	557,750,000	63	562,750,000	72	567,750,000	81	562,750,000	81	2,399,300,000	DINAS KESEHATAN
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tatanan Rumah Tangga (%)	78,04	92,14	43.00	335,185,000	47.00	624,885,000	50.00	641,725,000	55.00	659,405,000	60.00	667,925,000	60.00	2,929,125,000	DINAS KESEHATAN



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar pelayanan penyakit menular dan tidak menular (%)	81,09	84,88	92,5	889,969,000	100	954,467,450	100	1,002,190,823	100	1,052,300,366	100	1,104,915,383	100	5,003,843,022	DINAS KESEHATAN
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar pelayanan penyakit menular dan tidak menular (%)	47,34	92,61	100	17,195,778,734	100	11,039,498,153	100	12,479,355,857	100	15,085,649,156	100	18,036,456,732	100	73,836,738,632	DINAS KESEHATAN
Program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Persentase kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun) (%)	2	2,05	2,11	1,159,250,000	2,1	1,326,598,750	2,09	1,424,269,938	2,08	1,535,753,434	2,07	1,679,099,356	2,07	7,124,971,478	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program upaya kesehatan masyarakat	Persentase penyediaan jasa kebersihan, keamanan, pemeliharaan (%)	71,43	71,43	77,14	723,600,000									85	4,914,000,000	RSUD DATU SANGGUL
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar (%)	39,54	50	59,55	4,517,987,776	68,64	4,724,310,305	77,27	5,518,759,327	86,82	5,891,431,700	92,72	6,300,614,945	92,72	26,953,104,052	RSUD DATU SANGGUL
Program penyelenggaraan BLUD RSUD Datu Sanggul	Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat (nilai)	A	A	A	29,032,872,406	A	30,164,958,471	A	35,267,776,438	A	37,722,279,575	A	40,417,251,440	A	172,605,138,329	RSUD DATU SANGGUL
Sasaran 3: Meningkatkan daya beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp)	11.417.450	11.417.450	11.760.000	502.064.241	12.112.800	524.991.962	12.746.150	613.275.611	12.850.450	654.689.063	13.235.950	700.159.809	13.235.950	2.995.180,686	
Program:																
Program Perumusan Kebijakan Perekonomian	- Persentase BUMD yang sehat dan profitable (%)	80	80	85	502,064,241	90	524,991,962	95	613,275,611	100	654,689,063	100	700,159,809	100	2,995,180,686	Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Sekretariat Daerah





Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	- Persentase kesepakatan kerjasama (MoU) dibidang perekonomian yang difasilitasi	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang diselesaikan (%)	75	78	80	3,193,42 5,425	80	4,367,68 9,759	85	4,283,77 9,353	80	5,347,95 5,016	86.67	4,902,01 5,045	86.67	22,094,8 64,598	
Program:																
Program Pembinaan Kehidupan Beragama Untuk Meningkatkan Iman Dan Taqwa	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel (%)	40.38	53.84	65	3,014,69 0,425	68	4,104,55 4,759	71	3,970,50 4,353	74	4,987,19 5,016	77	4,533,01 5,045	77	20,609,9 59,598	Bagian Kesejahteraan Masyarakat, Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (%)	40	50	80	51,350,0 00	80	99,400,0 00	80	115,350, 000	80	129,450, 000	80	132,500, 000	80	528,050, 000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program Pemeliharaan Kamtibmas	Persentase kasus/kejadian potensi konflik yang ditangani (%)	80	80	80	65,735,0 00	80	86,585,0 00	80	93,725,0 00	80	122,310, 000	80	124,000, 000	80	492,355, 000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang terdata (%)	100	100	80	61,650,0 00	85	77,150,0 00	85	104,200, 000	90	109,000, 000	90	112,500, 000	90	464,500, 000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sasaran 5: Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	83.87	83.87	84.54	790,333, 200	84.73	1,312,37 5,715	84.92	1,328,61 3,282	85.11	1,481,47 4,606	85.3	1,722,12 2,061	85.3	6,634,91 8,864	
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	72.99	72.99	73.17		73.25		73.32		73.39		73.47		73.47		

Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program:																
Program Perlindungan Hak Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti (%)	94	90	90	120,120,000	90	236,920,605	90	260,612,665	90	286,673,931	90	315,341,323	90	1,219,668,524	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti (%)	94	90	90	51,710,100	90	179,295,605	90	192,225,165	90	231,447,681	90	247,092,448	90	901,770,999	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Kualitas Hidup Perempuan	- Persentase Analisis Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD (%)	2	0.01	2,1	454,228,100	2,2	476,939,505	2,3	524,633,452	2,4	577,096,794	2,5	634,806,470	2,5	2,667,704,321	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	- Persentase perempuan yang terlibat di pemerintahan daerah (%)	51.6	52	53		54		55		56		57		57	-	
	- Persentase pelaku usaha rumahan perempuan (%)	13	15	17		18		19		20		22		22	-	
Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan (%)	8.33	8.33	8.3	164,275,000	8.3	419,220,000	8.3	351,142,000	8.3	386,256,200	8.3	524,881,820	8.3	1,845,775,020	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan (%)	1.69	1.69	1.69		1.69		1.69		1.69		1.69		1.69	-	



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan (%)	8	8	8.33		7.69		7.69		7.69		7.69		7.69	-	
	Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA (%)	75	75	75		50		50		50		50		50	-	
	Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan (%)	75	75	38.46		38.46		46.15		53.84		61.53		61.53	-	
Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agribisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa					52,303,139,441		50,309,619,240		54,451,738,567		56,743,949,202		58,458,505,772		272,266,952,222	
Tujuan 1: Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah	Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	4.85	4.85	4.9	52,303,139,441	5	50,309,619,240	5.2	54,451,738,567	5.4	56,743,949,202	5.6	58,458,505,772	5.6	272,266,952,222	
	Indeks Gini (poin)	0.33	0.33	0.3		0.3		0.29		0.29		0.28		0.28		
	Indeks Ketimpangan Regional (poin)	0.32	0.32	0.31		0.3		0.29		0.28		0.27		0.27		
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	5895173	6072028	6254189		644181		66350		683412		7039144.9		7039144.9		
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	7433273	7656271	7885959		812253		83662		861720		88757		88757		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran 1: Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	21.71	21.75	22.78	19,975,933,231	23.15	20,529,170,010	23.53	22,498,674,793	23.91	23,398,136,830	24.3	24,353,520,677	24	110,755,435,541	
	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	2.1	2.3	2.5		2.6		2.7		2.8		2.9		3		
	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1.2	1.3	1.4		1.5		1.6		1.7		1.8		2		
	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	6.99	7.03	7.2		7.4		7.6		7.8		8		8		
Program:																
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Berkelanjutan	- Produktivitas Padi (Ku/Ha)	48.25	48.50	49.23	5,974,014,614	49.97	6,018,494,849	50.72	6,189,766,883	51.48	6,270,109,805	52.25	6,358,323,957	52.25	30,810,710,108	DINAS PERTANIAN
	- Produktivitas Jagung (Ku/Ha)	46.75	47.33	48.04	-	48.76	-	49.49	-	50.23	-	50.99	-	50.99	-	
	- Produktivitas Kedelai (Ku/Ha)	8.76	9.05	9.19	-	9.32	-	9.46	-	9.61	-	9.75	-	9.75	-	
	- Luas Panen Padi (Ha)	75,302	78,966.39	79,899.98		80,844.61		81,800.41		82,767.51		83,746.04		48802.496		
	- Luas Panen Jagung (Ha)	1,038	1,691.11	1,749.42		1,809.74		1,872.15		1,936.71		2,003.49		11062.61		
	- Luas Panen Kedelai (Ha)	77	104.97	108.59		112.34		116.21		120.22		124.36		686.69		
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	- Persentase RMU yang menghasilkan beras dengan mutu baik (%)	2.50	3.35	5.00	4,068,534,611	10.00	4,071,664,374	15.00	4,083,715,592	20.00	4,089,368,763	25.00	4,095,575,777	25.00	20,408,859,116	DINAS PERTANIAN
	- Jumlah kemitraan pemasaran hasil tanaman pangan	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		6.00		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura Berkelanjutan	- Luas Panen Cabe Rawit Hiyung (Ha)	111	111.55	112.10	1,020,42 2,489	112.66	1,067,02 2,028	113.21	1,246,45 4,486	113.77	1,330,62 5,424	114.34	1,423,04 2,625	677.64	6,087,56 7,051	DINAS PERTANIAN
	- Luas Panen Bawang Merah (Ha)	111	149.13	151.29		153.48		155.71		157.97		160.25		927.84		
	- Luas Panen Jeruk (Ha)	464	464.18	468.83		473.51		478.25		483.03		487.86		2855.6 7		
	Produktivitas Cabe Rawit (Ku/Ha)	7.97	8,55	8.64		8.72		8.81		8.90		8.99		8.99		
	Produktivitas Bawang Merah (Ku/Ha)	6.96	6,67	6.87		7.08		7.29		7.51		7.73		7.73		
	Produktivitas Jeruk (Ku/Ha)	0.89	1.99	0.91		0.94		0.97		1.00		1.03		1.03		
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	- Persentase Kelompok tani Yang Melaksanakan Pengolahan Hasil Hortikultura (%)	2.50	5.00	7.50	265,819, 995	10.00	277,959, 172	12.50	324,701, 316	15.00	346,627, 840	17.50	370,702, 515	17.50	1,585,81 0,838	DINAS PERTANIAN
	- Jumlah kemitraan pemasaran hasil hortikultura	1	1.00	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		6.00		
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan	- Produktivitas Tanaman Karet (Ku/Ha)	621.18	603.09	613.88	936,073, 914	632.30	978,821, 514	651.27	1,143,42 2,005	670.80	1,220,63 5,336	690.93	1,305,41 3,290	690.93	5,584,36 6,059	DINAS PERTANIAN
	- Produktivitas Tanaman Sawit (Ku/Ha)	1,878.70	1,789.24	3,239.35	-	3,336.5 3	-	3,436. 63	-	3,539.7 3	-	3,645. 92	-	3,645.9 2	-	
	- Luas Tanaman Karet (Ha)	399.27	13,309.0 0	14,118.2 1		14,541. 76		14,978 .01		15,427. 35		15,890 .17		15890. 17		
	- Luas Tanaman Sawit (Ha)	2248.05	44,961.0 0	3,239.35		3,336.5 3		3,436. 63		3,539.7 3		3,645. 92		3,645.9 2		
	- Persentase intensitas serangan OPT Perkebunan	5.00	5.00	4.50		4.00		3.50		3.00		2.50		2.50		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Persentase kelompok tani RPBSK kategori baik (%)	9.38	12.50	15.63	62,041,181	18.17	64,874,410	21.88	75,783,815	25.00	80,901,366	28.18	86,520,286	28.18	370,121,057	DINAS PERTANIAN
Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Peternakan Berkelanjutan	- Populasi sapi (ekor)	6751	6,900	7,015	4,184,419,866	7,132	4,375,509,379	7,251	5,111,303,374	7,372	5,456,460,943	7,495	5,835,433,748	7495	24,963,127,309	DINAS PERTANIAN
	- Populasi kambing (ekor)	4526	4,585	4,650		4,716		4,783		4,851		4,920		4920		
	- Populasi unggas (ekor)	2281314	2,301,089	2,315,533		2,330,206		2,346,072		2,364,135		2,364,135		2364135		
	- Angka konsumsi daging per kapita (kg/kapita)	3.8	3.80	3.84		3.89		3.94		4.00		4.05		4.05		
	- Persentase penyakit hewan yang tertangani (%)	100	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Persentase kelompok pengolahan hasil peternakan yang teregister dan dibina (%)	2.00	2.00	2.00	198,881,268	2.00	207,963,560	2.00	242,935,109	2.00	259,340,101	2.00	277,352,297	2.00	1,186,472,335	DINAS PERTANIAN
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Budidaya (%)	100.09	100	100	2,031,303,280	100	2,124,066,619	100	2,481,253,708	100	2,648,808,525	100	2,832,778,759	100	12,118,210,890	DINAS PERIKANAN
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap (%)	98.29	100	100	618,529,189	100	646,775,504	100	755,538,506	100	806,558,728	100	862,577,423	100	3,689,979,350	DINAS PERIKANAN
Program Pembinaan, Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro Dan Kimia	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia (%)	0.2	0.25	0.30	615,892,825	0.33	696,018,600	0.37	843,800,000	0.38	888,700,000	0.41	905,800,000	0.41	3,950,211,425	DINAS PERINDUSTRIAN



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia (%)	0.15	0.20	0,23		0,25		0,26		0,27		0,29		0,29		
Sasaran 2: Meningkatnya Sektor Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	2.5	2.7	3	2,019,81 9,982	3.2	2,112,05 7,914	3.5	2,467,22 6,766	3.7	2,633,83 4,367	4	2,816,76 4,586	4	12,049,7 03,615	
Program:																
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang telah dikelola dengan baik (%)	68.18	70	70	1,003,21 1,982	73	1,078,21 2,914	75	1,305,25 7,166	78	1,366,00 1,047	80	1,513,13 3,266	80	6,265,81 6,375	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Program Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata	Persentase kelompok sadar wisata yang aktif (%)	15	20	20	175,400, 000	25	281,340, 000	35	295,150, 000	40	336,180, 000	55	336,180, 000	55	1,424,25 0,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dipasarkan (%)	20	25	30	822,208, 000	33	677,555, 000	35	791,819, 600	40	835,653, 320	50	858,251, 320	50	3,985,48 7,240	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Program Pengembangan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku usaha pariwisata yang dibina (%)	15	25	30	19,000,0 00	35	74,950,0 00	40	75,000,0 00	45	96,000,0 00	50	109,200, 000	50	374,150, 000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sasaran 3: Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM	Kontribusi sektor Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	1.1	1.2	1.3	100,187, 363	1.4	123,782, 648	1.4	133,257, 711	1.6	137,982, 996	1.7	143,146, 892	1.7	638,357, 610	
Program:																
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	82.39	83	86.96	51,137,3 63	87	53,472,6 48	87	62,464,7 11	88	66,682,8 46	88	71,314,2 34	87.84	305,071, 802	DINAS PERINDUSTRIAN
	Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat			100		100		100		100		100		100		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase bertambahnya pelaku usaha mikro (%)	21	17	14.80	9,200,00	26	9,660,00	34	10,143,00	41	10,650,150	47	11,182,658	46.51	50,835,808	DINAS PERINDUSTRIAN
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase UMKM Yang Memiliki Izin Usaha (%)	4.49	4.50	14.02	39,850,00	15	60,650,00	16	60,650,00	17	60,650,00	18	60,650,00	17.88	282,450,000	DINAS PERINDUSTRIAN
Sasaran 4: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun (poin)	0.54	0.55	0.56	22,048,450,839	0.57	22,293,568,041	0.58	23,925,539,263	0.59	24,706,497,127	0.6	25,179,980,156	0.6	118,154,035,427	
Program:																
Program Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan	- Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten (%)	56	68	74	190,821,958	76	199,536,206	79	233,090,595	81	248,830,804	84	266,113,088	84	1,138,392,651	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	- Persentase BUMDES yang aktif (%)	30	35	78		80		81		83		85		85		
	- Persentase BUMDES menghasilkan laba (%)	0.80	0.90	1.00		1.70		1.85		2.00		2.10		2.10		
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar (%)	30	35	40	980,357,130	43	1,025,127,008	47	1,197,514,319	67	1,278,380,412	70	1,367,168,990	70	5,848,547,859	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program Keberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	78	83	85	963,810,586	89	1,007,824,835	91	1,177,302,579	93	1,256,803,808	94	1,344,093,806	94	5,749,835,614	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	- Persentase PKK aktif (%)	88	89	91		92		94		95		97		97		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	- Persentase posyandu aktif (%)	78	80	82		84		87		88		90		90		
Program Advokasi dan Penggerak	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan mitra kerja (%)	15	20	30	2,016,170,000	35	2,031,478,500	40	2,778,566,718	45	3,144,430,046	50	3,162,151,549	50	13,132,796,813	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan	Persentase Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan dalam kondisi baik (%)	50,65	55.00	58.00	17,897,291,165	62.00	18,029,601,492	67.00	18,539,065,052	70.00	18,778,052,058	75.00	19,040,452,724	75	92,284,462,491	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sasaran 5: Meningkatnya kemandirian pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (poin)	83.9	86.2	85	512,422,400	86	538,043,520	87	564,945,696	88	593,192,981	90	622,852,630	90	2,831,457,227	
Program:																
Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita)	15,286,000 (Kg/kapita/tahun)	12000 (Kg/kapita/tahun)	14,368,840 (Kg/kapita/tahun)	212,639,000	14,656,216 (Kg/kapita/tahun)	223,270,950.00	14,949,341 (Kg/kapita/tahun)	234,434,498	15,248,327 (Kg/kapita/tahun)	246,156,222	15,553,294 (Kg/kapita/tahun)	258,464,033	15,553,294 (Kg/kapita/tahun)	1,174,964,703	DINAS KETAHANAN PANGAN
Program Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi (%)	100	80	100	299,783,400	100	314,772,570.00	100	330,511,199	100	347,036,758	100	364,388,596	100	1,656,492,523	DINAS KETAHANAN PANGAN
Sasaran 6: Menurunnya Kemiskinan	Persentase penduduk miskin (%)	3.77	3.76	3.75	7,212,867,993	3.65	4,260,370,770	3.55	4,388,144,309	3.45	4,782,652,293	3.35	4,830,205,728	3.35	25,474,241,092	
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (poin)	0.4	0.41	0.42		0.43		0.44		0.45		0.46		0.46		
	Indeks Keparahan Kemiskinan (poin)	0.08	0.08	0.07		0.06		0.05		0.04		0.03		0.03		
Program:																



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	54.2	55	55	398,604,300	55.05	512,761,795	55.1	538,399,885	55.12	565,319,879	55.14	593,585,873	55.16	2,608,671,732	DINAS SOSIAL
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapatkan perbaikan (%)	1.4	2.26	23.00	4,024,579,700	2.27	398,000,000	2.28	417,900,000	2.29	438,795,000	2.3	460,734,750	2.3	5,740,009,450	DINAS SOSIAL
Program Pembinaan Anak Terlantar dan Lanjut Usia	Persentase anak terlantar dan lanjut usia yang memperoleh pembinaan	23.3	35	35	559,698,100	35.05	619,295,600	35.10	625,260,380	35.12	631,523,399	35.14	638,099,569	35.14	3,073,877,048	DINAS SOSIAL
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat dan trauma yang telah menerima pembinaan	2.9	3	3	471,125,000	3.02	486,424,000	3.04	490,745,200	3.06	495,282,460	3.08	500,046,583	3.08	2,443,623,243	DINAS SOSIAL
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan PMKS (%)	55.1	56.1	56.1	682,968,000	56.15	1,126,492,500	56.16	1,182,817,125	56.17	1,241,957,981	56.18	1,304,055,880	56.18	5,538,291,487	DINAS SOSIAL
Program Pemberdayaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Persentase panti asuhan dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	100	100	222,612,000	100	223,742,600	100	224,929,730	100	226,176,217	100	227,485,027	100	1,124,945,574	DINAS SOSIAL
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial (%)	-	-	10	291,975,500	10.05	306,574,275	10.10	321,902,989	10.12	337,998,138	10.14	354,898,045	10.14	1,613,348,947	DINAS SOSIAL
Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (%)	0.29	0.17	0.50	561,305,393	0.63	587,080,000	0.88	586,189,000	1.45	845,599,219	4.24	751,300,000	7.70	3,331,473,612	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sasaran 7: Menurunnya Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4.39	4.25	4	433,457,633	3.8	452,626,337	3.6	473,950,030	3.4	491,652,608	3.2	512,035,103	3.2	2,363,721,711	



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program:																
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	- Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	18,74	50	50	137,482,500	50	137,482,500	50	137,482,500	60	137,482,500	50	137,482,500	50	687,412,500	DINAS TENAGA KERJA
	- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)			60		60		60		60		60		60		
	- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)			45		45		45		45		45		45		
	- Rasio lowongan kerja dengan pencari kerja (%)		4,03	10		10		10		10		10		10		
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja LLK Tapin	- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	60,75	66,93	75	63,050,000	75	63,050,000	75	63,050,000		63,050,000	75	63,050,000	75	315,250,000	DINAS TENAGA KERJA
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	- Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	65	65	65	12,600,000	70	15,000,000	75	17,000,000	80	20,000,000	85	25,000,000	100	89,600,000	KECAMATAN TAPIN UTARA
	- Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	100	100	100	16,500,000	100	16,500,000	100	22,000,000	100	25,000,000	100	27,000,000	100	107,000,000	KECAMATAN TAPIN TENGAH
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	40	40	40	15,000,000	43	25,000,000	45	25,550,000	48	25,550,000	50	26,550,000	50	117,650,000	KECAMATAN TAPIN SELATAN



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Desa																	
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		-	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	100	100	100	13,095,725	100	13,693,767	100	15,996,537	100	17,076,755	100	18,262,804	100	78,125,587		KECAMATAN SALAM BABARIS
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		-	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	40	40	40	21,000,000	43	21,840,000	45	21,840,000	48	23,150,400	50	24,539,424	50	112,369,824		KECAMATAN PIANI
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100			
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	65	65	65	16,700,000	70	17,327,920	75	17,452,681	80	18,555,690	85	19,759,955	85	89,796,246		KECAMATAN LOKPAIKAT
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100			
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	65	65	65	13,000,000	70	13,000,000	75	16,000,000	80	17,000,000	85	17,000,000	85	76,000,000		KECAMATAN HATUNGUN
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100			



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	75	75	75	16,240,000	76	16,240,000	77	16,240,000	78	17,052,000	80	17,904,600	80	83,676,600	KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	80	80	80		82		85		87		90		90	-	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	65	65	65	17,425,000	70	17,875,000	75	17,875,000	80	18,875,000	85	20,875,000	85	92,925,000	KECAMATAN CANDI LARAS UTARA
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	75	75	75	33,804,407	76	35,348,150	77	41,292,362	78	44,080,765	80	47,142,348	80	201,668,033	KECAMATAN BINUANG
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	80	80	80		82		85		87		90		90	-	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	100	100	100	29,180,000	100	30,639,000	100	32,170,950	100	33,779,498	100	35,468,472	100	161,237,920	KECAMATAN BAKARANGAN
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	100	100	100	18,380,000	100	19,630,000	100	20,000,000	100	21,000,000	100	22,000,000	100	101,010,000	KECAMATAN BUNGUR
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					314,412,353,788		345,364,181,250		319,903,378,569		343,370,381,568		354,821,705,897		1,677,872,001,071	
Misi 3: Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan																
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas infrastruktur	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap (%)	43.49	44.55	46.67	304,565,776,123	52.33	335,067,799,311	55.33	307,975,152,916	60.67	330,416,837,372	64.33	341,121,516,227	67.67	1,619,147,081,950	
Sasaran 1: Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	54.32	54.32	60	196,286,541,018	63	213,757,506,762	55.333333	195,132,338,809	70	212,133,978,072	75	216,868,266,095	75	1,034,178,630,756	
	Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	47	49	52		55		55.333333		60		65		65		
Program:																
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	44.69	45.55	48	133,491,541,018	50	139,898,256,762	52	119,784,701,309	55	129,155,744,947	57	125,182,003,001	57	647,512,247,037	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi sedang (%)	9.62	9.25	12		13		14		15		18		18		
	Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik (%)	47.00	49	52		55		58		60		65		65		
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	Persentase panjang Jalan Kabupaten yang direhabilitasi/dipelihara (%)	4,5	10	12	51,965,000,000	15	61,946,250,000	20	62,243,337,500	21	68,563,503,125	25	75,830,060,094	25	320,548,150,719	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Jembatan Kabupaten yang direhabilitasi/dipelihara (%)	0	3	10		12		15		20		22		22		
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik	10	5	8	10,830,000,000	15	11,913,000,000	20	13,104,300,000	25	14,414,730,000	30	15,856,203,000	35	66,118,233,000	





Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaan 2: Meningkatnya kualitas jaringan air bersih	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih (%)	55.48	55.65	56	10,734,022,502	58	11,132,878,298	60	12,668,680,514	62	13,389,118,251	64	14,180,137,582	64	62,104,837,146	
Program:																
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah	Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih (%)	51.36	60.00	70.00	10,734,022,502	75.00	11,132,878,298	80.00	12,668,680,514	85.00	13,389,118,251	90.00	14,180,137,582	90	62,104,837,146	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air limbah (%)															
Sasaan 3: Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Luas areal sawah yang terairi (%)	65	66	67	85,007,753,201	69	97,063,118,091	71	84,977,341,703	73	88,689,867,500	75	92,766,111,045	75	448,504,191,539	
Program:																
Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.	- Persentase panjang saluran pada jaringan irigasi dan irigasi rawa dalam kondisi baik/sedang	45.17	50	55	85,007,753,201	57	97,063,118,091	60	84,977,341,703	65	88,689,867,500	70	92,766,111,045	70	448,504,191,539	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	- Persentase pintu air, waduk/situ/embung serta bangunan air lainnya yang berfungsi baik	35.15	40	45		48		50		52		55		55		
Sasaan 4: Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Persentase bangunan gedung negara (gedung kantor dan gedung pelayanan publik) dalam kondisi baik (%)	28	29	32	12,424,740,327	44	12,996,429,553	48	15,059,104,610	60	16,056,888,483	64	17,149,807,745	64	73,686,970,718	

Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program:																
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar (%)	95	95	96	243,555,433	96	254,677,857	96	297,504,970	96	317,594,972	96	339,653,200	96	1,452,986,432	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Pemenuhan Prasarana Perhubungan Yang Sesuai Standar (%)	70	75	80	990,000,000	85	1,039,500,000	90	1,091,475,000	95	1,146,048,750	100	1,203,351,188	100	5,470,374,938	DINAS PERHUBUNGAN
Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Persentase sarana dan prasarana pemerintahan yang dibangun (%)	40.00	45.00	50.00	11,191,184,894	55.00	11,702,251,697	60.00	13,670,124,639	65.00	14,593,244,761	70.00	15,606,803,358	70	66,763,609,349	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sasaan 5: Meningkatkan ketersediaan jaringan komunikasi	Persentase desa yang tersambung dengan jaringan komunikasi (%)	80	85	90	112,719,075	92	117,866,607	94	137,687,280	96	146,985,067	98	157,193,761	98	672,451,790	
Program:																
Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi dan E-Government	Persentase sarana dan prasarana telekomunikasi yang memiliki izin	55.09	57.33	57.33	112,719,075	59.67	117,866,607	0.62	137,687,280	0.6467	146,985,067	0.6467	157,193,761	1	672,451,790	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tujuan 2: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	1.39	1.48	0.56	9,846,577,664	0.11	10,296,381,939	2.69	11,928,225,653	0.01	12,953,544,196	0.32	13,700,189,669	0.32	58,724,919,121	
Sasaran 1: Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	53.03	53.71	53,329	9,285,272,271	53	9,709,301,939	55	11,342,036,653	55	12,107,944,977	55	12,948,889,669	55	55,393,445,509	
	Tingkat ketaatan terhadap RTRW (%)	45	46	48		57		63		69		75		75		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program:																
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	- Status Mutu Air (status)	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	3,150,24 7,189	Cemar Sedang	3,294,10 9,235	Cemar Sedang	3,848,0 5 2,921	Cemar Sedang	4,107,90 5,349	Cemar Sedang	4,393,2 1 5,631	Cemar Sedang	18,793,5 30,324	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu	80	80	80		80		80		80		80		80		
	Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku	0	60	60		60		60		60		60		60		
Program Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Keanekaragaman Hayati	Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati (%)	0	0	20	4,195,34 4,428	40	4,386,93 2,833	60	5,124,6 4 7,817	80	5,470,70 6,514	100	5,850,6 6 8,730	100	25,028,3 00,322	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup	Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah (%)	25	25	25	150,454, 686	50	157,325, 487	75	183,78 1, 640	100	196,192, 100	100	209,818 , 417	100	897,572, 330	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase MHA yang ditetapkan haknya (%)	0	0	12.50	868,416, 237	25	908,074, 121	37.50	1,060,7 7 7,596	50&	1,132,41 0,091	62.50	1,211,0 6 0,453	62.50	5,180,73 8,498	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Penaatan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas air (%)	29	20	24	327,830, 169	28	342,801, 159	32	400,44 7, 255	36	427,488, 773	40	457,179 , 560	40	1,955,74 6,917	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas udara (%)	19,35	36	24		28		32		36		40		40		
	- Tingkat kasus lingkungan hidup yang diverifikasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Kajian Dampak Lingkungan	Persentase perusahaan yang beroperasi sesuai dengan dokumen lingkungan (%)	30	20	40	360,613,186	50	377,081,275	55	440,491,981	60	470,237,651	65	502,897,516	65	2,151,321,609	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase kawasan yang memiliki rencana tata ruang (%)	7,69	23,08	38,46	39,073,743	53,86	40,858,120	69,22	47,728,900	84,60	50,951,951	100	54,490,765	100	233,103,480	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase lahan yang pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang (%)	5,24	12,8	30,24	19,717,917	47,68	20,618,374	65,12	24,085,599	82,56	25,712,058	100	27,497,862	100	117,631,809	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program Pemanfaatan Ruang	Persentase permohonan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi (%)	62,73	88,53	90	173,574,714	90	181,501,335	90	212,022,945	90	226,340,491	90	242,060,734	90	1,035,500,219	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Persentase rumah layak huni (%)	97.5	97.62	98	561,305,393	98	587,080,000	98	586,189,000	98	845,599,219	98	751,300,000	98	3,331,473,612	
Program:																
Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (%)	0.29	0.17	0.50	561,305,393	0.63	587,080,000	0.88	586,189,000	1.45	845,599,219	4.24	751,300,000	7.70	3,331,473,612	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat					2,479,954,429		2,593,206,278		3,029,284,786		3,233,847,204		3,458,450,689		14,794,743,386	
Tujuan 1: Meningkatnya investasi	Laju pertumbuhan investasi daerah (%)	4	4.6	5	2,479,954,429	5.2	2,593,206,278	5.5	3,029,284,786	5.7	3,233,847,204	6	3,458,450,689	6	14,794,743,386	
Sasaran 1: Meningkatnya keamanan daerah	Indeks rasa aman (poin)	0	0	0.49	2,479,954,429	0.5	2,593,206,278	0.51	3,029,284,786	0.52	3,233,847,204	0.53	3,458,450,689	0.53	14,794,743,386	
Program:																
Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	1. Persentase pelaku usaha yang memiliki izin	0	0	100	351,707,277	100	367,768,661	100	429,613,340	100	458,624,393	100	490,477,672	100	2,098,191,344	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2. Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan laporan LKPM tepat waktu	0	0	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase jenis investasi/promosi yang dipublikasikan (%)	0	0	100	10,500,925	100	10,980,470	100	12,826,967	100	13,693,150	100	14,644,193	100	62,645,706	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Persentase stakeholder yang menggunakan informasi/promosi investasi yang dipublikasikan	0	0	100		100		100		100		100		100		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Pertumbuhan penanaman modal (%)	-90	57.7	5	73,677,921	5	77,042,564	5	89,998,188	5	96,075,612	5	102,748,443	5	439,542,727	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Persentase dokumen RUPM yang tersedia			-		50		-		50		-		100		
	Persentase rekomendasi PM (investor baru)			100		100		100		100		100		100		
Program peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	99.41	100	100	783,165,225	100	818,929,959	100	956,642,781	100	1,021,243,231	100	1,092,172,615	100	4,672,153,811	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
Program pencegahan dini dan kesiapsiagaan	Persentase Desa Tangguh Bencana (%)	50	50	50	112,509,914	60	117,647,894	70	137,431,788	80	146,712,321	80	156,902,073	80	671,203,990	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program penanganan bencana	Persentase daerah terdampak bencana yang dilakukan penanganan (%)	80	80	80	365,227,941	80	381,906,771	80	446,128,941	80	476,255,265	80	509,333,078	80	2,178,851,996	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)	99.77	100	100	783,165,225	100	818,929,959	100	956,642,781	100	1,021,243,231	100	1,092,172,615	100	4,672,153,811	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Misi 5: Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).					18,807,939,826		20,103,504,299		22,734,639,464		24,192,809,279		25,713,626,421		111,552,519,281	
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat	Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi (poin)	-	-	C	18,807,939,826	CC	20,103,504,299	CC	22,734,639,464	B	24,192,809,279	BB	25,713,626,421	BB	111,552,519,281	
Sasaran 1: Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP (predikat)	CC	B	B	12,879,546,819	B	13,932,592,470	B	15,819,185,563	BB	16,816,349,607	BB	17,901,480,062	BB	77,349,154,521	
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda (predikat)	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
Program:																
Program peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase perangkat daerah yang menyusun SAKIP dengan benar dan tepat waktu (%)	100	100	100	116,301,391	100	121,612,516	100	142,063,108	100	151,656,387	100	162,189,523	100	693,822,925	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	- Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu (%)	100	100	100	2,679,166,654	100	2,801,515,909	100	3,272,624,163	100	3,493,618,872	100	3,736,264,527	100	15,983,190,125	INSPEKTORAT
	- Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu (%)	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	INSPEKTORAT



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	- Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	INSPEKTORAT
	- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu (%)	70.22	60.92	80	-	85	-	90	-	95	-	100	-	100	-	INSPEKTORAT
Program Penunjang dan Pendukung Good Governance	- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu (%)	76.97	70	75	772,951,682	80	808,249,995	85	944,166,854	90	1,007,924,826	95	1,077,929,194	95	4,611,222,552	INSPEKTORAT
	- Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	0	100	100		100		100		100		100		100		
	- Persentase Self Assesment Per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3 (%)	0	50	60		70		80		90		100		100		
Program Penatausahaan Keuangan	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan penggunaan APBD sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	556,800,000	100	864,640,000	100	907,872,000	100	953,265,600	100	1,000,928,880	100	4,283,506,480	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program Penyusunan Anggaran	Persentase Perda, Perbup dan Pedoman yang disahkan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	100	100	1,146,500,000	100	1,203,825,000	100	1,264,016,250	100	1,327,217,063	100	1,393,577,916	100	6,335,136,228	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Misi/Tujuan/Sasaran /Program	Indikator Kinerja (Tujuan,	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah
------------------------------	----------------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------



Pembangunan Daerah	Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD														Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Pengelolaan Aset	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan	97,57	97,57	100	1,287,46 7,600	100	1,522,64 0,480	100	1,598,77 2,504	100	1,678,7 1 1,129	100	1,762,6 4 6,686	100	7,850,23 8,399	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan	11,58	11,58	100		100		100		100		100		100		
	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Perbendaharaan	Persentase complain terhadap penerbitan SP2D (%)	0	0	0	257,970, 000	0	270,868, 500	0	284,411, 925	0	298,63 2, 521	0	313,56 4, 147	0	1,425,44 7,094	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	- Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100	100	100	2,406,74 1,792	100	2,516,65 0,246	100	2,939,85 4,946	100	3,138,3 7 8,319	100	3,356,3 5 1,113	100	14,357,9 76,416	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	- Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD:															
	a. sasaran	100	100	100		100		100		100		100		100		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	b. program	100	100	100		100		100		100		100		100		
	- Persentase program dan kegiatan dalam KUA PPAS yang konsisten dengan RKPD															
	a. program	100	100	100		100		100		100		100		100		
	b. kegiatan	100	100	100		100		100		100		100		100		
	- Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran program pembangunan daerah															
	a. kinerja	100	100	100		100		100		100		100		100		
	b. anggaran	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur	1. Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang selaras dengan program RPJMD (%)	100	100	100	99,094,4 46	100	103,619, 783	100	121,044, 683	100	129,21 8, 624	100	138,19 3, 368	100	591,170, 905	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN
	2. Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur (%)															
	a. program	100	100	100		100		100		100		100		100		
	b. kegiatan	100	100	100		100		100		100		100		100		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	3. Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur (%)															
	a. kinerja	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN
	b. anggaran	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia	1. Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Sosial dan SDM yang selaras dengan program RPJMD (%)	100	100	100	104,434,917	100	109,204,137	100	127,568,112	100	136,182,569	100	145,640,987	100	623,030,721	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBA NGAN
	2. Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Sosial dan SDM (%)															
	a. program	100	100	100		100		100		100		100		100		
	b. kegiatan	100	100	100		100		100		100		100		100		
	3. Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Sosial dan SDM (%)															



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	3. Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Sosial dan SDM (%)															
	a. kinerja	100	100	100		100		100		100		100		100		
	b. anggaran	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	- Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu (%)	100	100	100	2,679,16 6,654	100	2,801,51 5,909	100	3,272,6 2 4,163	100	3,493,6 1 8,872	100	3,736,2 6 4,527	100	15,983,1 90,125	INSPEKTO RAT
	- Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu (%)	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	INSPEKTO RAT
	- Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	INSPEKTO RAT
Program Penunjang dan Pendukung Good Governance	- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu (%)	76.97	70	75	772,951, 682	80	808,249, 995	85	944,16 6, 854	90	1,007,9 2 4,826	95	1,077,9 2 9,194	95	4,611,22 2,552	INSPEKTO RAT
	- Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	0	100	100		100		100		100		100		100		
	- Persentase Self Assesment Per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3 (%)	0	50	60		70		80		90		100		100		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Targ et	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran 2: Meningkatkan kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (poin)	-	-	99	916,038,319	99	957,870,956	99	1,118,948,362	99	1,194,509,029	99	1,277,472,408	99	5,464,839,075	
Program:																
Program Kinerja, Pengembangan karier dan Disiplin Aparatur	Persentase Pejabat pemimpin tinggi berdasarkan hasil assessment (%)	98	99	99	310,024,347	99	324,182,200	99	378,697,297	99	404,270,077	99	432,348,234	99	1,849,522,156	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBA NGAN SUMBERDA YA MANUSIA
	Persentase Pejabat administrator yang memenuhi syarat jabatan (%)			90		90		90		90		90		90		
	Persentase Pejabat fungsional tertentu yang memenuhi syarat jabatan (%)			90		90		90		90		90		90		
Program Peningkatan Kapasitas SDM	Persentasi ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	90.01	99	70	606,013,972	75	633,688,756	80	740,251,065	85	790,238,952	90	845,124,175	90	3,615,316,920	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBA NGAN SUMBERDA YA MANUSIA
Sasaran 3: Meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	75	76	77	5,012,354,687	79	5,213,040,872	81	5,796,505,540	83	6,181,950,642	85	6,534,673,951	85	28,738,525,685	
Program:																
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Persentase terlaksananya SOP Pelayanan	0	0	100	618,873,105	100	647,135,126	100	755,958,602	100	807,007,192	100	863,057,035	100	3,692,031,061	DINAS PENANAMA N MODAL DAN PELAYAN AN TERPADU SATU PINTU
	2. Persentase perizinan yang diterbitkan	100	100	100		100		100		100		100		100		





Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	IKM terhadap pelayanan KTP & Kartu Keluarga (Poin)	87.34	87	88	838,845,803	89	877,153,297	89	1,024,657,066	89	1,093,850,404	89	1,169,822,644	89	5,004,329,214	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	IKM terhadap pelayanan Akta kelahiran, akta kematian dan Akta Perkawinan (Poin)	87.34	87	88	223,037,194	89	233,222,612	89	272,441,771	89	290,839,298	89	311,039,238	89	1,330,580,113	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Utara (poin)	100	100	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	50,000,000	KECAMATAN TAPIN UTARA
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah (poin)	85	85	86.40	183,429,651	86.50	195,094,333	86.6	181,009,425	86.80	188,078,887	86.80	198,212,534	86.80	945,824,831	KECAMATAN TAPIN TENGAH
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)														-	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Selatan (poin)	77.17	85	86.40	386,770,199	86.50	395,122,473	86.60	401,088,793	86.70	425,044,055	86.80	446,773,898	87	2,054,799,418	KECAMATAN TAPIN SELATAN

Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Salam Babaris (poin)	78	85	78.25	146,690,640	78.50	153,389,548	79.11	179,183,827	79.56	191,283,804	80.00	204,569,221	80.00	875,117,041	KECAMATAN SALAM BABARIS
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Piani (poin)	87.32	85	86.50	183,584,995	86.60	190,928,395	86.70	193,416,790	86.80	207,400,677	87	223,033,765	87	998,364,622	KECAMATAN PIANI
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Lokpaikat (poin)	86.31	85	86.4	304,120,600	86.5	315,555,535	86.6	317,827,534	86.7	337,914,235	86.8	359,844,868	86.8	1,635,262,772	KECAMATAN LOKPAIKAT
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Hatungun (poin)	86.23	85	86	154,650,000	87	157,650,000	87	167,369,156	87	178,031,601	87	193,571,400	87	851,272,157	KECAMATAN HATUNGUN
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Candi Laras Selatan (poin)	80	85	85	196,650,000	86	196,650,000	87	196,650,000	88	206,482,500	89	236,806,625	89	1,033,239,125	KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Candi Laras Utara (poin)	86,3	86,3	86.4	171,179,900	86.5	172,449,804	86.6	174,363,866	86.7	178,409,226	86.8	193,152,554	86.8	889,555,350	KECAMATAN CANDI LARAS UTARA
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Binuang (poin)	78.11	85	85	312,973,202	86	336,399,102	87	426,600,997	88	468,914,290	89	415,373,034	89	1,960,260,625	KECAMATAN BINUANG
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bakarang (poin)	82	85	86,4	189,228,500	85	198,689,925	85	208,624,421	85	219,055,642	85	230,008,424	86,8	1,045,606,913	KECAMATAN BAKARA NGAN
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bakarang (poin)	76	76	86	221,224,684	86.5	222,267,570	87	221,047,000	87.5	240,694,119	88	260,665,241	88	1,165,898,614	KECAMATAN BUNGUR
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Tapin (nilai)	-	-	100	16,158,567	100	16,896,478	100	19,737,823	100	21,070,684	100	22,534,126	100	96,397,678	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah



Misi/Tujuan/Sasaran /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2023		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Informasi Berbasis TI (%)	80	80	100	864,937,645	100	904,436,672	100	1,056,528,466	100	1,127,874,026	100	1,206,209,340	100	5,159,986,150	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase penyebaran informasi melalui media massa (%)	80	80	80	100		100		100		100		100		100	
	Persentase Opini dan Aspirasi Publik yang dipublikasikan melalui media online (%)	80	80	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
	JUMLAH				490,592,717,365		525,213,776,884		524,854,979,026		561,913,828,160		585,900,607,440		2,692,666,308,867	

Sumber : RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023





D. Kegiatan Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Dokumen Perencanaan Tahunan

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah disusun berdasarkan tingkat kebutuhan yang penting dan tingkat keterkaitan dengan pencapaian RPJMD, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah untuk memecahkan permasalahan/isu-isu strategis.

Adapun rencana program masing-masing Perangkat Daerah untuk tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2023 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2024	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
	Dinas Pendidikan						314.233.563.779	0	0		329.945.241.968
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 persen	255.894.570.997	0	0	100 persen	268.689.299.547
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen				100 persen	
					Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 persen				100 persen	
					Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 persen				100 persen	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah laporan rencana Kerja dan Monitoring dan evaluasi Renja	7 Laporan	26.891.000	0	0	7 Laporan	28.235.550
					Jumlah laporan Kinerja	6 Laporan				6 Laporan	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	1.233.000	0	0	6 Dokumen	1.294.650
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	1.358.000	0	0	2 Dokumen	1.425.900
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD			Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	1.600.000	0	0	1 Dokumen	1.680.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	7.500.000	0	0	1 Laporan	7.875.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	12.000.000	0	0	1 Laporan	12.600.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	1.600.000	0	0	1 Dokumen	1.680.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1.600.000	0	0	1 Dokumen	1.680.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase administrasi keuangan perangkat daerah	100%	250.137.916.097	0	0	100%	262.644.811.902



X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Dinas Pendidikan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1714 Orang/bulan	250.123.636.997	0	0	1714 Orang/bulan	262.629.818.847
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.745.000	0	0	1 Laporan	4.982.250
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.755.000	0	0	1 Laporan	2.892.750
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis/Realisasi Anggaran			Dinas Pendidikan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1.779.100	0	0	1 Dokumen	1.868.055
X.XX.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	5.000.000	0	0	1 Dokumen	5.250.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2023 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2024	
					Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran.	100 persen	7.330.000	0	0	100 persen	7.696.500
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Dinas Pendidikan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	4.830.000	0	0	50 Orang	5.071.500
X.XX.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	2.500.000	0	0	1 Dokumen	2.625.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran.	100 persen	1.725.116.900	0	0	100 persen	1.811.372.745
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Dinas Pendidikan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	16.491.500	0	0	1 Paket	17.316.075
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Pendidikan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	177.053.400	0	0	1 Paket	185.906.070
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Dinas Pendidikan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	133.420.000	0	0	1 Paket	140.091.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Dinas Pendidikan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	65.000.000	0	0	1 Paket	68.250.000
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Dinas Pendidikan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	5.500.000	0	0	1 Paket	5.775.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi			Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	1 Laporan	1.327.652.000	0	0	1 Laporan	1.394.034.600



	SKPD				Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik.	100 persen	141.601.700	0	0	100 persen	148.681.785
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Dinas Pendidikan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	141.601.700	0	0	5 Unit	148.681.785
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase pengelolaan asset dan urusan rumah tangga dinas pendidikan	100 persen	3.472.710.000	0	0	100 persen	3.646.345.500
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.500.000	0	0	1 Laporan	1.575.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	215.252.100	0	0	1 Laporan	226.014.705
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	31.639.000	0	0	1 Laporan	33.220.950
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Dinas Pendidikan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	3.224.318.900	0	0	1 Laporan	3.385.534.845
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan yang diterapkan	100 persen	383.005.300	0	0	100 persen	402.155.565
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Dinas Pendidikan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit	78.070.000	0	0	3 Unit	81.973.500
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Dinas Pendidikan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	29.999.600	0	0	2 Unit	31.499.580
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Dinas Pendidikan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	274.935.700	0	0	1 Unit	288.682.485
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dikmas, Pendidikan dasar jenjang SD dan SMP		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	80%	57.338.992.782	0	0	80%	60.205.942.421
					Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	75%				75%	
					Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	100%				100%	
					Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97%				97%	
					Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B	92%				92%	
					Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B	68%				68%	
					Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs	85%				85%	
					Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	84%				84%	



1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		TAPIN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	100%	35.795.751.322	0	0	100%	37.585.538.888
				Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97%				97%	
				Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%				100%	
				Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SD	96%				96%	
				Angka Putus Sekolah Dasar (SD)	0.09 %				0.09 %	
				Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs	85%				85%	
1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Kabupaten Tapin	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang	650.000.000	0	0	3 Ruang	682.500.000
1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Kabupaten Tapin	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	115.436.320	0	0	1 Ruang	121.208.136
1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah		Kabupaten Tapin	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	225.097.100	0	0	1 Ruang	236.351.955
1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Kabupaten Tapin	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	36 Unit	9.185.869.462	0	0	36 Unit	9.645.162.935
1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas		Kabupaten Tapin	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	10 Ruang	2.428.073.640	0	0	10 Ruang	2.549.477.322
1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		Kabupaten Tapin	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	225.214.800	0	0	1 Ruang	236.475.540
1.01.02.2.01.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah		Kabupaten Tapin	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	200.000.000	0	0	1 Ruang	210.000.000
1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah		Kabupaten Tapin	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	200.000.000	0	0	1 Ruang	210.000.000
1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		Kabupaten Tapin	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	4 Unit	1.440.000.000	0	0	4 Unit	1.512.000.000
1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah		Kabupaten Tapin	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	1 Paket	200.000.000	0	0	1 Paket	210.000.000
1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah		Kabupaten Tapin	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	0	0	1 Paket	105.000.000
1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa		Kabupaten Tapin	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	100 Unit	255.000.000	0	0	100 Unit	267.750.000
1.01.02.2.01.21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar		Kabupaten Tapin	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	160.000.000	0	0	100 Peserta Didik	168.000.000
1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa		Kabupaten Tapin	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	100.000.000	0	0	1 Paket	105.000.000
1.01.02.2.01.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik		Kabupaten Tapin	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	178 Satuan Pendidikan	180.000.000	0	0	178 Satuan Pendidikan	189.000.000
1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar		Kabupaten Tapin	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	178 Satuan Pendidikan	105.000.000	0	0	178 Satuan Pendidikan	110.250.000
1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Kabupaten Tapin	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	36 Peserta Didik	185.000.000	0	0	36 Peserta Didik	194.250.000



1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kabupaten Tapin	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Orang	20.000.000	0	0	100 Orang	21.000.000
1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Kabupaten Tapin	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	25.000.000	0	0	100 Orang	26.250.000
1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Kabupaten Tapin	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	178 Satuan Pendidikan	35.000.000	0	0	178 Satuan Pendidikan	36.750.000
1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kabupaten Tapin	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	175 Satuan Pendidikan	17.201.060.000	0	0	175 Satuan Pendidikan	18.061.113.000
1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Kabupaten Tapin	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	350 Orang	190.000.000	0	0	350 Orang	199.500.000
1.01.02.2.01.07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	tapin	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit	720.000.000	0	0	3 Unit	756.000.000
1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Kab. Tapin	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	5 Ruang	1.300.000.000	0	0	5 Ruang	1.365.000.000
1.01.02.2.01.13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Kab. Tapin	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	350.000.000	0	0	2 Unit	367.500.000
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	TAPIN	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Mts/Paket B	92%	11.909.747.100	0	0	92%	12.505.234.455
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts/Paket B	68%				68%	
			Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100%				100%	
			Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan SMP	50%				50%	
			Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (SMP)	0,30 %				0,30 %	
			Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	84%				84%	
1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Tapin	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	26 Satuan Pendidikan	211.738.120	0	0	26 Satuan Pendidikan	222.325.026
1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Kabupaten Tapin	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	36 Peserta Didik	295.463.589	0	0	36 Peserta Didik	310.236.768
1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Kabupaten Tapin	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	22 Satuan Pendidikan	4.128.440.000	0	0	22 Satuan Pendidikan	4.334.862.000
1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Tapin	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	9 Unit	2.472.651.400	0	0	9 Unit	2.596.283.970
1.01.02.2.02.28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Kab. Tapin	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	1 Paket	50.000.000	0	0	1 Paket	52.500.000



1.01.02.2.02.25	Pengadaan Mebel Sekolah			Kab. Tapin	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket	205.601.000	0	0	1 Paket	215.881.050
1.01.02.2.02.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Kab. Tapin	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	422.651.400	0	0	2 Unit	443.783.970
1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru			Kab. Tapin	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	2 Ruang	422.651.400	0	0	2 Ruang	443.783.970
1.01.02.2.02.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			Kab. Tapin	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang	892.651.400	0	0	4 Ruang	937.283.970
1.01.02.2.02.35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			Kab. Tapin	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	1 Paket	200.000.000	0	0	1 Paket	210.000.000
1.01.02.2.02.11	Pembangunan Kantin Sekolah			Kab. Tapin	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit	200.000.000	0	0	1 Unit	210.000.000
1.01.02.2.02.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah			Kab. Tapin	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3 Ruang	622.651.400	0	0	3 Ruang	653.783.970
1.01.02.2.02.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah			Kab. Tapin	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	200.000.000	0	0	1 Ruang	210.000.000
1.01.02.2.02.17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			Kab. Tapin	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang	422.651.400	0	0	2 Ruang	443.783.970
1.01.02.2.02.18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			Kab. Tapin	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	200.000.000	0	0	1 Ruang	210.000.000
1.01.02.2.02.16	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah			Kab. Tapin	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang	200.000.000	0	0	1 Ruang	210.000.000
1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			Kab. Tapin	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	100 Peserta Didik	100.000.000	0	0	100 Peserta Didik	105.000.000
1.01.02.2.02.36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			Kab. Tapin	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	1440 Peserta Didik	102.999.991	0	0	1440 Peserta Didik	108.149.991
1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			Kab. Tapin	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	26 Satuan Pendidikan	179.760.000	0	0	26 Satuan Pendidikan	188.748.000
1.01.02.2.02.43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			Kab. Tapin	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	52 Orang	70.036.000	0	0	52 Orang	73.537.800
1.01.02.2.02.40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			Kab. Tapin	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	30 Orang	45.000.000	0	0	30 Orang	47.250.000
1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			Kab. Tapin	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	30 Orang	64.800.000	0	0	30 Orang	68.040.000
1.01.02.2.02.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah			Kab. Tapin	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang	200.000.000	0	0	1 Ruang	210.000.000
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			TAPIN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	80%	7.635.566.960	0	0	80%	8.017.345.308
					Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	75%				75%	



					Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	60%				60%	
					Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PAUD	53%				53%	
1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			Dinas Pendidikan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	335 Orang	3.087.518.900	0	0	335 Orang	3.241.894.845
1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			Kabupaten Tapin	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	182 Satuan Pendidikan	201.572.600	0	0	182 Satuan Pendidikan	211.651.230
1.01.02.2.03.16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD			Kabupaten Tapin	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang	30.174.000	0	0	100 Orang	31.682.700
1.01.02.2.03.10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD			Kabupaten Tapin	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	1 Paket	75.000.000	0	0	1 Paket	78.750.000
1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			Kabupaten Tapin	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	1 Unit	225.214.600	0	0	1 Unit	236.475.330
1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			Kabupaten Tapin	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3 Unit	781.086.860	0	0	3 Unit	820.141.203
1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			Tapin	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit	500.000.000	0	0	2 Unit	525.000.000
1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD			Kab. Tapin	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	186 Satuan Pendidikan	2.700.000.000	0	0	186 Satuan Pendidikan	2.835.000.000
1.01.02.2.03.11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			Kab. Tapin	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50 Peserta Didik	35.000.000	0	0	50 Peserta Didik	36.750.000
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			TAPIN	Persentase rata-rata pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada PNF	58%	1.997.927.400	0	0	58%	2.097.823.770
					Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) Tahun yang mengikuti program Pendidikan Non Formal	2,80%				2,80%	
1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar NonFormal/Kesetaraan			Kabupaten Tapin	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	100 Peserta Didik	247.632.000	0	0	100 Peserta Didik	260.013.600
1.01.02.2.04.13	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			Kabupaten Tapin	Jumlah Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	14 Satuan Pendidikan	30.095.400	0	0	14 Satuan Pendidikan	31.600.170
1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non Formal/Kesetaraan			Kabupaten Tapin	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	14 Satuan Pendidikan	19.200.000	0	0	14 Satuan Pendidikan	20.160.000
1.01.02.2.04.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan			Kab. Tapin	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	1 Unit	200.000.000	0	0	1 Unit	210.000.000



1.01.02.2.04.04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan			Kab. Tapin	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit	200.000.000	0	0	1 Unit	210.000.000
1.01.02.2.04.22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan			Kab. Tapin	Jumlah Satuan Pendidikan yang Penyelenggarakan Ujian	14 Satuan Pendidikan	35.000.000	0	0	14 Satuan Pendidikan	36.750.000
1.01.02.2.04.18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan			Kab. Tapin	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan	28 Orang	25.000.000	0	0	28 Orang	26.250.000
1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non Formal/Kesetaraan			Kab. Tapin	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	14 Satuan Pendidikan	1.040.000.000	0	0	14 Satuan Pendidikan	1.092.000.000
1.01.02.2.04.09	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			Kab. Tapin	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Tersedia	1 Paket	166.000.000	0	0	1 Paket	174.300.000
1.01.02.2.04.10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan			Kab. Tapin	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	50 Peserta Didik	35.000.000	0	0	50 Peserta Didik	36.750.000
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya Angka Partisipasi Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Dikmas, Pendidikan dasar jenjang SD dan SMP		Rasio Guru Terhadap Siswa (TK/SD/SMP)	TK = 1:11 SD = 1:15 SMP = 1:12 Orang	1.000.000.000	0	0	TK = 1:11 SD = 1:15 SMP = 1:12 Orang	1.050.000.000
					Persentase Pendidik (Guru) yang Bersertifikasi	54.35 %				54.35 %	
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			TAPIN	Persentase Pendidik (Guru) yang memenuhi kualifikasi S1/ D-IV	93%	1.000.000.000	0	0	93%	1.050.000.000
					Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan PAUD/PNF	96%				96%	
					Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan SD	85%				85%	
					Persentase rata-rata pemenuhan jumlah Pendidik pada satuan pendidikan SMP	85%				85%	
					Rasio Guru Terhadap Siswa TK	1:11 Orang				1:11 Orang	
					Rasio Guru Terhadap Siswa SD	1:15 Orang				1:15 Orang	
					Rasio Guru Terhadap Siswa SMP	1:12 Orang				1:12 Orang	
1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			Dinas Pendidikan Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	5 Dokumen	1.000.000.000	0	0	5 Dokumen	1.050.000.000
	Dinas Kesehatan						105.033.322.822	0	0		110.284.988.963
X	Semua Urusan										



X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 persen	74.116.507.017	0	0	100 persen	77.822.332.368
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100 persen				100 persen	
					Persentase laporan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 persen				100 persen	
					Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 persen				100 persen	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 BULAN	71.974.900	0	0	12 BULAN	75.573.645
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	41.974.900	0	0	6 Laporan	44.073.645
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			kab tapin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	30.000.000	0	0	3 Dokumen	31.500.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Pengelolaan perencanaan, pelaporan dan keuangan yang efektif dan efisien	100 persen	71.432.269.417	0	0	100 persen	75.003.882.888
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600 Orang/bulan	71.418.289.417	0	0	600 Orang/bulan	74.989.203.888
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2.850.000	0	0	2 Laporan	2.992.500
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kab Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	11.130.000	0	0	3 Laporan	11.686.500
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	100 persen	1.740.318.100	0	0	100 persen	1.827.334.005
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kab tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	30 Paket	17.083.400	0	0	30 Paket	17.937.570
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 Paket	176.673.700	0	0	60 Paket	185.507.385
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kab Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 Paket	1.987.800	0	0	30 Paket	2.087.190



X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	1.385.175.000	0	0	100 Laporan	1.454.433.750
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	159.398.200	0	0	12 Paket	167.368.110
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	163.361.000	0	0	100 persen	171.529.050
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			kab tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 Unit	163.361.000	0	0	13 Unit	171.529.050
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	592.053.400	0	0	100 persen	621.656.070
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	363.128.400	0	0	12 Laporan	381.284.820
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	228.925.000	0	0	12 Laporan	240.371.250
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 persen	116.530.200	0	0	100 persen	122.356.710
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	36 Unit	18.300.000	0	0	36 Unit	19.215.000
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			kab tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	50 Unit	98.230.200	0	0	50 Unit	103.141.710
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan		Persentase PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 persen	28.423.755.305	0	0	100 persen	29.844.943.070
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	PERSENTASE Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1	100 persen	9.170.277.505	0	0	100 persen	9.628.791.380
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya			KAB TAPIN	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	2 Unit	1.906.800.000	0	0	2 Unit	2.002.140.000
1.02.02.2.01.09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			KAB TAPIN	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	10 Unit	2.678.000.000	0	0	10 Unit	2.811.900.000
1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya			KAB TAPIN	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas	5 Unit	2.500.000.000	0	0	5 Unit	2.625.000.000



					Kesehatan Lainnya						
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin			KAB TAPIN	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	100 Paket	2.085.477.505	0	0	100 Paket	2.189.751.380
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	PERSENTASE Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	19.238.251.900	0	0	100 persen	20.200.164.495
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			KAB TAPIN	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	200 Orang	57.550.000	0	0	200 Orang	60.427.500
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			KAB TAPIN	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60 Orang	125.155.000	0	0	60 Orang	131.412.750
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			KAB TAPIN	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	300 Orang	25.640.000	0	0	300 Orang	26.922.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			KAB.TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	47453 orang Dokumen	14.765.560.900	0	0	47453 orang Dokumen	15.503.838.945
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Kab- Tapin	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	28.295.000	0	0	30 Orang	29.709.750
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Kab-Tapin	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	117.929.200	0	0	30 Orang	123.825.660
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			Kab-Tapin	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	126.765.000	0	0	30 Orang	133.103.250
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Kab-Tapin	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	40.987.200	0	0	30 Orang	43.036.560
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Kab-Tapin	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	36.900.000	0	0	30 Orang	38.745.000
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus			Kab-Tapin	Jumlah Penderita Diabetes Mellitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30 Orang	31.900.000	0	0	30 Orang	33.495.000
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Kab-Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	30 Orang	35.200.000	0	0	30 Orang	36.960.000
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			Kab-Tapin	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	30 Orang	98.433.200	0	0	30 Orang	103.354.860
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			Kab-Tapin	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	30 Orang	85.547.000	0	0	30 Orang	89.824.350
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Kab-Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	30 Dokumen	287.650.000	0	0	30 Dokumen	302.032.500
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Kab-Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	30 Dokumen	45.890.000	0	0	30 Dokumen	48.184.500
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Kab-Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	30 Dokumen	81.749.900	0	0	30 Dokumen	85.837.395



1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya			Kab-Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	30 Dokumen	63.400.000	0	0	30 Dokumen	66.570.000
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan			Kab-Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	30 Dokumen	68.420.000	0	0	30 Dokumen	71.841.000
1.02.02.2.02.21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)			Kab-Tapin	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	30 Orang	41.900.000	0	0	30 Orang	43.995.000
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			Kab-Tapin	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	30 Orang	38.575.000	0	0	30 Orang	40.503.750
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Kab-Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	30 Dokumen	2.509.599.000	0	0	30 Dokumen	2.635.078.950
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah			Kab-Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	30 Orang	16.900.000	0	0	30 Orang	17.745.000
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			Kab-Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	30 Dokumen	75.010.000	0	0	30 Dokumen	78.760.500
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Kab-Tapin	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	30 Dokumen	72.690.000	0	0	30 Dokumen	76.324.500
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Kab-Tapin	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	30 Dokumen	360.605.500	0	0	30 Dokumen	378.635.775
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			TAPIN	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100%	15.225.900	0	0	100%	15.987.195
1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	30 Dokumen	15.225.900	0	0	30 Dokumen	15.987.195
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan		Persentase Kebutuhan Sumberdaya manusia kesehatan	100 Bulan	2.118.739.200	0	0	100 Bulan	2.224.676.160
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100 persen	1.968.000.000	0	0	100 persen	2.066.400.000
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			Kab tapin	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	50 Orang	1.968.000.000	0	0	50 Orang	2.066.400.000
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	150.739.200	0	0	100 persen	158.276.160
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia			Kab tapin	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	900 Orang	150.739.200	0	0	900 Orang	158.276.160



	Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya						
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan		SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	100%	36.400.000	0	0	100%	38.220.000
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			TAPIN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100%	36.400.000	0	0	100%	38.220.000
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	30 Dokumen	36.400.000	0	0	30 Dokumen	38.220.000
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	100%	337.921.300	0	0	100%	354.817.365
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	261.602.900	0	0	100%	274.683.045
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	30 Dokumen	261.602.900	0	0	30 Dokumen	274.683.045
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	76.318.400	0	0	100%	80.134.320
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	30 Dokumen	76.318.400	0	0	30 Dokumen	80.134.320
	Puskesmas Tapin Utara (APBD)						125.250.000	0	0		131.512.500
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 persen	125.250.000	0	0	100 persen	131.512.500
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN UTARA	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	125.250.000	0	0	100 persen	131.512.500



1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Tapin Utara	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	125.250.000	0	0	12 Dokumen	131.512.500
	Puskesmas Tapin Utara (JKN)					1.221.548.572	0	0		1.282.626.001
X	Semua Urusan									
X.XX	Semua Bidang									
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			PERSENTASE PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 persen	1.221.548.572	0	0	100 persen	1.282.626.001
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		TAPIN UTARA	PERSENTASE Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	1.221.548.572	0	0	100 persen	1.282.626.001
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		KAB TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	1.221.548.572	0	0	12 Dokumen	1.282.626.001
	Puskesmas Binuang (APBD)					208.640.800	0	0		219.072.840
X	Semua Urusan									
X.XX	Semua Bidang									
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 persen	208.640.800	0	0	100 persen	219.072.840
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		BINUANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	208.640.800	0	0	100 persen	219.072.840
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas		Binuang	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	208.640.800	0	0	12 Dokumen	219.072.840
	Puskesmas Binuang (JKN)					1.281.251.920	0	0		1.345.314.516
X	Semua Urusan									
X.XX	Semua Bidang									
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	100 persen	1.281.251.920	0	0	100 persen	1.345.314.516



	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			BINUANG	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	1.281.251.920	0	0	100 persen	1.345.314.516
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Binuang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	1.281.251.920	0	0	12 Dokumen	1.345.314.516
	Puskesmas Hatungun (APBD)						124.000.000	0	0		130.200.000
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PERSENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 persen	124.000.000	0	0	100 persen	130.200.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			HATUNGUN	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	124.000.000	0	0	100 persen	130.200.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Hatungun	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	124.000.000	0	0	12 Dokumen	130.200.000
	Puskesmas Hatungun (JKN)						300.000.000	0	0		315.000.000
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PERSENTASE PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 persen	300.000.000	0	0	100 persen	315.000.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			HATUNGUN	Persentase Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	300.000.000	0	0	100 persen	315.000.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			hatungun	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	300.000.000	0	0	12 Dokumen	315.000.000
	Puskesmas Tambarangan (APBD)						163.350.000	0	0		171.517.500
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	URUSAN PEMERINTAHAN										



	WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 persen	163.350.000	0	0	100 persen	171.517.500
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN SELATAN	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	163.350.000	0	0	100 persen	171.517.500
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			TAPIN SELATAN	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	163.350.000	0	0	12 Dokumen	171.517.500
	Puskesmas Tambarangan (JKN)						685.900.165	0	0		720.195.173
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 persen	685.900.165	0	0	100 persen	720.195.173
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN SELATAN	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	685.900.165	0	0	100 persen	720.195.173
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			TAMBARANGAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	685.900.165	0	0	12 Dokumen	720.195.173
	Puskesmas Salam Babaris (APBD)						110.228.400	0	0		115.739.820
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 persen	110.228.400	0	0	100 persen	115.739.820
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			SALAM BABARIS	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	110.228.400	0	0	100 persen	115.739.820
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Salam babaris	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	110.228.400	0	0	12 Dokumen	115.739.820
	Puskesmas Salam Babaris (JKN)						393.231.865	0	0		412.893.458



X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 persen	393.231.865	0	0	100 persen	412.893.458
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		SALAM BABARIS		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	393.231.865	0	0	100 persen	412.893.458
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Salam babaris		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	393.231.865	0	0	12 Dokumen	412.893.458
	Puskesmas Banua Padang (APBD)						144.587.800	0	0		151.817.190
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 persen	144.587.800	0	0	100 persen	151.817.190
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		BUNGUR		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	144.587.800	0	0	100 persen	151.817.190
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas		BUNGUR		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	144.587.800	0	0	12 Dokumen	151.817.190
	Puskesmas Banua Padang (JKN)						553.751.705	0	0		581.439.290
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 persen	553.751.705	0	0	100 persen	581.439.290
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan		BANUA PADANG		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	100 persen	553.751.705	0	0	100 persen	581.439.290



	UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			BUNGUR	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	553.751.705	0	0	12 Dokumen	581.439.290
	Puskesmas Bakarangan (APBD)						120.198.490	0	0		126.208.415
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 persen	120.198.490	0	0	100 persen	126.208.415
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			BAKARANGAN	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	120.198.490	0	0	100 persen	126.208.415
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			BAKARANGAN	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	120.198.490	0	0	12 Dokumen	126.208.415
	Puskesmas Bakarangan (JKN)						638.631.120	0	0		670.562.676
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 persen	638.631.120	0	0	100 persen	670.562.676
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			BAKARANGAN	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	638.631.120	0	0	100 persen	670.562.676
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			BAKARANGAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	638.631.120	0	0	12 Dokumen	670.562.676
	Puskesmas Pandahan (APBD)						71.500.000	0	0		75.075.000
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										



1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 persen	71.500.000	0	0	100 persen	75.075.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			PANDAHAN	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	71.500.000	0	0	100 persen	75.075.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			PANDAHAN	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	71.500.000	0	0	12 Dokumen	75.075.000
	Puskesmas Pandahan (JKN)						338.100.000	0	0		355.005.000
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 persen	338.100.000	0	0	100 persen	355.005.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			PANDAHAN	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	100 persen	338.100.000	0	0	100 persen	355.005.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			PANDAHAN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	338.100.000	0	0	12 Dokumen	355.005.000
	Puskesmas Tambaruntung (APBD)						104.800.000	0	0		110.040.000
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 persen	104.800.000	0	0	100 persen	110.040.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			PEMATANG KARANGAN HULU	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	104.800.000	0	0	100 persen	110.040.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			Tambaruntung	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	104.800.000	0	0	12 Dokumen	110.040.000
	Puskesmas Tambaruntung (JKN)						455.011.300	0	0		477.761.865
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										



	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 persen	455.011.300	0	0	100 persen	477.761.865
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PEMATANG KARANGAN HULU	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	455.011.300	0	0	100 persen	477.761.865
	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Tambaruntung	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	455.011.300	0	0	12 Dokumen	477.761.865
		Puskesmas Baringin (APBD)					222.200.000	0	0		233.310.000
	X	Semua Urusan									
	X.XX	Semua Bidang									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 persen	222.200.000	0	0	100 persen	233.310.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		BARINGIN B	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	222.200.000	0	0	100 persen	233.310.000
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas		baringin	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	222.200.000	0	0	12 Dokumen	233.310.000
		Puskesmas Baringin (JKN)					694.505.344	0	0		729.230.611
	X	Semua Urusan									
	X.XX	Semua Bidang									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 persen	694.505.344	0	0	100 persen	729.230.611
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		BARINGIN B	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	694.505.344	0	0	100 persen	729.230.611
	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		baringin	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan	12 Dokumen	694.505.344	0	0	12 Dokumen	729.230.611



					Kesehatan Masyarakat						
		Puskesmas Margasari (APBD)					111.620.000	0	0		117.201.000
X		Semua Urusan									
X.XX		Semua Bidang									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 persen	111.620.000	0	0	100 persen	117.201.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		MARGASARI HULU	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	111.620.000	0	0	100 persen	117.201.000
	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas		margasari	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	111.620.000	0	0	12 Dokumen	117.201.000
		Puskesmas Margasari (JKN)					885.600.000	0	0		929.880.000
X		Semua Urusan									
X.XX		Semua Bidang									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 persen	885.600.000	0	0	100 persen	929.880.000
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		MARGASARI HULU	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	885.600.000	0	0	100 persen	929.880.000
	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		margasari	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	885.600.000	0	0	12 Dokumen	929.880.000
		Puskesmas Lokpaikat (APBD)					127.450.000	0	0		133.822.500
X		Semua Urusan									
X.XX		Semua Bidang									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA			PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	100 persen	127.450.000	0	0	100 persen	133.822.500



	KESEHATAN MASYARAKAT				UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			LOKPAIKAT	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	127.450.000	0	0	100 persen	133.822.500
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			lokpaikat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	127.450.000	0	0	12 Dokumen	133.822.500
	Puskesmas Lokpaikat (JKN)						547.148.722	0	0		574.506.158
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 persen	547.148.722	0	0	100 persen	574.506.158
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			LOKPAIKAT	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	547.148.722	0	0	100 persen	574.506.158
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			lokpaikat	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	547.148.722	0	0	12 Dokumen	574.506.158
	Puskesmas Piani (APBD)						117.680.000	0	0		123.564.000
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 persen	117.680.000	0	0	100 persen	123.564.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			PIANI	Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	117.680.000	0	0	100 persen	123.564.000
1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas			PIANI	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	117.680.000	0	0	12 Dokumen	123.564.000
	Puskesmas Piani (JKN)						308.000.000	0	0		323.400.000
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN										



	DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	100 persen	308.000.000	0	0	100 persen	323.400.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		PIANI		Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	308.000.000	0	0	100 persen	323.400.000
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		PIANI		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	308.000.000	0	0	12 Dokumen	323.400.000
	Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul						57.061.184.000	0	0		59.914.243.200
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN										
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan		Waktu Pelayanan Rumah Sakit	12 Bulan	53.100.000.000	0	0	12 Bulan	55.755.000.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Waktu Pelayanan Rumah Sakit	12 Bulan	53.100.000.000	0	0	12 Bulan	55.755.000.000
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1 Dokumen	53.100.000.000	0	0	1 Dokumen	55.755.000.000
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Sesuai Standar	23 Orang	3.961.184.000	0	0	23 Orang	4.159.243.200
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Sesuai Standar	23 Orang	3.961.184.000	0	0	23 Orang	4.159.243.200
1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar			Kabupaten Tapin	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	23 Orang	3.961.184.000	0	0	23 Orang	4.159.243.200
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Sekretariat)						15.526.447.046	0	0		16.302.769.398
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan		TERLAKSANANYA PENUNJANG URUSAN	1 TAHUN	15.526.447.046	0	0	1 TAHUN	16.302.769.398



	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	keuangan	Laporan Kinerja/Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 TAHUN	560.460.000	0	0	1 TAHUN	588.483.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	560.460.000	0	0	1 Laporan	588.483.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	TERLAKSANANYA ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1 TAHUN	11.912.497.233	0	0	1 TAHUN	12.508.122.095
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan	11.894.287.233	0	0	85 Orang/bulan	12.489.001.595
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	11.700.000	0	0	1 Laporan	12.285.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	6.510.000	0	0	1 Laporan	6.835.500
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 TAHUN	1.414.996.200	0	0	1 TAHUN	1.485.746.010
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	200.038.600	0	0	1 Paket	210.040.530
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	58.783.000	0	0	1 Paket	61.722.150
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	56.496.100	0	0	1 Paket	59.320.905
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.495.000	0	0	1 Dokumen	11.019.750
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kabupaten Kapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	203.998.500	0	0	1 Paket	214.198.425
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.020.000	0	0	1 Laporan	9.471.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	876.165.000	0	0	1 Laporan	919.973.250
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 TAHUN	256.192.200	0	0	1 TAHUN	269.001.810



X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	68.377.000	0	0	1 Unit	71.795.850
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	187.815.200	0	0	1 Unit	197.205.960
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 TAHUN	796.348.013	0	0	1 TAHUN	836.165.414
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	11.600.000	0	0	1 Laporan	12.180.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	378.126.000	0	0	1 Laporan	397.032.300
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	406.622.013	0	0	1 Laporan	426.953.114
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 TAHUN	585.953.400	0	0	1 TAHUN	615.251.070
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kabupaten Tapin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	476.374.600	0	0	1 Unit	500.193.330
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	109.578.800	0	0	1 Unit	115.057.740
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Bidang Cipta Karya)					131.600.000.000	0	0		138.180.000.000
X		Semua Urusan									
X.XX		Semua Bidang									
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1.03.03		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya kualitas jaringan air bersih	Meningkatnya Pelayanan Jaringan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatkan akses air minum di Kabupaten Tapin	1000 SR	11.090.000.000	0	0	1000 SR	11.644.500.000
1.03.03.2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		TAPIN	Meningkatkan akses air minum di Kabupaten Tapin	1000 SR	11.090.000.000	0	0	1000 SR	11.644.500.000
1.03.03.2.01.03		Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan		Kabupaten Tapin	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang	300 Liter/Detik	0	0	0	300 Liter/Detik	0



					terbangun						
1.03.03.2.01.04	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			Kab. Tapin	Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat	1500 SR	11.090.000.000	0	0	1500 SR	11.644.500.000
1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Menurunnya Pencemaran Lingkungan		Terbangun sarana dan prasarana persampahan	10 unit	11.420.000.000	0	0	10 unit	11.991.000.000
					Terbangunnya sarana dan prasarana persampahan	10 unit				10 unit	
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Terbangunnya sarana dan prasarana persampahan	10 unit	11.420.000.000	0	0	10 unit	11.991.000.000
1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			Kab. Tapin	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	2000 Rumah Tangga	11.420.000.000	0	0	2000 Rumah Tangga	11.991.000.000
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya kualitas jaringan air bersih	Meningkatnya Pelayanan Jaringan Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		Terbangunnya sarana dan prasarana air limbah di Kabupaten Tapin	200 KK	2.940.000.000	0	0	200 KK	3.087.000.000
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Terbangunnya sarana dan prasarana sanitasi di Kabupaten Tapin	200 KK	2.940.000.000	0	0	200 KK	3.087.000.000
1.03.05.2.01.03	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota			Kab. Tapin	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	200 Rumah Tangga	2.940.000.000	0	0	200 Rumah Tangga	3.087.000.000
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Meningkatnya Kuantitas Bangunan Gedung negara dalam kondisi baik		Pembangunan Gedung Kantor	15 Buah	100.870.000.000	0	0	15 Buah	105.913.500.000
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			TAPIN	Terbangunnya bangunan gedung	15 Buah	100.870.000.000	0	0	15 Buah	105.913.500.000
1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			Kab Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	100.870.000.000	0	0	12 Dokumen	105.913.500.000
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Meningkatnya Kuantitas Bangunan Gedung negara dalam kondisi baik		Terbangunnya gedung kantor	15 Buah	5.280.000.000	0	0	15 Buah	5.544.000.000
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Pembangunan Gedung Kantor Inspektorat Kabupaten Tapin	1 Buah	5.280.000.000	0	0	1 Buah	5.544.000.000
1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan			Kab. Tapin	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan	12 Kawasan	5.280.000.000	0	0	12 Kawasan	5.544.000.000



					Strategis Lainnya						
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Bidang Bina Marga)						389.238.870.016	0	0		408.700.813.517
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Meningkatnya kualitas Jalan dan jembatan Kabupaten		Terlaksananya penyelenggaraan jalan dan jembatan kabupaten	12 bulan	389.238.870.016	0	0	12 bulan	408.700.813.517
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			TAPIN	Terlaksananya penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	12 bulan	389.238.870.016	0	0	12 bulan	408.700.813.517
1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	30 Dokumen	3.750.000.000	0	0	30 Dokumen	3.937.500.000
1.03.10.2.01.02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan			Kabupaten Tapin	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	250000 M ²	30.000.000.000	0	0	250000 M ²	31.500.000.000
1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			Kabupaten Tapin	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	12 Dokumen	1.500.000.000	0	0	12 Dokumen	1.575.000.000
1.03.10.2.01.05	Pembangunan Jalan			Kabupaten Tapin	Panjang Jalan yang Dibangun	7 KM	165.000.000.000	0	0	7 KM	173.250.000.000
1.03.10.2.01.06	Pelebaran Jalan Menuju Standar			Kabupaten Tapin	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	2 KM	47.000.000.000	0	0	2 KM	49.350.000.000
1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan			Kabupaten Tapin	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	40 KM	76.000.000.000	0	0	40 KM	79.800.000.000
1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan			Kabupaten Tapin	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	15 KM	2.500.000.000	0	0	15 KM	2.625.000.000
1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan			Kabupaten Tapin	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	0.5 KM	5.488.870.016	0	0	0.5 KM	5.763.313.517
1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan			Kabupaten Tapin	Panjang Jembatan yang Dibangun	250 M	50.000.000.000	0	0	250 M	52.500.000.000
1.03.10.2.01.16	Penggantian Jembatan			Kabupaten Tapin	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	100 M	4.000.000.000	0	0	100 M	4.200.000.000
1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	30 Dokumen	4.000.000.000	0	0	30 Dokumen	4.200.000.000
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Bidang Sumber Daya Air)						91.100.000.000	0	0		95.655.000.000
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										



1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Meningkatkan jaringan irigasi dan bangunan air		Tercapainya Normalisasi/ Restorasi Sungai	322 KM	91.100.000.000	0	0	322 KM	95.655.000.000
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Target Normalisasi Sungai	322 KM	58.820.000.000	0	0	322 KM	61.761.000.000
1.03.02.2.01.46	Normalisasi/Restorasi Sungai			Kabupaten Tapin	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	322 KM	30.360.000.000	0	0	322 KM	31.878.000.000
1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			Kabupaten Tapin	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	2,208 KM	13.740.000.000	0	0	2,208 KM	14.427.000.000
1.03.02.2.01.11	Pembangunan Pintu Air/Bendung PengendaliBanjir			Kabupaten Tapin	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	74 Unit	14.720.000.000	0	0	74 Unit	15.456.000.000
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Tercapainya Normnalisasi Sungai	322 KM	32.280.000.000	0	0	322 KM	33.894.000.000
1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan			Kabupaten Tapin	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	3,680 KM	24.920.000.000	0	0	3,680 KM	26.166.000.000
1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan IrigasiPermukaan			Kabupaten Tapin	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1,840 KM	7.360.000.000	0	0	1,840 KM	7.728.000.000
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Bidang Tata Ruang)						2.169.999.900	0	0		2.278.499.895
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan		Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	80 Persen	2.169.999.900	0	0	80 Persen	2.278.499.895
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			TAPIN	Terlaksananya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	2 Dokumen	502.531.000	0	0	2 Dokumen	527.657.550
1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTRKabupaten/Kota			Kec. CLU dan Kec. CLS	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	502.531.000	0	0	2 Dokumen	527.657.550



1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten	2 Dokumen	532.616.000	0	0	2 Dokumen	559.246.800
1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			Kec. CLU dan Kec. CLS	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	532.616.000	0	0	2 Dokumen	559.246.800
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	6 Rapat	377.577.500	0	0	6 Rapat	396.456.375
1.03.12.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	6 Dokumen	269.063.700	0	0	6 Dokumen	282.516.885
1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang			Kab. Tapin	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	1 (Satu) Aplikasi Sistem Informasi Dokumen	108.513.800	0	0	1 (Satu) Aplikasi Sistem Informasi Dokumen	113.939.490
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	12 Rapat	757.275.400	0	0	12 Rapat	795.139.170
1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	12 Dokumen	757.275.400	0	0	12 Dokumen	795.139.170
	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Bidang Jasa Konstruksi)						235.381.000	0	0		247.150.050
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Meningkatkan kualitas jasa konstruksi		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	6 Orang	235.381.000	0	0	6 Orang	247.150.050
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			TAPIN	Terselenggarana Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	12 BULAN	63.521.000	0	0	12 BULAN	66.697.050
1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			Kabupaten Tapin	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	50 Orang	63.521.000	0	0	50 Orang	66.697.050
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)			TAPIN	Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	12 BULAN	171.860.000	0	0	12 BULAN	180.453.000
1.03.11.2.03.03	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi			Kabupaten Tapin	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa	6 Orang	171.860.000	0	0	6 Orang	180.453.000



					Konstruksi							
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan						42.230.341.683	0	0		44.341.858.767	
X	Semua Urusan											
X.XX	Semua Bidang											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100%	5.643.141.683	0	0	100%	5.925.298.767
						Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100%				100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN		Persentase laporan monitoring dan kinerja yang dilaporkan tepat waktu	100%	10.105.000	0	0	100%	10.610.250
						Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100%				100%	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kabupaten Tapin		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.365.000	0	0	3 Dokumen	2.483.250
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Kabupaten Tapin		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1.100.000	0	0	1 Dokumen	1.155.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD			Kabupaten Tapin		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	1.100.000	0	0	1 Dokumen	1.155.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kabupaten Tapin		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	1.150.000	0	0	1 Dokumen	1.207.500
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Kabupaten Tapin		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1.150.000	0	0	1 Dokumen	1.207.500
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kabupaten Tapin		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.160.000	0	0	4 Laporan	2.268.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kabupaten Tapin		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.080.000	0	0	1 Laporan	1.134.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN		Terlaksana dan Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	2.874.086.584	0	0	100%	3.017.790.913
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Tapin		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	266 Orang/bulan	2.870.066.584	0	0	266 Orang/bulan	3.013.569.913
	Koordinasi dan					Jumlah Laporan Keuangan						



X.XX.01.2.02.07	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kabupaten Tapin	Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.010.000	0	0	1 Laporan	2.110.500
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.010.000	0	0	1 Laporan	2.110.500
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	1.791.508.400	0	0	100%	1.881.083.820
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	144.331.300	0	0	2 Paket	151.547.865
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	181.136.700	0	0	1 Paket	190.193.535
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.762.400	0	0	1 Paket	53.300.520
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	13.435.000	0	0	1 Paket	14.106.750
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.750.000	0	0	12 Laporan	2.887.500
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.399.093.000	0	0	12 Laporan	1.469.047.650
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase sub unit kerja yang mendapatkan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	396.352.199	0	0	100%	416.169.809
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	46.400.000	0	0	12 Laporan	48.720.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	85.098.000	0	0	12 Laporan	89.352.900
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	264.854.199	0	0	12 Laporan	278.096.909
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase tersedianya penunjang operasional dan pemeliharaan barang milik daerah	100%	571.089.500	0	0	100%	599.643.975
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kabupaten Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	41.490.000	0	0	1 Unit	43.564.500
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kabupaten Tapin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit	237.430.000	0	0	16 Unit	249.301.500
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit	42.739.500	0	0	37 Unit	44.876.475



X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	48.550.000	0	0	1 Unit	50.977.500
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.880.000	0	0	1 Unit	210.924.000
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Berkurangnya kawasan kumuh		Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota	100%	5.836.800.000	0	0	100%	6.128.640.000
					Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100%				100%	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			TAPIN	persentase dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang tersedia	100%	250.000.000	0	0	100%	262.500.000
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	0	0	1 Dokumen	52.500.000
1.04.02.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen	50.000.000	0	0	1 Dokumen	52.500.000
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen	50.000.000	0	0	1 Dokumen	52.500.000
1.04.02.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen	50.000.000	0	0	1 Dokumen	52.500.000
1.04.02.2.01.05	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen	50.000.000	0	0	1 Dokumen	52.500.000
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase tingkat pemahaman peserta sosialisasi	90%	61.800.000	0	0	90%	64.890.000
					Persentase tingkat pemahaman peserta sosialisasi	90%				90%	
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis			Kabupaten Tapin	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi	200 Orang	30.900.000	0	0	200 Orang	32.445.000



	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana				Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota						
1.04.02.2.02.02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan			Kabupaten Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	200 Orang	30.900.000	0	0	200 Orang	32.445.000
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100%	5.525.000.000	0	0	100%	5.801.250.000
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			Kabupaten Tapin	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	50 Unit Rumah	1.025.000.000	0	0	50 Unit Rumah	1.076.250.000
1.04.02.2.03.05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terbangun	40 Unit Rumah	3.500.000.000	0	0	40 Unit Rumah	3.675.000.000
1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			Kabupaten Tapin	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	10 Unit Rumah	900.000.000	0	0	10 Unit Rumah	945.000.000
1.04.02.2.03.02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	0	0	1 Dokumen	105.000.000
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Berkurangnya kawasan kumuh		Persentase penurunan kawasan kumuh	1,20%	4.879.450.000	0	0	1,20%	5.123.422.500
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			TAPIN	Persentase pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang berada pada fungsi hunian	80%	40.000.000	0	0	80%	42.000.000
1.04.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik			Kabupaten Tapin		1	40.000.000	0	0	1	42.000.000
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			TAPIN	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh	100%	100.000.000	0	0	100%	105.000.000
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	100.000.000	0	0	1 Dokumen	105.000.000
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			TAPIN	persentase luasan kumuh yang tertangani	1,20%	4.739.450.000	0	0	1,20%	4.976.422.500
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh			Kabupaten Tapin	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1 Dokumen	100.000.000	0	0	1 Dokumen	105.000.000
1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta	1 Dokumen	49.450.000	0	0	1 Dokumen	51.922.500



					PSU						
1.04.03.2.03.07	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	1 Dokumen	100.000.000	0	0	1 Dokumen	105.000.000
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			Kabupaten Tapin	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	180 Unit Rumah	4.490.000.000	0	0	180 Unit Rumah	4.714.500.000
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Berkurangnya kawasan kumuh		Persentase Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni	0,28%	8.425.950.000	0	0	0,28%	8.847.247.500
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	persentase realisasi peningkatan kualitas RTLH di luar kawasan kumuh sesuai target	100%	8.425.950.000	0	0	100%	8.847.247.500
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			Kabupaten Tapin	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	373 Unit Rumah	8.376.500.000	0	0	373 Unit Rumah	8.795.325.000
1.04.04.2.01.02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1 Dokumen	49.450.000	0	0	1 Dokumen	51.922.500
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Berkurangnya kawasan kumuh		Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik	2,64%	15.125.000.000	0	0	2,64%	15.881.250.000
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			TAPIN	Persentase perumahan terfasilitasi kecukupan PSU dalam kondisi berfungsi baik	2,64%	15.125.000.000	0	0	2,64%	15.881.250.000
					Persentase Developer Perumahan yang Menyerahkan Fasilitas Umum/Fasilitas Khusus.	30%				30%	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	50.000.000	0	0	1 Dokumen	52.500.000
1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			Kabupaten Tapin	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	10 Lokasi	14.975.000.000	0	0	10 Lokasi	15.723.750.000
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	50.000.000	0	0	1 Laporan	52.500.000
1.04.05.2.01.05	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	1 Dokumen	50.000.000	0	0	1 Dokumen	52.500.000
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Berkurangnya kawasan kumuh		persentase.....	100%	50.000.000	0	0	100%	52.500.000



	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN										
1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil			TAPIN	Persentase...	100%	50.000.000	0	0	100%	52.500.000
1.04.06.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil			tapin	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	12 Laporan	50.000.000	0	0	12 Laporan	52.500.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Tertanganinya konflik pertanahan		Persentase advokasi pertanahan yang berhasil	100%	300.000.000	0	0	100%	315.000.000
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	laporan persoalan pertanahan yang difasilitasi	100%	300.000.000	0	0	100%	315.000.000
2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50.000.000	0	0	1 Dokumen	52.500.000
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	250.000.000	0	0	1 Berita Acara	262.500.000
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Tertanganinya konflik pertanahan		Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan lokasi	100%	1.100.000.000	0	0	100%	1.155.000.000
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan luas	100%	1.100.000.000	0	0	100%	1.155.000.000
2.10.05.2.01.01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	1 Dokumen	100.000.000	0	0	1 Dokumen	105.000.000
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1.000.000.000	0	0	1 Dokumen	1.050.000.000
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Tertanganinya konflik pertanahan		Persentase penataan administrasi tanah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	870.000.000	0	0	100%	913.500.000



2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase usulan penyertifikatan aset tanah SKPD terverifikasi BPN	100%	870.000.000	0	0	100%	913.500.000
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	750.000.000	0	0	1 Laporan	787.500.000
2.10.10.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	120.000.000	0	0	1 Dokumen	126.000.000
	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kebakaran						12.282.956.552	0	0		12.897.104.380
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	7.957.157.452	0	0	1 Tahun	8.355.015.325
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	1 Tahun	8.875.000	0	0	1 Tahun	9.318.750
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	8.875.000	0	0	10 Laporan	9.318.750
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Tahun	6.236.012.712	0	0	1 Tahun	6.547.813.348
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/bulan	6.224.430.512	0	0	43 Orang/bulan	6.535.652.038
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	6.212.000	0	0	4 Laporan	6.522.600
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	5.370.200	0	0	4 Laporan	5.638.710
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	866.799.900	0	0	1 Tahun	910.139.895
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	650.000.000	0	0	150 Laporan	682.500.000



X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	122.835.300	0	0	1 Paket	128.977.065
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	22.691.200	0	0	1 Paket	23.825.760
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	11.515.600	0	0	4 Paket	12.091.380
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	43.867.800	0	0	3 Paket	46.061.190
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	15.890.000	0	0	12 Laporan	16.684.500
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	225.914.840	0	0	1 Tahun	237.210.582
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	33 Unit	132.402.800	0	0	33 Unit	139.022.940
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	93.512.040	0	0	7 Unit	98.187.642
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	155.200.800	0	0	1 Tahun	162.960.840
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	112.000.800	0	0	12 Laporan	117.600.840
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43.200.000	0	0	12 Laporan	45.360.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	464.354.200	0	0	12 Bulan	487.571.910
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	418.864.600	0	0	7 Unit	439.807.830
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	30.689.600	0	0	20 Unit	32.224.080
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	14.800.000	0	0	1 Unit	15.540.000
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya keamanan daerah	Meningkatkan stabilitas ketenteraman & ketertiban masyarakat		Peningkatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	1 Tahun	3.811.399.000	0	0	1 Tahun	4.001.968.950
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan			KALIMANTAN	Persentase penurunan	25%	3.597.299.000	0	0	25%	3.777.163.950



	Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			SELATAN;TAPIN	gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat						
1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, danPengawalan			Kabupaten Tapin	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	50 Kasus	3.244.599.000	0	0	50 Kasus	3.406.828.950
1.05.02.2.01.02	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			Kabupaten Tapin	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	24 Kasus	22.500.000	0	0	24 Kasus	23.625.000
1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4 Dokumen	68.000.000	0	0	4 Dokumen	71.400.000
1.05.02.2.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			Kabupaten Tapin	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	146 Orang	253.600.000	0	0	146 Orang	266.280.000
1.05.02.2.01.06	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokumen	8.600.000	0	0	4 Dokumen	9.030.000
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			TAPIN	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Daerah	25%	214.100.000	0	0	25%	224.805.000
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan PerangkatDaerah			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	2.930.300	0	0	13 Dokumen	3.076.815
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel	100%	2.829.082.355	0	0	100%	2.970.536.473
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	2.825.216.655	0	0	12 Orang/bulan	2.966.477.488
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.040.900	0	0	1 Laporan	1.092.945
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	2.824.800	0	0	4 Laporan	2.966.040
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100 persen	710.702.900	0	0	100 persen	746.238.045



X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.428.200	0	0	1 Paket	6.749.610
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	36.148.500	0	0	1 Paket	37.955.925
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kab. Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	70.000.000	0	0	1 Paket	73.500.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kab. Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	33.000.000	0	0	1 Paket	34.650.000
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		Kab. Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	6.086.200	0	0	1 Paket	6.390.510
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Kab. Tapin	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan	5.995.000	0	0	5 Laporan	6.294.750
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	553.045.000	0	0	20 Laporan	580.697.250
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		TAPIN	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 persen	161.653.300	0	0	100 persen	169.735.965
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	146.538.300	0	0	20 Unit	153.865.215
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Tapin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	15.115.000	0	0	5 Unit	15.870.750
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		TAPIN	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	567.260.400	0	0	100 persen	595.623.420
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.366.400	0	0	1 Laporan	2.484.720
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	494.700.000	0	0	12 Laporan	519.435.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	70.194.000	0	0	12 Laporan	73.703.700
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		TAPIN	Persentase Aset Terpeliharanya Barang Milik Daerah	100 persen	120.751.400	0	0	100 persen	126.788.970
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kab. Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit	95.191.200	0	0	8 Unit	99.950.760
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	25.560.200	0	0	25 Unit	26.838.210
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								



1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya keamanan daerah	Meningkatkan stabilitas ketentraman & ketertiban masyarakat		Menurunkan Indeks Risiko Bencana	0,31 skor	919.745.528	0	0	0,31 skor	965.732.804
					Meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana	0,47 skor				0,47 skor	
					Memastikan Pasca Bencana tertangani	100 persen				100 persen	
					Tertanganinya Kebakaran Hutan dan Lahan yang Terbakar	25 persen				25 persen	
					Tertanganinya Kebakaran Hutan dan Lahan yang di Bakar	15 persen				15 persen	
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Informasi Kebencanaan	100 persen	39.649.900	0	0	100 persen	41.632.395
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)			Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	160 Orang	39.649.900	0	0	160 Orang	41.632.395
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			TAPIN	Persentase Desa/kelurahan Tangguh Bencana	100 persen	756.706.628	0	0	100 persen	794.541.959
					Persentase Masyarakat dan Aparatur yang Terlatih untuk Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 persen				100 persen	
1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			Kab. tapin	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	40 Orang	13.018.000	0	0	40 Orang	13.668.900
1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			Kab. Tapin	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	1 Kawasan	24.160.000	0	0	1 Kawasan	25.368.000
1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	12 Dokumen	578.061.586	0	0	12 Dokumen	606.964.665
1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen	100.000.000	0	0	1 Dokumen	105.000.000
1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Kab. Tapin	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	2 Unit	41.467.042	0	0	2 Unit	43.540.394
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			TAPIN	Persentase Penanganan Darurat Bencana	100 persen	96.619.000	0	0	100 persen	101.449.950
					Persentase Sarana Prasarana dan SDM dalam Penanganan Bencana	100 persen				100 persen	



					Persentase Korban Bencana yang Tertangani	100 persen				100 persen	
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 Orang	96.619.000	0	0	50 Orang	101.449.950
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			TAPIN	Persentase Penanganan Pemulihan Pasca Bencana	100 persen	26.770.000	0	0	100 persen	28.108.500
1.05.03.2.04.06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1 Dokumen	26.770.000	0	0	1 Dokumen	28.108.500
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						5.829.666.378	0	0		6.121.149.697
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase terlaksananya kegiatan penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	3.678.708.428	0	0	100 Persen	3.862.643.849
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN UTARA	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 Persen	7.271.250	0	0	100 Persen	7.634.813
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Tapin Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	7.271.250	0	0	13 Laporan	7.634.813
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.625.112.078	0	0	100 Persen	2.756.367.682
					Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen				100 Persen	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			TAPIN UTARA	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/bulan	2.620.324.078	0	0	18 Orang/bulan	2.751.340.282
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			TAPIN UTARA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.213.000	0	0	1 Laporan	3.373.650
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			TAPIN UTARA	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.575.000	0	0	1 Laporan	1.653.750



X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	634.100.006	0	0	100 Persen	665.805.006
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN UTARA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.168.580	0	0	1 Paket	8.577.009
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			TAPIN UTARA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	73.440.766	0	0	1 Paket	77.112.804
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			TAPIN UTARA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	51.650.130	0	0	1 Paket	54.232.637
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			TAPIN UTARA	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	13.240.500	0	0	1 Paket	13.902.525
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			TAPIN UTARA	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	13.935.915	0	0	1 Paket	14.632.711
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			TAPIN UTARA	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.224.800	0	0	12 Laporan	5.486.040
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			TAPIN UTARA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	468.439.315	0	0	12 Laporan	491.861.281
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	76.980.558	0	0	100 Persen	80.829.586
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			TAPIN UTARA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	76.980.558	0	0	11 Unit	80.829.586
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	239.693.470	0	0	100 Persen	251.678.144
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			TAPIN UTARA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.350.740	0	0	12 Laporan	2.468.277
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			TAPIN UTARA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	38.682.000	0	0	12 Laporan	40.616.100
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			TAPIN UTARA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	198.660.730	0	0	12 Laporan	208.593.767
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	95.551.066	0	0	12 Bulan	100.328.619
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			TAPIN UTARA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	22 Unit	21.770.500	0	0	22 Unit	22.859.025
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			TAPIN UTARA	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	2.385.600	0	0	3 Unit	2.504.880
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			TAPIN UTARA	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.893.275	0	0	1 Unit	53.437.939
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			TAPIN UTARA	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	20.501.691	0	0	10 Unit	21.526.776
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM										



8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK										
8.01.02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya keamanan daerah	Meningkatkan stabilitas ketentraman & ketertiban masyarakat		Terlaksananya Pelaksanaan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Paket	225.524.055	0	0	1 Paket	236.800.258
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			TAPIN UTARA	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1 tahun	225.524.055	0	0	1 tahun	236.800.258
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Rantau, Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 Orang	158.834.055	0	0	200 Orang	166.775.758
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			Rantau, Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	66.690.000	0	0	100 Orang	70.024.500
8.01.03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya keamanan daerah	Meningkatkan stabilitas ketentraman & ketertiban masyarakat		Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100 Persen	1.301.579.095	0	0	100 Persen	1.366.658.050
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan			TAPIN UTARA	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	12 Bulan	1.301.579.095	0	0	12 Bulan	1.366.658.050
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Polit			Rantau, Kab. Tapin	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang	12 Dokumen	1.092.770.000	0	0	12 Dokumen	1.147.408.500



					Disusun						
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Rantau, Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150 Orang	123.273.950	0	0	150 Orang	129.437.648
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			Rantau, Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	50 Orang	50.399.895	0	0	50 Orang	52.919.890
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Sit			Rantau, Kab. Tapin	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 Laporan	35.135.250	0	0	20 Laporan	36.892.013
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya keamanan daerah	Meningkatkan stabilitas ketentraman & ketertiban masyarakat		Terlaksananya Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Paket	112.821.765	0	0	1 Paket	118.462.853
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			TAPIN UTARA	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	12 Bulan	112.821.765	0	0	12 Bulan	118.462.853
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			Rantau, Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	150 Orang	76.806.870	0	0	150 Orang	80.647.214
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi			Rantau, Kab. Tapin	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,	4 Laporan	36.014.895	0	0	4 Laporan	37.815.640



	Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya keamanan daerah	Meningkatkan stabilitas ketentraman & ketertiban masyarakat		Terlaksananya Pelaksanaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Paket	203.680.870	0	0	1 Paket	213.864.914
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			TAPIN	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	100%	203.680.870	0	0	100%	213.864.914
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			TAPIN UTRA	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	190 Orang	160.914.370	0	0	190 Orang	168.960.089
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			TAPIN UTARA	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	126 Orang	42.766.500	0	0	126 Orang	44.904.825
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya keamanan daerah	Meningkatkan stabilitas ketentraman & ketertiban masyarakat		Terlaksananya Pelaksanaan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Paket	307.352.165	0	0	1 Paket	322.719.773
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			TAPIN	Persentase Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100 Persen	307.352.165	0	0	100 Persen	322.719.773
8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di			TAPIN UTARA	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di	1735 Orang	189.929.770	0	0	1735 Orang	199.426.259



	Daerah			Daerah							
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			Tapin Utara	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	69 Orang	29.919.895	0	0	69 Orang	31.415.890
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan			TAPIN UTARA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2 Laporan	58.601.250	0	0	2 Laporan	61.531.313
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN UTARA	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	28.901.250	0	0	1 Dokumen	30.346.313
	Dinas Sosial						19.903.298.194	0	0		20.898.463.104
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	4.876.690.116	0	0	100%	5.120.524.622
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD sesuai standar	100%	9.488.600	0	0	100%	9.963.030
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Dinas Sosial	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	9.488.600	0	0	13 Laporan	9.963.030
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Perentase dokumen administrasi keuangan SOPD yang akuntabel	100%	3.238.209.916	0	0	100%	3.400.120.412
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	3.232.269.916	0	0	19 Orang/bulan	3.393.883.412
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Dinas Sosial	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1 Laporan	2.970.000	0	0	1 Laporan	3.118.500



					Keuangan Akhir Tahun SKPD						
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Dinas Sosial		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.970.000	0	0	1 Laporan	3.118.500
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		TAPIN		Persentase terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100%	1.194.874.300	0	0	100%	1.254.618.015
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Dinas Sosial		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.049.000	0	0	1 Paket	2.151.450
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Dinas Sosial		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40 Paket	127.129.400	0	0	40 Paket	133.485.870
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Dinas Sosial		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	83.323.600	0	0	3 Paket	87.489.780
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Dinas Sosial		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13.090.600	0	0	2 Paket	13.745.130
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		Dinas Sosial		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1.823.700	0	0	1 Paket	1.914.885
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Dinas Sosial		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	36 Laporan	48.365.000	0	0	36 Laporan	50.783.250
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Dinas Sosial		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	919.093.000	0	0	36 Laporan	965.047.650
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		TAPIN		Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah	100%	40.200.000	0	0	100%	42.210.000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Tapin		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25.200.000	0	0	2 Unit	26.460.000
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kab. Tapin		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.000.000	0	0	1 Unit	15.750.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		TAPIN		Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	251.006.800	0	0	100%	263.557.140
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Dinas Sosial		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	580.000	0	0	4 Laporan	609.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Dinas Sosial		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	87.132.000	0	0	4 Laporan	91.488.600
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Dinas Sosial		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	163.294.800	0	0	4 Laporan	171.459.540
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		TAPIN		Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	142.910.500	0	0	100%	150.056.025
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak		Dinas Sosial		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	8 Unit	118.652.500	0	0	8 Unit	124.585.125



	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Dinas Sosial	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	53 Unit	14.200.000	0	0	53 Unit	14.910.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Dinas Sosial	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	10.058.000	0	0	2 Unit	10.560.900
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Menurunnya Kemiskinan	Meningkatnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melayani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terampil	100%	2.086.762.220	0	0	100%	2.191.100.331
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	50%	2.086.762.220	0	0	50%	2.191.100.331
1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Dinas Sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	35 Orang	61.080.000	0	0	35 Orang	64.134.000
1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			Dinas Sosial	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	155.795.000	0	0	12 Orang	163.584.750
1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			Dinas Sosial	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga	1.833.577.220	0	0	4 Lembaga	1.925.256.081
1.06.02.2.03.05	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			Dinas Sosial	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Sertifikat	36.310.000	0	0	11 Sertifikat	38.125.500
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Menurunnya Kemiskinan			Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan Bantuan Sosial	43%	5.506.076.300	0	0	43%	5.781.380.115
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			TAPIN	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan distribusi Bantuan Sosial	43%	5.474.836.300	0	0	43%	5.748.578.115
1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan			Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan	905 Orang	4.961.874.500	0	0	905 Orang	5.209.968.225



					Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota						
1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang			Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	60 Orang	170.361.800	0	0	60 Orang	178.879.890
1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu			Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	180.130.000	0	0	20 Orang	189.136.500
1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	45.000.000	0	0	20 Orang	47.250.000
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			Dinas Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	55.470.000	0	0	20 Orang	58.243.500
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			Dinas Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10.000.000	0	0	20 Orang	10.500.000
1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	12.000.000	0	0	20 Orang	12.600.000
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10.000.000	0	0	20 Orang	10.500.000
1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan			Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10.000.000	0	0	20 Orang	10.500.000
1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10.000.000	0	0	20 Orang	10.500.000
1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan			Dinas Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	10.000.000	0	0	20 Orang	10.500.000
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			TAPIN	Persentase PPKS Terlantar (Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis) yang mendapatkan distribusi Bantuan Sosial	100%	31.240.000	0	0	100%	32.802.000



1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			Dinas Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	7.240.000	0	0	20 Orang	7.602.000
1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	6.000.000	0	0	20 Orang	6.300.000
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	6.000.000	0	0	20 Orang	6.300.000
1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	6.000.000	0	0	20 Orang	6.300.000
1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			Dinas Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	6.000.000	0	0	20 Orang	6.300.000
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Menurunnya Kemiskinan	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Persentase Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	74,42%	1.574.734.700	0	0	74,42%	1.653.471.435
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			TAPIN	Persentase terpeliharanya anak terlantar	100%	29.142.500	0	0	100%	30.599.625
1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar			Kabupaten Tapin	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang	24.242.500	0	0	25 Orang	25.454.625
1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar			Kabupaten Tapin	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	4.900.000	0	0	20 Orang	5.145.000
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mutakhir	88,56%	1.545.592.200	0	0	88,56%	1.622.871.810
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	5000 Orang	249.560.000	0	0	5000 Orang	262.038.000
1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	5 Keluarga	241.580.000	0	0	5 Keluarga	253.659.000
1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			Kabupaten Tapin	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	700 Keluarga	171.375.200	0	0	700 Keluarga	179.943.960
1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			Kabupaten Tapin	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	70 Orang	883.077.000	0	0	70 Orang	927.230.850



					Kewenangan Kabupaten/Kota						
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Menurunnya Kemiskinan	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani	100%	5.811.490.500	0	0	100%	6.102.065.025
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100%	5.623.614.100	0	0	100%	5.904.794.805
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan			Kabupaten Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	195.064.000	0	0	500 Orang	204.817.200
1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang			Kabupaten Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	218.050.000	0	0	500 Orang	228.952.500
1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan			Kabupaten Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	5.210.500.100	0	0	300 Orang	5.471.025.105
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase terselenggaranya pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	100%	187.876.400	0	0	100%	197.270.220
1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana			Kabupaten Tapin	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Kampung	16.706.400	0	0	1 Kampung	17.541.720
1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			Kabupaten Tapin	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	171.170.000	0	0	50 Orang	179.728.500
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Menurunnya Kemiskinan	Meningkatnya Perlindungan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) dalam kondisi baik	100%	47.544.358	0	0	100%	49.921.576
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dipelihara dalam kondisi baik	100%	47.544.358	0	0	100%	49.921.576
1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	47.544.358	0	0	1 Makam	49.921.576
	Dinas Tenaga Kerja						6.659.192.195	0	0		6.992.151.805
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
			Meningkatnya Penyediaan Administrasi								



X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		indeks kepuasan terhadap layanan kesekretariatan	12 bulan	4.364.862.395	0	0	12 bulan	4.583.105.515
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Meningkatnya Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 persen	20.000.000	0	0	90 persen	21.000.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	15.000.000	0	0	10 Laporan	15.750.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.000.000	0	0	1 Dokumen	5.250.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan dan Pelaporan	90 persen	3.296.883.095	0	0	90 persen	3.461.727.250
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 Orang/bulan	3.281.883.095	0	0	364 Orang/bulan	3.445.977.250
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.000	0	0	1 Laporan	5.250.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	10.000.000	0	0	1 Laporan	10.500.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase meningkatnya pelayanan administrasi umum perkantoran	95 persen	581.030.200	0	0	95 persen	610.081.710
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	85.000.000	0	0	10 Paket	89.250.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	80.000.000	0	0	10 Paket	84.000.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	13.000.000	0	0	2 Paket	13.650.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	403.030.200	0	0	100 Laporan	423.181.710
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Persentase meningkatnya pelayanan pemenuhan dan penatausahaan sarana dan prasarana SKPD	90 persen	102.336.300	0	0	90 persen	107.453.115
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	102.336.300	0	0	15 Unit	107.453.115
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen	114.650.000	0	0	100 persen	120.382.500



X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	72.000.000	0	0	4 Laporan	75.600.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	42.650.000	0	0	2 Laporan	44.782.500
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Meningkatnya persentase pelayanan dan pemeliharaan barang milik daerah	12 Bulan	249.962.800	0	0	12 Bulan	262.460.940
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	33.842.800	0	0	2 Unit	35.534.940
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	15.000.000	0	0	5 Unit	15.750.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	201.120.000	0	0	2 Unit	211.176.000
2	PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Menurunnya Pengangguran	Meningkatkan penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan serta dokumen perencanaan perangkat daerah		Dokumen Rencana Tenaga Kerja	1 Dokumen	150.000.000	0	0	1 Dokumen	157.500.000
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			TAPIN	Dokumen Rencana Tenaga Kerja	1 Dokumen	150.000.000	0	0	1 Dokumen	157.500.000
2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro			Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	150.000.000	0	0	1 Dokumen	157.500.000
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Menurunnya Pengangguran	Meningkatnya Kualitas Angkatan Kerja		Persentase Angkatan Kerja Terlatih yang Lulus Uji Kompetensi	75%	873.000.000	0	0	75%	916.650.000
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			TAPIN	Persentase Angkatan Kerja terlatih yang lulus Uji Kompetensi	75%	850.000.000	0	0	75%	892.500.000
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi			Kabupaten Tapin	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	100 Orang	850.000.000	0	0	100 Orang	892.500.000
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			TAPIN	Persentase meningkatnya lembaga LPPKS yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Kualitas Lembaga / LPKS	70%	23.000.000	0	0	70%	24.150.000
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			Kabupaten Tapin	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15 Lembaga	23.000.000	0	0	15 Lembaga	24.150.000
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Menurunnya Pengangguran	Meningkatnya kesempatan kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70%	886.610.000	0	0	70%	930.940.500
2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi informasi pelayanan antar kerja	80%	187.000.000	0	0	80%	196.350.000



2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja			Kabupaten Tapin	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	100 Orang	17.000.000	0	0	100 Orang	17.850.000
2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi PencariKerja			Kabupaten Tapin	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100 Orang	20.000.000	0	0	100 Orang	21.000.000
2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja			Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	16 Orang	150.000.000	0	0	16 Orang	157.500.000
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			TAPIN	Persentase meningkatnya administrasi pelayanan dan penyediaan infomrasi pasar kerja online	85%	100.000.000	0	0	85%	105.000.000
2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar KerjaOnline			Kabupaten Tapin	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1300 Orang	100.000.000	0	0	1300 Orang	105.000.000
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Meningkatnya Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	100%	599.610.000	0	0	100%	629.590.500
					Persentase meningkatnya informasi perlindungan dan Kompetensi CPMI dan PMI	80%				80%	
2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)			Dinas Tenaga Kerja	Jumlah CPMI/PMI yang Diilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	16 Orang	507.000.000	0	0	16 Orang	532.350.000
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran			Dinas Tenaga Kerja	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	40 Orang	10.000.000	0	0	40 Orang	10.500.000
2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia PurnaPenempatan			Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	12 Orang	82.610.000	0	0	12 Orang	86.740.500
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Menurunnya Pengangguran	Meningkatnya kualitas hubungan industrial dan ketenagakerjaan		Meningkatnya Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	90 Persen	384.719.800	0	0	90 Persen	403.955.790
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola yang Layak	90 persen	228.089.800	0	0	90 persen	239.494.290
2.07.05.2.01.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	110 Perusahaan	8.500.000	0	0	110 Perusahaan	8.925.000
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan			Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	219.589.800	0	0	5 Laporan	230.569.290
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Pengusaha/Pekerja yang Mendapatkan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	90 Persen	156.630.000	0	0	90 Persen	164.461.500
2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan			Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Perselisihan yang	10 Perkara	84.000.000	0	0	10 Perkara	88.200.000



	Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				Dicegah						
2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Dinas Tenaga Kerja	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	10 Perkara	72.630.000	0	0	10 Perkara	76.261.500
	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak						7.423.692.961	0	0		7.794.877.609
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	100%	5.763.999.281	0	0	100%	6.052.199.245
					Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%				100%	
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%				100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi SKPD	13 Buah	15.000.000	0	0	13 Buah	15.750.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	15.000.000	0	0	13 Laporan	15.750.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Laporan Keuangan semestaran dan akhir tahun	2 Buah	2.596.833.469	0	0	2 Buah	2.726.675.142
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			TAPIN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	2.586.825.369	0	0	14 Orang/bulan	2.716.166.637
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			TAPIN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.000.300	0	0	1 Laporan	5.250.315
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			TAPIN	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	5.007.800	0	0	1 Laporan	5.258.190
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Bulan	2.184.598.524	0	0	12 Bulan	2.293.828.450



					Waktu ketersediaan barang cetakan dan Penggandaan	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu ketersediaan Konsumsi Harian Pegawai Rapat dan Tamu	11 Bulan				11 Bulan	
					Waktu Ketersediaan Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	12 Bulan				12 Bulan	
					waktu Penyediaan Jasa Kebersihan keamanan kantor dan Bahan Pembersih	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah Pelaksanaan Tapin Expo	1 Kali				1 Kali	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.608.224	0	0	1 Paket	9.038.635
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			TAPIN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	58.657.400	0	0	12 Paket	61.590.270
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			TAPIN	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	80.208.300	0	0	12 Paket	84.218.715
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			TAPIN	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12.623.700	0	0	12 Paket	13.254.885
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			TAPIN	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	2.237.900	0	0	1 Paket	2.349.795
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			TAPIN	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.750.000	0	0	12 Laporan	2.887.500
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			TAPIN	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	2.019.513.000	0	0	12 Laporan	2.120.488.650
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 Buah	179.655.250	0	0	24 Buah	188.638.013
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			TAPIN	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 Unit	95.614.000	0	0	14 Unit	100.394.700
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			TAPIN	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	34 Unit	84.041.250	0	0	34 Unit	88.243.313
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Benda Pos dan Jasa Pengiriman	12 Bulan	212.349.100	0	0	12 Bulan	222.966.555
					Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			TAPIN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.160.000	0	0	12 Laporan	1.218.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			TAPIN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	69.452.300	0	0	12 Laporan	72.924.915
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			TAPIN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	141.736.800	0	0	12 Laporan	148.823.640



X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	12 Bulan	575.562.938	0	0	12 Bulan	604.341.085
					Waktu Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Kerja	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			TAPIN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	95.850.900	0	0	5 Unit	100.643.445
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			TAPIN	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	6.650.000	0	0	5 Unit	6.982.500
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			TAPIN	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	473.062.038	0	0	5 Unit	496.715.140
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan		Persentase Analisis Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	2,40%	309.096.780	0	0	2,40%	324.551.619
2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah SKPD yang mengikuti kegiatan dan asistensi PPRG dan ARG	45 SKPD	51.507.000	0	0	45 SKPD	54.082.350
2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG			TAPIN	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	45 Perangkat Daerah	51.507.000	0	0	45 Perangkat Daerah	54.082.350
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Peserta Pelatihan Yang Memahami (KKG) di Bidang Politik dan Dunia Usaha	109 Orang	30.055.300	0	0	109 Orang	31.558.065
					Jumlah Peserta yg mengikuti Pelatihan Keterampilan dibidang Usaha Rumahan Perempuan	109 Orang				109 Orang	



2.08.02.2.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	30.055.300	0	0	1 Dokumen	31.558.065
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah pemetaan dan pengembangan usaha rumahan perempuan	12 Kecamatan	227.534.480	0	0	12 Kecamatan	238.911.204
					Jumlah Peserta Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus Organisasi / Gerakan / Kelompok Perempuan	72 Orang				72 Orang	
					Jumlah Peserta yang mengikuti Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Pameran Hasil Karya Perempuan	12 Kecamatan				12 Kecamatan	
2.08.02.2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	1 Lembaga	34.973.100	0	0	1 Lembaga	36.721.755
2.08.02.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	172 Orang	130.833.600	0	0	172 Orang	137.375.280
2.08.02.2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	61.727.780	0	0	1 Dokumen	64.814.169
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Meningkatnya Peran Perempuan Dalam Pembangunan		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti	90%	154.254.300	0	0	90%	161.967.015
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Perempuan yang mendapatkan Pendampingan dan Advokasi Tindakan Hukum Akibat Tindak Kekerasan	8 Kasus	18.153.800	0	0	8 Kasus	19.061.490
					Jumlah PUSPA yang terbentuk (bh) dan Jumlah Partisipasi PUSPA	1 Buah				1 Buah	
2.08.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	18.153.800	0	0	1 Dokumen	19.061.490
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Kasus yang ditangani Pelayanan Penanganan Tindak kekerasan	12 Kasus	116.455.700	0	0	12 Kasus	122.278.485



2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	0 Orang	98.480.000	0	0	0 Orang	103.404.000
2.08.03.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Layanan	17.975.700	0	0	0 Layanan	18.874.485
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Peserta yang Memahami Sosialisasi PTT Perlindungan dan Anak Berbasis Masyarakat di kecamatan	100 Orang	19.644.800	0	0	100 Orang	20.627.040
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	50 Orang	19.644.800	0	0	50 Orang	20.627.040
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Meningkatnya Kualitas Keluarga		Persentase perkawinan usia anak	2,20%	484.981.300	0	0	2,20%	509.230.365
					Persentase keluarga pelaku usaha	0,91%				0,91%	
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah peserta yang mengikuti gerakan pencegahan perkawinan usia anak dan Penatalaksanaan Puspaga	350 Orang	361.928.400	0	0	350 Orang	380.024.820
					Jumlah organisasi/gerakan/kelompok perempuan yang mengikuti kegiatan Peringatan Hari Kartini	50 Kelompok				50 Kelompok	
					Jumlah organisasi/gerakan/kelompok perempuan yang mengikuti kegiatan Peringatan Hari Ibu	50 Kelompok				50 Kelompok	
					waktu Pembentukan dan Pelaksanaan PUSPA	12 Bulan				12 Bulan	
2.08.04.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Perangkat Daerah	55.467.300	0	0	0 Perangkat Daerah	58.240.665
2.08.04.2.01.02	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	132.379.900	0	0	1 Dokumen	138.998.895

2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	174.081.200	0	0	1 Laporan	182.785.260
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Waktu Peningkatan Kualitas Keluarga	12 Bulan	123.052.900	0	0	12 Bulan	129.205.545
2.08.04.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	123.052.900	0	0	500 Orang	129.205.545
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak		Persentase data SIMFONI dan SIGA yang terinput	90%	123.135.700	0	0	90%	129.292.485
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Data Kekerasaan	1 Kali	123.135.700	0	0	1 Kali	129.292.485
					Jumlah Dokumen (Buku) Data Gender dan Anak (dokumen (b))	1 Dokumen				1 Dokumen	
					Jumlah Peserta yang mamahami Sosialisasi dan Workshop Up Dating data Elektronik	40 Orang				40 Orang	
					Jumlah peserta yang memahami Forum Data Gender dan Anak	12 Bulan				12 Bulan	
2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	55.966.000	0	0	1 Dokumen	58.764.300
2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	67.169.700	0	0	1 Dokumen	70.528.185
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak		Persentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan	8,30%	500.933.500	0	0	8,30%	525.980.175
					Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan	1,69%				1,69%	
					Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan	7,69%				7,69%	
					Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA	50%				50%	
					Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan	53,84%				53,84%	





2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Kecamatan yang di Asistensi Kecamatan Layak Anak	4 Kecamatan	65.811.500	0	0	4 Kecamatan	69.102.075
					Jumlah Puskesmas yang di Advokasi dan Edukasi PRA	13 Puskesmas				13 Puskesmas	
					Jumlah Peserta Yang Memahami Pelatihan Khs Tenaga Pendidik Dan Advokasi Sekolah Ramah Anak (SRA)	54 Orang				54 Orang	
					Jumlah Peserta yang Memahami Sosialisasi Forum Pendidikan Pengasuhan Budaya dan Sekolah Ramah Anak	54 Orang				54 Orang	
					Jumlah Peserta Yang Memahami Pelatihan Ruang Bermain Ramah Anak	21 Orang				21 Orang	
					Jumlah Forum Anak Kecamatan Yang dibina	12 Kecamatan				12 Kecamatan	
					Jumlah Anak yang Berpartisipasi dalam Jambore Form Anak dan Lomba Inovasi & Kreativitas	15 Anak				15 Anak	
					Jumlah SKPD sebagai Anggota Gugus Tugas KLA	30 SKPD				30 SKPD	
					Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan gebyar ramadhan	145 Orang				145 Orang	
2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	73 Organisasi	59.892.400	0	0	73 Organisasi	62.887.020
2.08.06.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak KewenanganKabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	5.919.100	0	0	1 Dokumen	6.215.055
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Peserta Penyuluhan Pola Asuh Anak dan Remaja	72 Orang	435.122.000	0	0	72 Orang	456.878.100
2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	36.087.600	0	0	1 Dokumen	37.891.980
2.08.06.2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	237.610.200	0	0	1 Dokumen	249.490.710



2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	161.424.200	0	0	1 Dokumen	169.495.410
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak		Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti	90%	87.292.100	0	0	90%	91.656.705
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	waktu Kampanye Gerakan Nasional Anti Kekerasan (GNAKSA)	12 Bulan	17.139.000	0	0	12 Bulan	17.995.950
					waktu Sosialisasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	12 Bulan				12 Bulan	
2.08.07.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	17.139.000	0	0	1 Dokumen	17.995.950
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Anak Yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Layanan Kesehatan Rujukan Akibat Tindak Kekerasan	8 Kasus	39.289.200	0	0	8 Kasus	41.253.660
2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Orang	27.321.200	0	0	0 Orang	28.687.260
2.08.07.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Layanan	11.968.000	0	0	0 Layanan	12.566.400
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Peserta Yang Memahami Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan Terhadap Anak	50 Orang	30.863.900	0	0	50 Orang	32.407.095
2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	19.741.900	0	0	1 Dokumen	20.728.995
2.08.07.2.03.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	11.122.000	0	0	1 Dokumen	11.678.100
	Dinas Ketahanan Pangan						6.119.982.782	0	0		6.425.981.921



X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100%	4.331.877.840	0	0	100%	4.548.471.732
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Ketersediaan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	69.050.100	0	0	100 Persen	72.502.605
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Rantau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	69.050.100	0	0	13 Laporan	72.502.605
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.485.033.378	0	0	100%	2.609.285.047
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Rantau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	2.445.733.378	0	0	16 Orang/bulan	2.568.020.047
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Rantau	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	39.300.000	0	0	2 Laporan	41.265.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1.451.124.920	0	0	100%	1.523.681.166
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Rantau	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	9.999.400	0	0	1 Paket	10.499.370
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Rantau	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	152.137.300	0	0	10 Paket	159.744.165
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Rantau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	126.070.000	0	0	5 Paket	132.373.500
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Rantau	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	24.400.100	0	0	2 Paket	25.620.105
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Rantau	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.556.000	0	0	1 Paket	3.733.800
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Rantau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan	1.134.962.120	0	0	300 Laporan	1.191.710.226
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	133.983.600	0	0	100%	140.682.780
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Rantau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	59.983.600	0	0	3 Laporan	62.982.780



X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Rantau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	74.000.000	0	0	1 Laporan	77.700.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	192.685.842	0	0	100%	202.320.134
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Rantau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	129.485.842	0	0	24 Unit	135.960.134
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Rantau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	13.200.000	0	0	20 Unit	13.860.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Rantau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	0	0	1 Unit	52.500.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya kemandirian pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (poin)		Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	100%	1.606.114.942	0	0	100%	1.686.420.689
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan			TAPIN	Persentase enyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	100%	931.946.142	0	0	100%	978.543.449
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan NeracaBahan Makanan			Rantau	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Laporan	26.650.000	0	0	1 Laporan	27.982.500
2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			Rantau	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	356.661.142	0	0	1 Laporan	374.494.199
2.09.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya			Rantau	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	31.500.000	0	0	1 Laporan	33.075.000
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			Rantau	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	1 Dokumen	499.935.000	0	0	1 Dokumen	524.931.750
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan JaringanDistribusi Pangan			Rantau	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	5 Unit	17.200.000	0	0	5 Unit	18.060.000
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	100%	211.810.000	0	0	100%	222.400.500
2.09.03.2.02.04	Pemeliharaan Cadangan Pangan PemerintahKabupaten/Kota			Rantau	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	10 Ton	211.810.000	0	0	10 Ton	222.400.500
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan			TAPIN	Persentase Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka	100%	462.358.800	0	0	100%	485.476.740



	Gizi				Kecukupan Gizi						
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun			Rantau	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen	134.443.800	0	0	1 Dokumen	141.165.990
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal			Rantau	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Laporan	327.915.000	0	0	1 Laporan	344.310.750
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya kemandirian pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (poin)		Persentase Desa Bebas Rawan Pangan	100%	106.600.000	0	0	100%	111.930.000
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			TAPIN	Persentase Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	100%	53.500.000	0	0	100%	56.175.000
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis PetaKetahanan dan Kerentanan Pangan			Rantau	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	53.500.000	0	0	1 Dokumen	56.175.000
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	53.100.000	0	0	100%	55.755.000
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota			Rantau	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	53.100.000	0	0	1 Laporan	55.755.000
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya kemandirian pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (poin)		Persentase Skor Sampel Pangan Segar yang Lulus Uji	100%	75.390.000	0	0	100%	79.159.500
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100%	75.390.000	0	0	100%	79.159.500
2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			Rantau	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	75.390.000	0	0	1 Dokumen	79.159.500
	Dinas Lingkungan Hidup						27.657.003.834	0	0		29.039.854.026
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	9.294.278.568	0	0	100%	9.758.992.496
					Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik	90%				90%	
					Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Wajib Disusun	100%				100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja			TAPIN	Persentase Kelengkapan Dokumen Perencanaan, Laporan Capaian Kinerja	100%	31.137.300	0	0	100%	32.694.165



	Perangkat Daerah				dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang Dibuat Sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu						
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3.965.000	0	0	3 Dokumen	4.163.250
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	26.237.200	0	0	3 Laporan	27.549.060
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	935.100	0	0	8 Laporan	981.855
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Tersedianya Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	4.582.969.691	0	0	100%	4.812.118.176
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan	4.520.184.791	0	0	360 Orang/bulan	4.746.194.031
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	60.885.000	0	0	1 Laporan	63.929.250
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.899.900	0	0	1 Laporan	1.994.895
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Pelayanan Kepegawaian	100%	300.650.000	0	0	100%	315.682.500
X.XX.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Kab. Tapin	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	100.000.000	0	0	1 Unit	105.000.000
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	42.900.000	0	0	1 Dokumen	45.045.000
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	260 Orang	14.300.000	0	0	260 Orang	15.015.000
X.XX.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun			Kab. Tapin	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	2 Orang	7.150.000	0	0	2 Orang	7.507.500
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Kab. Tapin	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	65 Paket	36.300.000	0	0	65 Paket	38.115.000
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			Kab. Tapin	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang	100.000.000	0	0	12 Orang	105.000.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Pelayanan Surat Menyurat	100%	1.500.056.987	0	0	100%	1.575.059.836
					Persentase Pelayanan Kearsipan	100%				100%	
					Persentase Ketersediaan ATK	100%				100%	
					Persentase Penatausahaan Barang dengan Baik dan Benar	100%				100%	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	5 Paket	137.937.300	0	0	5 Paket	144.834.165



					Disediakan						
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	5.607.200	0	0	2 Paket	5.887.500
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	8.375.000	0	0	1 Laporan	8.793.750
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	137.795.000	0	0	3 Paket	144.684.750
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.718.438	0	0	2 Paket	8.104.360
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket	5.293.586	0	0	3 Paket	5.558.265
X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	21.600.000	0	0	1 Dokumen	22.680.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.175.730.463	0	0	12 Laporan	1.234.516.986
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	425.624.600	0	0	12 Bulan	446.905.830
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Tapin	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	59.864.800	0	0	2 Unit	62.858.040
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	187.528.200	0	0	15 Unit	196.904.610
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			Kab. Tapin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	33 Unit	178.231.600	0	0	33 Unit	187.143.180
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase Pembayaran Listrik, Air, dan Komunikasi Setiap Bulan	100%	237.454.240	0	0	100%	249.326.952
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	114.480.000	0	0	1 Laporan	120.204.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	122.974.240	0	0	1 Laporan	129.122.952
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	12 bulan	2.216.385.750	0	0	12 bulan	2.327.205.038
					Persentase Kendaraan Dinas yang Siap Pakai	100%				100%	
					Persentase Pemeliharaan Gedung	100%				100%	
					Persentase Penatausahaan Barang dengan Baik dan Benar	100%				100%	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kabupaten Tapin	Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.484.000	0	0	1 Unit	46.708.200
X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,			Kabupaten Tapin	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan	3 Unit	170.773.900	0	0	3 Unit	179.312.595



	BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				Perizinannya						
X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			Kabupaten Tapin	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	6 Unit	31.000.000	0	0	6 Unit	32.550.000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	148.751.976	0	0	42 Unit	156.189.575
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Tapin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	1.580.106.174	0	0	50 Unit	1.659.111.483
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	70.000.000	0	0	2 Unit	73.500.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	171.269.700	0	0	2 Unit	179.833.185
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Menurunnya Pencemaran Lingkungan		Persentase usaha yang memiliki dokumen lingkungan yang dikendalikan	100%	869.509.300	0	0	100%	912.984.765
					Persentase Rekomendasi Dokumen Lingkungan yang Ditindaklanjuti	100%				100%	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota yang Dibuat	2 Dokumen	869.509.300	0	0	2 Dokumen	912.984.765
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	425.624.600	0	0	12 Bulan	446.905.830
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan			Kab. Tapin	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	59.864.800	0	0	2 Unit	62.858.040
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	187.528.200	0	0	15 Unit	196.904.610
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			Kab. Tapin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	33 Unit	178.231.600	0	0	33 Unit	187.143.180
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase Pembayaran Listrik, Air, dan Komunikasi Setiap Bulan	100%	237.454.240	0	0	100%	249.326.952
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	114.480.000	0	0	1 Laporan	120.204.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	122.974.240	0	0	1 Laporan	129.122.952
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan			TAPIN	Waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	12 bulan	2.216.385.750	0	0	12 bulan	2.327.205.038



	Daerah				pemerintahan daerah yang disediakan						
					Persentase Kendaraan Dinas yang Siap Pakai	100%				100%	
					Persentase Pemeliharaan Gedung	100%				100%	
					Persentase Penatausahaan Barang dengan Baik dan Benar	100%				100%	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kabupaten Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	44.484.000	0	0	1 Unit	46.708.200
X.XX.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar			Kabupaten Tapin	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	3 Unit	170.773.900	0	0	3 Unit	179.312.595
X.XX.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor			Kabupaten Tapin	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	6 Unit	31.000.000	0	0	6 Unit	32.550.000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42 Unit	148.751.976	0	0	42 Unit	156.189.575
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Kab. Tapin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit	1.580.106.174	0	0	50 Unit	1.659.111.483
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	70.000.000	0	0	2 Unit	73.500.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	171.269.700	0	0	2 Unit	179.833.185
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Menurunnya Pencemaran Lingkungan		Persentase usaha yang memiliki dokumen lingkungan yang dikendalikan	100%	869.509.300	0	0	100%	912.984.765
					Persentase Rekomendasi Dokumen Lingkungan yang Ditindaklanjuti	100%				100%	
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota yang Dibuat	2 Dokumen	869.509.300	0	0	2 Dokumen	912.984.765
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Menurunnya Pencemaran Lingkungan		Persentase Luas Ruang terbuka Hijau (RTH) 3 Kecamatan Di Kabupaten Tapin	7,50%	7.913.625.652	0	0	7,50%	8.309.306.935



					Persentase Pertambahan Populasi Bekantan di Kawasan Bernilai Penting	14%				14%	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			TAPIN	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1 Kegiatan	7.913.625.652	0	0	1 Kegiatan	8.309.306.935
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			KABUPATEN TAPIN	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	23,3 Ha	7.913.625.652	0	0	23,3 Ha	8.309.306.935
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Menurunnya Pencemaran Lingkungan		Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan	100%	324.901.400	0	0	100%	341.146.470
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3			TAPIN	Jumlah Perusahaan yang Dibina	24 Perusahaan	24.840.800	0	0	24 Perusahaan	26.082.840
					Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Verifikasi Lapangan Untuk Pemenuhan Komitmen Penerbitan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3	6 Perusahaan				6 Perusahaan	
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	4 Laporan	24.840.800	0	0	4 Laporan	26.082.840
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Tertanganinya Timbulan Limbah B3 Domestik Skala Kabupaten Non Institusi/Corporate	155 Usaha Kecil Menengah	300.060.600	0	0	155 Usaha Kecil Menengah	315.063.630
					Jumlah LB3 Domestik yang Dikumpulkan pada Depo LB3 Dinas LH	55,8 Ton				55,8 Ton	
2.11.05.2.02.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Kab. Tapin	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Pengumpulan Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	300.060.600	0	0	1 Dokumen	315.063.630
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Menurunnya Pencemaran Lingkungan		Persentase jumlah usaha/kegiatan pemegang izin/persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran air	100%	29.944.200	0	0	100%	31.441.410
					Persentase jumlah usaha/kegiatan pemegang izin/persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran udara	100%				100%	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh			TAPIN	Jumlah pelaku usaha berizin yang dibina	30 Perusahaan	29.944.200	0	0	30 Perusahaan	31.441.410



	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Air	1 Laporan				1 Laporan	
					Jumlah Pelaku Usaha Berizin Dibina yang Taat Terhadap Ketentuan Pengendalian Pencemaran Air	15 Perusahaan				15 Perusahaan	
					Jumlah Pelaku Usaha Berizin yang Menindaklanjuti Rekomendasi Pengendalian Pencemaran Air	15 Perusahaan				15 Perusahaan	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengendalian Pencemaran Udara	1 Laporan				1 Laporan	
					Jumlah Pelaku Usaha Berizin Dibina yang Taat Terhadap Ketentuan Pengendalian Pencemaran Udara	15 Perusahaan				15 Perusahaan	
					Jumlah Pelaku Usaha Berizin yang Menindaklanjuti Rekomendasi Pengendalian Pencemaran Udara	15 Perusahaan				15 Perusahaan	
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	29.944.200	0	0	1 Laporan	31.441.410
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Menurunnya Pencemaran Lingkungan		Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan haknya	25%	129.272.100	0	0	25%	135.735.705
					Persentase kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dilakukan peningkatan kapasitas	25%				25%	
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			TAPIN	Jumlah kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan haknya	1 kelompok	88.692.200	0	0	1 kelompok	93.126.810
2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH			Kecamatan Piani, Desa Pipitak Jaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	1 Dokumen	88.692.200	0	0	1 Dokumen	93.126.810
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			TAPIN	Jumlah Kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) Yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	1 kelompok	40.579.900	0	0	1 kelompok	42.608.895



2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH			Kecamatan Piani, Desa Pipitak jaya	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	1 Dokumen	40.579.900	0	0	1 Dokumen	42.608.895
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Menurunnya Pencemaran Lingkungan		Persentase jumlah peserta yang berhasil memahami penyampaian sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup	82,50%	52.750.800	0	0	82,50%	55.388.340
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup yang dilaksanakan	2 Kali	52.750.800	0	0	2 Kali	55.388.340
					Jumlah laporan penyelenggaraan dan penyuluhan tentang lingkungan hidup	1 laporan				1 laporan	
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan			Kab. Tapin	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	1 Lembaga	52.750.800	0	0	1 Lembaga	55.388.340
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Menurunnya Pencemaran Lingkungan		Persentase Sekolah Yang Menjadi Sekolah Adiwiyata	28%	645.321.600	0	0	28%	677.587.680
					Persentase Masyarakat/Lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dilakukan Fasilitasi dan Pembinaan Mendapatkan Penghargaan	55%				55%	
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Pemberian Penghargaan Tentang Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Kali	645.321.600	0	0	2 Kali	677.587.680
					Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan Terhadap Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Dalam Penilaian Upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	8 Kali				8 Kali	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan serta Pemberian Penghargaan Tentang Lingkungan Hidup	1 Laporan				1 Laporan	
2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia			Kabupaten Tapin	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia	4 Entitas	645.321.600	0	0	4 Entitas	677.587.680



	Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH						
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Menurunnya Pencemaran Lingkungan		Persentase kasus lingkungan hidup yang di tindaklanjuti	100%	41.419.000	0	0	100%	43.489.950
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Kasus Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	4 pengaduan	41.419.000	0	0	4 pengaduan	43.489.950
					Jumlah Laporan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup (Laporan)	1 laporan				1 laporan	
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1 Dokumen	41.419.000	0	0	1 Dokumen	43.489.950
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Menurunnya Pencemaran Lingkungan		Persentase cakupan area pelayanan	66,67%	6.487.907.532	0	0	66,67%	6.812.302.909
					Persentase volume sampah yang ditangani	72%				72%	
					Persentase volume sampah yang dikurangi	27%				27%	
					Persentase Areal Publik Bebas Sampah	100%				100%	
					Persentase TPS Zero Sampah Pada Waktu Tertentu (Siang Hari)	100%				100%	
					Persentase Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sampah (Bank Sampah, TPS3 3R, Rumah Kompos) yang Beroperasi Aktif	100%				100%	
					Persentase Jumlah Desa/Kelurahan yang Mandiri Dalam Pengelolaan Sampah	50%				50%	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah			TAPIN	Jumlah petugas kebersihan yang menangani sampah	305 orang	6.487.907.532	0	0	305 orang	6.812.302.909
					Jumlah armada pengangkut sampah yang beroperasi	15 Unit				15 Unit	
					Jumlah peserta yang dibina	120 orang				120 orang	
					Jumlah Bank Sampah yang Terbentuk	4 Unit				4 Unit	
					Jumlah Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah yang Dibeli atau Dibangun	7 Unit				7 Unit	
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA			Kabupaten Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	16.551,73 Ton	5.326.035.100	0	0	16.551,73 Ton	5.592.336.855



	Kabupaten/Kota										
2.11.11.2.01.04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			Kabupaten Tapin	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	5 Kelompok	41.975.000	0	0	5 Kelompok	44.073.750
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	1 Dokumen	871.038.132	0	0	1 Dokumen	914.590.039
2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2 Unit	148.859.300	0	0	2 Unit	156.302.265
2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1 Laporan	100.000.000	0	0	1 Laporan	105.000.000
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						7.653.921.976	0	0		8.036.618.075
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di bidang kependudukan		Persentase ASN yang memiliki sertifikat diklat/keahlian sesuai dengan jabatannya	100%	6.381.297.476	0	0	100%	6.700.362.350
					Persentase Penyerapan anggaran	100%				100%	
					Kategori minimal hasil evaluasi SAKIP	A Score				A Score	
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana	100%				100%	
					Persentase pegawai (responden) yang puas terhadap pelayanan administrasi kepegawaian	100%				100%	
					Persentase Aset Tercatat	100%				100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	27.311.800	0	0	100%	28.677.390
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	13 Laporan	27.311.800	0	0	13 Laporan	28.677.390



	SKPD			SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Peringkat Daerah			TAPIN	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan	100%	3.217.907.176	0	0	100%	3.378.802.535
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228 Orang/bulan	3.215.907.176	0	0	228 Orang/bulan	3.376.702.535
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.000.000	0	0	1 Laporan	1.050.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.000.000	0	0	1 Laporan	1.050.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Peringkat Daerah			TAPIN	Persentase Penyediaan Administrasi Perkantoran	100%	1.816.686.000	0	0	100%	1.907.520.300
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	317.326.300	0	0	12 Paket	333.192.615
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	135.300.000	0	0	12 Paket	142.065.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	11.438.900	0	0	12 Paket	12.010.845
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	14.720.000	0	0	12 Laporan	15.456.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.337.179.000	0	0	12 Laporan	1.404.037.950
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	721.800	0	0	12 Paket	757.890
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	659.996.100	0	0	100%	692.995.905
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	128.596.100	0	0	4 Unit	135.025.905
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	531.400.000	0	0	12 Unit	557.970.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase Penyediaan jasa Penunjang	100%	499.673.400	0	0	100%	524.657.070
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	216.996.100	0	0	4 Laporan	227.845.905
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	282.677.300	0	0	11 Laporan	296.811.165



X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase Aset Terpelihara	100%	159.723.000	0	0	100%	167.709.150
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	95.154.000	0	0	4 Unit	99.911.700
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	24.100.000	0	0	4 Unit	25.305.000
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	40.469.000	0	0	2 Unit	42.492.450
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan		IKM terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk	89,19 poin	287.987.500	0	0	89,19 poin	302.386.875
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk			TAPIN	Persentase Permohonan KTP yang diselesaikan tepat waktu	100%	278.937.500	0	0	100%	292.884.375
					Persentase Permohonan KIA yang diselesaikan tepat waktu	100%				100%	
					Persentase Permohonan Pelayanan Penduduk Pindah Datang yang diselesaikan tepat waktu	100%				100%	
2.12.02.2.01.04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	278.937.500	0	0	12 Laporan	292.884.375
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk			TAPIN	Persentase laporan Penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk yang disusun tepat waktu	100%	9.050.000	0	0	100%	9.502.500
2.12.02.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	2 Dokumen	9.050.000	0	0	2 Dokumen	9.502.500
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan		IKM Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	89,17 poin	441.244.500	0	0	89,17 poin	463.306.725
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil			TAPIN	Persentase Permohonan Akta Kelahiran yang diselesaikan tepat waktu	100%	441.244.500	0	0	100%	463.306.725
					Persentase Permohonan Akta Kematian yang diselesaikan tepat waktu	100%				100%	



					Persentase Permohonan Akta Perkawinan yang diselesaikan tepat waktu	100%				100%	
					Persentase Permohonan Perubahan Status Anak yang diselesaikan tepat waktu	100%				100%	
2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	6 Layanan	285.833.600	0	0	6 Layanan	300.125.280
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	7 Dokumen	65.520.300	0	0	7 Dokumen	68.796.315
2.12.03.2.01.04	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	7 Dokumen	89.890.600	0	0	7 Dokumen	94.385.130
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya cakupan masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan		Tingkat Akurasi Data Perorangan Pada Kartu Keluarga	95.08 %	543.392.500	0	0	95.08 %	570.562.125
					Tingkat Akurasi Data Orang lahir, mati, pindah, dan datang	99.45 %				99.45 %	
					Persentase Pemenuhan Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD	100%				100%	
					Persentase Peningkatan Jumlah Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	33.81 %				33.81 %	
					Persentase Jumlah Instansi Yang Bekerjasama dalam Bidang Pelayanan Kependudukan	100%				100%	
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			TAPIN	Persentase PKS/MOU OPD/Instansi yang ditindaklanjuti	100%	127.150.000	0	0	100%	133.507.500
					Persentase OPD yang memanfaatkan Data Kependudukan sesuai Peraturan yang berlaku	100%				100%	
2.12.04.2.01.02	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	5 Dokumen	127.150.000	0	0	5 Dokumen	133.507.500
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			TAPIN	Persentase Instansi (responden) yang puas terhadap pelayanan adminduk	100%	139.250.000	0	0	100%	146.212.500
					Persentase Penyebaran Wilayah Informasi Layanan Kependudukan di Wilayah Kab Tapin	100%				100%	
2.12.04.2.02.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk	1 Dokumen	139.250.000	0	0	1 Dokumen	146.212.500



	Informasi Administrasi Kependudukan				Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun						
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			TAPIN	Persentase data Kependudukan yang diupdate	97%	276.992.500	0	0	97%	290.842.125
					Persentase dokumen laporan data yang disampaikan tepat waktu	100%				100%	
2.12.04.2.04.01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12 Laporan	276.992.500	0	0	12 Laporan	290.842.125
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa						9.764.906.933	0	0		10.253.152.280
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	5.098.974.721	0	0	100 Persen	5.353.923.457
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen				100 Persen	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen				100 Persen	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen				100 Persen	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen				100 Persen	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen				100 Persen	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100 Persen	7.548.500	0	0	100 Persen	7.925.925
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan Laporan	7.548.500	0	0	12 Bulan Laporan	7.925.925
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	2.960.218.521	0	0	100 Persen	3.108.229.447
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	2.949.001.221	0	0	12 Orang/bulan	3.096.451.282
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester	12 Laporan	5.323.900	0	0	12 Laporan	5.590.095



					an SKPD						
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	5.893.400	0	0	12 Laporan	6.188.070
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100 Persen	1.678.683.900	0	0	100 Persen	1.762.618.095
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan Paket	52.752.600	0	0	12 Bulan Paket	55.390.230
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan Paket	64.493.400	0	0	12 Bulan Paket	67.718.070
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan Paket	28.514.200	0	0	12 Bulan Paket	29.939.910
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Bulan Paket	2.000.000	0	0	12 Bulan Paket	2.100.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Tapin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bulan Laporan	10.000.000	0	0	12 Bulan Laporan	10.500.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan Laporan	1.520.923.700	0	0	12 Bulan Laporan	1.596.969.885
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	129.594.000	0	0	12 Bulan	136.073.700
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Bulan Unit	75.000.000	0	0	12 Bulan Unit	78.750.000
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Tapin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Bulan Unit	54.594.000	0	0	12 Bulan Unit	57.323.700
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	224.840.000	0	0	100 Persen	236.082.000
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan Laporan	8.640.000	0	0	12 Bulan Laporan	9.072.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan Laporan	65.000.000	0	0	12 Bulan Laporan	68.250.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan Laporan	151.200.000	0	0	12 Bulan Laporan	158.760.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100 Persen	98.089.800	0	0	100 Persen	102.994.290
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Bulan Unit	45.739.800	0	0	12 Bulan Unit	48.026.790
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Bulan Unit	32.200.000	0	0	12 Bulan Unit	33.810.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Bulan Unit	20.150.000	0	0	12 Bulan Unit	21.157.500



2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA										
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Desa Berstatus Maju		Fasilitasi Tata Wilayah Desa	100 Persen	23.223.000	0	0	100 Persen	24.384.150
					Terlaksananya fasilitasi Tata wilayah desa	100 Persen				100 Persen	
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa			TAPIN	Terlaksananya fasilitasi tata wilayah desa	100 Persen	23.223.000	0	0	100 Persen	24.384.150
2.13.02.2.01.02	Fasilitasi Tata Wilayah Desa			Tapin	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	12 Bulan Desa	23.223.000	0	0	12 Bulan Desa	24.384.150
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Desa Berstatus Maju		Terfasilitasinya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	100 Persen	2.345.260.512	0	0	100 Persen	2.462.523.538
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa			TAPIN	Terfasilitasinya kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	100 Persen	2.345.260.512	0	0	100 Persen	2.462.523.538
2.13.03.2.01.02	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota			Tapin	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	12 Bulan Dokumen	2.345.260.512	0	0	12 Bulan Dokumen	2.462.523.538
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Desa Berstatus Maju		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	100 Persen	735.991.300	0	0	100 Persen	772.790.865
					Tertatanya administrasi asset Desa	100 Persen				100 Persen	
					Terfasilitasinya penyusunan produk hukum desa	100 Persen				100 Persen	
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			TAPIN	Terfasilitasinya produk hukum desa	100 Persen	735.991.300	0	0	100 Persen	772.790.865
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	12 Bulan Dokumen	75.889.000	0	0	12 Bulan Dokumen	79.683.450
2.13.04.2.01.05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			Tapin	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	12 Bulan Orang	65.261.000	0	0	12 Bulan Orang	68.524.050
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	12 Bulan Dokumen	180.799.000	0	0	12 Bulan Dokumen	189.838.950
2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	12 Bulan Dokumen	85.132.000	0	0	12 Bulan Dokumen	89.388.600
2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	12 Bulan Dokumen	45.133.000	0	0	12 Bulan Dokumen	47.389.650
2.13.04.2.01.08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	12 Bulan Dokumen	209.184.500	0	0	12 Bulan Dokumen	219.643.725
2.13.04.2.01.14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD			Tapin	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	12 Bulan Orang	24.592.800	0	0	12 Bulan Orang	25.822.440



2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa			Tapin	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	12 Bulan Laporan	50.000.000	0	0	12 Bulan Laporan	52.500.000
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya Desa Berstatus Maju		Persentase Lembaga masyarakat Desa yang terbina dan berfungsi	100 Persen	1.561.457.400	0	0	100 Persen	1.639.530.270
					Persentase Desa Bumdes yang aktif	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Bumdes yang menghasilkan laba	100 Persen				100 Persen	
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase lembaga masyarakat yang terbina dan berfungsi	100 Persen	1.561.457.400	0	0	100 Persen	1.639.530.270
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Tapin	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	126 Lembaga	413.150.500	0	0	126 Lembaga	433.808.025
2.13.05.2.01.02	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	12 Bulan Dokumen	689.865.100	0	0	12 Bulan Dokumen	724.358.355
2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	12 Bulan Dokumen	234.745.800	0	0	12 Bulan Dokumen	246.483.090
2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Tapin	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	12 Bulan Laporan	223.696.000	0	0	12 Bulan Laporan	234.880.800
	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana						7.541.085.088	0	0		7.918.139.342
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
			Meningkatnya Penyediaan Administrasi								



X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD	100%	5.648.252.188	0	0	100%	5.930.664.797
					Persentase Aset yang tercatat	100%				100%	
					Persentase Pemenuhan Pengurusan administrasi perkantoran	100%				100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Dokumen Kinerja sesuai ketentuan	14 Laporan	5.000.000	0	0	14 Laporan	5.250.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	5.000.000	0	0	14 Laporan	5.250.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Dokumen laporan Keuangan secara berkala	2 Laporan	3.133.947.143	0	0	2 Laporan	3.290.644.500
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	3.129.047.143	0	0	20 Orang/bulan	3.285.499.500
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.450.000	0	0	1 Laporan	2.572.500
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.450.000	0	0	1 Laporan	2.572.500
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Pegawai yang administrasi kepegawaian yang dilayani secara tertib	100%	1.683.411.500	0	0	100%	1.767.582.075
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.161.200	0	0	1 Paket	4.369.260
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	29.098.900	0	0	2 Paket	30.553.845
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	62.914.700	0	0	1 Paket	66.060.435
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.274.400	0	0	1 Paket	12.888.120
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	4.015.300	0	0	1 Paket	4.216.065
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Tapin	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	20 Laporan	8.250.000	0	0	20 Laporan	8.662.500
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	1.562.697.000	0	0	30 Laporan	1.640.831.850



X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Jumlah dokumen terkait sarana dan Prasarana	100%	277.704.545	0	0	100%	291.589.772
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	74.704.545	0	0	2 Unit	78.439.772
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Tapin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3.000.000	0	0	2 Unit	3.150.000
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kec. Benuang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	200.000.000	0	0	1 Unit	210.000.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Jumlah dokumen terkait sarana dan Prasarana	100%	223.613.000	0	0	100%	234.793.650
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1.531.200	0	0	1 Laporan	1.607.760
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	71.897.400	0	0	12 Laporan	75.492.270
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	150.184.400	0	0	12 Laporan	157.693.620
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Jumlah Aset yang tercatat	100%	324.576.000	0	0	100%	340.804.800
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	50 Unit	119.091.000	0	0	50 Unit	125.045.550
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	5.100.000	0	0	48 Unit	5.355.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.385.000	0	0	1 Unit	210.404.250
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terkendalinya Angka Kelahiran		Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan Mitra kerja	50%	376.324.600	0	0	50%	395.140.830
					Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	85%				85%	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah			TAPIN	Persentase mitra kerja yang berpartisipasi dalam program KKBPK	70%	219.419.200	0	0	70%	230.390.160



	Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk										
					Jumlah petugas lini lapangan yang mendapatkan pelatihan KKBPk	25 orang			25 orang		
					Jumlah sekolah yang dibina terkait masalah kependudukan	2 Sekolah			2 Sekolah		
					Jumlah Kader KB yang mendapatkan pelatihan KKBPk	273 Kader			273 Kader		
2.14.02.2.01.03	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan			Tapin	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1 Dokumen	200.074.700	0	0	1 Dokumen	210.078.435
2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal			Tapin	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	12 Satuan Pendidikan	14.490.600	0	0	12 Satuan Pendidikan	15.215.130
2.14.02.2.01.12	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan			Tapin	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	2 Organisasi	4.853.900	0	0	2 Organisasi	5.096.595
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah data basis KKBPk yang tersedia	60 Buah	156.905.400	0	0	60 Buah	164.750.670
					Jumlah Stakeholder yang memanfaatkan data KKBPk	36 Buah				36 Buah	
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga			Tapin	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1 Dokumen	7.663.900	0	0	1 Dokumen	8.047.095
2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPk di Sektor Lain			Tapin	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	6 Unit	56.000.100	0	0	6 Unit	58.800.105
2.14.02.2.02.10	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			Tapin	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	1 Dokumen	69.854.200	0	0	1 Dokumen	73.346.910
2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			Tapin	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12 Dokumen	5.582.000	0	0	12 Dokumen	5.861.100
2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPk			Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan	12 Laporan	17.805.200	0	0	12 Laporan	18.695.460
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kesertaan ber-KB		Persentase Peserta KB Aktif MKJP	15%	618.218.100	0	0	15%	649.129.005



					Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per WUS (15-49 Tahun)	2,07 Anak				2,07 Anak	
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			TAPIN	Persentase Akseptor KB yang dibina	85%	40.763.100	0	0	85%	42.801.255
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			Tapin	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	24 Organisasi	37.850.000	0	0	24 Organisasi	39.742.500
2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			Tapin	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12 Dokumen	2.913.100	0	0	12 Dokumen	3.058.755
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			TAPIN	Jumlah petugas lini lapangan yang mendapatkan pelatihan KKBPK	25 orang	17.640.000	0	0	25 orang	18.522.000
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			Tapin	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	24 Organisasi	17.640.000	0	0	24 Organisasi	18.522.000
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Alat Obat Kontrasepsi (Alokon) yang tersedia	65%	484.398.500	0	0	65%	508.618.425
					Persentase Alat , Obat dan Kontrasepsi (Alokon) yang didistribusikan ke Sasaran tepat Waktu	85%				85%	
					Jumlah Alat Kontrasepsi yang terpasang	978 Akseptor				978 Akseptor	
					Jumlah MOW/MOP yang dilaksanakan	4 Akseptor				4 Akseptor	
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			Tapin	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	15 Laporan	30.000.000	0	0	15 Laporan	31.500.000
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	500 Orang	246.395.000	0	0	500 Orang	258.714.750
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			Tapin	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	2 Unit	71.600.200	0	0	2 Unit	75.180.210
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk	12 Laporan	30.085.700	0	0	12 Laporan	31.589.985



					Jaringan dan Jejaringnya						
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			Tapin	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	12 Laporan	106.317.600	0	0	12 Laporan	111.633.480
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB			TAPIN	Persentase Akseptor KB yang dibina	85%	75.416.500	0	0	85%	79.187.325
2.14.03.2.04.01	Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB			Tapin	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	46 Organisasi	36.726.600	0	0	46 Organisasi	38.562.930
2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB			Tapin	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	24 Kampung	38.689.900	0	0	24 Kampung	40.624.395
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)		Persentase keluarga ber-KB yang aktif dalam UPPKS	92,19%	898.290.200	0	0	92,19%	943.204.710
					Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKB	84,07%				84,07%	
					Persentase Keluarga ber-KB yang aktif dalam BKL	73,66%				73,66%	
					Persentase kelompok pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) yang aktif	71,12%				71,12%	
					Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja	92,80%				92,80%	
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			TAPIN	Jumlah BKB dan BKL yang terbina	152 Kelompok	728.229.400	0	0	152 Kelompok	764.640.870
					Jumlah BKB, BKL yang mengikuti Lomba	24 Kelompok				24 Kelompok	
					Jumlah lomba Poktan PIK Remaja, Kelompok dan kader BKR	24 Kelompok				24 Kelompok	
					Jumlah PIK Remaja Jalur Pendidikan	15 Kelompok				15 Kelompok	
					Jumlah PIK Remaja Jalur Masyarakat	25 Kelompok				25 Kelompok	
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberda			Tapin	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang Dibentuk	152 Kelompok	76.939.000	0	0	152 Kelompok	80.785.950
2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Tapin	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	24 Orang	125.015.000	0	0	24 Orang	131.265.750
2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Tapin	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	152 Orang	344.571.600	0	0	152 Orang	361.800.180



2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Tapin	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	140.156.900	0	0	12 Laporan	147.164.745
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			Tapin	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	12 Laporan	13.300.000	0	0	12 Laporan	13.965.000
2.14.04.2.01.09	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	12 Dokumen	28.246.900	0	0	12 Dokumen	29.659.245
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			TAPIN	Jumlah UPPKS yang ikut dalam gelar produk peningkatan pendapatan keluarga sejahtera	25 Kelompok	170.060.800	0	0	25 Kelompok	178.563.840
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Tapin	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12 Laporan	21.387.800	0	0	12 Laporan	22.457.190
2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			Tapin	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Masyarakat dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1 Organisasi	8.022.900	0	0	1 Organisasi	8.424.045
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja			Tapin	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	12 Laporan	140.650.100	0	0	12 Laporan	147.682.605
	Dinas Perhubungan						10.430.076.307	0	0		10.951.380.122
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	4.303.181.067	0	0	12 Bulan	4.518.340.120
					www	1 1				1 1	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			KALIMANTAN SELATAN:TAPIN	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	65.322.400	0	0	12 Bulan	68.588.520
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	65.322.400	0	0	12 Laporan	68.588.520



X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			KALIMANTAN SELATAN:TAPIN	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.144.383.915	0	0	12 Bulan	3.301.603.111
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang/bulan	3.097.049.915	0	0	22 Orang/bulan	3.251.902.411
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	2.134.000	0	0	12 Laporan	2.240.700
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	45.200.000	0	0	12 Laporan	47.460.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			KALIMANTAN SELATAN:TAPIN	Terlaksananya kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	709.813.862	0	0	12 Bulan	745.304.555
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.655.362	0	0	1 Paket	9.088.130
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	125.237.000	0	0	1 Paket	131.498.850
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	57.072.000	0	0	1 Paket	59.925.600
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	17.112.500	0	0	1 Paket	17.968.125
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	501.737.000	0	0	12 Laporan	526.823.850
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			KALIMANTAN SELATAN:TAPIN	Terlaksananya Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	205.046.800	0	0	12 Bulan	215.299.140
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	122.296.800	0	0	1 Laporan	128.411.640
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	23.750.000	0	0	1 Laporan	24.937.500
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	59.000.000	0	0	1 Laporan	61.950.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			KALIMANTAN SELATAN:TAPIN	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	178.614.090	0	0	12 Bulan	187.544.795
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	27.792.000	0	0	2 Unit	29.181.600
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kabupaten Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit	150.822.090	0	0	11 Unit	158.363.195
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN										
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas sarana pelayanan publik	Meningkatnya kapasitas prasarana perhubungan		Terlaksananya Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12 Bulan	5.330.395.240	0	0	12 Bulan	5.596.915.002
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			KALIMANTAN SELATAN:TAPIN	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	63.757.532	0	0	12 Bulan	66.945.409



2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan		Kabupaten Tapin	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2 Unit	17.464.820	0	0	2 Unit	18.338.061
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan		Kabupaten Tapin	Jumlah Perengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	4 Unit	46.292.712	0	0	4 Unit	48.607.348
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		KALIMANTAN SELATAN:TAPIN	Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tpe C	12 Bulan	96.963.000	0	0	12 Bulan	101.811.150
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)		Kabupaten Tapin	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	96.963.000	0	0	3 Unit	101.811.150
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		KALIMANTAN SELATAN:TAPIN	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	12 Bulan	506.460.200	0	0	12 Bulan	531.783.210
2.15.02.2.04.01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6 Dokumen	67.826.800	0	0	6 Dokumen	71.218.140
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Laporan	438.633.400	0	0	12 Laporan	460.565.070
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		KALIMANTAN SELATAN:TAPIN	Terlaksananya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 Bulan	2.904.943.508	0	0	12 Bulan	3.050.190.683
2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Kabupaten Tapin	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	7 Orang	90.000.000	0	0	7 Orang	94.500.000
2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor		Kabupaten Tapin	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1 Unit	114.943.508	0	0	1 Unit	120.690.683
2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		Kabupaten Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	1 Unit	2.700.000.000	0	0	1 Unit	2.835.000.000
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekamasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		KALIMANTAN SELATAN:TAPIN	Terlaksananya Pelaksanaan Manajemen dan Rekamasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	1.355.451.000	0	0	12 Bulan	1.423.223.550
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekamasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekamasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	1 Laporan	8.000.000	0	0	1 Laporan	8.400.000
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamasa Lalu Lintas		Kabupaten Tapin	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekamasa Lalu Lintas	1 Unit	1.100.000.000	0	0	1 Unit	1.155.000.000
2.15.02.2.06.03	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekamasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	21.649.900	0	0	5 Dokumen	22.732.395
2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	53.603.400	0	0	5 Laporan	56.283.570
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	5 Laporan	172.197.700	0	0	5 Laporan	180.807.585
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		KALIMANTAN SELATAN:TAPIN	Terlaksananya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 Bulan	94.190.000	0	0	12 Bulan	98.899.500
2.15.02.2.07.02	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin		Kabupaten Tapin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Orang	62.800.000	0	0	5 Orang	65.940.000
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	5 Laporan	31.390.000	0	0	5 Laporan	32.959.500
2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		KALIMANTAN SELATAN:TAPIN	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di	12 Bulan	87.830.000	0	0	12 Bulan	92.221.500



				Jalan							
2.15.02.2.08.03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	5 Laporan	87.830.000	0	0	5 Laporan	92.221.500
2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			KALIMANTAN SELATAN:TAPIN	Terlaksananya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	220.800.000	0	0	12 Bulan	231.840.000
2.15.02.2.14.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Laporan	220.800.000	0	0	4 Laporan	231.840.000
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Meningkatnya kapasitas prasarana perhubungan		Terlaksananya PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	12 Bulan	796.500.000	0	0	12 Bulan	836.325.000
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			KALIMANTAN SELATAN:TAPIN	Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Bulan	142.500.000	0	0	12 Bulan	149.625.000
2.15.03.2.12.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	12 Dokumen	142.500.000	0	0	12 Dokumen	149.625.000
2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			KALIMANTAN SELATAN:TAPIN	Terlaksananya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	12 Bulan	654.000.000	0	0	12 Bulan	686.700.000
2.15.03.2.13.06	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau			Kabupaten Tapin	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	3 Unit	504.000.000	0	0	3 Unit	529.200.000
2.15.03.2.13.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau			Kabupaten Tapin	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	1 Unit	150.000.000	0	0	1 Unit	157.500.000
	Dinas Komunkasi Dan Informatika						10.943.253.442	0	0		11.490.416.114
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase Terpenuhinya Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Kantor	100%	5.035.238.442	0	0	100%	5.287.000.364
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang disampaikan tepat Waktu	10 Dokumen	12.000.000	0	0	10 Dokumen	12.600.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	12.000.000	0	0	10 Laporan	12.600.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran dan Akhir Tahun yang disampaikan Tepat Waktu dan Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	3.431.176.842	0	0	12 Bulan	3.602.735.684
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24/12 Orang/bulan	3.427.576.842	0	0	24/12 Orang/bulan	3.598.955.684
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.050.000	0	0	1 Laporan	2.152.500



X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	1.550.000	0	0	2 Laporan	1.627.500
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Pengurusan Administrasi Umum dan Kepegawaian ASN	36 Orang	723.049.000	0	0	36 Orang	759.201.450
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.919.500	0	0	1 Paket	47.165.475
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	76.499.500	0	0	3 Paket	80.324.475
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	0	0	1 Paket	52.500.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	8.000.000	0	0	1 Laporan	8.400.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	543.630.000	0	0	3 Laporan	570.811.500
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	370.182.000	0	0	100%	388.691.100
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	370.182.000	0	0	11 Unit	388.691.100
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	422.355.600	0	0	100%	443.473.380
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	220.155.600	0	0	2 Laporan	231.163.380
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	202.200.000	0	0	4 Laporan	212.310.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	76.475.000	0	0	100%	80.298.750
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kabupaten Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	34.834.500	0	0	3 Unit	36.576.225
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	11.955.000	0	0	3 Unit	12.552.750
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	29.685.500	0	0	3 Unit	31.169.775
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi	Meningkatnya level SPBE Kabupaten		Persentase Layanan Informasi Berbasis TI	100%	1.260.600.000	0	0	100%	1.323.630.000
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota			TAPIN	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kabupaten/Kota	100%	1.260.600.000	0	0	100%	1.323.630.000
2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media			Kabupaten Tapin	Jumlah Layanan Hubungan Media	4 Layanan	1.098.400.000	0	0	4 Layanan	1.153.320.000
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	29.400.000	0	0	1 Dokumen	30.870.000
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi	2 Dokumen	33.000.000	0	0	2 Dokumen	34.650.000



					Program atau Kebijakan						
2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dokumen	48.200.000	0	0	1 Dokumen	50.610.000
2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	2 Dokumen	51.600.000	0	0	2 Dokumen	54.180.000
2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi	Meningkatnya level SPBE Kabupaten		Persentase Sarana dan Prasarana Telekomunikasi yang memiliki izin	100%	4.469.153.000	0	0	100%	4.692.610.650
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	3.388.460.600	0	0	100%	3.557.883.630
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan IntraPemerintah Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit	2.813.481.000	0	0	1 Unit	2.954.155.050
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	574.979.600	0	0	1 Dokumen	603.728.580
2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Terlaksananya Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.080.692.400	0	0	100%	1.134.727.020
2.16.03.2.02.01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	226.350.000	0	0	3 Dokumen	237.667.500
2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	809.732.400	0	0	2 Dokumen	850.219.020
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	2 Dokumen	36.360.000	0	0	2 Dokumen	38.178.000
2.16.03.2.02.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan/Pengembangan Ekosistem SPBE			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	8.250.000	0	0	1 Dokumen	8.662.500
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi	Meningkatnya layanan statistik sektoral		Persentase Layanan Data Statistik Sektoral yang disaiikan	100%	101.018.000	0	0	100%	106.068.900
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Buku Statistik Sektoral, KDA, PDRB, Ekonomi Makro Yang dicetak	150 Buah	101.018.000	0	0	150 Buah	106.068.900
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	101.018.000	0	0	4 Dokumen	106.068.900
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi	Meningkatnya layanan pengamanan data dan persandian		Persentase Layanan Pengamanan Informasi dan Persandian	100%	77.244.000	0	0	100%	81.106.200
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Terselenggaranya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	77.244.000	0	0	100%	81.106.200
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	77.244.000	0	0	2 Laporan	81.106.200



	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						7.769.607.007	0	0		8.158.087.357	
X	Semua Urusan											
X.XX	Semua Bidang											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Persentase rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat		100%	6.172.321.407	0	0	6.480.937.477
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN		Predikat nilai evaluasi SAKIP		BB .	35.495.000	0	0	37.269.750
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Tapin		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		12 Laporan	35.495.000	0	0	37.269.750
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN		Persentase penyerapan anggaran SKPD		100%	2.952.717.707	0	0	3.100.353.592
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Tapin		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		19 Orang/bulan	2.921.417.807	0	0	3.067.488.697
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Tapin		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3 Laporan	31.299.900	0	0	32.864.895
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN		Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD		100%	1.255.444.900	0	0	1.318.217.145
						Persentase ASN yang memiliki sertifikat keahlian		100%				100%
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Tapin		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	185.723.100	0	0	195.009.255
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kab. Tapin		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	14.400.000	0	0	15.120.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Tapin		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	102.766.000	0	0	107.904.300
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Tapin		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1 Laporan	916.077.000	0	0	961.880.850
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kab. Tapin		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 Paket	36.478.800	0	0	38.302.740
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD		100%	1.338.111.500	0	0	1.405.017.075
						Persentase aset yang tercatat		100%				100%
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		160 Unit	1.078.226.500	0	0	1.152.137.825
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Tapin		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5 Unit	259.885.000	0	0	272.879.250
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN		Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD		100%	387.314.900	0	0	406.680.645
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Tapin		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	225.715.400	0	0	237.001.170
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Tapin		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	161.599.500	0	0	169.679.475
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SKPD		100%	203.237.400	0	0	213.399.270



					Persentase aset yang tercatat	100%				100%	
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit	32.650.000	0	0	52 Unit	34.282.500
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	72.735.000	0	0	1 Unit	76.371.750
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	9 Unit	97.852.400	0	0	9 Unit	102.745.020
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL										
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya keamanan daerah	Meningkatnya investasi daerah		Nilai Investasi	541 Rp. Milyar	392.859.100	0	0	541 Rp. Milyar	412.502.055
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Updating Regulasi Penanaman Modal	100%	293.440.000	0	0	100%	308.112.000
					Persentase Kegiatan Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha	100%				100%	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			Kab. Tapin	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	287.940.000	0	0	1 Dokumen	302.337.000
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			Kab. Tapin	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	1 Kegiatan Usaha	5.500.000	0	0	1 Kegiatan Usaha	5.775.000
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Penyusunan Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Tapin	100%	99.419.100	0	0	100%	104.390.055
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	99.419.100	0	0	1 Dokumen	104.390.055
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya keamanan daerah	Meningkatnya investasi daerah		Nilai Investasi	541 Rp Milyar	92.418.400	0	0	541 Rp Milyar	97.039.320
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			INDONESIA	Persentase Peluan Penanaman Modal yang Dipromosikan	100%	92.418.400	0	0	100%	97.039.320
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			Luar Provinsi Kalsel	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	92.418.400	0	0	1 Dokumen	97.039.320
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Pelayanan Perizinan	85,5 poin	1.008.000.000	0	0	85,5 poin	1.058.400.000
					Persentase perizinan dan non perizinan yang terbit tepat waktu	100%				100%	
					Persentase Pengaduan Masyarakat yang Tertangani	100%				100%	
					Persentase Pelaku Usaha yang berizin	100%				100%	
					Persentase izin yang update	100%				100%	
					Persentase investasi yang lolos izin lingkungan	100%				100%	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			TAPIN	Persentase Perizinan yang Diterbitkan	100%	1.008.000.000	0	0	100%	1.058.400.000
					Persentase Pengaduan yang terselesaikan	100%				100%	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu	10 Orang	365.000.000	0	0	10 Orang	383.250.000



					Perizinan dan Non Perizinan						
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Kab. Tapin	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	600 Pelaku Usaha	278.400.000	0	0	600 Pelaku Usaha	292.320.000
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			Kab. Tapin	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	50 Kegiatan Usaha	364.600.000	0	0	50 Kegiatan Usaha	382.830.000
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya keamanan daerah	Meningkatnya investasi daerah		Nilai Investasi	541 Rp Milyar	61.372.100	0	0	541 Rp Milyar	64.440.705
					Persentase Perumbuhan Investasi	3%				3%	
					Persentase Rasio angka kerja yang terserap terhadap nilai investasi	0,00%				0,00%	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM Tepat Waktu	100%	61.372.100	0	0	100%	64.440.705
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			Kab. Tapin	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	25 Pelaku Usaha	53.773.200	0	0	25 Pelaku Usaha	56.461.860
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			Kab. Tapin	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	10 Kegiatan Usaha.	3.949.000	0	0	10 Kegiatan Usaha.	4.146.450
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			Kab. Tapin	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	10 Kegiatan Usaha	3.649.900	0	0	10 Kegiatan Usaha	3.832.395
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya daya beli masyarakat	Meningkatnya investasi daerah		Persentase data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang update	100%	42.636.000	0	0	100%	44.767.800
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Peningkatan Pelayanan Informasi Pendukung Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	100%	42.636.000	0	0	100%	44.767.800
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Kab. Tapin	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen	42.636.000	0	0	12 Dokumen	44.767.800
	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga						30.632.093.526	0	0		32.163.698.202
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100 persen	4.985.412.316	0	0	100 persen	5.234.682.932
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14 dokumen	14.468.800	0	0	14 dokumen	15.192.240
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan	14.468.800	0	0	14 Laporan	15.192.240



X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 dokumen	2.930.926.679	0	0	3 dokumen	3.077.473.013
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	6.324.800	0	0	1 Laporan	6.641.040
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	5.225.000	0	0	2 Laporan	5.486.250
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang/bulan	2.919.376.879	0	0	25 Orang/bulan	3.065.345.723
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			INDONESIA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 persen	858.416.937	0	0	100 persen	901.337.784
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	59.430.300	0	0	1 Paket	62.401.815
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	77.308.200	0	0	1 Paket	81.173.610
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kab. Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.153.400	0	0	1 Paket	9.611.070
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	22.975.500	0	0	12 Laporan	24.124.275
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Indonesia	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	689.549.537	0	0	12 Laporan	724.027.014
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	166.525.600	0	0	100 persen	174.851.880
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	108.117.600	0	0	5 Unit	113.523.480
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	58.408.000	0	0	5 Unit	61.328.400
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	690.870.600	0	0	100 persen	725.414.130
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	144.000.000	0	0	12 Laporan	151.200.000
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.870.600	0	0	12 Laporan	7.214.130
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	540.000.000	0	0	12 Laporan	567.000.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	324.203.700	0	0	100 persen	340.413.885
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	78.783.700	0	0	5 Unit	82.722.885
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	39.500.000	0	0	5 Unit	41.475.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	205.920.000	0	0	1 Unit	216.216.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan		Persentase peningkatan pemuda yang mendaftar sebagai calon pemuda	0,48 persen	2.661.407.000	0	0	0,48 persen	2.794.477.350



					pelopor (%)						
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			INDONESIA	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	100 persen	1.430.415.600	0	0	100 persen	1.501.936.380
2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda			Kab. Tapin	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	12 Orang	16.428.900	0	0	12 Orang	17.250.345
2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda/Kader Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	12 Orang	20.821.400	0	0	12 Orang	21.862.470
2.19.02.2.01.04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis			Kab. Tapin	Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis	40 Orang	13.757.900	0	0	40 Orang	14.445.795
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi			Kab. Tapin	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan	12 Orang	150.000.000	0	0	12 Orang	157.500.000
2.19.02.2.01.08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda			Kab. Tapin	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	40 Orang	17.253.000	0	0	40 Orang	18.115.650
2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera			Kalimantan Selatan	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan	53 Orang	1.212.154.400	0	0	53 Orang	1.272.762.120
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	1.230.991.400	0	0	100 persen	1.292.540.970
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	12 Dokumen	1.230.991.400	0	0	12 Dokumen	1.292.540.970
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Meningkatnya prestasi olahraga		1. Persentase Cabang Olahraga yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi (%) 2. Persentase Cabang Olahraga Khusus dan Tradisional yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi (%) 3. Cakupan event- event olahraga rekreasi (Event) 4. Persentase Sarana dan Prasarana yang dimanfaatkan (%)	100 persen	22.485.274.210	0	0	100 persen	23.609.537.921
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	1.078.610.800	0	0	100 persen	1.132.541.340
2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan/penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	12 Unit	1.078.610.800	0	0	12 Unit	1.132.541.340
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			KALIMANTAN SELATAN	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 persen	1.060.187.020	0	0	100 persen	1.113.196.371
2.19.03.2.02.01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event	12 Dokumen	801.337.020	0	0	12 Dokumen	841.403.871



					Tingkat Kabupaten/Kota						
2.19.03.2.02.03	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan			Kalimantan Selatan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	200 Orang	258.850.000	0	0	200 Orang	271.792.500
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			KALIMANTAN SELATAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100 persen	880.524.290	0	0	100 persen	924.550.505
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan	200 Orang	800.000.000	0	0	200 Orang	840.000.000
2.19.03.2.03.01	Seleksi Atlet Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	200 Orang	80.524.290	0	0	200 Orang	84.550.505
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			TAPIN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	100 persen	5.612.891.100	0	0	100 persen	5.893.535.655
2.19.03.2.04.01	Standarisasi Organisasi Keolahragaan			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standarisasi Organisasi Keolahragaan	12 Dokumen	5.612.891.100	0	0	12 Dokumen	5.893.535.655
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			KALIMANTAN SELATAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100 persen	13.853.061.000	0	0	100 persen	14.545.714.050
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	12 Dokumen	834.624.600	0	0	12 Dokumen	876.355.830
2.19.03.2.05.04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	12 Dokumen	468.436.400	0	0	12 Dokumen	491.858.220
2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	12 Laporan	300.000.000	0	0	12 Laporan	315.000.000
2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	12 Dokumen	500.000.000	0	0	12 Dokumen	525.000.000
2.19.03.2.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi			Kab. Tapin	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai	12 Unit	11.750.000.000	0	0	12 Unit	12.337.500.000
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan		Persentase Organisasi Kepemudaan yang mendapat pembinaan (%)	0,04 persen	500.000.000	0	0	0,04 persen	525.000.000
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			TAPIN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100 persen	500.000.000	0	0	100 persen	525.000.000
2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	1 Organisasi	450.000.000	0	0	1 Organisasi	472.500.000
2.19.04.2.01.03	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah			Kab. Tapin	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya	40 Orang	30.000.000	0	0	40 Orang	31.500.000
2.19.04.2.01.05	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	12 Laporan	20.000.000	0	0	12 Laporan	21.000.000
	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata						12.352.761.194	0	0		12.970.399.254
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%	100%	5.603.295.194	0	0	100%	5.883.459.954
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100%	9.875.000	0	0	100%	10.368.750



X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kaupaten Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	9.875.000	0	0	13 Laporan	10.368.750
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		TAPIN	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100%	3.231.357.821	0	0	100%	3.392.925.712
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kabupaten Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	276 Orang/bulan	3.223.857.821	0	0	276 Orang/bulan	3.385.050.712
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.750.000	0	0	1 Laporan	3.937.500
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.750.000	0	0	1 Laporan	3.937.500
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		TAPIN	Indeks kepuasan pelayanan ASN Disudpar	4.3 score	1.345.101.723	0	0	4.3 score	1.412.356.809
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kaupaten Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.322.700	0	0	1 Paket	7.688.835
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	158.683.923	0	0	10 Paket	166.618.119
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	79.882.500	0	0	12 Paket	83.876.625
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket	17.909.600	0	0	10 Paket	18.805.080
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.840.000	0	0	1 Paket	4.032.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	5.500.000	0	0	5 Laporan	5.775.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Indonesia	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	1.071.963.000	0	0	50 Laporan	1.125.561.150
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		TAPIN	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	726.115.750	0	0	100%	762.421.538
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kabupaten Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	183.805.550	0	0	10 Unit	192.995.828
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kabupaten Tapin	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	493.895.000	0	0	1 Unit	518.589.750
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kabupaten Tapin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit	48.415.200	0	0	6 Unit	50.835.960
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		TAPIN	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	222.082.000	0	0	100%	233.186.100
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	94.482.000	0	0	12 Laporan	99.206.100
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	127.600.000	0	0	12 Laporan	133.980.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		TAPIN	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	68.762.900	0	0	100%	72.201.045
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kabupaten Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 Unit	26.338.300	0	0	1 Unit	27.655.215



					dibayarkan Pajaknya						
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	11.360.000	0	0	16 Unit	11.928.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	31.064.600	0	0	1 Unit	32.617.830
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya		Persentase Benda Cagar Budaya (BCB) / Situs daerah yang terawat dengan baik (%)	100%	516.619.800	0	0	100%	542.450.790
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase event adat budaya daerah	100%	51.472.000	0	0	100%	54.045.600
2.22.02.2.01.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			Kabupaten Tapin	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5 Objek	45.506.900	0	0	5 Objek	47.782.245
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			Kabupaten Tapin	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	25 Orang	5.965.100	0	0	25 Orang	6.263.355
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Sanggar/Seni Budaya yang mengikuti event seni dan budaya	40%	238.669.800	0	0	40%	250.603.290
2.22.02.2.02.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			Kabupaten Tapin	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	5 Objek	117.304.400	0	0	5 Objek	123.169.620
2.22.02.2.02.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	2 Laporan	57.834.400	0	0	2 Laporan	60.726.120
2.22.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan			Kabupaten Tapin	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10 Sertifikat	63.531.000	0	0	10 Sertifikat	66.707.550
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Pemangku Adat Dayak yang Aktif	80%	226.478.000	0	0	80%	237.801.900
2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat			Kabupaten Tapin	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	27 Objek	226.478.000	0	0	27 Objek	237.801.900
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya		Persentase sanggar seni budaya saerah yang aktif (%)	50%	849.655.000	0	0	50%	892.137.750
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase sanggar seni/ budaya yang terbina	40%	849.655.000	0	0	40%	892.137.750
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			Kabupaten Tapin	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	50 Orang	305.114.000	0	0	50 Orang	320.369.700
2.22.03.2.01.02	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan			Kabupaten Tapin	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standardisasi	50 Sertifikat	245.600.000	0	0	50 Sertifikat	257.880.000
2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			Kabupaten Tapin	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3 Lembaga	298.941.000	0	0	3 Lembaga	313.888.050
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya		Persentase Benda Cagar Budaya (BCB) / Situs daerah yang terawat dengan baik	100%	191.509.900	0	0	100%	201.085.395
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Cagar Budaya yang terdaftar	35%	22.069.900	0	0	35%	23.173.395
2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya			Kabupaten Tapin	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	5 Objek	22.069.900	0	0	5 Objek	23.173.395



2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Benda Cagar Budaya/Situs yang dipelihara	100%	169.440.000	0	0	100%	177.912.000
2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya			Kabupaten Tapin	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	27 Objek	169.440.000	0	0	27 Objek	177.912.000
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Meningkatkan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan budaya		Persentase Benda Cagar Budaya (BCB) / Situs daerah yang terawat dengan baik	100%	187.067.100	0	0	100%	196.420.455
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Benda Cagar Budaya/Situs yang dipelihara	100%	187.067.100	0	0	100%	196.420.455
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum			Kabupaten Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	5 Unit	187.067.100	0	0	5 Unit	196.420.455
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Sektor Pariwisata	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan		Persentase destinasi wisata yang dikelola dengan baik	75%	3.705.115.000	0	0	75%	3.890.370.750
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang terpenuhi	30%	14.756.000	0	0	30%	15.493.800
3.26.02.2.01.02	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	1 Dokumen	14.756.000	0	0	1 Dokumen	15.493.800
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase destinasi pariwisata yang terpelihara dengan baik	75%	503.994.300	0	0	75%	529.194.015
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4 Unit	443.799.300	0	0	4 Unit	465.989.265
3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1 Laporan	60.195.000	0	0	1 Laporan	63.204.750
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase sarana dan prasarana destinasi pariwisata yang terpenuhi	30%	3.113.835.700	0	0	30%	3.269.527.485
3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	10 Unit	3.113.835.700	0	0	10 Unit	3.269.527.485
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Destinasi Wisata yang dikembangkan	30%	72.529.000	0	0	30%	76.155.450
3.26.02.2.04.04	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	1 Laporan	72.529.000	0	0	1 Laporan	76.155.450
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya Sektor Pariwisata	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan		Persentase Destinasi Wisata yang dipasarkan	40%	1.032.291.900	0	0	40%	1.083.906.495
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase promosi pariwisata	35%	1.032.291.900	0	0	35%	1.083.906.495
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	312.902.500	0	0	1 Dokumen	328.547.625
3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Laporan	468.891.900	0	0	4 Laporan	492.336.495
3.26.03.2.01.03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	84.170.000	0	0	1 Dokumen	88.378.500
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen	166.327.500	0	0	1 Dokumen	174.643.875



3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya Sektor Pariwisata	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan		Persentase kelompok sadar wisata yang aktif	30%	58.861.000	0	0	30%	61.804.050
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			TAPIN	Persentase Pokdarwis yang mengikuti pelatihan/bimtek kepariwisataan	80%	58.861.000	0	0	80%	61.804.050
3.26.04.2.02.09	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen	58.861.000	0	0	1 Dokumen	61.804.050
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya Sektor Pariwisata	Meningkatkan Kunjungan Wisatawan		Persentase kelompok sadar wisata yang aktif	30%	208.346.300	0	0	30%	218.763.615
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			TAPIN	Persentase Pokdarwis yang dibina	30%	185.762.300	0	0	30%	195.050.415
3.26.05.2.01.02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			Kabupaten Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	50 Orang	94.762.800	0	0	50 Orang	99.500.940
3.26.05.2.01.03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)			Kabupaten Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	50 Orang	59.161.500	0	0	50 Orang	62.119.575
3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan	31.838.000	0	0	1 Laporan	33.429.900
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			TAPIN	Persentase pelaku usaha yang mengikuti pelatihan/bimtek usaha pariwisata	80%	22.584.000	0	0	80%	23.713.200
3.26.05.2.02.01	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif			Kabupaten Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	50 Orang	22.584.000	0	0	50 Orang	23.713.200
	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan						7.213.571.615	0	0		7.574.250.196
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Deraah		Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang wajib dibuat	100%	5.754.125.636	0	0	100%	6.041.831.918
					Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik	100%				100%	
					Persentase pemenuhan pengelolaan administrasi umum dan kepegawian SKPD	100%				100%	
					Persentase penyelesaian dokumen keuangan yang wajib dibuat	100%				100%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD yang Disusun	13 Laporan	19.781.800	0	0	13 Laporan	20.770.890
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13 Laporan	19.781.800	0	0	13 Laporan	20.770.890
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD yang Disusun (Laporan)	2 Laporan	3.066.478.725	0	0	2 Laporan	3.219.802.661
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan	3.046.873.925	0	0	19 Orang/bulan	3.199.217.621



X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	18.401.200	0	0	1 Laporan	19.321.260
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.203.600	0	0	1 Laporan	1.263.780
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		TAPIN	Jumlah dokumen /aset yang tercatat terkait sarana dan prasarana aparatur	52 Buah	1.084.611.318	0	0	52 Buah	1.138.841.884
				Jumlah berkas/ dokumen kepegawaian yang tertib administrasinya dilayani secara tertib	157 Berkas				157 Berkas	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19.635.860	0	0	1 Paket	20.617.653
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	55.449.707	0	0	1 Paket	58.222.192
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	232.914.008	0	0	1 Paket	244.559.708
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	23.056.232	0	0	1 Paket	24.209.044
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	24.783.411	0	0	1 Paket	26.022.582
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	5.428.500	0	0	1 Laporan	5.699.925
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	723.343.600	0	0	1 Laporan	759.510.780
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		TAPIN	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	854.324.053	0	0	100%	897.040.256
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kabupaten Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	83.532.494	0	0	11 Unit	87.709.119
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kabupaten Tapin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	73 Unit	770.791.559	0	0	73 Unit	809.331.137
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		TAPIN	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	425.111.060	0	0	100%	446.366.613
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	247.135.200	0	0	1 Laporan	259.491.960
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.053.200	0	0	1 Laporan	2.155.860
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	175.922.660	0	0	1 Laporan	184.718.793
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		TAPIN	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	303.818.680	0	0	100%	319.009.614
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kabupaten Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit	59.006.180	0	0	2 Unit	61.956.489
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kabupaten Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	21.875.000	0	0	10 Unit	22.968.750



X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	222.937.500	0	0	1 Unit	234.084.375
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN										
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya kepuasan publik atas pelayanan Perpustakaan		Persentase Pemustaka (pengunjung perpustakaan)	12,83%	927.065.365	0	0	12,83%	973.418.633
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan	76 poin				76 poin	
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Perpustakaan yang dapat diakses pemustaka	5,97%	741.453.779	0	0	5,97%	778.526.468
					Persentase rata - rata pemanfaatan Perpustakaan	0,56%				0,56%	
					Persentase peningkatan Perpustakaan yang aktif sesuai SNP	25%				25%	
					Persentase peningkatan tenaga pengelola Perpustakaan yang terampil	25%				25%	
					Persentase peningkatan jumlah koleksi bahan perpustakaan	4,20%				4,20%	
2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	13 Layanan	257.862.224	0	0	13 Layanan	270.755.335
2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	204 Orang	47.497.944	0	0	204 Orang	49.872.841
2.23.02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	28.020.800	0	0	1 Dokumen	29.421.840
2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka			Kabupaten Tapin	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	900 Eksemplar	276.580.000	0	0	900 Eksemplar	290.409.000
2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			Kabupaten Tapin	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	900 Eksemplar	50.200.010	0	0	900 Eksemplar	52.710.011
2.23.02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	2 Perpustakaan	81.292.801	0	0	2 Perpustakaan	85.357.441
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Perpustakaan yang dapat diakses pemustaka	5,97%	185.611.586	0	0	5,97%	194.892.165
					Persentase rata-rata pemanfaatan perpustakaan	0.56 %				0.56 %	
2.23.02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			Kabupaten Tapin	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	2 Lokus	46.073.586	0	0	2 Lokus	48.377.265
2.23.02.2.02.03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			Kabupaten Tapin	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	215 Orang	139.538.000	0	0	215 Orang	146.514.900
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN										



2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin		Persentase peningkatan SKPD yang menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai NSPK	3,85%	457.385.614	0	0	3,85%	480.254.895
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah SKPD/Kecamatan/Kelurahan/Desa arsip yang ditata sesuai NSPK	12 Unit	241.820.674	0	0	12 Unit	253.911.708
2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			Kabupaten Tapin	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1150 Berkas	160.441.954	0	0	1150 Berkas	168.464.052
2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			Kabupaten Tapin	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	589 Berkas	50.730.920	0	0	589 Berkas	53.267.466
2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Laporan	30.647.800	0	0	5 Laporan	32.180.190
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah SKPD/Kecamatan/Kelurahan/Desa yang dikelola sesuai NSPK	5 Unit	215.564.940	0	0	5 Unit	226.343.187
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			Kabupaten Tapin	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	50 Arsip	215.564.940	0	0	50 Arsip	226.343.187
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin		Persentase peningkatan SKPD yang menerapkan pengelolaan kearsipan sesuai NSPK	3,85%	74.995.000	0	0	3,85%	78.744.750
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun			TAPIN	Jumlah SKPD yang arsipnya dimusnahkan sesuai NSPK	1 Unit	74.995.000	0	0	1 Unit	78.744.750
2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			Kabupaten Tapin	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	420 Arsip	74.995.000	0	0	420 Arsip	78.744.750
	Dinas Perikanan						8.851.594.408	0	0		9.294.174.128
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit	266.550.400	0	0	30 Unit	279.877.920
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	23.600.000	0	0	12 Unit	24.780.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	302.480.000	0	0	12 Unit	317.604.000
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN										
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Sektor Agribisnis	Meningkatnya Produksi Perikanan		Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap	100%	206.983.200	0	0	100%	217.532.360
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawan, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			KALIMANTAN SELATAN	waktu pemanfaatan sumberdaya perairan (bulan)	12 Bulan	159.464.200	0	0	12 Bulan	167.437.410
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan			Tapin	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	12 Dokumen	99.588.200	0	0	12 Dokumen	104.567.610
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			Tapin	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	12 Unit	59.876.000	0	0	12 Unit	62.869.800



3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			KALIMANTAN SELATAN	Waktu pemanfaatan sumberdaya perairan (bulan)	12 Bulan	47.519.000	0	0	12 Bulan	49.894.950
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil			Tapin	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	12 Orang	47.519.000	0	0	12 Orang	49.894.950
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDDAYA	Meningkatnya Sektor Agribisnis	Meningkatnya Produksi Perikanan		Persentase Realisasi Produksi Perikanan Budidaya	100%	1.476.268.656	0	0	100%	1.550.082.089
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			KALIMANTAN SELATAN	Jumlah penerima bantuan hibah bagi Desa P2WKSS dan percontohan budidaya ikan (Kelompok) dan rehab sarana budidaya	12 Bulan	821.250.000	0	0	12 Bulan	862.312.500
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil			Tapin	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	12 Kelompok	821.250.000	0	0	12 Kelompok	862.312.500
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			KALIMANTAN SELATAN	Jumlah penerima bantuan hibah bagi Desa P2WKSS dan percontohan budidaya ikan (Kelompok) dan rehab sarana budidaya	12 Bulan	655.018.656	0	0	12 Bulan	687.769.589
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Tapin	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Unit	323.311.956	0	0	12 Unit	339.477.554
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Tapin	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Unit	295.720.700	0	0	12 Unit	310.506.735
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Tapin	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	12 Dokumen	35.986.000	0	0	12 Dokumen	37.785.300
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Sektor Agribisnis	Meningkatnya Produksi Perikanan		Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap	100%	156.687.800	0	0	100%	164.522.190
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			KALIMANTAN SELATAN	Jumlah Razia terpadu dan pengawasan SD Perikanan (kali)	12 Bulan	156.687.800	0	0	12 Bulan	164.522.190
3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	12 Dokumen	156.687.800	0	0	12 Dokumen	164.522.190
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Sektor Agribisnis	Meningkatnya Produksi Perikanan		Persentase jumlah kelompok usaha perikanan yang naik kelas	12 Bulan	183.751.600	0	0	12 Bulan	192.939.180
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			KALIMANTAN SELATAN	Jumlah Waktu pengolahan informasi data atas hasil perikanan (Bulan)	12 Bulan	36.400.000	0	0	12 Bulan	38.220.000
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Tapin	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	12 Dokumen	36.400.000	0	0	12 Dokumen	38.220.000
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			KALIMANTAN SELATAN	Jumlah uji sampel produk perikanan	12 Bulan	5.800.000	0	0	12 Bulan	6.090.000
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			Tapin	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	12 Unit Usaha	5.800.000	0	0	12 Unit Usaha	6.090.000
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota			KALIMANTAN SELATAN	Jumlah Waktu pengolahan informasi data atas hasil perikanan (Bulan)	12 Bulan	141.551.600	0	0	12 Bulan	148.629.180
3.25.06.2.03.01	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Tapin	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk	12 Ton	113.803.800	0	0	12 Ton	119.493.990



					Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan/Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Tapin	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	12 Pelaku Usaha	27.747.800	0	0	12 Pelaku Usaha	29.135.190
	Dinas Pertanian						53.534.275.361	0	0		56.210.989.129
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Indeks Layanan Perkantoran (%)	100%	23.808.568.966	0	0	100%	24.998.997.414
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan (Dokumen)	5 Dokumen	82.808.000	0	0	5 Dokumen	86.948.400
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	82.808.000	0	0	3 Laporan	86.948.400
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala (Dokumen)	4 Dokumen	13.192.506.226	0	0	4 Dokumen	13.852.131.537
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	122 Orang/bulan	13.115.631.226	0	0	122 Orang/bulan	13.771.412.787
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	39.600.000	0	0	1 Dokumen	41.580.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	5.475.000	0	0	1 Laporan	5.748.750
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	31.800.000	0	0	1 Laporan	33.390.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Waktu penyediaan ATK (Bulan)	12 Bulan	1.802.089.840	0	0	12 Bulan	1.892.194.332
					Waktu Penyediaan makanan dan minuman (Bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu pemenuhan barang cetakan penggandaan dan penulisan (Bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
					Waktu pelaksanaan rapat-rapat konsultasi pelatihan Pembinaan/monitoring ke kecamatan dan menghadiri rapat koordinasi (Bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
					Jumlah promosi komoditi pertanian dan produk olahan serta ekspos kegiatan (Kali)	1 Kali				1 Kali	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	129.984.600	0	0	1 Paket	136.483.830
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	237.440.100	0	0	1 Paket	249.333.105
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	52.353.300	0	0	1 Paket	54.970.965
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	49.006.840	0	0	1 Paket	51.457.182



X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	16.400.000	0	0	1 Laporan	17.220.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.316.885.000	0	0	1 Laporan	1.382.729.250
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase Pemenuhan Sarana dan Kegiatan penunjang Operasional yang diperlukan (%)	100%	6.816.454.000	0	0	100%	7.157.276.700
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	927.725.400	0	0	0 Unit	974.111.670
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	4.498.610.000	0	0	0 Unit	4.723.540.500
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	1.390.118.600	0	0	0 Unit	1.459.624.530
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu Penyediaan Telpon Internet Listrik dan Air (Bulan)	12 Bulan	577.332.800	0	0	12 Bulan	606.199.440
					Waktu pembayaran upah untuk petugas kebersihan kantor dan keamanan kantor (Bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	290.332.800	0	0	1 Laporan	304.849.440
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	287.000.000	0	0	1 Laporan	301.350.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Waktu terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor hingga dapat digunakan dan berfungsi dengan baik (Bulan)	12 Bulan	1.337.378.100	0	0	12 Bulan	1.404.247.005
					Waktu pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional (Bulan)	12 Bulan				12 Bulan	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kabupaten Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	111 Unit	393.243.100	0	0	111 Unit	412.905.255
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	31.250.000	0	0	0 Unit	32.812.500
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	912.885.000	0	0	0 Unit	958.529.250
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN										
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Sektor Agribisnis	Meningkatnya Persentase PDRB Sektor Pertanian		Jumlah Produksi Padi (Ton)	427.437 Ton	8.102.438.345	0	0	427.437 Ton	8.507.560.262
					Jumlah Produksi Jagung (Ton)	8.416 Ton				8.416 Ton	
					Persentase Peningkatan Produksi Padi (%)	1,50%				1,50%	
					Persentase Peningkatan produksi jagung (%)	1,50%				1,50%	
					Jumlah Produksi Cabai Rawit Hiyung (Ton)	2.115 Ton				2.115 Ton	
					Jumlah Produksi Jahe (Ton)	551 Ton				551 Ton	
					Jumlah Produksi Jeruk (Ton)	17.051 Ton				17.051 Ton	
					Persentase Peningkatan Produksi Cabe Rawit Hiyung (%)	1,49%				1,49%	



					Persentase Peningkatan Produksi Jahe (%)	11,31%				11,31%	
					Persentase Peningkatan Produksi Jeruk (%)	3%				3%	
					Jumlah Produksi Karet (Ton)	9.305 Ton				9.305 Ton	
					Jumlah Produksi Kelapa Sawit (Ton)	55.710 Ton				55.710 Ton	
					Persentase Peningkatan Produksi Karet (%)	3%				3%	
					Persentase Peningkatan Produksi Kelapa Sawit (%)	5%				5%	
					Jumlah Produksi Daging (Ton)	4.737 Ton				4.737 Ton	
					Jumlah Produksi Telur (Ton)	6.945 Ton				6.945 Ton	
					Persentase Peningkatan Produksi Daging (%)	0,34%				0,34%	
					Persentase Peningkatan Produksi Telur (%)	2,69%				2,69%	
					Jumlah Surplus Beras (Ton)	253.455 Ton				253.455 Ton	
					Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	23,53%				23,53%	
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			TAPIN	Produktivitas Padi (Ku/Ha)	51,48 Ku/Ha	5.055.976.400	0	0	51,48 Ku/Ha	5.308.775.220
					Produktivitas Jagung (Ku/Ha)	51,23 Ku/Ha				51,23 Ku/Ha	
					Luas Panen Padi (Ha)	84.294 Ha				84.294 Ha	
					Luas Panen Jagung (Ha)	1.643 Ha				1.643 Ha	
					Produktivitas Cabai Rawit (Ku/Ha)	8,99 Ku/Ha				8,99 Ku/Ha	
					Produktivitas Jahe (Ku/Ha)	95 Ku/Ha				95 Ku/Ha	
					Produktivitas Jeruk (Ku/Ha)	1,03 Ku/Ha				1,03 Ku/Ha	
					Luas Panen Cabai Rawit Hiyung (Ha)	114,34 Ha				114,34 Ha	
					Luas Panen Jahe (Ha)	58 Ha				58 Ha	
					Luas Panen Jeruk (Ha)	487,86 Ha				487,86 Ha	
					Produktivitas Tanaman Karet (Ku/Ha)	690,93 Ku/Ha				690,93 Ku/Ha	
					Produktivitas Tanaman Sawit (Kg/Ha)	3.645,92 Kg/Ha				3.645,92 Kg/Ha	
					Luas Tanaman Karet (Ha)	15.429 Ha				15.429 Ha	
					Luas Tanaman Sawit (Ha)	57.383 Ha				57.383 Ha	
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			Kabupaten Tapin	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5 Laporan	5.055.976.400	0	0	5 Laporan	5.308.775.220
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Cakupan Wilayah Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Kecamatan	128.377.600	0	0	12 Kecamatan	134.796.480
3.27.02.2.03.01	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			Kabupaten Tapin	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1 Laporan	128.377.600	0	0	1 Laporan	134.796.480
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijaunan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Populasi Sapi (ekor)	7.495 Ekor	2.918.084.345	0	0	7.495 Ekor	3.063.988.562



					Populasi Kambing (ekor)	4.920 Ekor				4.920 Ekor	
					Populasi Unggas (ekor)	2.364.135 Ekor				2.364.135 Ekor	
3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak			Kabupaten Tapin	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	1.700 Ekor	2.374.913.300	0	0	1.700 Ekor	2.493.658.965
3.27.02.2.05.04	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan			Kabupaten Tapin	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	0 Ton	306.629.445	0	0	0 Ton	321.960.917
3.27.02.2.05.06	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan			Kabupaten Tapin	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1 Laporan	236.541.600	0	0	1 Laporan	248.368.680
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Persentase PDRB Sektor Pertanian		Persentase Capaian Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian (%)	100%	16.565.992.950	0	0	100%	17.394.292.598
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian			TAPIN	Jumlah Peserta AUTP (Ha)	3500 Ha	93.450.500	0	0	3500 Ha	98.123.025
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan	93.450.500	0	0	1 Laporan	98.123.025
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian			TAPIN	Jumlah luas lahan fungsional yang ditanami (Ha)	63163 Ha	16.472.542.450	0	0	63163 Ha	17.296.169.573
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			Kabupaten Tapin	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	5 Unit	1.971.598.800	0	0	5 Unit	2.070.178.740
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani			Kabupaten Tapin	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	30 Unit	13.628.797.030	0	0	30 Unit	14.310.236.882
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya			Kabupaten Tapin	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	872.146.620	0	0	2 Unit	915.753.951
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Persentase PDRB Sektor Pertanian		Persentase penyakit hewan yang tertangani (%)	100%	402.112.200	0	0	100%	422.217.810
					Persentase Hewan Ternak Bebas Penyakit (%)	100%				100%	
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Pemutusan dan Pembatasan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Hewan yang divaksin dan diobati (Ekor)	6000 Ekor	165.475.400	0	0	6000 Ekor	173.749.170
3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			Kabupaten Tapin	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Laporan	165.475.400	0	0	1 Laporan	173.749.170
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Waktu Pelaksanaan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	9.066.100	0	0	12 Bulan	9.519.405
3.27.04.2.02.03	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	9.066.100	0	0	1 Laporan	9.519.405
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Jumlah Waktu Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	39.108.100	0	0	12 Bulan	41.063.505
3.27.04.2.03.02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			Kabupaten Tapin	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 Laporan	39.108.100	0	0	1 Laporan	41.063.505
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan PERSYARATAN Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			TAPIN	Jumlah Waktu Penerapan dan Pengawasan PERSYARATAN Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	12 Bulan	188.462.600	0	0	12 Bulan	197.885.730
3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan			Kabupaten Tapin	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1 Laporan	188.462.600	0	0	1 Laporan	197.885.730
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Persentase PDRB Sektor Pertanian		-	0%	823.425.000	0	0	0%	864.596.250
					Waktu Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	12 bulan				12 bulan	
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			TAPIN	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	0%	823.425.000	0	0	0%	864.596.250



3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan			Kabupaten Tapin	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	6 Ha	823.425.000	0	0	6 Ha	864.596.250
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Persentase PDRB Sektor Pertanian		-Persentase Perijinan yang dipenuhi	100%	79.790.000	0	0	100%	83.779.500
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	-	0%	79.790.000	0	0	0%	83.779.500
3.27.06.2.01.03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian			Kabupaten Tapin	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1 Laporan	79.790.000	0	0	1 Laporan	83.779.500
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Persentase PDRB Sektor Pertanian		-Persentase Kelas kelompok tani Lanjut	73,09%	3.751.947.900	0	0	73,09%	3.939.545.295
					Persentase Penyuluh yang bersertifikat Kompetensi Teknis (%)	75,00%				75,00%	
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			TAPIN	-	0%	3.751.947.900	0	0	0%	3.939.545.295
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa			Kabupaten Tapin	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit	633.562.200	0	0	0 Unit	665.240.310
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			Kabupaten Tapin	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0 Unit	449.821.900	0	0	0 Unit	472.312.995
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			Kabupaten Tapin	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	0 Unit	281.454.700	0	0	0 Unit	295.527.435
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani			Kabupaten Tapin	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	0 Unit	75.715.100	0	0	0 Unit	79.500.855
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	0 Unit	2.311.394.000	0	0	0 Unit	2.426.963.700
	Dinas Perdagangan						10.851.463.200	0	0		11.394.036.360
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Dinas Perdagangan	A Nilai	5.129.463.200	0	0	A Nilai	5.385.936.360
					Persentase Penyerapan Anggaran	100 persen				100 persen	
					Persentase Aset Yang Tercatat	100 persen				100 persen	
					Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian ASN	100 persen				100 persen	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	10 Dokumen	15.000.000	0	0	10 Dokumen	15.750.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Rantau	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	15.000.000	0	0	10 Laporan	15.750.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	4 Dokumen	3.720.093.299	0	0	4 Dokumen	3.906.097.964
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Rantau	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/bulan	3.709.793.299	0	0	360 Orang/bulan	3.895.282.964
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Rantau	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.000.000	0	0	1 Laporan	4.200.000



X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Rantau	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	6.300.000	0	0	2 Laporan	6.615.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		TAPIN	Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaianya dilayani secara tertib	30 orang	661.500.000	0	0	30 orang	694.575.000
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kab. Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	18.000.000	0	0	3 Paket	18.900.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kab. Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	68.000.000	0	0	3 Paket	71.400.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Rantau	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	92.000.000	0	0	1 Paket	96.600.000
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kab. Tapin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	10.000.000	0	0	3 Paket	10.500.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kab. Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3.250.000	0	0	3 Paket	3.412.500
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material		Rantau	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	3.250.000	0	0	1 Paket	3.412.500
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Rantau	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	7.000.000	0	0	1 Laporan	7.350.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rantau	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	460.000.000	0	0	1 Laporan	483.000.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		TAPIN	Jumlah Aset yang tercatat	25 unit	172.000.000	0	0	25 unit	180.600.000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rantau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	135.000.000	0	0	10 Unit	141.750.000
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Rantau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 Unit	37.000.000	0	0	15 Unit	38.850.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		TAPIN	Tersedianya Dokumen Pembayaran Rekening Listrik, Internet, Telepon, dan Jasa Administrasi	12 bulan	330.040.800	0	0	12 bulan	346.542.840
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	135.040.800	0	0	1 Laporan	141.792.840
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	195.000.000	0	0	1 Laporan	204.750.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		TAPIN	Persentase Aset yang dipelihara	100 persen	230.829.101	0	0	100 persen	242.370.556
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kab. Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit	80.000.000	0	0	20 Unit	84.000.000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kab. Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20.000.000	0	0	20 Unit	21.000.000
X.XX.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud		Rantau	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit	7.000.000	0	0	3 Unit	7.350.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Kab. Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	123.829.101	0	0	3 Unit	130.020.556
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									



3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,50 persen	52.000.000	0	0	12,50 persen	54.600.000
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			TAPIN	Terciptanya Tertib Usaha perdagangan	100%	52.000.000	0	0	100%	54.600.000
3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Kab. Tapin	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	52.000.000	0	0	1 Dokumen	54.600.000
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan		Indeks Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar	79 Indeks	4.925.000.000	0	0	79 Indeks	5.171.250.000
					Persentase bangunan pasar yang memenuhi kriteria layak	89 persen				89 persen	
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			TAPIN	Jumlah Sarana dan prasarana yang dibangun/diperbaiki	4 buah	4.850.000.000	0	0	4 buah	5.092.500.000
					Jumlah Petugas Keamanan yang bertugas	1800 org/hari				1800 org/hari	
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			Kabupaten Tapin	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit	2.700.000.000	0	0	4 Unit	2.835.000.000
3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			Kab. Tapin	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	10 Unit	2.150.000.000	0	0	10 Unit	2.257.500.000
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			TAPIN	Persentase Data Penyewa Toko/Kios/Los/Warung	100 Persen	75.000.000	0	0	100 Persen	78.750.000
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 Dokumen	75.000.000	0	0	1 Dokumen	78.750.000
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan		Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok	1,40 persen	40.000.000	0	0	1,40 persen	42.000.000
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Laporan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100 persen	25.000.000	0	0	100 persen	26.250.000
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			Rantau	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	48 Laporan	10.000.000	0	0	48 Laporan	10.500.000
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 Laporan	15.000.000	0	0	4 Laporan	15.750.000
3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Penyaluran Pupuk Bersubsidi yang tepat waktu, tepat Jumlah dan Tepat Sasaran	100 persen	15.000.000	0	0	100 persen	15.750.000
3.30.04.2.03.03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 Laporan	15.000.000	0	0	1 Laporan	15.750.000
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan		Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	12,50 persen	130.000.000	0	0	12,50 persen	136.500.000
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Cakupan Pembinaan pelaku usaha	80 persen	130.000.000	0	0	80 persen	136.500.000
					Jumlah Pameran produk lokal yang diikuti	3 Kali				3 Kali	
					Persentase Jenis Produk Lokal yang berpotensi dipromosikan	24 jenis				24 jenis	
					Persentase pelaku usaha yang berpotensi dipromosikan	30 Pelaku Usaha				30 Pelaku Usaha	
3.30.05.2.01.01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota			Kabupaten Tapin	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	30 Pelaku Usaha	20.000.000	0	0	30 Pelaku Usaha	21.000.000



3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional			Luar Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	2 Pelaku Usaha	60.000.000	0	0	2 Pelaku Usaha	63.000.000
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal			Provinsi Kalimantan Selatan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	3 Pelaku Usaha	50.000.000	0	0	3 Pelaku Usaha	52.500.000
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan		Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah tahun berjalan	70 persen	225.000.000	0	0	70 persen	236.250.000
					Persentase Pelaku Usaha Bidang Metrologi Legal yang memenuhi ketentuan berlaku terhadap UTTP dan BDKT	100 persen				100 persen	
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			TAPIN	Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera	500 unit	225.000.000	0	0	500 unit	236.250.000
					Jumlah Pelaku Usaha dibidang metrologi legal yang dibina	400 orang				400 orang	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.500.000	0	0	1 Laporan	4.725.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1.085.395.000	0	0	1 Laporan	1.139.664.750
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase pengadaan BMD dalam kondisi baik	100%	144.152.000	0	0	100%	151.359.600
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Rantau	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	37 Unit	144.152.000	0	0	37 Unit	151.359.600
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	168.800.000	0	0	100%	177.240.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Rantau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	66.000.000	0	0	1 Laporan	69.300.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Rantau	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	102.800.000	0	0	1 Laporan	107.940.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	44.929.100	0	0	100%	47.175.555
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Rantau	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	30.349.100	0	0	2 Unit	31.866.555
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Rantau	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	14.580.000	0	0	12 Unit	15.309.000
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah		Persentase Koperasi Aktif	87,59%	30.372.200	0	0	87,59%	31.890.810
					Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat	70%				70%	
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Koperasi Aktif	87,41%	30.372.200	0	0	87,41%	31.890.810
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			Rantau	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Unit Usaha	30.372.200	0	0	5 Unit Usaha	31.890.810
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah		Persentase Koperasi Aktif	87,59%	17.767.000	0	0	87,59%	18.655.350
					Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang	70%				70%	



					meningkat						
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		TAPIN		Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat	60%	17.767.000	0	0	60%	18.655.350
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		Rantau		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	20 Orang	17.767.000	0	0	20 Orang	18.655.350
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Koperasi Aktif	87,59%	39.368.100	0	0	87,59%	41.336.505
					Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat	70%				70%	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		TAPIN		Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat	60%	39.368.100	0	0	60%	41.336.505
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota		Rantau		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	20 Orang	39.368.100	0	0	20 Orang	41.336.505
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM		Meningkatnya Koperasi yang berkualitas dan Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Mikro	20,90%	519.102.541	0	0	20,90%	545.057.668
					Persentase UMKM Yang Memiliki Izin Usaha	16,91%				16,91%	
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		TAPIN		Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Mikro	19,50%	519.102.541	0	0	19,50%	545.057.668
					Persentase Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki izin Usaha	15,95%				15,95%	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi		Rantau		Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	5 Unit Usaha	519.102.541	0	0	5 Unit Usaha	545.057.668
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Sektor Agrobisnis		Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia	0,38%	1.130.719.900	0	0	0,38%	1.187.255.895
					Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia	0,27%				0,27%	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		TAPIN		Persentase Bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia	0,37 %	1.130.719.900	0	0	0,37 %	1.187.255.895
					Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia	0,26 %				0,26 %	
3.31.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		Rantau		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	11.000.000	0	0	1 Dokumen	11.550.000
3.31.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Rantau		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	108.796.300	0	0	1 Dokumen	114.236.115
3.31.02.2.01.04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		Rantau		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	151.153.700	0	0	1 Dokumen	158.711.385
3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Rantau		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	859.769.900	0	0	1 Dokumen	902.758.395
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Sektor Agrobisnis		Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	0,38%	63.995.400	0	0	0,38%	67.195.170



					Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka	0,27%				0,27%	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka	2,31%	63.995.400	0	0	2,31%	67.195.170
3.31.03.2.01.01	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Rantau	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 Dokumen	63.995.400	0	0	1 Dokumen	67.195.170
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Meningkatnya Perkembangan dan Daya Saing Industri		Persentase Bertambahnya Usaha Industri Logam dan Aneka	0,38%	143.351.000	0	0	0,38%	150.518.550
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka	0,27%				0,27%	
3.31.04.2.01.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Logam dan Aneka	2,01 %	143.351.000	0	0	2,01 %	150.518.550
3.31.04.2.01.01	Facilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			Rantau	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	98.616.900	0	0	1 Dokumen	103.547.745
3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas			Rantau	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	1 Dokumen	35.401.500	0	0	1 Dokumen	37.171.575
3.31.04.2.01.03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas			Rantau	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	9.332.600	0	0	1 Dokumen	9.799.230
	Sekretariat Daerah (Bagian Tata Pemerintahan)						641.560.600	0	0		673.638.630
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas		Persentasi kebijakan Administrasi Pemerintahan Yang Diindak Lanjuti	100 persen	641.560.600	0	0	100 persen	673.638.630
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan			TAPIN	terlaksananya administrasi tata pemerintahan	100 persen	641.560.600	0	0	100 persen	673.638.630
4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan			kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	128.403.500	0	0	1 Dokumen	134.823.675
4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	1 Dokumen	257.015.700	0	0	1 Dokumen	269.866.485
4.01.02.2.01.03	Facilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	256.141.400	0	0	3 Dokumen	268.948.470
	Sekretariat Daerah (Bagian Hukum)						952.081.900	0	0		999.685.995



X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah serta terlaksananya Pemberian Bantuan Hukum		Persentase Produk Hukum Daerah (Perda/Perbup/ SK) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	952.081.900	0	0	100%	999.685.995
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			TAPIN	Persentase Usulan Raperda/Perbup/Keppub Yang diharmonisasi (%)	100%	952.081.900	0	0	100%	999.685.995
4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	258 Dokumen	238.684.000	0	0	258 Dokumen	250.618.200
4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum			Kabupaten Tapin	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 Kasus	485.580.900	0	0	3 Kasus	509.859.945
4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			Kabupaten Tapin	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	258 Dokumen	227.817.000	0	0	258 Dokumen	239.207.850
	Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi)						860.903.000	0	0		903.948.150
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas penerapan SAKIP SKPD di Pemda		Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Pemkab. Tapin	Tinggi Tingkat	860.903.000	0	0	Tinggi Tingkat	903.948.150
					Indeks Kepuasan Masyarakat Pemkab Tapin	83 Indeks				83 Indeks	
					Jumlah Inovasi yang masuk dalam kompetisi penilaian tingkat nasional	1 Buah				1 Buah	
					Nilai AKIP Pemkab Tapin	BB Predikat				BB Predikat	
					Indeks Reformasi Birokrasi Pemkab Tapin	BB Predikat				BB Predikat	
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi			TAPIN	Persentase SKPD dengan Tingkat Kematangan Level Tinggi	50%	860.903.000	0	0	50%	903.948.150
					Persentase SKPD binaan dengan kinerja pelayanan berkategori baik	89%				89%	
					Jumlah Inovasi yang lolos penilaian seleksi skala nasional	9 Buah				9 Buah	
					Persentase SKPD binaan dengan nilai SAKIP SKPD berkategori sangat baik	100%				100%	
					Persentase SKPD binaan dengan nilai RB SKPD berkategori sangat baik	100%				100%	
X.XX.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			Rantau	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	199.178.600	0	0	3 Dokumen	209.137.530
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			Rantau	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	113.345.400	0	0	2 Laporan	119.012.670
X.XX.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			Rantau	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	548.379.000	0	0	3 Dokumen	575.797.950
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										



4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
	Sekretariat Daerah (Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol)					5.129.572.600	0	0			5.386.051.230
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatkan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan		Indeks kualitas pelayanan keprotokolan, Persentase dokumentasi pimpinan yang terpublikasi secara tepat dan akurat	Baik (62,51-81,25) %	5.129.572.600	0	0	Baik (62,51-81,25) %	5.386.051.230
X.XX.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		INDONESIA;KALIMANTAN SELATAN;TAPIN;TAPIN UTARA;RANTAU KIWA		Indeks kualitas pelayanan keprotokolan Persentase dokumentasi pimpinan yang terpublikasi secara tepat dan akurat	Baik (62,51-81,25) %	5.129.572.600	0	0	Baik (62,51-81,25) %	5.386.051.230
X.XX.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan		Kabupaten Tapin		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	100% Laporan	393.099.000	0	0	100% Laporan	412.753.950
X.XX.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Kabupaten Tapin		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100% Laporan	1.913.278.000	0	0	100% Laporan	2.008.941.900
X.XX.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan		Kabupaten Tapin		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100% Laporan	2.823.195.600	0	0	100% Laporan	2.964.355.380
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
	Sekretariat Daerah (Bagian Umum)					35.685.792.407	0	0			37.470.082.027
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi kepegawaian Indeks Kepuasan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100% Tingkat efisiensi penggunaan anggaran	85 85 85	35.685.792.407	0	0	85 85 85	37.470.082.027
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		TAPIN		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang sesuai standart	100%	38.046.200	0	0	100%	39.948.510
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kabupaten Tapin		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	38.046.200	0	0	12 Laporan	39.948.510
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		TAPIN		Persentase dokumen pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar Persentase dokumen administrasi keuangan yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100% 100%	17.409.659.901	0	0	100% 100%	18.280.142.896



X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/bulan	17.242.369.101	0	0	86 Orang/bulan	18.104.487.556
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10000 Dokumen	161.478.800	0	0	10000 Dokumen	169.552.740
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.906.000	0	0	1 Laporan	3.051.300
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.906.000	0	0	1 Laporan	3.051.300
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dilayani tepat waktu dan sesuai standar kepegawaian	100%	3.109.814.300	0	0	100%	3.265.305.015
X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15 Paket	2.936.614.300	0	0	15 Paket	3.083.445.015
X.XX.01.2.05.03	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	86 Dokumen	173.200.000	0	0	86 Dokumen	181.860.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilayani tepat waktu dan sesuai standar	Predikat Baik -	11.070.233.100	0	0	Predikat Baik -	11.623.744.755
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	21 Paket	452.522.000	0	0	21 Paket	475.148.100
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	211.500.000	0	0	12 Paket	222.075.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	74.600.000	0	0	1 Paket	78.330.000
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.210.200	0	0	1 Paket	10.720.710
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.518.384.500	0	0	12 Laporan	2.644.303.725
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	7.803.016.400	0	0	12 Laporan	8.193.167.220
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase Surat Menyurat yang tertangani sesuai standar	100%	2.734.904.600	0	0	100%	2.871.649.830
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	161.700.000	0	0	12 Laporan	169.785.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	2.573.204.600	0	0	12 Laporan	2.701.864.830
X.XX.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			TAPIN	Persentase pelayanan Kedinasan KDH/WKDH yang dilayani dengan baik	100%	1.323.134.306	0	0	100%	1.389.291.021
X.XX.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	168.541.206	0	0	2 Orang/Bulan	176.968.266
X.XX.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	754.593.100	0	0	12 Paket	792.322.755
X.XX.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	400.000.000	0	0	2 Orang/Bulan	420.000.000
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										



4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
	Sekretariat Daerah (Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa)						709.609.600	0	0		745.090.080
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan perundang-undangan		Jumlah pengadaan barang dan jasa melalui LPSE dibagi Jumlah pengadaan barang dan jasa melalui SIRUP x 100%	100%	709.609.600	0	0	100%	745.090.080
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			TAPIN	Terlaksananya pengelolaan pengadaan barang dan jasa	100%	709.609.600	0	0	100%	745.090.080
4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	380 Dokumen	447.910.900	0	0	380 Dokumen	470.306.445
4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	12 Dokumen	204.762.700	0	0	12 Dokumen	215.000.835
4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	600 Orang	56.936.000	0	0	600 Orang	59.782.800
	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)						19.102.225.400	0	0		20.057.336.670
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatkan pelayanan pada lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,04	19.102.225.400	0	0	82,04	20.057.336.670
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			TAPIN	Persentasi Hasil Rekomendasi Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	100%	19.102.225.400	0	0	100%	20.057.336.670
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kegiatan Pembinaan Mental Spritual	83,00%				83,00%	
4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	14 Dokumen	3.892.943.000	0	0	14 Dokumen	4.087.590.150
4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	3 Dokumen	15.209.282.400	0	0	3 Dokumen	15.969.746.520
	Sekretariat Daerah (Bagian Pertengakan)						22.672.212.690	0	0		23.805.823.325
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										



X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Indeks kepuasan pelayanan	88,3 point	22.672.212.690	0	0	88,3 point	23.805.823.325
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana	88,3 (baik) predikat	114.997.400	0	0	88,3 (baik) predikat	120.747.270
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kantor Sekretariat Daerah, Pendopo, PKK	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	114.997.400	0	0	12 Paket	120.747.270
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana	88,3 (baik) predikat	11.926.877.800	0	0	88,3 (baik) predikat	12.523.221.690
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	145.825.000	0	0	2 Unit	153.116.250
X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit	3.553.837.500	0	0	5 Unit	3.731.529.375
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	2.897.746.800	0	0	3 Unit	3.042.634.140
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit	5.329.468.500	0	0	50 Unit	5.595.941.925
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Sekretariat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	1 Unit	0
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana	88,3 (baik) predikat	2.747.367.300	0	0	88,3 (baik) predikat	2.884.735.665
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.001.844.900	0	0	12 Laporan	1.051.937.145
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Sekretariat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.745.522.400	0	0	12 Laporan	1.832.798.520
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana	88,3 (baik) predikat	5.519.398.390	0	0	88,3 (baik) predikat	5.795.368.310
X.XX.01.2.09.12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah			Sekretariat Daerah	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standart	100 persen				100 persen	
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Sekretariat Daerah Kab. Tapin	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	50 Ha	315.650.000	0	0	50 Ha	331.432.500
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Sekretariat Daerah, Bupati Tapin dan Wakil Bupati Tapin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit	1.838.318.100	0	0	54 Unit	1.930.234.005
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Gedung Sekretariat Daerah, Pendopo, PKK Rumah Dinas Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asrama Mahasiswa Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	705.209.290	0	0	12 Unit	740.469.755
X.XX.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			TAPIN	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	2.660.221.000	0	0	15 Unit	2.793.232.050
X.XX.01.2.12.01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			Kabupaten Tapin	Indeks Kepuasan layanan Sarana dan Prasarana kedinasan Kdh/Wkdh	88,3 (baik) predikat	2.363.571.800	0	0	88,3 (baik) predikat	2.481.750.390
X.XX.01.2.12.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	1.448.636.000	0	0	5 Paket	1.521.067.800
X.XX.01.2.12.03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	5 Paket	717.935.800	0	0	5 Paket	753.832.590
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	5 Paket	197.000.000	0	0	5 Paket	206.850.000
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										



	Sekretariat Daerah (Bagian Ekonomi Dan Pembangunan)						339.990.000	0	0		356.989.500
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.01	SEKRETARIAT DAERAH										
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Menjaga stabilitas harga bahan pokok		Jumlah kebijakan bidang perekonomian daerah yang dilaksanakan dibagi jumlah kebijakan bidang perekonomian daerah yang dihasilkan dikali 100%	100%	339.990.000	0	0	100%	356.989.500
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			TAPIN	Terlaksananya kebijakan perekonomian	100%	234.520.000	0	0	100%	246.246.000
4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen	167.670.000	0	0	2 Dokumen	176.053.500
4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan	53.650.000	0	0	2 Laporan	56.332.500
4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro/Kecil			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	2 Dokumen	13.200.000	0	0	2 Dokumen	13.860.000
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			TAPIN	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	100%	44.200.000	0	0	100%	46.410.000
4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	4.800.000	0	0	4 Dokumen	5.040.000
4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan	29.150.000	0	0	4 Laporan	30.607.500
4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	10.250.000	0	0	1 Laporan	10.762.500
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			TAPIN	Terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam	100%	61.270.000	0	0	100%	64.333.500
4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	4 Dokumen	43.175.000	0	0	4 Dokumen	45.333.750
4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	4 Dokumen	5.895.000	0	0	4 Dokumen	6.189.750
4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	12.200.000	0	0	4 Dokumen	12.810.000
	Sekretariat DPRD						49.805.990.873	0	0		52.296.290.417
X	Semua Urusan										



X.XX	Semua Bidang											
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Kinerja yang disusun dan Dilaporkan Tepat Waktu	80%	30.061.669.373	0	0	80%	31.564.752.842	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (%)	100 Persen	89.400.000	0	0	100 Persen	93.870.000	
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	89.400.000	0	0	12 Laporan	93.870.000	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang selesai tepat waktu (%)	100 Persen	5.454.700.369	0	0	100 Persen	5.727.435.387	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	5.265.700.369	0	0	12 Orang/bulan	5.528.985.387	
X.XX.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Tapin	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	103.800.000	0	0	12 Dokumen	108.990.000	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	0	0	1 Laporan	3.150.000	
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	82.200.000	0	0	12 Laporan	86.310.000	
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Pemenuhan Administrasi Kantor (%)	100 Persen	4.502.459.800	0	0	100 Persen	4.727.582.790	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	32.581.500	0	0	1 Paket	34.210.575	
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	62.107.800	0	0	5 Paket	65.213.190	
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	187.972.400	0	0	3 Paket	197.371.020	
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	81.924.600	0	0	4 Paket	86.020.830	
X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Tapin	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1460 Dokumen	126.000.000	0	0	1460 Dokumen	132.300.000	
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	17.615.500	0	0	4 Paket	18.496.275	
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Tapin	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	30 Laporan	87.450.000	0	0	30 Laporan	91.823.500	
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	3.906.808.000	0	0	4 Laporan	4.102.148.400	
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Persentase Pengadaan BMD Kantor yang tepat waktu (%)	80 Persen	1.065.180.000	0	0	80 Persen	1.118.439.000	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	120 Unit	575.180.000	0	0	120 Unit	603.939.000	
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Tapin	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	60 Unit	490.000.000	0	0	60 Unit	514.500.000	



X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	80 Persen	411.200.000	0	0	80 Persen	431.760.000
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	240 Laporan	11.600.000	0	0	240 Laporan	12.180.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	198.000.000	0	0	36 Laporan	207.900.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	228 Laporan	201.600.000	0	0	228 Laporan	211.680.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Pemeliharaan Kondisi BMD dalam kondisi baik (%)	100 Persen	2.045.986.504	0	0	100 Persen	2.148.285.829
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	327.993.800	0	0	6 Unit	344.393.490
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Tapin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	185.851.600	0	0	14 Unit	195.144.180
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	43.643.200	0	0	1 Unit	45.825.360
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.488.497.904	0	0	1 Unit	1.562.922.799
X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi			TAPIN	Persentase kegiatan Penataan Organisasi/Pergantian antarwaktu	100 Persen	61.950.000	0	0	100 Persen	65.047.500
X.XX.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			Tapin	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Laporan	61.950.000	0	0	1 Laporan	65.047.500
X.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			TAPIN	Persentase Keuangan dan Kesejahteraan DPRD yang selesai tepat waktu (%)	100 Persen	16.430.792.700	0	0	100 Persen	17.252.332.335
X.XX.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			Tapin	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	25 Orang/Bulan	15.983.657.200	0	0	25 Orang/Bulan	16.782.840.060
X.XX.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD			Tapin	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket	372.135.500	0	0	2 Paket	390.742.275
X.XX.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	25 Orang	75.000.000	0	0	25 Orang	78.750.000
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
4.02	SEKRETARIAT DPRD										
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya pelayanan terhadap kegiatan anggota DPRD		Indeks kepuasan pelayanan kepada anggota DPRD	80%	19.744.321.500	0	0	80%	20.731.537.575
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			TAPIN	Persentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang selesai tepat waktu	100 Persen	803.051.000	0	0	100 Persen	843.203.550
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	5 Dokumen	138.501.400	0	0	5 Dokumen	145.216.470
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Perda			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	344.749.800	0	0	8 Dokumen	361.987.290
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 Dokumen	319.999.800	0	0	8 Dokumen	335.999.790
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran			TAPIN	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran dan Pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu	80 Persen	187.900.000	0	0	80 Persen	197.295.000
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	41.400.000	0	0	1 Dokumen	43.470.000



4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	27.650.000	0	0	1 Dokumen	29.032.500
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	34.525.000	0	0	1 Dokumen	36.251.250
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	34.525.000	0	0	1 Dokumen	36.251.250
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	22.150.000	0	0	1 Dokumen	23.257.500
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	27.650.000	0	0	1 Dokumen	29.032.500
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD			TAPIN	Persentase Kegiatan Dewan yang Terfasilitasi dalam meningkatkan dalam meningkatkan kapasitas Anggota DPRD	80 Persen	918.354.500	0	0	80 Persen	964.272.225
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan			Tapin	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	12 Dokumen	314.667.500	0	0	12 Dokumen	330.400.875
4.02.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli			Tapin	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	8 Orang	306.000.000	0	0	8 Orang	321.300.000
4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD			Tapin	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12 Dokumen	297.687.000	0	0	12 Dokumen	312.571.350
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			TAPIN	Jumlah kegiatan reses anggota DPRD	3 kali	392.400.000	0	0	3 kali	412.020.000
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah			Tapin	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	300 Laporan	19.500.000	0	0	300 Laporan	20.475.000
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD			Tapin	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	25 Dokumen	4.575.000	0	0	25 Dokumen	4.803.750
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses			Tapin	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	75 Dokumen	368.325.000	0	0	75 Dokumen	386.741.250
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah			TAPIN	Persentase Pembahasan Kerja Sama Daerah yang selesai tepat waktu	80 Persen	30.000.000	0	0	80 Persen	31.500.000
4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi			Tapin	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	12 Dokumen	30.000.000	0	0	12 Dokumen	31.500.000
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD			TAPIN	Persentase Kegiatan Dewan yang Terfasilitasi dalam meningkatkan dalam meningkatkan kapasitas Anggota DPRD	80 Persen	17.412.616.000	0	0	80 Persen	18.283.246.800
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	2500 Dokumen	14.681.062.000	0	0	2500 Dokumen	15.415.115.100
4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	600 Dokumen	2.731.554.000	0	0	600 Dokumen	2.868.131.700
	Kecamatan Panti						2.493.652.863	0	0		2.618.335.506
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu	100 Persen	2.122.562.863	0	0	100 Persen	2.228.691.006
					Persentase Penyerapan Anggaran	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik	96,04 Persen				96,04 Persen	
					Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan	100 Persen				100 Persen	



SKPD										
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		TAPIN	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	6.150.000	0	0	100 Persen	6.457.500
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kecamatan Piani	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	750.000	0	0	1 Dokumen	787.500
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kecamatan Piani	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	750.000	0	0	1 Dokumen	787.500
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Kecamatan Piani	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	750.000	0	0	1 Dokumen	787.500
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Kecamatan Piani	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	750.000	0	0	1 Dokumen	787.500
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kecamatan Piani	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	3.150.000	0	0	10 Laporan	3.307.500
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		PIANI	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.391.260.036	0	0	100 Persen	1.460.823.038
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kecamatan Piani	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9 Orang/bulan	1.389.060.036	0	0	9 Orang/bulan	1.458.513.038
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kecamatan Piani	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.100.000	0	0	1 Laporan	1.155.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kecamatan Piani	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.100.000	0	0	1 Laporan	1.155.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		TAPIN	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	300.348.427	0	0	100 Persen	315.365.848
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kecamatan Piani	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.750.000	0	0	1 Paket	3.937.500
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kecamatan Piani	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	18.805.500	0	0	1 Paket	19.745.775
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kecamatan Piani	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.060.000	0	0	1 Paket	38.913.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kecamatan Piani	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	12.526.400	0	0	1 Paket	13.152.720
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Kecamatan Piani	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.475.000	0	0	12 Laporan	2.598.750
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kecamatan Piani	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	225.731.527	0	0	12 Laporan	237.018.103
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		TAPIN	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	98.500.000	0	0	100 Persen	103.425.000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kecamatan Piani	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	50.000.000	0	0	5 Unit	52.500.000
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kecamatan Piani	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	48.500.000	0	0	5 Unit	50.925.000



X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	63.520.000	0	0	100 Persen	66.696.000
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kecamatan Piani	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.320.000	0	0	12 Laporan	2.436.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Piani	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.000.000	0	0	12 Laporan	18.900.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kecamatan Piani	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43.200.000	0	0	12 Laporan	45.360.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	262.784.400	0	0	100 Persen	275.923.620
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kecamatan Piani	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	57.264.400	0	0	5 Unit	60.127.620
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Piani	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	5.520.000	0	0	10 Unit	5.796.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kecamatan Piani	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	200.000.000	0	0	3 Unit	210.000.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,80 Point	43.200.000	0	0	86,80 Point	45.360.000
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			PIANI	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	43.200.000	0	0	100 Persen	45.360.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Piani	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	43.200.000	0	0	12 Laporan	45.360.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,80 Point	235.640.000	0	0	86,80 Point	247.422.000
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			PIANI	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen	229.240.000	0	0	100 Persen	240.702.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kecamatan Piani	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	3.750.000	0	0	8 Lembaga Kemasyarakatan	3.937.500
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Piani	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	225.490.000	0	0	4 Laporan	236.764.500



7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			TAPIN	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 Persen	6.400.000	0	0	100 Persen	6.720.000
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Kecamatan Piani	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	3.750.000	0	0	1 Laporan	3.937.500
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Kecamatan Piani	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	2.650.000	0	0	1 Laporan	2.782.500
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,80 Point	10.800.000	0	0	86,80 Point	11.340.000
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			PIANI	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	10.800.000	0	0	100 Persen	11.340.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Piani	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	5.400.000	0	0	1 Laporan	5.670.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Kecamatan Piani	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	5.400.000	0	0	1 Laporan	5.670.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,80 Point	18.600.000	0	0	86,80 Point	19.530.000
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah			PIANI	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	100 Persen	18.600.000	0	0	100 Persen	19.530.000
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan dan Peneliharahan Keutuhan Negara			Kecamatan Piani	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	70 Orang	14.100.000	0	0	70 Orang	14.805.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Kecamatan Piani	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 Orang	4.500.000	0	0	50 Orang	4.725.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,80 Point	62.850.000	0	0	86,80 Point	65.992.500
					Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	



					Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 Persen				100 Persen	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		PIANI		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	62.850.000	0	0	100 Persen	65.992.500
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Kecamatan Piani		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen	39.750.000	0	0	16 Dokumen	41.737.500
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Kecamatan Piani		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	4.300.000	0	0	16 Dokumen	4.515.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Kecamatan Piani		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dokumen	4.300.000	0	0	8 Dokumen	4.515.000
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Kecamatan Piani		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8 Laporan	14.500.000	0	0	8 Laporan	15.225.000
	Kecamatan Lokpaikat						4.029.028.258	0	0		4.230.479.671
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu	100 Persen	3.630.309.458	0	0	100 Persen	3.811.824.931
					Persentase Penyerapan Anggaran	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik	88.9 Persen				88.9 Persen	
					Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD	100 Persen				100 Persen	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		TAPIN		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	7.500.000	0	0	100 Persen	7.875.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kecamatan Lokpaikat		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	750.000	0	0	1 Dokumen	787.500
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kecamatan Lokpaikat		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	750.000	0	0	1 Dokumen	787.500
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Kecamatan Lokpaikat		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	750.000	0	0	1 Dokumen	787.500
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Kecamatan Lokpaikat		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	750.000	0	0	1 Dokumen	787.500
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kecamatan Lokpaikat		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	4.500.000	0	0	10 Laporan	4.725.000



X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			LOKPAIKAT	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.640.993.325	0	0	100 Persen	2.773.042.991
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	2.638.543.325	0	0	12 Orang/bulan	2.770.470.491
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.300.000	0	0	1 Laporan	1.365.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.150.000	0	0	1 Laporan	1.207.500
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	380.898.133	0	0	100 Persen	399.943.040
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	0	0	1 Paket	10.500.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	0	0	1 Paket	31.500.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	43.374.200	0	0	1 Paket	45.542.910
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	1 Paket	15.037.500	0	0	1 Paket	15.789.375
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	0	0	0	12 Laporan	0
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	282.486.433	0	0	12 Laporan	296.610.755
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	192.000.000	0	0	100 Persen	201.600.000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	142.000.000	0	0	2 Unit	149.100.000
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	50.000.000	0	0	10 Unit	52.500.000
				Kecamatan Lokpaikat		1 unit	0	0	0	1 unit	0
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	78.918.000	0	0	100 Persen	82.863.900
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.480.000	0	0	12 Laporan	3.654.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.838.000	0	0	12 Laporan	31.329.900
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	45.600.000	0	0	12 Laporan	47.880.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	330.000.000	0	0	100 Persen	346.500.000
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	60.000.000	0	0	1 Unit	63.000.000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	20.000.000	0	0	5 Unit	21.000.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	1 Unit	250.000.000	0	0	1 Unit	262.500.000



					Dipelihara/Direhabilitasi						
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86.8 Point	43.200.000	0	0	86.8 Point	45.360.000
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			LOKPAIKAT	Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100 persen	43.200.000	0	0	100 persen	45.360.000
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 persen				100 persen	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	43.200.000	0	0	12 Laporan	45.360.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86.8 Point	284.535.000	0	0	86.8 Point	298.761.750
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			LOKPAIKAT	Persentase Rekomendasi IMB yang dikeluarkan sesuai ketentuan	100 Persen	275.835.000	0	0	100 Persen	289.626.750
					Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	100 persen				100 persen	
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Pembangunan yang ditindaklanjuti	100 persen				100 persen	
					Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	100 persen				100 persen	
					Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan	100 persen				100 persen	
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Kesra yang ditindaklanjuti	100 persen				100 persen	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan	5.835.000	0	0	9 Lembaga Kemasyarakatan	6.126.750
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	270.000.000	0	0	3 Laporan	283.500.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Kelurahan Bitahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	14 Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	14 Lembaga Kemasyarakatan	0



7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	0	0	0	2 Unit	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kelurahan Bitahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	14 Pokmas / Ormas	0	0	0	14 Pokmas / Ormas	0
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			TAPIN	Persentase rekomendasi ijin usaha sesuai ketentuan	100 Persen	8.700.000	0	0	100 Persen	9.135.000
					Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100 persen				100 persen	
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang perekonomian yang diindaklanjuti	100 persen				100 persen	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	4.350.000	0	0	1 Laporan	4.567.500
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	4.350.000	0	0	1 Laporan	4.567.500
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86.8 Point	0	0	0	86.8 Point	0
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			ASN.POL.RI.TNI Kec.Lokpaikat	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	0	0	0	1 Laporan	0
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	0	0	0	1 Laporan	0
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86.8 Point	26.808.800	0	0	86.8 Point	28.149.240
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 persen				100 persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 persen				100 persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			LOKPAIKAT	Persentase laporan bidang trantib	100 persen	26.808.800	0	0	100 persen	28.149.240
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Trantib yang diindaklanjuti	100 persen				100 persen	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang	22.608.800	0	0	1 Orang	23.739.240
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	70 Orang	4.200.000	0	0	70 Orang	4.410.000



					Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86.8 Point	44.175.000	0	0	86.8 Point	46.383.750
					Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 Persen				100 Persen	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			LOKPAIKAT	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	44.175.000	0	0	100 Persen	46.383.750
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen	4.350.000	0	0	16 Dokumen	4.567.500
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	4.350.000	0	0	16 Dokumen	4.567.500
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dokumen	4.850.000	0	0	8 Dokumen	5.092.500
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan	15.950.000	0	0	4 Laporan	16.747.500
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	4.150.000	0	0	12 Dokumen	4.357.500
7.01.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	12 Laporan	4.350.000	0	0	12 Laporan	4.567.500
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen	4.275.000	0	0	12 Dokumen	4.488.750
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Kecamatan Lokpaikat	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12 Dokumen	1.900.000	0	0	12 Dokumen	1.995.000
							758.000.000	0	0		795.900.000
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	86.8 Point	758.000.000	0	0	86.8 Point	795.900.000
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 Persen				100 Persen	



					Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			BITAHAN	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen	758.000.000	0	0	100 Persen	795.900.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kelurahan Bitahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	10 Pokmas / Ormas	552.893.800	0	0	10 Pokmas / Ormas	580.538.400
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Kelurahan Bitahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	205.106.200	0	0	2 Unit	215.361.510
	Kecamatan Tapin Utara						6.437.587.641	0	0		6.759.467.023
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu	100 Persen	5.624.709.841	0	0	100 Persen	5.905.945.333
					Persentase Penyerapan Anggaran	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD	100 Persen				100 Persen	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	18.800.000	0	0	100 Persen	19.740.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.125.000	0	0	1 Dokumen	1.181.250
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.125.000	0	0	1 Dokumen	1.181.250
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.275.000	0	0	1 Dokumen	1.338.750
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.275.000	0	0	1 Dokumen	1.338.750
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	14.000.000	0	0	10 Laporan	14.700.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	4.967.035.991	0	0	100 Persen	5.215.387.791
					Persentase Penyerapan Anggaran	100 Persen				100 Persen	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.275.000	0	0	1 Laporan	1.338.750
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.275.000	0	0	1 Laporan	1.338.750



X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	4.964.485.991	0	0	45 Orang/bulan	5.212.710.291
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen	352.441.750	0	0	100 Persen	370.063.838
					Persentase file data kepegawaian yang lengkap	100 Persen				100 Persen	
					Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Keluhan/Pengaduan pelayanan administratif bidang umum dan kepegawaian yang diindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.469.100	0	0	1 Paket	3.642.555
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.242.800	0	0	1 Paket	34.904.940
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	29.345.000	0	0	1 Paket	30.812.250
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	6.236.900	0	0	1 Paket	6.548.745
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	270.000.000	0	0	12 Laporan	283.500.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.147.950	0	0	1 Paket	10.655.348
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	87.650.600	0	0	100 Persen	92.033.130
					Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen				100 Persen	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	60.968.200	0	0	8 Unit	64.016.610
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit	26.682.400	0	0	14 Unit	28.016.520
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	83.453.000	0	0	100 Persen	87.625.650
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	31.447.800	0	0	12 Laporan	33.020.190
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	52.005.200	0	0	12 Laporan	54.605.460
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	115.328.500	0	0	100 Persen	121.094.925
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	3 Unit	17.528.500	0	0	3 Unit	18.404.925
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	6.040.000	0	0	1 Unit	6.342.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	91.760.000	0	0	1 Unit	96.348.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Point	39.750.000	0	0	87 Point	41.737.500



					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			TAPIN UTARA	Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100 Persen	39.750.000	0	0	100 Persen	41.737.500
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	39.750.000	0	0	12 Laporan	41.737.500
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Point	732.827.800	0	0	87 Point	769.469.190
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			TAPIN UTARA	Persentase rekomendasi IMB yang dikeluarkan sesuai ketentuan	100 Persen	243.927.800	0	0	100 Persen	256.124.190
					Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Pembangunan yang ditindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	
					Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	3.900.000	0	0	12 Lembaga Kemasyarakatan	4.095.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	240.027.800	0	0	4 Laporan	252.029.190
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			TAPIN	Persentase masyarakat Kelurahan yang mendapatkan Pemberdayaan	100 Persen	482.900.000	0	0	100 Persen	507.045.000
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat Kelurahan yang ditindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4 Lembaga Kemasyarakatan	2.900.000	0	0	4 Lembaga Kemasyarakatan	3.045.000



7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0	0	0	1 Unit	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	4 Pokmas / Ormas	480.000.000	0	0	4 Pokmas / Ormas	504.000.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			TAPIN	Persentase rekomendasi ijin usaha sesuai ketentuan.	100 Persen	6.000.000	0	0	100 Persen	6.300.000
					Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang ekonomi yang diindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	3.000.000	0	0	1 Laporan	3.150.000
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	3.000.000	0	0	1 Laporan	3.150.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Point	3.000.000	0	0	87 Point	3.150.000
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			TAPIN UTARA	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Tranitib yang diindaklanjuti	100 Persen	3.000.000	0	0	100 Persen	3.150.000
					Persentase laporan bidang tranitib	100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.000.000	0	0	1 Laporan	3.150.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Point	10.000.000	0	0	87 Point	10.500.000
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengusan Kepala Daerah			TAPIN UTARA	Persentase laporan bidang tranitib	100 Persen	10.000.000	0	0	100 Persen	10.500.000
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Tranitib yang diindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Kesatuan Negara			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	5.000.000	0	0	75 Orang	5.250.000



7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75 Orang	5.000.000	0	0	75 Orang	5.250.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Point	27.300.000	0	0	87 Point	28.665.000
					Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 Persen				100 Persen	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			TAPIN UTARA	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen	27.300.000	0	0	100 Persen	28.665.000
					Jumlah dokumen laporan APBDes	72 Laporan				72 Laporan	
					Jumlah rekomendasi pencairan ADD	48 Rekomendasi				48 Rekomendasi	
					Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100 Persen				100 Persen	
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	48 Dokumen	5.300.000	0	0	48 Dokumen	5.565.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	36 Dokumen	5.300.000	0	0	36 Dokumen	5.565.000
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	10.200.000	0	0	2 Laporan	10.710.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24 Dokumen	5.300.000	0	0	24 Dokumen	5.565.000
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan PembangunanDesa			Kecamatan Tapin Utara	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen	1.200.000	0	0	12 Dokumen	1.260.000
	Rantau Kiwa						539.563.000	0	0		566.541.150
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Point	539.563.000	0	0	87 Point	566.541.150
					Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	



					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			RANTAU KIWA	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen	539.563.000	0	0	100 Persen	566.541.150
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Kelurahan Rantau Kiwa	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	211.892.400	0	0	1 Unit	222.487.020
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kelurahan Rantau Kiwa	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	327.670.600	0	0	3 Pokmas / Ormas	344.054.130
	Rantau Kanan						602.718.300	0	0		632.854.215
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87 Point	602.718.300	0	0	87 Point	632.854.215
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			RANTAU KANAN	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	12 Bulan	602.718.300	0	0	12 Bulan	632.854.215
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Kelurahan Rantau Kanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	320.280.000	0	0	1 Unit	336.294.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			kelurahan Rantau Kanan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	282.438.300	0	0	6 Pokmas / Ormas	296.560.215
	Rangda Malingkung						620.673.700	0	0		651.707.385
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Point	620.673.700	0	0	87 Point	651.707.385
					Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			RANGDA MALINGKUNG	Persentase masyarakat Kelurahan yang mendapatkan Pemberdayaan	100 Persen	620.673.700	0	0	100 Persen	651.707.385
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat Kelurahan yang ditindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 Persen				100 Persen	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Kelurahan Rangda Malingkung	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	321.010.000	0	0	2 Unit	337.060.500



7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kelurahan Ranga Malingkung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8 Pokmas / Ormas	299.663.700	0	0	8 Pokmas / Ormas	314.646.885
	Kupang						597.325.800	0	0		627.192.090
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Point	597.325.800	0	0	87 Point	627.192.090
					Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			KUPANG	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen	597.325.800	0	0	100 Persen	627.192.090
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Kelurahan Kupang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	322.796.000	0	0	2 Unit	338.935.800
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kelurahan Kupang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	274.529.800	0	0	6 Pokmas / Ormas	288.256.290
	Kecamatan Bakarangan						3.211.044.385	0	0		3.371.596.604
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu	100 Persen	2.824.192.385	0	0	100 Persen	2.965.402.004
					Persentase Penyerapan Anggaran	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD	100 Persen				100 Persen	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	29.350.000	0	0	100 Persen	30.817.500
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	24.850.000	0	0	10 Laporan	26.092.500
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	0	0	1 Dokumen	1.050.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	0	0	1 Dokumen	1.050.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	1 Dokumen	1.500.000	0	0	1 Dokumen	1.575.000



SKPD											
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	0	0	1 Dokumen	1.050.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			BAKARANGAN	Persentase Penyerapan Anggaran	100 Persen	2.039.351.544	0	0	100 Persen	2.141.319.121
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kecamatan Bakarangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen				100 Persen	
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	2.027.851.544	0	0	12 Orang/bulan	2.129.244.121
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8.000.000	0	0	1 Laporan	8.400.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	3.500.000	0	0	1 Laporan	3.675.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen	292.492.600	0	0	100 Persen	307.117.230
					Persentase file data kepegawaian yang lengkap	100 Persen				100 Persen	
					Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Keluhan/Pengaduan pelayanan administratif bidang umum dan kepegawaian yang ditindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.000.000	0	0	1 Paket	7.350.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.000.000	0	0	1 Paket	15.750.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	44.352.600	0	0	1 Paket	46.570.230
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.000.000	0	0	1 Paket	8.400.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.600.000	0	0	12 Laporan	3.780.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	214.540.000	0	0	12 Laporan	225.267.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	172.000.000	0	0	100 Persen	180.600.000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit	112.000.000	0	0	12 Unit	117.600.000
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	60.000.000	0	0	5 Unit	63.000.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	56.861.200	0	0	100 Persen	59.704.260
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.660.800	0	0	12 Laporan	5.943.840
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22.400.400	0	0	12 Laporan	23.520.420



X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	28.800.000	0	0	12 Laporan	30.240.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	234.137.041	0	0	100 Persen	245.843.893
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit	38.839.800	0	0	6 Unit	40.781.790
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	26.897.241	0	0	20 Unit	28.242.103
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	168.400.000	0	0	2 Unit	176.820.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,80 Persen	36.300.000	0	0	86,80 Persen	38.115.000
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			BAKARANGAN	Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100 Persen	36.300.000	0	0	100 Persen	38.115.000
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	36.300.000	0	0	12 Laporan	38.115.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,60 Persen	265.760.000	0	0	86,60 Persen	279.048.000
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 persen				100 persen	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			BAKARANGAN	Persentase rekomendasi IMB yang dikeluarkan sesuai ketentuan	100 Persen	239.960.000	0	0	100 Persen	251.958.000
					Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Pembangunan yang ditindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	
					Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang pemerintahan yang	100 Persen				100 Persen	



					ditindaklanjuti						
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	5.960.000	0	0	12 Lembaga Kemasyarakatan	6.258.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	234.000.000	0	0	3 Laporan	245.700.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			TAPIN	Persentase rekomendasi ijin usaha sesuai ketentuan.	100 Persen	25.800.000	0	0	100 Persen	27.090.000
					Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	12.900.000	0	0	1 Laporan	13.545.000
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	12.900.000	0	0	1 Laporan	13.545.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,80 persen	11.000.000	0	0	86,80 persen	11.550.000
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 persen				100 persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 persen				100 persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 persen				100 persen	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum			BAKARANGAN	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Trantib yang ditindaklanjuti	100 Persen	11.000.000	0	0	100 Persen	11.550.000
					Persentase laporan bidang trantib	100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	11.000.000	0	0	1 Laporan	11.550.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,80 Persen	40.792.000	0	0	86,80 Persen	42.831.600
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			BAKARANGAN	Persentase laporan bidang trantib	100 Persen	40.792.000	0	0	100 Persen	42.831.600
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Trantib yang ditindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memamapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan	1 Orang	34.792.000	0	0	1 Orang	36.531.600



					Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia						
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 Orang	6.000.000	0	0	70 Orang	6.300.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,80 Persen	33.000.000	0	0	86,80 Persen	34.650.000
					Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang D diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang D diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 Persen				100 Persen	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			BAKARANGAN	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen	33.000.000	0	0	100 Persen	34.650.000
					Jumlah dokumen laporan APBDes	72 Laporan				72 Laporan	
					Jumlah rekomendasi pencairan ADD	48 Rekomendasi				48 Rekomendasi	
					Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100 Persen				100 Persen	
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	24 Dokumen	6.000.000	0	0	24 Dokumen	6.300.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24 Dokumen	6.000.000	0	0	24 Dokumen	6.300.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	6.000.000	0	0	12 Dokumen	6.300.000
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Kecamatan Bakarangan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	15.000.000	0	0	2 Laporan	15.750.000
				Kecamatan Candi Laras Selatan			3.641.610.657	0	0		3.823.691.190
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu	100 Persen	3.009.253.657	0	0	100 Persen	3.159.716.340
					Persentase Penyerapan Anggaran	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik	100 Persen				100 Persen	



					Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD	100 Persen				100 Persen	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			CANDI LARAS SELATAN	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100 Persen	6.250.300	0	0	100 Persen	6.562.815
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Tapin, Kec. Candi Laras Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	6.250.300	0	0	12 Laporan	6.562.815
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.946.326.957	0	0	100 Persen	2.043.643.305
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Tapin, Kec. Candi Laras Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.942.858.657	0	0	12 Orang/bulan	2.040.001.590
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Tapin, Kec. Candi Laras Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	2.007.900	0	0	12 Laporan	2.108.295
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kab. Tapin, Kec. Candi Laras Selatan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	1.460.400	0	0	4 Laporan	1.533.420
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	346.170.100	0	0	100 Persen	363.478.605
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Tapin, Kec. Candi Laras Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket	9.948.800	0	0	100 Paket	10.446.240
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Tapin, Kec. Candi Laras Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	39.645.000	0	0	12 Paket	41.627.250
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Tapin, Kec. Candi Laras Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	53.299.300	0	0	12 Paket	55.964.265
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kab. Tapin, Kec. Candi Laras Selatan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	16.032.000	0	0	12 Paket	16.833.600
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kab. Tapin, Kec. Candi Laras Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.500.000	0	0	12 Laporan	4.725.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Tapin, Kec. Candi Laras Selatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	222.745.000	0	0	12 Laporan	233.882.250
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	151.423.400	0	0	100 Persen	158.994.570
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin, Kec. Candi Laras Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	81.761.700	0	0	30 Unit	85.849.785
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kab. Tapin, Kec. Candi Laras Selatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	69.661.700	0	0	30 Unit	73.144.785
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	50.496.400	0	0	100 Persen	53.021.220
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Tapin, Kec. Candi Laras Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.496.000	0	0	12 Laporan	6.820.800
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Tapin, Kec. Candi Laras Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20.000.400	0	0	12 Laporan	21.000.420
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Tapin, Kec. Candi Laras Selatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	24.000.000	0	0	12 Laporan	25.200.000



X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	508.586.500	0	0	100 Persen	534.015.825
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Tapin, Kec. Candi Laras Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	46.246.500	0	0	5 Unit	48.558.825
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin, Kec. Candi Laras Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	18.340.000	0	0	50 Unit	19.257.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Tapin, Kec. Candi Laras Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	444.000.000	0	0	1 Unit	466.200.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		indeks kepuasan Masyarakat dalam pelayanan	87 Poin	36.000.000	0	0	87 Poin	37.800.000
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			CANDI LARAS SELATAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	36.000.000	0	0	100 Persen	37.800.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kec. CLS	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	36.000.000	0	0	12 Laporan	37.800.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Poin	305.788.200	0	0	87 Poin	321.077.610
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			CANDI LARAS SELATAN	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen	305.788.200	0	0	100 Persen	321.077.610
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kec. CLS	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.599.800	0	0	1 Lembaga Kemasyarakatan	6.929.790
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kec. CLS	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	299.188.400	0	0	2 Laporan	314.147.820
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Point	28.744.800	0	0	87 Point	30.182.040
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah			CANDI LARAS SELATAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan	100 Persen	28.744.800	0	0	100 Persen	30.182.040



					Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara			Kec. CLS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	20100 Orang	28.744.800	0	0	20100 Orang	30.182.040
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Point	261.824.000	0	0	87 Point	274.915.200
					Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 Persen				100 Persen	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			CANDI LARAS SELATAN	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Bulan	261.824.000	0	0	12 Bulan	274.915.200
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kab. Tapin, Kec. Candi Laras Selatan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	24 Dokumen	26.476.400	0	0	24 Dokumen	27.800.220
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kab. Tapin, Kec. Candi Laras Selatan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24 Dokumen	12.144.800	0	0	24 Dokumen	12.752.040
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kab. Tapin, Kec. Candi Laras Selatan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	24.163.200	0	0	12 Dokumen	25.371.360
7.01.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Kab. Tapin, Kec. Candi Laras Selatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	12 Dokumen	6.613.200	0	0	12 Dokumen	6.943.860
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			Kab. Tapin, Kec. Candi Laras Selatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	7.513.200	0	0	12 Dokumen	7.888.860
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Kab. Tapin, Kec. Candi Laras Selatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen	90.600.000	0	0	12 Dokumen	95.130.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Kab. Tapin, Kec. Candi Laras Selatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Dokumen	7.513.200	0	0	12 Dokumen	7.888.860
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Kab. Tapin, Kec. Candi Laras Selatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	86.800.000	0	0	12 Laporan	91.140.000
							3.194.741.757	0	0		3.354.478.845
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
					Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur						



X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu	87 Point	2.762.276.157	0	0	87 Point	2.900.389.965
					Persentase Penyerapan anggaran	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Sarana dan prasarana Yang Dibutuhkan SKPD	100 Persen				100 Persen	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		TAPIN		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	5.250.000	0	0	100 Persen	5.312.500
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Kec.Candi Laras Utara		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000	0	0	1 Dokumen	525.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Kecamatan Candi Laras Utara		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	500.000	0	0	1 Dokumen	525.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Kecamatan Candi Laras Utara		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	500.000	0	0	1 Dokumen	525.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Kecamatan Candi Laras Utara		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	500.000	0	0	1 Dokumen	525.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kecamatan Candi Laras Utara		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	3.250.000	0	0	10 Laporan	3.412.500
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		CANDI LARAS UTARA		Persentase Penyerapan Anggaran	100 Persen	1.928.161.757	0	0	100 Persen	2.024.569.845
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen				100 Persen	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kecamatan Camatan Candi Laras Utara		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.925.711.757	0	0	12 Orang/bulan	2.021.997.345
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kecamatan Candi Laras Utara		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.300.000	0	0	1 Laporan	1.365.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kecamatan Candi Laras Utara		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.150.000	0	0	1 Laporan	1.207.500
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		TAPIN		Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen	339.441.400	0	0	100 Persen	356.413.470
					Persentase file data kepegawaian yang lengkap	100 Persen				100 Persen	
					Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Keluhan/Pengaduan pelayanan administratif bidang umum dan kepegawaian yang ditindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kecamatan Candi Laras Utara		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.386.400	0	0	1 Paket	6.705.720



X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Candi Laras Utara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.800.000	0	0	1 Paket	16.590.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kecamatan Candi Laras Utara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	62.673.000	0	0	1 Paket	65.806.650
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kecamatan Candi Laras Utara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	11.316.000	0	0	1 Paket	11.881.800
X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Kecamatan Candi Laras Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.500.000	0	0	12 Laporan	4.725.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kecamatan Candi Laras Utara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	238.766.000	0	0	12 Laporan	250.704.300
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	326.323.000	0	0	100 Persen	342.639.150
					Persentase Sarana dan Prasarana yang di Butuhkan SKPD	100 Persen				100 Persen	
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Candi Laras Utara	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	70.500.000	0	0	6 Unit	74.025.000
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kecamatan Candi Laras Utara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	255.823.000	0	0	2 Unit	268.614.150
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	58.500.000	0	0	100 Persen	61.425.000
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kecamatan Candi Laras Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	4.300.000	0	0	12 Laporan	4.515.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Candi Laras Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.200.000	0	0	12 Laporan	19.110.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kecamatan Candi Laras Utara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000	0	0	12 Laporan	37.800.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	104.600.000	0	0	100 Persen	109.830.000
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kecamatan Candi Laras Utara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	35.500.000	0	0	1 Unit	37.275.000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Candi Laras Utara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	19.100.000	0	0	1 Unit	20.055.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kecamatan Candi Laras Utara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	50.000.000	0	0	1 Unit	52.500.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87 Point	79.200.000	0	0	87 Point	83.160.000
					Persentase Laporan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			CANDI LARAS UTARA	Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100 Persen	79.200.000	0	0	100 Persen	83.160.000
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang pemerintahan yang	100 Persen				100 Persen	



					ditindaklanjuti						
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Candi Laras Utara	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	79.200.000	0	0	12 Laporan	83.160.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87 Point	265.760.000	0	0	87 Point	279.048.000
					Persentase Laporan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			CANDI LARAS UTARA	Persentase rekomendasi IMB yang dikeluarkan sesuai ketentuan	100 Persen	239.960.000	0	0	100 Persen	251.958.000
					Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Pembangunan yang ditindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	
					Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kecamatan Candi Laras Utara	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	13 Lembaga Kemasyarakatan	5.960.000	0	0	13 Lembaga Kemasyarakatan	6.258.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Candi Laras Utara	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	234.000.000	0	0	3 Laporan	245.700.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			TAPIN	Persentase rekomendasi ijin usaha sesuai ketentuan.	100 Persen	25.800.000	0	0	100 Persen	27.090.000
					Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Kecamatan Candi Laras Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	12.900.000	0	0	1 Laporan	13.545.000
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Kecamatan Candi Laras Utara	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	12.900.000	0	0	1 Laporan	13.545.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87 Point	11.000.000	0	0	87 Point	11.550.000
					Persentase Laporan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertaman dan Keteriban Umum			CANDI LARAS UTARA	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Trantib yang	100 Persen	11.000.000	0	0	100 Persen	11.550.000



					ditindaklanjuti						
					Persentase laporan bidang trantib	100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Candi Laras Utara		1 laporan	11.000.000	0	0	1 laporan	11.550.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87 point	28.744.800	0	0	87 point	30.182.040
					Persentase Laporan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah			CANDI LARAS UTARA	Persentase laporan bidang trantib	100 Persen	28.744.800	0	0	100 Persen	30.182.040
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Trantib yang ditindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara			Kecamatan Candi Laras Utara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang	22.744.800	0	0	1 Orang	23.882.040
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Kecamatan Candi Laras Utara	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 Orang	6.000.000	0	0	70 Orang	6.300.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87 Point	47.760.800	0	0	87 Point	50.148.840
					Persentase Laporan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Desa Dengan pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Desa Dengan administrasi Kependudukan Yang Baik	100 Persen				100 Persen	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			CANDI LARAS UTARA	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen	47.760.800	0	0	100 Persen	50.148.840
					Jumlah dokumen laporan APBDes	78 laporan				78 laporan	
					Jumlah rekomendasi pencairan ADD	52 Rekomendasi				52 Rekomendasi	
					Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100 Persen				100 Persen	
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	



7.01.06.2.01.01	Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Candi Laras Utara	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	26 Dokumen	7.476.400	0	0	26 Dokumen	7.850.220
7.01.06.2.01.03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Candi Laras Utara	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 Dokumen	7.000.000	0	0	26 Dokumen	7.350.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			Candi Laras Utara	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	13 Dokumen	7.513.200	0	0	13 Dokumen	7.888.860
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Candi Laras Utara	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	12.800.000	0	0	2 Laporan	13.440.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kecamatan Candi Laras Utara	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	26 Dokumen	5.971.200	0	0	26 Dokumen	6.269.760
7.01.06.2.01.09	Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Kecamatan Candi Laras Utara	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	12 Dokumen	7.000.000	0	0	12 Dokumen	7.350.000
				Kecamatan Hatungun			3.151.359.069	0	0		3.308.927.022
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu	100 Persen	2.793.559.069	0	0	100 Persen	2.933.237.022
					Persentase Penyerapan Anggaran	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Aset Dengan Kondisi Baik	80 Persen				80 Persen	
					Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	100 Persen				100 Persen	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			HATUNGUN	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	10.500.000	0	0	100 Persen	11.025.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kecamatan Hatungun	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	750.000	0	0	1 Dokumen	787.500
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kecamatan Hatungun	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	750.000	0	0	1 Dokumen	787.500
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kecamatan Hatungun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	750.000	0	0	1 Dokumen	787.500
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Kecamatan Hatungun	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	750.000	0	0	1 Dokumen	787.500
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Hatungun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	7.500.000	0	0	10 Laporan	7.875.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	1.802.874.269	0	0	100 Persen	1.893.017.982



X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kecamatan Hatungun	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 Orang/bulan	1.799.874.269	0	0	13 Orang/bulan	1.889.867.982
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kecamatan Hatungun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.500.000	0	0	1 Laporan	1.575.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kecamatan Hatungun	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.500.000	0	0	1 Laporan	1.575.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	518.384.800	0	0	100 Persen	544.304.040
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Hatungun	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	0	0	1 Paket	21.000.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Hatungun	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.000.000	0	0	1 Paket	31.500.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kecamatan Hatungun	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.390.800	0	0	1 Paket	52.910.340
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kecamatan Hatungun	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	0	0	1 Paket	10.500.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kecamatan Hatungun	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	407.994.000	0	0	12 Laporan	428.393.700
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen	130.000.000	0	0	100 Persen	136.500.000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Hatungun	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	100.000.000	0	0	5 Unit	105.000.000
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kecamatan Hatungun	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	30.000.000	0	0	5 Unit	31.500.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	51.800.000	0	0	100 Persen	54.390.000
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kecamatan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	0	0	12 Laporan	5.250.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Hatungun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.000.000	0	0	12 Laporan	18.900.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kecamatan Hatungun	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	28.800.000	0	0	12 Laporan	30.240.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	280.000.000	0	0	100 Persen	294.000.000
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kecamatan Hatungun	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit	65.000.000	0	0	5 Unit	68.250.000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Hatungun	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	15.000.000	0	0	5 Unit	15.750.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kecamatan Hatungun	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	200.000.000	0	0	2 Unit	210.000.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	88 Point	36.300.000	0	0	88 Point	38.115.000



					Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang D diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang D diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			HATUNGUN	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	36.300.000	0	0	100 Persen	38.115.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Hatungun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	36.300.000	0	0	12 Laporan	38.115.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA-ADAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	88 Point	253.000.000	0	0	88 Point	265.650.000
					Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang D diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang D diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			HATUNGUN	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen	246.000.000	0	0	100 Persen	258.300.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kecamatan Hatungun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Lembaga Kemasyarakatan	3.500.000	0	0	8 Lembaga Kemasyarakatan	3.675.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Hatungun	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	242.500.000	0	0	3 Laporan	254.625.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			TAPIN	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 Persen	7.000.000	0	0	100 Persen	7.350.000
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Kecamatan Hatungun	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	3.500.000	0	0	1 Laporan	3.675.000
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Kecamatan Hatungun	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	3.500.000	0	0	1 Laporan	3.675.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	88 Persen	7.000.000	0	0	88 Persen	7.350.000
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang D diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang D diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum			HATUNGUN	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	100 Persen	7.000.000	0	0	100 Persen	7.350.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Hatungun	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.500.000	0	0	1 Laporan	3.675.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Kecamatan Hatungun	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	3.500.000	0	0	1 Laporan	3.675.000



7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URISAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	88 Point	35.000.000	0	0	88 Point	36.750.000
					Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			HATUNGUN	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	35.000.000	0	0	100 Persen	36.750.000
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara			Kecamatan Hatungun	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang	30.000.000	0	0	1 Orang	31.500.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Kecamatan Hatungun	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 Orang	5.000.000	0	0	70 Orang	5.250.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	88 Point	26.500.000	0	0	88 Point	27.825.000
					Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 Persen				100 Persen	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			HATUNGUN	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	26.500.000	0	0	100 Persen	27.825.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kecamatan Hatungun	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	16 Dokumen	3.500.000	0	0	16 Dokumen	3.675.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kecamatan Hatungun	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	16 Dokumen	3.500.000	0	0	16 Dokumen	3.675.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			Kecamatan Hatungun	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	8 Dokumen	3.500.000	0	0	8 Dokumen	3.675.000
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Kecamatan Hatungun	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	3.500.000	0	0	8 Dokumen	3.675.000
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Kecamatan Hatungun	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8 Laporan	12.500.000	0	0	8 Laporan	13.125.000



	Kecamatan Salam Babaris						3.106.372.085	0	0		3.261.690.689
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota	12 bulan	2.718.020.085	0	0	12 bulan	2.853.921.089
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Terselenggaranya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	35.000.000	0	0	12 Bulan	36.750.000
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	5.000.000	0	0	4 Dokumen	5.250.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2.500.000	0	0	2 Dokumen	2.625.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	0	0	1 Dokumen	2.625.000
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	0	0	1 Dokumen	2.625.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	0	0	1 Dokumen	2.625.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	20.000.000	0	0	12 Laporan	21.000.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	12 bulan	1.975.020.085	0	0	12 bulan	2.073.771.089
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.000.000	0	0	1 Laporan	7.350.000
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	15.000.000	0	0	12 Laporan	15.750.000
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.953.020.085	0	0	12 Orang/bulan	2.050.671.089
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	12 bulan	469.000.000	0	0	12 bulan	492.450.000
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	27.000.000	0	0	1 Paket	28.350.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	20.000.000	0	0	5 Paket	21.000.000
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	7.000.000	0	0	5 Paket	7.350.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	67.000.000	0	0	12 Paket	70.350.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	25.000.000	0	0	12 Paket	26.250.000



X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5 Laporan	12.000.000	0	0	5 Laporan	12.600.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	311.000.000	0	0	12 Laporan	326.550.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	11 buah	97.000.000	0	0	11 buah	101.850.000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit	97.000.000	0	0	11 Unit	101.850.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	70.000.000	0	0	12 Bulan	73.500.000
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 Laporan	12.000.000	0	0	7 Laporan	12.600.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	22.000.000	0	0	12 Laporan	23.100.000
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	24.000.000	0	0	2 Laporan	25.200.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12.000.000	0	0	12 Laporan	12.600.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Terselenggaranya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	72.000.000	0	0	12 Bulan	75.600.000
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	57.000.000	0	0	3 Unit	59.850.000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	15.000.000	0	0	8 Unit	15.750.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan	87 point	72.000.000	0	0	87 point	75.600.000
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 persen				100 persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 persen				100 persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang D diselesaikan	100 persen				100 persen	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			SALAM BABARIS	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	12 bulan	72.000.000	0	0	12 bulan	75.600.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.	Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	72.000.000	0	0	12 Laporan	75.600.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Terselenggaranya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	12 bulan	224.960.000	0	0	12 bulan	236.208.000
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			SALAM BABARIS	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	12 bulan	217.960.000	0	0	12 bulan	228.858.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	5.960.000	0	0	12 Lembaga Kemasyarakatan	6.258.000



7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	212.000.000	0	0	12 Laporan	222.600.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			TAPIN	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat tingkat kecamatan	12 bulan	7.000.000	0	0	12 bulan	7.350.000
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	3.500.000	0	0	1 Laporan	3.675.000
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	3.500.000	0	0	1 Laporan	3.675.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12 bulan	15.000.000	0	0	12 bulan	15.750.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			SALAM BABARIS	Terlaksananya koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	12 bulan	15.000.000	0	0	12 bulan	15.750.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	11.000.000	0	0	1 Laporan	11.550.000
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	4.000.000	0	0	1 Laporan	4.200.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Terselenggaranya Program pelayanan Umum	12 bulan	40.392.000	0	0	12 bulan	42.411.600
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Ususan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah			SALAM BABARIS	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah	12 bulan	40.392.000	0	0	12 bulan	42.411.600
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang	34.392.000	0	0	1 Orang	36.111.600
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 Orang	6.000.000	0	0	70 Orang	6.300.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	12 bulan	36.000.000	0	0	12 bulan	37.800.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			SALAM BABARIS	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	12 bulan	36.000.000	0	0	12 bulan	37.800.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 Dokumen	6.000.000	0	0	34 Dokumen	6.300.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kecamatan Salam babaris	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	34 Dokumen	6.000.000	0	0	34 Dokumen	6.300.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	17 Dokumen	6.000.000	0	0	17 Dokumen	6.300.000



7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	15.000.000	0	0	2 Laporan	15.750.000
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Kecamatan Salam Babaris	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	3.000.000	0	0	8 Dokumen	3.150.000
				Kecamatan Tapin Tengah			3.008.854.557	0	0		3.159.297.285
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu	100 Persen	2.633.652.557	0	0	100 Persen	2.765.335.185
					Persentase Penyerapan Anggaran	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD	100 Persen				100 Persen	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen	24.550.000	0	0	100 Persen	25.777.500
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	9.850.000	0	0	10 Laporan	10.342.500
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kegiatan Tapin Tengah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.675.000	0	0	1 Dokumen	3.858.750
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.675.000	0	0	1 Dokumen	3.858.750
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.675.000	0	0	1 Dokumen	3.858.750
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.675.000	0	0	1 Dokumen	3.858.750
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN TENGAH	Persentase Penyerapan Anggaran	100 Persen	1.934.742.919	0	0	100 Persen	2.031.480.065
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 Persen				100 Persen	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.926.117.919	0	0	12 Orang/bulan	2.022.423.815
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.675.000	0	0	1 Laporan	3.858.750
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester	1 Laporan	4.950.000	0	0	1 Laporan	5.197.500



				an SKPD							
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 Persen	393.131.700	0	0	100 Persen	412.788.285
					Persentase file data kepegawaian yang lengkap	100 Persen				100 Persen	
					Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Keluhan/Pengaduan pelayanan administratif bidang umum dan kepegawaian yang ditindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.106.600	0	0	1 Paket	5.361.930
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	37.285.900	0	0	1 Paket	39.150.195
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	49.266.300	0	0	1 Paket	51.729.615
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	10.320.900	0	0	1 Paket	10.836.945
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	2.475.000	0	0	12 Laporan	2.598.750
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	288.677.000	0	0	12 Laporan	303.110.850
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	100.450.038	0	0	100 Persen	105.472.540
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit	100.450.038	0	0	8 Unit	105.472.540
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	99.722.400	0	0	100 Persen	104.708.520
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.322.400	0	0	12 Laporan	1.388.520
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.400.000	0	0	12 Laporan	27.720.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	72.000.000	0	0	12 Laporan	75.600.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 Persen	81.055.500	0	0	100 Persen	85.108.275
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	32.865.500	0	0	1 Unit	34.508.775
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	8.190.000	0	0	1 Unit	8.599.500
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	40.000.000	0	0	1 Unit	42.000.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Point	24.650.000	0	0	87 Point	25.882.500
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	



					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			TAPIN TENGAH	Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100 Persen	24.650.000	0	0	100 Persen	25.882.500
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 persen				100 persen	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	24.650.000	0	0	12 Laporan	25.882.500
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Point	265.760.000	0	0	87 Point	279.048.000
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			TAPIN	Persentase rekomendasi IMB yang dikeluarkan sesuai ketentuan	100 Persen	239.960.000	0	0	100 Persen	251.958.000
					Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Pembangunan yang ditindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	
					Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Kesra yang ditindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17 Lembaga Kemasyarakatan	5.960.000	0	0	17 Lembaga Kemasyarakatan	6.258.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	234.000.000	0	0	3 Laporan	245.700.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			TAPIN	Persentase rekomendasi ijin usaha sesuai ketentuan.	100 Persen	25.800.000	0	0	100 Persen	27.090.000
					Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang ekonomi yang ditindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	12.900.000	0	0	1 Laporan	13.545.000
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	12.900.000	0	0	1 Laporan	13.545.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Point	11.000.000	0	0	87 Point	11.550.000



					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum			TAPIN TENGAH	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Trantib yang diindaklanjuti	100 Persen	11.000.000	0	0	100 Persen	11.550.000
					Persentase laporan bidang trantib	100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	11.000.000	0	0	1 Laporan	11.550.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Point	40.792.000	0	0	87 Point	42.831.600
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			TAPIN TENGAH	Persentase laporan bidang trantib	100 Persen	40.792.000	0	0	100 Persen	42.831.600
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Trantib yang diindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memamapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang	34.792.000	0	0	1 Orang	36.531.600
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 Orang	6.000.000	0	0	70 Orang	6.300.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 Point	33.000.000	0	0	87 Point	34.650.000
					Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 Persen				100 Persen	



7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			TAPIN TENGAH	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen	33.000.000	0	0	100 Persen	34.650.000
					Jumlah dokumen laporan APBDes	102 Laporan				102 Laporan	
					Jumlah rekomendasi pencairan ADD	68 Rekomendasi				68 Rekomendasi	
					Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100 Persen				100 Persen	
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 Persen				100 Persen	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	34 Dokumen	6.000.000	0	0	34 Dokumen	6.300.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	34 Dokumen	6.000.000	0	0	34 Dokumen	6.300.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	17 Dokumen	6.000.000	0	0	17 Dokumen	6.300.000
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Kecamatan Tapin Tengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	15.000.000	0	0	2 Laporan	15.750.000
				Kecamatan Tapin Selatan			5.146.612.386	0	0		5.403.943.005
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu	86,80 Point	4.676.682.386	0	0	86,80 Point	4.910.516.505
					Persentase Penyerapan Anggaran	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD	100 Persen				100 Persen	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN SELATAN	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	18.800.000	0	0	100 Persen	19.740.000
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kecamatan Tapin Selatan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.125.000	0	0	1 Dokumen	1.181.250
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kecamatan Tapin Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.125.000	0	0	1 Dokumen	1.181.250
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kecamatan Tapin Selatan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.275.000	0	0	1 Dokumen	1.338.750
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Kecamatan Tapin Selatan	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.275.000	0	0	1 Dokumen	1.338.750
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Tapin Selatan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi		14.000.000	0	0		14.700.000



					Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan				10 Laporan	
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		TAPIN		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	2.829.372.016	0	0	100 Persen	2.970.840.617
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kecamatan Tapin Selatan		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	2.825.207.016	0	0	23 Orang/bulan	2.966.467.367
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kecamatan Tapin Selatan		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.365.000	0	0	1 Laporan	2.483.250
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kecamatan Tapin Selatan		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.800.000	0	0	1 Laporan	1.890.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		TAPIN		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	466.432.300	0	0	100 Persen	489.753.915
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kecamatan Tapin Selatan		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.469.100	0	0	1 Paket	8.892.555
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kecamatan Tapin Selatan		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.586.900	0	0	1 Paket	16.366.245
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kecamatan Tapin Selatan		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	38.714.200	0	0	1 Paket	40.649.910
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kecamatan Tapin Selatan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	7.151.100	0	0	1 Paket	7.508.655
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Kecamatan Tapin Selatan		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	3.000.000	0	0	12 Laporan	3.150.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kecamatan Tapin Selatan		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	393.511.000	0	0	12 Laporan	413.186.550
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		TAPIN		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	576.167.800	0	0	100 Persen	604.976.190
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tapin Selatan		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	112.399.400	0	0	10 Unit	118.019.370
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Tapin Selatan		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	38.768.400	0	0	3 Unit	40.706.820
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tapin Selatan		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	370.000.000	0	0	2 Unit	388.500.000
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Tapin Selatan		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	55.000.000	0	0	1 Unit	57.750.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		TAPIN		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	194.933.000	0	0	100 Persen	204.679.650
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kecamatan Tapin Selatan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000	0	0	12 Laporan	2.100.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kecamatan Tapin Selatan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	26.133.000	0	0	12 Laporan	27.439.650
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kecamatan Tapin Selatan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	166.800.000	0	0	12 Laporan	175.140.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		TAPIN		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	590.977.270	0	0	100 Persen	620.526.134



X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kecamatan Tapin Selatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	37.379.000	0	0	1 Unit	39.247.950
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Tapin Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	6 Unit	6.000.000	0	0	6 Unit	6.300.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kecamatan Tapin Selatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	285.000.000	0	0	1 Unit	299.250.000
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Tapin Selatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	262.598.270	0	0	1 Unit	275.728.184
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,80 Point	28.800.000	0	0	86,80 Point	30.240.000
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			TAPIN SELATAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 Persen	28.800.000	0	0	100 Persen	30.240.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Tapin Selatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	28.800.000	0	0	12 Laporan	30.240.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,80 Point	393.600.000	0	0	86,80 Point	413.280.000
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			TAPIN SELATAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen	249.600.000	0	0	100 Persen	262.080.000
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kecamatan Tapin selatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	4.000.000	0	0	10 Lembaga Kemasyarakatan	4.200.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Tapin Selatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	245.600.000	0	0	3 Laporan	257.880.000
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			TAPIN	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 Persen	138.000.000	0	0	100 Persen	144.900.000
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Kelurahan Tambarangan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	1 Lembaga Kemasyarakatan	0
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Kelurahan Tambarangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Unit	0	0	0	1 Unit	0
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kelurahan Tambarangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	138.000.000	0	0	1 Pokmas / Ormas	144.900.000



7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			TAPIN	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 Persen	6.000.000	0	0	100 Persen	6.300.000
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Kecamatan Tapin Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	3.000.000	0	0	1 Laporan	3.150.000
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Kecamatan Tapin Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	3.000.000	0	0	1 Laporan	3.150.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,80 Point	3.000.000	0	0	86,80 Point	3.150.000
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			TAPIN SELATAN	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	3.000.000	0	0	100 Persen	3.150.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Tapin Selatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	3.000.000	0	0	1 Laporan	3.150.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,80 Point	20.030.000	0	0	86,80 Point	21.031.500
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			TAPIN SELATAN	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 Persen	20.030.000	0	0	100 Persen	21.031.500
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara			Kecamatan Tapin Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75 Orang	15.030.000	0	0	75 Orang	15.781.500
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Kecamatan Tapin Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	75 Orang	5.000.000	0	0	75 Orang	5.250.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86,80 Point	24.500.000	0	0	86,80 Point	25.725.000
					Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	



					Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa Yang Baik	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 Persen				100 Persen	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		TAPIN SELATAN		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen	24.500.000	0	0	100 Persen	25.725.000
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Kecamatan Tapin Utara		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	20 Dokumen	4.500.000	0	0	20 Dokumen	4.725.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Kecamatan Tapin Selatan		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	20 Dokumen	4.500.000	0	0	20 Dokumen	4.725.000
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Kecamatan Tapin Selatan		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10 Dokumen	4.500.000	0	0	10 Dokumen	4.725.000
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Kecamatan Tapin Selatan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	11.000.000	0	0	2 Laporan	11.550.000
	Tambarangan						649.999.700	0	0		682.499.685
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86.8 Point	66.499.700	0	0	86.8 Point	69.824.685
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		TAMBARANGAN		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86.8 Point	42.034.200	0	0	86.8 Point	44.135.910
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kelurahan Tambarangan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.034.200	0	0	12 Laporan	6.335.910
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kelurahan Tambarangan		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.000.000	0	0	12 Laporan	37.800.000
X.XX.01.2.09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		TAPIN		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86.8 Point	24.465.500	0	0	86.8 Point	25.688.775
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kelurahan Tambarangan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	24.465.500	0	0	1 Unit	25.688.775
7	UNSUR KEWILAYAHAN										



7.01	KECAMATAN										
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	86.8 Point	583.500.000	0	0	86.8 Point	612.675.000
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		TAMBARANGAN		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	86.8 Point	583.500.000	0	0	86.8 Point	612.675.000
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Kelurahan Tambarangan		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	375.000.000	0	0	2 Unit	393.750.000
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kelurahan Tambarangan		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	208.500.000	0	0	2 Pokmas / Ormas	218.925.000
	Kecamatan Bimuang						5.378.616.922	0	0		5.647.547.768
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Persentase Laporan Keuangan yang dibuat tepat waktu	100 persen	4.526.671.922	0	0	100 persen	4.753.005.518
					Persentase Penyerapan Anggaran	100 persen				100 persen	
					Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen				100 persen	
					Persentase Aset dengan kondisi yang baik	100 persen				100 persen	
					Persentase Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	100 persen				100 persen	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		BINUANG		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 persen	6.600.000	0	0	100 persen	6.930.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kecamatan Bimuang		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	6.600.000	0	0	10 Laporan	6.930.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		TAPIN		Persentase Penyerapan Anggaran	100 persen	3.430.940.429	0	0	100 persen	3.602.487.450
					Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100 persen				100 persen	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Kecamatan Bimuang		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	3.426.140.429	0	0	32 Orang/bulan	3.597.447.450
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Kecamatan Bimuang		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.400.000	0	0	1 Laporan	2.520.000



X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Kecamatan Bimuang	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.400.000	0	0	1 Laporan	2.520.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		TAPIN	Persentase Pelayanan kepegawaian yang dibuat	100 persen	499.538.500	0	0	100 persen	524.305.425
				Persentase file data kepegawaian yang lengkap	100 persen				100 persen	
				Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen				100 persen	
				Persentase Keluhan/Pengaduan pelayanan administratif bidang umum dan kepegawaian yang ditindaklanjuti	100 persen				100 persen	
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kecamatan Bimuang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	2.357.500	0	0	10 Paket	2.475.375
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kecamatan Bimuang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	26.546.700	0	0	2 Paket	27.874.035
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kecamatan Bimuang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	8.479.300	0	0	12 Paket	8.903.265
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kecamatan Bimuang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	68.444.000	0	0	12 Paket	71.866.200
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kecamatan Bimuang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	393.511.000	0	0	12 Laporan	413.186.550
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		TAPIN	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	401.736.693	0	0	100 persen	421.823.528
X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kecamatan Bimuang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20.000.000	0	0	1 Unit	21.000.000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kecamatan Bimuang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	200.000.000	0	0	10 Unit	210.000.000
X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kecamatan Bimuang	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	181.736.693	0	0	1 Unit	190.823.528
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		TAPIN	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	116.600.000	0	0	100 persen	122.430.000
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kecamatan Bimuang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.800.000	0	0	12 Laporan	6.090.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kecamatan Bimuang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	53.200.000	0	0	12 Laporan	55.860.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kecamatan Bimuang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	57.600.000	0	0	12 Laporan	60.480.000
X.XX.01.2.09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		TAPIN	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100 persen	71.456.300	0	0	100 persen	75.029.115
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kecamatan Bimuang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	68.481.300	0	0	13 Unit	71.905.365
X.XX.01.2.09.06	Peneliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kecamatan Bimuang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	2.975.000	0	0	10 Unit	3.123.750
7	UNSUR KEWILAYAHAN									



7.01	KECAMATAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	88 point	79.200.000	0	0	88 point	83.160.000
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 persen				100 persen	
					Persentase Rekomendasi yang D diselesaikan	100 persen				100 persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100 persen				100 persen	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			BINUANG	Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100 persen	79.200.000	0	0	100 persen	83.160.000
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 persen				100 persen	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Bimuang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	79.200.000	0	0	12 Laporan	83.160.000
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyakat dalam Pelayanan	88 ponit	720.594.500	0	0	88 ponit	756.624.225
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 persen				100 persen	
					Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 persen				100 persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100 persen				100 persen	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			BINUANG	Persentase Rekomendasi IMB yang dikeluarkan sesuai ketentuan	100 persen	269.394.500	0	0	100 persen	282.864.225
					Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam Musrenbang Kecamatan	100 persen				100 persen	
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Pembangunan yang ditindaklanjuti	100 persen				100 persen	
					Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan	100 persen				100 persen	
					Persentase bantuan kesejahteraan masyarakat yang disalurkan sesuai ketentuan	100 persen				100 persen	
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Kesra yang ditindaklanjuti	100 persen				100 persen	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kecamatan Bimuang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10 Lembaga Kemasyarakatan	6.450.000	0	0	10 Lembaga Kemasyarakatan	6.772.500
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Bimuang	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	262.944.500	0	0	12 Laporan	276.091.725
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			TAPIN	Persentase masyarakat Kelurahan yang mendapatkan Pemberdayaan	100 persen	451.200.000	0	0	100 persen	473.760.000
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat Kelurahan yang ditindaklanjuti	100 persen				100 persen	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kecamatan Bimuang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	12 Pokmas / Ormas	451.200.000	0	0	12 Pokmas / Ormas	473.760.000



7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	88 point	4.300.000	0	0	88 point	4.515.000
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 persen				100 persen	
					Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 persen				100 persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100 persen				100 persen	
7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum			BINUANG	Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Trantib yang ditindaklanjuti	100 persen	4.300.000	0	0	100 persen	4.515.000
					Persentase laporan bidang trantib	100 persen				100 persen	
7.01.04.2.03.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Kecamatan Bimuang		12	2.150.000	0	0	12	2.257.500
7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Bimuang		1	2.150.000	0	0	1	2.257.500
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	88 point	25.569.000	0	0	88 point	26.847.450
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 persen				100 persen	
					Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 persen				100 persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100 persen				100 persen	
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pengawasan Kepala Daerah			BINUANG	Persentase laporan bidang trantib	100 persen	25.569.000	0	0	100 persen	26.847.450
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang Trantib yang ditindaklanjuti	100 persen				100 persen	
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Peneliharaan Kesatuan Negara			Kecamatan Bimuang	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemerintahan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100 Orang	25.569.000	0	0	100 Orang	26.847.450
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	88 point	22.281.500	0	0	88 point	23.395.575
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 persen				100 persen	
					Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 persen				100 persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100 persen				100 persen	
					Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang baik	100 persen				100 persen	
					Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan yang baik	100 persen				100 persen	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			BINUANG	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Yang Baik	100 persen	22.281.500	0	0	100 persen	23.395.575
					Jumlah dokumen laporan APBDes	48 Laporan				48 Laporan	
					Jumlah rekomendasi pencairan ADD	64 Rekomendasi				64 Rekomendasi	



					Persentase pengurusan data kependudukan masyarakat yang dilayani	100 persen				100 persen	
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat dibidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	100 persen				100 persen	
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kecamatan Bimuang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	1.060.000	0	0	12 Dokumen	1.113.000
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kecamatan Bimuang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	2.305.000	0	0	12 Dokumen	2.420.250
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			Kecamatan Bimuang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	2.306.500	0	0	12 Dokumen	2.421.825
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Kecamatan Bimuang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan	10.000.000	0	0	12 Laporan	10.500.000
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum			Kecamatan Bimuang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	12 Dokumen	2.000.000	0	0	12 Dokumen	2.100.000
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kecamatan Bimuang	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	2.305.000	0	0	12 Dokumen	2.420.250
7.01.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			Kecamatan Bimuang	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen	2.305.000	0	0	12 Dokumen	2.420.250
	Bimuang						616.005.000	0	0		646.805.250
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	88 Point	616.005.000	0	0	88 Point	646.805.250
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100 Persen				100 Persen	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			BINUANG	Persentase masyarakat Kelurahan yang mendapatkan Pemberdayaan	100 Persen	616.005.000	0	0	100 Persen	646.805.250
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat Kelurahan yang ditindaklanjuti	100 persen				100 persen	
					Persentase Pembangunan Sarana dan Prsarana Kelurahan	100 persen				100 persen	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kelurahan Bimuang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	6 Pokmas / Ormas	216.000.000	0	0	6 Pokmas / Ormas	226.800.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Kelurahan Bimuang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	400.005.000	0	0	3 Unit	420.005.250
	Raya Belanti						623.720.000	0	0		654.906.000



X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	88 point	623.720.000	0	0	88 point	654.906.000
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 persen				100 persen	
					Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 persen				100 persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100 persen				100 persen	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			RAYA BELANTI	Persentase masyarakat Kelurahan yang mendapatkan Pemberdayaan	100 persen	623.720.000	0	0	100 persen	654.906.000
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat Kelurahan yang ditindaklanjuti	100 persen				100 persen	
					Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 persen				100 persen	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Kelurahan Raya Belanti	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	238.800.000	0	0	5 Pokmas / Ormas	250.740.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Kelurahan Raya Belanti	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	384.920.000	0	0	3 Unit	404.166.000
	Karangan Putih						615.799.000	0	0		646.588.950
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN				INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PELAYANAN	88 Point	615.799.000	0	0	88 Point	646.588.950
					PERSENTASE LAYANAN MASYARAKAT DENGAN INDEKS MINIMAL B	100 Persen				100 Persen	
					PERSENTASE REKOMENDASI YANG DISELESAIKAN	100 Persen				100 Persen	
					PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DISELESAIKAN	100 Persen				100 Persen	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			KARANGAN PUTHH	Persentase masyarakat Kelurahan yang mendapatkan Pemberdayaan	100 Persen	615.799.000	0	0	100 Persen	646.588.950
					Persentase keluhan / pengaduan masyarakat Kelurahan yang ditindaklanjuti	100 persen				100 persen	
					Persentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	100 persen				100 persen	
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Karangan Putih	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	5 Pokmas / Ormas	237.600.000	0	0	5 Pokmas / Ormas	249.480.000
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Karangan Putih	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	378.199.000	0	0	3 Unit	397.108.950
	Kecamatan Bungur						3.476.061.816	0	0		3.649.864.907



X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								3.257.747.762
					Persentase Laporan Kinerja Yang Dibuat Tepat Waktu	100 persen	3.102.616.916	0	0	100 persen	
					Persentase Penyerapan Anggaran	100 persen				100 persen	
					Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 persen				100 persen	
					Persentase Aset dengan Kondisi Yang Baik	100 persen				100 persen	
					Persentase Sarana dan Prasarana Yang Dibutuhkan SKPD	100 persen				100 persen	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			BUNGUR	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Bulan	24.550.000	0	0	12 Bulan	25.777.500
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kecamatan Bungur	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	3.675.000	0	0	1 Dokumen	3.858.750
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kec. Bungur	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	3.675.000	0	0	1 Dokumen	3.858.750
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kecamatan Bungur	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.675.000	0	0	1 Dokumen	3.858.750
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Kecamatan Bungur	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.675.000	0	0	1 Dokumen	3.858.750
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kecamatan Bungur	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	9.850.000	0	0	10 Laporan	10.342.500
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 persen	1.903.679.629	0	0	100 persen	1.998.863.610
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kecamatan Bungur	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	1.900.454.629	0	0	16 Orang/bulan	1.995.477.360
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kecamatan Bungur	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.848.500	0	0	1 Laporan	1.940.925
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kecamatan Bungur	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.376.500	0	0	1 Laporan	1.445.325
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 persen	379.224.400	0	0	100 persen	398.185.620
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Bungur	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.675.000	0	0	1 Paket	7.008.750
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kecamatan Bungur	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	1 Paket	35.196.900	0	0	1 Paket	36.956.745



				Disediakan							
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kecamatan Bungur	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	48.694.700	0	0	1 Paket	51.129.435
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kecamatan Bungur	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.343.800	0	0	1 Paket	9.810.990
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kecamatan Bungur	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	279.314.000	0	0	1 Laporan	293.279.700
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	245.020.000	0	0	100 persen	257.271.000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Bungur	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	166.510.000	0	0	1 Unit	174.835.500
X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kecamatan Bungur	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	78.510.000	0	0	1 Unit	82.435.500
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	74.280.000	0	0	100 persen	77.994.000
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kecamatan Bungur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.480.000	0	0	12 Laporan	3.654.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kecamatan Bungur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	42.000.000	0	0	12 Laporan	44.100.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kecamatan Bungur	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	28.800.000	0	0	12 Laporan	30.240.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 persen	475.862.887	0	0	100 persen	499.656.031
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kecamatan Bungur	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	40.000.000	0	0	1 Unit	42.000.000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kecamatan Bungur	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	25.000.000	0	0	1 Unit	26.250.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kecamatan Bungur	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	410.862.887	0	0	1 Unit	431.406.031
7	UNSUR KEWILAYAHAN										
7.01	KECAMATAN										
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	89 poin	39.600.000	0	0	89 poin	41.580.000
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 persen				100 persen	
					Persentase Rekomendasi Yang Diselesaikan	100 persen				100 persen	
					Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100 persen				100 persen	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			TAPIN	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 persen	39.600.000	0	0	100 persen	41.580.000
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Bungur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	39.600.000	0	0	12 Laporan	41.580.000



7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 poin	268.549.900	0	0	87 poin	281.977.395
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			TAPIN	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 persen	242.749.900	0	0	100 persen	254.887.395
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Kecamatan Bungur	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Lembaga Kemasyarakatan	4.600.000	0	0	12 Lembaga Kemasyarakatan	4.830.000
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Bungur	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan	238.149.900	0	0	3 Laporan	250.057.395
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			TAPIN	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	100 persen	25.800.000	0	0	100 persen	27.090.000
7.01.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			Kecamatan Bungur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan	12.900.000	0	0	1 Laporan	13.545.000
7.01.03.2.03.05	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Kecamatan Bungur	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	12.900.000	0	0	1 Laporan	13.545.000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 poin	11.000.000	0	0	87 poin	11.550.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum			BUNGUR	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum	100 persen	11.000.000	0	0	100 persen	11.550.000
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Bungur	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	11.000.000	0	0	1 Laporan	11.550.000
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 poin	27.620.000	0	0	87 poin	29.001.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			TAPIN	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 persen	27.620.000	0	0	100 persen	29.001.000
7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara			Kecamatan Bungur	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Orang	19.920.000	0	0	1 Orang	20.916.000
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Kecamatan Bungur	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	70 Orang	7.700.000	0	0	70 Orang	8.085.000
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.		Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87 poin	26.675.000	0	0	87 poin	28.008.750
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			TAPIN	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 persen	26.675.000	0	0	100 persen	28.008.750
7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kecamatan Bungur	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	24 Dokumen	4.275.000	0	0	24 Dokumen	4.488.750
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Kecamatan Bungur	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa	24 Dokumen	6.900.000	0	0	24 Dokumen	7.245.000



					dan Pendayagunaan Aset Desa						
7.01.06.2.01.07	Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			Kecamatan Bungur	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	4.850.000	0	0	12 Dokumen	5.092.500
7.01.06.2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			Kecamatan Bungur	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan	10.650.000	0	0	2 Laporan	11.182.500
	Inspektorat						17.437.496.522	0	0		18.309.371.348
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100%	10.730.212.022	0	0	100%	11.266.722.623
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase ketersediaan laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	9.835.600	0	0	100%	10.327.380
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	654.500	0	0	2 Dokumen	687.225
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	701.600	0	0	1 Dokumen	736.680
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	695.000	0	0	1 Dokumen	729.750
X.XX.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	290.000	0	0	1 Dokumen	304.500
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	444.500	0	0	1 Dokumen	466.725
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	6.550.000	0	0	2 Laporan	6.877.500
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	500.000	0	0	4 Laporan	525.000
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	8.273.520.706	0	0	100%	8.687.196.741
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kabupaten Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang/bulan	8.207.160.706	0	0	38 Orang/bulan	8.617.518.741
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	600.000	0	0	1 Laporan	630.000
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis/Realisasi Anggaran			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	600.000	0	0	1 Dokumen	630.000
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	65.160.000	0	0	12 Dokumen	68.418.000
X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah	100%	600.000	0	0	100%	630.000



X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	600.000	0	0	1 Laporan	630.000
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		TAPIN	Persentase aparat pengawas fungsional pemerintah yang bersertifikat	100%	299.823.500	0	0	100%	314.814.675
X.XX.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Kabupaten Tapin	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	38 Orang	71.500.000	0	0	38 Orang	75.075.000
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Kabupaten Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	38 Orang	163.163.500	0	0	38 Orang	171.321.675
X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai		Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	65.160.000	0	0	1 Dokumen	68.418.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		TAPIN	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100%	1.590.481.316	0	0	100%	1.670.005.382
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	29.189.800	0	0	2 Paket	30.649.290
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	84.498.700	0	0	12 Paket	88.723.635
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	90.865.500	0	0	12 Paket	95.408.775
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	46.132.000	0	0	12 Paket	48.438.600
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	13.750.000	0	0	12 Laporan	14.437.500
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.319.045.316	0	0	12 Laporan	1.384.997.582
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	7.000.000	0	0	1 Paket	7.350.000
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		TAPIN	Persentase pengadaan BMD dalam kondisi baik	100%	110.750.000	0	0	100%	116.287.500
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	39.750.000	0	0	10 Unit	41.737.500
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kabupaten Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	71.000.000	0	0	5 Unit	74.550.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		TAPIN	Persentase Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	142.924.800	0	0	100%	150.071.040
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	99.724.800	0	0	12 Laporan	104.711.040
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43.200.000	0	0	12 Laporan	45.360.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		TAPIN	Persentase sarana dan prasarana aparaturn dalam kondisi baik	100%	302.276.100	0	0	100%	317.389.905
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Kabupaten Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	84.354.100	0	0	1 Unit	88.571.805
X.XX.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Kabupaten Tapin	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	126.022.000	0	0	10 Unit	132.323.100
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Kabupaten Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80 Unit	67.900.000	0	0	80 Unit	71.295.000
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor danBangunan Lainnya		Kabupaten Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	24.000.000	0	0	1 Unit	25.200.000
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									



6.01	INSPEKTORAT DAERAH										
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal Pemerintah Daerah		Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin	WTP Opini LHP Audit Eksternal	5.618.912.200	0	0	WTP Opini LHP Audit Eksternal	5.899.857.810
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal			TAPIN	Persentase laporan hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan pemeriksaan tepat waktu	100%	4.264.942.200	0	0	100%	4.478.189.310
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	13 Laporan	2.764.492.200	0	0	13 Laporan	2.902.716.810
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	2 Laporan	267.350.000	0	0	2 Laporan	280.717.500
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2 Laporan	119.690.000	0	0	2 Laporan	125.674.500
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	123.575.000	0	0	1 Laporan	129.753.750
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1 Laporan	232.600.000	0	0	1 Laporan	244.230.000
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	757.235.000	0	0	2 Dokumen	795.096.750
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			TAPIN	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Aduan Masyarakat Yang Ditangani Tepat Waktu	100%	1.353.970.000	0	0	100%	1.421.668.500
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian/Negara/ Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Ditangani	12 Laporan	283.825.000	0	0	12 Laporan	298.016.250
6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	1.070.145.000	0	0	12 Laporan	1.123.652.250
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal Pemerintah Daerah		Persentase kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan	100%	1.088.372.300	0	0	100%	1.142.790.915
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan			TAPIN	Persentase jumlah rancangan produk hukum yang terselesaikan menjadi produk hukum	100%	57.812.100	0	0	100%	60.702.705
6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			Kabupaten Tapin	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	56.383.600	0	0	1 Rekomendasi	59.202.780
6.01.03.2.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan			Kabupaten Tapin	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	1.428.500	0	0	1 Rekomendasi	1.499.925
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi			TAPIN	Persentase Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Yang Dilaksanakan Tepat Waktu	100%	1.030.560.200	0	0	100%	1.082.088.210
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah			Kabupaten Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	53 perangkat daerah	190.890.000	0	0	53 perangkat daerah	200.434.500
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			Kabupaten Tapin	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	410.170.200	0	0	5 Kegiatan	430.678.710
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			Kabupaten Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	53 perangkat daerah	298.900.000	0	0	53 perangkat daerah	313.845.000
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			Kabupaten Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	53 perangkat daerah	130.600.000	0	0	53 perangkat daerah	137.130.000
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan						19.922.446.823	0	0		20.918.569.164



X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rata-rata capaian kinerja kegiatan sekretariat	100%	15.283.446.823	0	0	100%	16.047.619.164
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%	80%	53.250.000	0	0	80%	55.912.500
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	42.000.000	0	0	3 Dokumen	44.100.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	11.250.000	0	0	1 Laporan	11.812.500
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase efisiensi penggunaan anggaran	90%	4.045.950.000	0	0	90%	4.248.247.500
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang/bulan	4.038.000.000	0	0	24 Orang/bulan	4.239.900.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.150.000	0	0	1 Laporan	3.307.500
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	4.800.000	0	0	1 Laporan	5.040.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90%	10.261.646.823	0	0	90%	10.774.729.164
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.700.000	0	0	1 Paket	16.485.000
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	277.000.000	0	0	1 Paket	290.850.000
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	118.000.000	0	0	1 Paket	123.900.000
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	16.900.000	0	0	1 Paket	17.745.000
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	24.400.000	0	0	1 Paket	25.620.000
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	9.250.000	0	0	1 Laporan	9.712.500
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	9.800.396.823	0	0	1 Laporan	10.290.416.664
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90%	396.400.000	0	0	90%	416.220.000
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	396.400.000	0	0	1 Unit	416.220.000
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90%	428.900.000	0	0	90%	450.345.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	1 Laporan	355.000.000	0	0	1 Laporan	372.750.000



				Disediakan							
X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	13.000.000	0	0	1 Laporan	13.650.000
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	60.900.000	0	0	1 Laporan	63.945.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90%	97.300.000	0	0	90%	102.165.000
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	71.300.000	0	0	1 Unit	74.865.000
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit	26.000.000	0	0	1 Unit	27.300.000
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.01	PERENCANAAN										
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas hasil perencanaan pembangunan daerah		Indeks Kualitas Perencanaan	8.1 (sangat baik) score	1.731.000.000	0	0	8.1 (sangat baik) score	1.817.550.000
					Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	100%				100%	
					Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	100%				100%	
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			TAPIN	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	1.164.000.000	0	0	100%	1.222.200.000
5.01.02.2.01.01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan, Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	136.000.000	0	0	1 Dokumen	142.800.000
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	63.000.000	0	0	1 Berita Acara	66.150.000
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	245.000.000	0	0	1 Berita Acara	257.250.000
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan			Kab. Tapin	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	1 Usulan	184.000.000	0	0	1 Usulan	193.200.000
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	1 Dokumen	536.000.000	0	0	1 Dokumen	562.800.000
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			TAPIN	Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti	70%	227.500.000	0	0	70%	238.875.000
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Masukan	183.000.000	0	0	1 Masukan	192.150.000
5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	1 Orang	44.500.000	0	0	1 Orang	46.725.000
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			TAPIN	Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti	70%	339.500.000	0	0	70%	356.475.000
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	187.000.000	0	0	1 Laporan	196.350.000
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja	1 Laporan	152.500.000	0	0	1 Laporan	160.125.000



Pembangunan Daerah											
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas hasil perencanaan pembangunan daerah		Indeks Kualitas Perencanaan	100%	1.487.000.000	0	0	100%	1.561.350.000
					Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	100%				100%	
					Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	100%				100%	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			TAPIN	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti	100%	467.500.000	0	0	100%	490.875.000
					Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang Sosial dan SDM	90%				90%	
5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Bappelitbang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	47.000.000	0	0	3 Dokumen	49.350.000
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	44.000.000	0	0	1 Perangkat Daerah	46.200.000
5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	37.500.000	0	0	1 Laporan	39.375.000
5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	268.000.000	0	0	1 Dokumen	281.400.000
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	1 Perangkat Daerah	31.000.000	0	0	1 Perangkat Daerah	32.550.000
5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	1 Perangkat Daerah	40.000.000	0	0	1 Perangkat Daerah	42.000.000
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			TAPIN	Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur	90%	565.000.000	0	0	90%	593.250.000
					Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%				100%	
5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	35.000.000	0	0	1 Dokumen	36.750.000
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	1 Perangkat Daerah	28.000.000	0	0	1 Perangkat Daerah	29.400.000
5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	1 Perangkat Daerah	34.000.000	0	0	1 Perangkat Daerah	35.700.000
5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya	1 Dokumen	468.000.000	0	0	1 Dokumen	491.400.000



					(RPJPD, RPJMD dan RKPDP)						
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			TAPIN	Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%	454.500.000	0	0	100%	477.225.000
					Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur	90%				90%	
5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPPD, RPJMD dan RKPDP)			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	1 Dokumen	157.500.000	0	0	1 Dokumen	163.375.000
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1 Perangkat Daerah	42.000.000	0	0	1 Perangkat Daerah	44.100.000
5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1 Perangkat Daerah	37.000.000	0	0	1 Perangkat Daerah	38.850.000
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah/Bidang Infrastruktur			Bappelitbang Kab. Tapin	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan	218.000.000	0	0	1 Laporan	228.900.000
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya akumabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan		Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	100%	1.421.000.000	0	0	100%	1.492.050.000
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			TAPIN	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	100%	127.000.000	0	0	100%	133.350.000
5.05.02.2.02.03	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	127.000.000	0	0	1 Dokumen	133.350.000
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			TAPIN	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	100%	443.000.000	0	0	100%	465.150.000
5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	420.000.000	0	0	1 Dokumen	441.000.000
5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	23.000.000	0	0	1 Dokumen	24.150.000
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			TAPIN	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	100%	851.000.000	0	0	100%	893.550.000
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perakayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	175.000.000	0	0	1 Dokumen	183.750.000
5.05.02.2.04.02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	650.000.000	0	0	1 Laporan	682.500.000
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	26.000.000	0	0	1 Laporan	27.300.000
	Badan Keuangan dan Aset Daerah						14.830.976.532	0	0		15.572.525.359
X	Semua Urusan										



X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100%	10.988.550.432	0	0	100%	11.537.977.954
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD yang disusun	100%	30.345.000	0	0	100%	31.862.250
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	1.800.000	0	0	4 Dokumen	1.890.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	28.545.000	0	0	8 Laporan	29.972.250
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6.477.504.202	0	0	100%	6.801.379.412
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.809.000	0	0	1 Laporan	3.999.450
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	33.045.000	0	0	18 Laporan	34.697.250
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32 Orang/bulan	6.440.650.202	0	0	32 Orang/bulan	6.762.682.712
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	54.094.450	0	0	100%	56.799.173
X.XX.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	133 Orang	54.094.450	0	0	133 Orang	56.799.173
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Administrasi umum perangkat daerah	100%	2.418.762.340	0	0	100%	2.539.700.457
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	129.493.340	0	0	1 Paket	135.968.007
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	833.679.600	0	0	1 Paket	875.363.580
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Kab. Tapin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.028.600	0	0	1 Paket	10.530.030
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	261.266.200	0	0	1 Paket	274.329.510
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kab. Tapin	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	99.810.000	0	0	1 Paket	104.800.500
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			Kab. Tapin	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	49.409.600	0	0	1 Paket	51.880.080
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	29.974.000	0	0	1 Laporan	31.472.700
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.005.101.000	0	0	12 Laporan	1.055.356.050
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Persentase pengadaan peralatan dan mesin kantor	100%	819.748.000	0	0	100%	860.735.400



X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	42 Unit	819.748.000	0	0	42 Unit	860.735.400
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	822.653.040	0	0	100%	863.785.692
X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.700.000	0	0	1 Laporan	9.135.000
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	344.330.000	0	0	12 Laporan	361.546.500
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	469.623.040	0	0	12 Laporan	493.104.192
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100%	365.443.400	0	0	100%	383.715.570
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kab. Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit	78.007.900	0	0	6 Unit	81.908.295
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	37.470.000	0	0	40 Unit	39.343.500
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	249.965.500	0	0	1 Unit	262.463.775
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.02	KUANGAN										
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah		Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12%	2.733.306.600	0	0	12%	2.869.971.930
					Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu (Paling lambat akhir Des)	100%				100%	
					Tingkat Kepuasan Pelayanan Penerbitan SP2D (Nilai IKM)	100 Point				100 Point	
					Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan tepat waktu (Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir)	100%				100%	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			TAPIN	Persentase Perda dan Perub yang disahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100%	1.475.842.600	0	0	100%	1.549.634.730
5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	72.000.000	0	0	2 Dokumen	75.600.000
5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	69.800.000	0	0	2 Dokumen	73.290.000
5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			Kab. Tapin	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	58 Dokumen	9.020.000	0	0	58 Dokumen	9.471.000
5.02.02.2.01.04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	58 Dokumen	8.980.000	0	0	58 Dokumen	9.429.000
5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			Kab. Tapin	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	58 Dokumen	36.230.000	0	0	58 Dokumen	38.041.500
5.02.02.2.01.06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			Kab. Tapin	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	58 Dokumen	36.270.000	0	0	58 Dokumen	38.083.500
5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			Kab. Tapin	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	4 Dokumen	836.332.600	0	0	4 Dokumen	878.149.230
5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			Kab. Tapin	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	140.510.100	0	0	4 Dokumen	147.535.605
5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4 Dokumen	266.699.900	0	0	4 Dokumen	280.034.895



5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			TAPIN	Persentase kejadian komplain	100%	719.464.000	0	0	100%	755.437.200
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	52 Dokumen	225.460.000	0	0	52 Dokumen	236.733.000
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	136 Dokumen	43.212.000	0	0	136 Dokumen	45.372.600
5.02.02.2.02.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	1 Dokumen	15.100.000	0	0	1 Dokumen	15.855.000
5.02.02.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	3 Dokumen	10.100.000	0	0	3 Dokumen	10.605.000
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	81.152.000	0	0	12 Dokumen	85.209.600
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			Kab. Tapin	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	30 Dokumen	127.560.000	0	0	30 Dokumen	133.938.000
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	99 Orang	216.880.000	0	0	99 Orang	227.724.000
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			TAPIN	Persentase laporan keuangan daerah tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	538.000.000	0	0	100%	564.900.000
5.02.02.2.03.01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	47.090.000	0	0	12 Laporan	49.444.500
5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen	32.290.000	0	0	1 Dokumen	33.904.500
5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan/Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	121.610.000	0	0	18 Laporan	127.690.500
5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	196.250.000	0	0	1 Laporan	206.062.500
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	59.580.000	0	0	2 Dokumen	62.559.000
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	27.220.000	0	0	1 Dokumen	28.581.000
5.02.02.2.03.10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen	27.220.000	0	0	1 Dokumen	28.581.000
5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	90 Orang	26.740.000	0	0	90 Orang	28.077.000



					Pemerintah Kabupaten/Kota						
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah		Persentase Penatausahaan BMD yang Tertib Sesuai Ketentuan	100%	1.109.119.500	0	0	100%	1.164.575.475
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah			TAPIN	Persentase Barang Milik Daerah yang tercatat di Kabupaten Tapin	100%	1.109.119.500	0	0	100%	1.164.575.475
					Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang digunakan	100%				100%	
					Persentase barang milik daerah Pemkab Tapin yang dihapuskan	100%				100%	
					Persentase usulan Rencana Kebutuhan barang milik daerah Pemkab Tapin yang terverifikasi	100%				100%	
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga			Kab. Tapin	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	278.720.000	0	0	1 Dokumen	292.656.000
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	6.630.000	0	0	2 Dokumen	6.961.500
5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	113.653.900	0	0	2 Dokumen	119.336.595
5.02.03.2.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	179.085.000	0	0	1 Laporan	188.039.250
5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	12.697.900	0	0	1 Laporan	13.332.795
5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	34.032.000	0	0	1 Laporan	35.733.600
5.02.03.2.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	112.185.900	0	0	1 Laporan	117.795.195
5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	60 Dokumen	262.351.400	0	0	60 Dokumen	275.468.970
5.02.03.2.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	90 Laporan	35.781.400	0	0	90 Laporan	37.570.470
5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	90 Laporan	15.780.000	0	0	90 Laporan	16.569.000
5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	90 Orang	58.202.000	0	0	90 Orang	61.112.100
	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah						178.694.708.382	0	0		187.629.443.801
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.02	KEUANGAN										
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH				Persentase Anggaran SKPD terverifikasi menerapkan anggaran berbasis kinerja	12%	178.694.708.382	0	0	12%	187.629.443.801
					Penetapan APBD sesuai ketentuan dan tepat waktu (Paling lambat akhir Des)	100%				100%	
					Tingkat Kepuasan Pelayanan Penerbitan SP2D (Nilai IKM)	100 Point				100 Point	



					Laporan Keuangan Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan tepat waktu (Paling lambat 3 bulan setelah TA berakhir)	100%				100%	
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			TAPIN	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang di proses sesuai ketentuan	100%	178.694.708.382	0	0	100%	187.629.443.801
5.02.02.2.04.04	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	1 Laporan	2.772.661.751	0	0	1 Laporan	2.911.294.839
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	148.397.300.131	0	0	1 Laporan	155.817.165.138
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	25.000.000.000	0	0	1 Laporan	26.250.000.000
5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota			Kab. Tapin	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	2.524.746.500	0	0	1 Laporan	2.650.983.825
	Badan Pendapatan Daerah						11.445.412.762	0	0		12.017.683.400
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat	100%	8.910.907.530	0	0	100%	9.356.452.907
					Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Coverage anggaran	80%				80%	
					Persentase efisiensi penggunaan anggaran	90%				90%	
					Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90%				90%	
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100%	13.015.400	0	0	100%	13.666.170
					Persentase tindak lanjut perencanaan dan pelaporan yang tetap waktu sesuai ketentuan.	100%				100%	
					Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu	100%				100%	
X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	2.000.000	0	0	3 Dokumen	2.100.000
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	0	0	1 Dokumen	2.100.000
X.XX.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.000.000	0	0	1 Dokumen	2.100.000
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	2.000.000	0	0	4 Laporan	2.100.000
X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	5.015.400	0	0	3 Laporan	5.266.170
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang	100%	5.822.878.430	0	0	100%	6.114.022.352



					sesuai dengan standar penatausahaan keuangan					
					Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100%			100%	
					persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%			100%	
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	264 Orang/bulan	5.581.467.530	0	0	264 Orang/bulan 5.860.540.907
X.XX.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1749 Dokumen	235.810.900	0	0	1749 Dokumen 247.601.445
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2.800.000	0	0	2 Laporan 2.940.000
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.800.000	0	0	1 Laporan 2.940.000
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2.097.778.000	0	0	100% 2.202.666.900
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	67.301.000	0	0	2 Paket 70.666.050
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	303.694.000	0	0	12 Paket 318.878.700
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	119.111.500	0	0	12 Paket 125.067.075
X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	571.355.600	0	0	12 Paket 599.923.380
X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	6.140.900	0	0	1 Paket 6.447.945
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.500.000	0	0	12 Laporan 5.775.000
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.024.675.000	0	0	12 Laporan 1.075.908.750
X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Persentase Pengadaan peralatan dan mesin kantor	100%	199.652.700	0	0	100% 209.635.335
X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Mebel			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Unit	46.278.200	0	0	50 Unit 48.592.110
X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	153.374.500	0	0	10 Unit 161.043.225
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	455.306.000	0	0	100% 478.071.300
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	416.506.000	0	0	12 Laporan 437.331.300
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	38.800.000	0	0	12 Laporan 40.740.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	322.277.000	0	0	100% 338.390.850
X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	67.387.000	0	0	13 Unit 70.756.350



X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	338 Unit	54.970.000	0	0	338 Unit	57.718.500
X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	199.920.000	0	0	1 Unit	209.916.000
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.02	KEUANGAN										
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatkan Pelayanan yang prima kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah		Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Jumlah Pendapatan Daerah	1,60%	2.534.505.232	0	0	1,60%	2.661.230.494
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			TAPIN	Persentase Peningkatan Objek Pajak (OP)	0,50%	2.534.505.232	0	0	0,50%	2.661.230.494
					Persentase Penerimaan Pajak Daerah	0,67%				0,67%	
					Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	0,50%				0,50%	
					Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)	33%				33%	
					Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada Wajib Pajak Daerah	80 Nilai				80 Nilai	
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 Dokumen	208.324.900	0	0	4 Dokumen	218.741.145
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	74.999.800	0	0	1 Laporan	78.749.790
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	4 Laporan	294.816.600	0	0	4 Laporan	309.557.430
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PB/BPP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NUOP nya	3000 Obyek Pajak	389.933.728	0	0	3000 Obyek Pajak	409.430.414
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	8000 Dokumen	267.295.000	0	0	8000 Dokumen	280.659.750
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1200 Layanan	38.500.000	0	0	1200 Layanan	40.425.000
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1900 Dokumen	186.000.000	0	0	1900 Dokumen	195.300.000
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	4 Dokumen	357.675.000	0	0	4 Dokumen	375.558.750
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			KABUPATEN TAPIN	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	24 Laporan	716.960.204	0	0	24 Laporan	752.808.214
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia						9.990.453.247	0	0		10.489.975.909
X	Semua Urusan										
X.XX	Semua Bidang										
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Perkantoran, Sarana Prasarana Aparatur dan Laporan Kinerja/ Keuangan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Terlaksananya urusan pelayanan administrasi Umum, Kepegawaian, dan kinerja SKPD	12 bulan	5.923.774.647	0	0	12 bulan	6.219.963.379
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Laporan Wajib yang dibuat	10 Dokumen	47.769.100	0	0	10 Dokumen	50.157.555
X.XX.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			BKPSDM Tapin	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Dokumen	6.943.200	0	0	1 Dokumen	7.290.360



					Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						
X.XX.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			BKPSDM Tapin	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.650.000	0	0	1 Dokumen	2.782.500
X.XX.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			BKPSDM Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	38.175.900	0	0	8 Laporan	40.084.695
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	6 Laporan	3.802.380.397	0	0	6 Laporan	3.992.499.417
X.XX.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			BKPSDM Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	4.299.800	0	0	1 Laporan	4.514.790
X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			BKPSDM Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	23.703.500	0	0	4 Laporan	24.888.675
X.XX.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis/Realisasi Anggaran			BKPSDM Tapin	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	4.550.000	0	0	2 Dokumen	4.777.500
X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			BKPSDM Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang/bulan	3.769.827.097	0	0	30 Orang/bulan	3.958.318.452
X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			KALIMANTAN SELATAN	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi/Rakor Kepegawaian	1 Kegiatan	65.675.000	0	0	1 Kegiatan	68.958.750
X.XX.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Kalimantan Selatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	65.675.000	0	0	100 Orang	68.958.750
X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Tersedianya Sarana dan Prasarana Umum BKPSDM Tapin sesuai kebutuhan yang layak pakai	12 bulan	1.337.110.725	0	0	12 bulan	1.403.966.261
X.XX.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			BKPSDM Tapin	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	35.501.445	0	0	1 Paket	37.276.517
X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			BKPSDM Tapin	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	29.310.200	0	0	1 Paket	30.775.710
X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			BKPSDM Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	117.450.000	0	0	1 Paket	123.322.500
X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu			BKPSDM Tapin	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	27.150.000	0	0	1 Laporan	28.507.500
X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Indonesia	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	864.762.000	0	0	1 Laporan	908.000.100
X.XX.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			BKPSDM Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	262.937.080	0	0	1 Paket	276.083.934
X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Tersedianya Dokumen Pembayaran Rekening Listrik, Internet, Telepon, dan Jasa Administrasi	12 bulan	451.628.800	0	0	12 bulan	474.210.240
X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			BKPSDM TAPIN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	192.428.800	0	0	12 Laporan	202.050.240
X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			BKPSDM TAPIN	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	259.200.000	0	0	12 Laporan	272.160.000
X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Tersedia dan Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dalam Kondisi Baik	12 bulan	219.210.625	0	0	12 bulan	230.171.156



X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			BKPSDM TAPIN	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	28.329.500	0	0	1 Unit	29.745.975
X.XX.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			BKPSDM TAPIN	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	85.743.000	0	0	50 Unit	90.030.150
X.XX.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			BKPSDM TAPIN	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	105.138.125	0	0	1 Unit	110.395.031
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN										
5.03											
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas ASN	Meningkatnya tingkat kesempatan pengembangan		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90%	3.548.968.600	0	0	90%	3.726.417.030
					Nilai Indeks Profesionalitas ASN	75%				75%	
					Persentase Pejabat Struktural yang Lulus Diklat Jabatannya	50%				50%	
					Persentase ASN Fungsional yang Lulus Uji Kompetensi Jabatan Fungsional	80%				80%	
					Persentase Jabatan Struktural yang Terisi oleh Pejabat yang Sesuai Kompetensinya	90%				90%	
					Persentase Pegawai yang Berkinerja Tinggi	100%				100%	
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			KALIMANTAN SELATAN	Terlaksananya Kegiatan Seleksi CASN, Terbitnya SK Administrasi Kepegawaian	1 tahun	927.729.000	0	0	1 tahun	974.115.450
5.03.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN			BKPSDM TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	3.300.000	0	0	1 Dokumen	3.465.000
5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			KALIMANTAN SELATAN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	743.715.000	0	0	1 Dokumen	780.900.750
5.03.02.2.01.05	Perumusan Bahan Kebijakan PemberhentianASN			BKPSDM TAPIN DAN BKD PROVINSI KALSEL	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	1 Dokumen	52.232.000	0	0	1 Dokumen	54.843.600
5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			BKPSDM TAPIN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	20.282.000	0	0	1 Lembaga	21.296.100
5.03.02.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			BKPSDM TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	82.700.000	0	0	1 Dokumen	86.835.000
5.03.02.2.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian			BKPSDM TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1 Dokumen	25.500.000	0	0	1 Dokumen	26.775.000
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN			TAPIN	Terbitnya SK Mutasi dan Promosi ASN	1 Tahun	574.261.700	0	0	1 Tahun	602.974.785
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN			BKPSDM Kab. Tapin	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi	50 Dokumen	3.580.000	0	0	50 Dokumen	3.759.000



5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			BKPSDM Tapin, BKD Prov. Kalsel, BKN Kanreg VIII	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	250 Dokumen	129.999.800	0	0	250 Dokumen	136.499.790
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN			Kalimantan Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen	440.681.900	0	0	4 Dokumen	462.715.995
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN			INDONESIA	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kompetensi Bagi ASN Kab. Tapin	12 bulan	1.706.262.900	0	0	12 bulan	1.791.576.045
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			KALIMANTAN SELATAN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	75 Orang	82.775.000	0	0	75 Orang	86.913.750
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			INDONESIA	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	1 Orang	100.900.000	0	0	1 Orang	105.945.000
5.03.02.2.03.05	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat			BPSDMD PROV. KALSEL	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1 Dokumen	1.503.888.000	0	0	1 Dokumen	1.579.082.400
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional			BKPSDM TAPIN	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	1 Orang	18.699.900	0	0	1 Orang	19.634.895
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			KALIMANTAN SELATAN	Terlaksananya Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 bulan	340.715.000	0	0	12 bulan	357.750.750
5.03.02.2.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			BKPSDM TAPIN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	172.390.000	0	0	1 Dokumen	181.009.500
5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			BKPSDM TAPIN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	50 Orang	16.075.000	0	0	50 Orang	16.878.750
5.03.02.2.04.07	Pembinaan Disiplin ASN			BKPSDM TAPIN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	25 Orang	152.250.000	0	0	25 Orang	159.862.500
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya kualitas ASN	Meningkatnya tingkat kesempatan pengembangan		Nilai Indeks Profesionalitas ASN	75%	517.710.000	0	0	75%	543.595.500
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			INDONESIA	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Bagi ASN KAB. TAPIN	12 bulan	517.710.000	0	0	12 bulan	543.595.500
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan			INDONESIA	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3 Laporan	517.710.000	0	0	3 Laporan	543.595.500
TOTAL	1.873.836.571.952	0	0		1.967.528.400.550						

Sumber : RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2023

1.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan

prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka pemerintah Kabupaten Tapin menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi pemerintah daerah, karena :

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan semua kewenangan / fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat pemerintah daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
2. Kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;



2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten / Kota
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten / Kota
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten / Kota
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Taknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota

C. Kebijakan Umum

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah / ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Tapin untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Tapin menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan / Keputusan Menteri. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

D. Arah Kebijakan

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah / ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Prioritas dan arah kebijakan pembangunan pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas SDM Kabupaten Tapin.

Arah Kebijakan :

- a. Penerapan jenis pelayanan dasar PAUD, dasar dan kesetaraan.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.



sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan / petunjuk dalam melaksanakan program / kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen Penerapan jenis pelayanan dasar Kesehatan.

- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan Kesehatan.
 - d. Pengembangan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong daya beli masyarakat.
 - e. Peningkatan pembinaan keagamaan.
 - f. Pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.
 - g. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.
 - h. Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup.
 - i. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak.
2. Meningkatkan kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah.

Arah Kebijakan :

- a. Pengembangan sektor yang berdaya ungkit bagi perekonomian daerah.
- b. Peningkatan penataan destinasi/obyek dan promosi pariwisata.
- c. Peningkatan kapasitas dan peran koperasi dan usaha mikro.
- d. Pengembangan sistem kemitraan koperasi dan usaha mikro dengan sektor unggulan daerah.
- e. Peningkatan pembinaan dan keberdayaan masyarakat desa.
- f. Peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan berkelanjutan yang aman.



- g. Peningkatan kapasitas dan keterampilan Angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja.
- h. Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan PMKS.

3. Meningkatkan kualitas infrastruktur.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi.
- b. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih dan penanganan limbah domestic.
- c. Peningkatan cakupan layanan irigasi untuk pertanian.
- d. Peningkatan kualitas gedung kantor dan Gedung pelayanan public.
- e. Peningkatan cakupan layanan jaringan komunikasi.

4. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Arah Kebijakan :

- a. Pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- b. Penerapan instrumen pengendalian RTRW.
- c. Peningkatan perumahan yang layak huni.

5. Meningkatkan Investasi.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan pemberian kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.
- b. Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah.

6. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat.

Arah Kebijakan :

- a. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah.
- b. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dan aset dengan baik.
- c. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan.
- d. Pengembangan kapasitas aparatur.
- e. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tabel 1.27
Integrasi SPM dalam RPJMD
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
SPM PENDIDIKAN				
1	Pendidikan anak usia dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik (%)	Dinas Pendidikan
			Persentase PAUD yang terakreditasi (%)	
2	Pendidikan dasar	Program Pembinaan SD	Angka Putus Sekolah Dasar (%)	Dinas Pendidikan
			Angka Mengulang Sekolah Dasar (%)	
			Persentase sekolah yang terakreditasi jenjang SD	
			Persentase sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SD (%)	
		Program Pembinaan SMP	Angka Putus Sekolah Menengah Pertama(%)	Dinas Pendidikan
			Angka Mengulang Sekolah Menengah Pertama (%)	
			Persentase sekolah yang terkareditasi jenjang SMP	
			Persentase sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SMP (%)	



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
3	Pendidikan kesetaraan	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 yang mengikuti program Pendidikan Non Formal (%)	Dinas Pendidikan
			Persentase pendidikan non formal yang terakreditasi (%)	
SPM KESEHATAN				
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Kesehatan Keluarga	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Program Kesehatan Keluarga	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Program Kesehatan Keluarga	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan kesehatan balita	Program Kesehatan Keluarga	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program Kesehatan Keluarga	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Program Kesehatan Keluarga	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Program Kesehatan Keluarga	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	Dinas Kesehatan



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar pelayanan penyakit menular dan tidak menular (%)	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar pelayanan penyakit menular dan tidak menular (%)	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar pelayanan penyakit menular dan tidak menular (%)	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar pelayanan penyakit menular dan tidak menular (%)	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar pelayanan penyakit menular dan tidak menular (%)	Dinas Kesehatan
SPM PEKERJAAN UMUM				
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah	Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air limbah (%)	



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah	Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air limbah (%)	
SPM PERUMAHAN RAKYAT				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (%)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (%)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Program peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	Satpol PP
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Program pencegahan dini dan kesiapsiagaan	Persentase Desa Tangguh Bencana (%)	BPBD
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program pencegahan dini dan kesiapsiagaan	Persentase Desa Tangguh Bencana (%)	BPBD



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program penanganan bencana	Persentase daerah terdampak bencana yang dilakukan penanganan (%)	BPBD
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)	Satpol PP
SPM SOSIAL				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat dan trauma yang telah menerima pembinaan	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Program Pembinaan Anak Terlantar dan Lanjut Usia	Persentase anak terlantar dan lanjut usia yang memperoleh pembinaan	Dinas Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	Dinas Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial (%)	Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial (%)	Dinas Sosial

Sumber : RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1. Indikator Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

a. Indeks Pembangunan Manusia

Kesejahteraan sosial harus selalu ditingkatkan setiap tahunnya melalui berbagai upaya dan berbagai pendekatan. Salah satu cara untuk melihat tingkat kesejahteraan sosial adalah melihat nilai Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indeks komposit untuk mengukur pencapaian upaya pembangunan manusia dari berbagai perspektif, yaitu kesehatan, pendidikan dan pengeluaran. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

IPM Kabupaten Tapin tahun 2023 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2022, yang semula 72,61 naik menjadi 73,52. Angka IPM tersebut masih rendah bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan maupun IPM Nasional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapin pada Tahun 2023 Sebesar 73,52%, sedangkan IPM

KALSEL pada Tahun 2023 adalah 74,66%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapin merupakan yang tertinggi keenam se-Kalimantan Selatan yaitu setelah Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Tanah Bumbu.

Data IPM Kabupaten Tapin bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2023 akan nampak sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapin,
Provinsi Kalimantan Selatan dan Indonesia Tahun 2018 - 2023

Prov/Kab	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tapin	69.53	70.13	70.11	71,90	72,61	73,52
KALSEL	70.17	70.72	70.91	73,45	74,00	74,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Pada tahun 1990 UNDP menetapkan tiga dimensi pembentuk IPM. Ketiga dimensi ini merupakan pendekatan yang dipilih dalam penggambaran kualitas hidup manusia dan tidak mengalami perubahan hingga saat ini. Dimensi tersebut mencakup: 1. umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); 2. pengetahuan (knowledge); dan 3. standar hidup layak (decent standard of living).

Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Pentingnya umur harapan hidup terletak pada kepercayaan umum bahwa umur panjang merupakan hal yang berharga dan kenyataan bahwa terdapat berbagai faktor yang secara tidak langsung berkaitan erat dengan umur harapan hidup, seperti nutrisi yang cukup dan kesehatan yang baik.

Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang merefleksikan dari kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan berkualitas baik yang sangat diperlukan dalam kehidupan produktif masyarakat modern. Harapan lama sekolah menggambarkan kesempatan yang

dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, sedangkan rata-rata lama sekolah menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah.

Dimensi ketiga dari pembangunan manusia adalah pemenuhan standar hidup yang layak. UNDP menggunakan data Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita sebagai indikator dimensi ini. Akan tetapi, mengingat data tersebut tidak tersedia di tingkat daerah, maka dipilih alternatif lain berupa indikator pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Indikator ini dapat dihitung hingga level kabupaten/kota. Indikator pengeluaran riil per kapita juga mampu mencerminkan indikator pendapatan masyarakat dan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai output dari semakin membaiknya perekonomian.

1) Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka Harapan Lama Sekolah merupakan indikator baru yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru menggantikan indikator Angka Melek Huruf yang digunakan pada metode lama. Penggunaan HLS dalam perhitungan indeks pendidikan, menjadikan IPM dengan metode baru mampu memotret gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi dibanding IPM dengan metode lama.

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Tapin dapat dilihat di tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2023

Kabupaten/Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Tapin	11,85	11,86	11,94	11,95	12,04	12,33
Provinsi Kalimantan Selatan	12,50	12,52	12,52	12,81	12,82	12,86

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 cenderung meningkat setiap tahunnya akan tetapi masih dibawah target RPJMD. Berdasarkan data harapan lama sekolah, Kabupaten Tapin berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2018-2023 dan pada tahun 2023 berada di urutan ke-12 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah Kabupaten Tapin dalam upaya peningkatan Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tapin

2) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 5 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Sesuai standar global (UNDP) nilai maksimum Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah 15 tahun atau setingkat Diploma III

Untuk menghitung angka rata-rata lama sekolah maka digunakan data jumlah tahun bersekolah individu usia 5 tahun ke atas dan juga data jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas. Berikut adalah hasil olah kedua data tersebut sehingga menjadi angka rata-rata lama sekolah

Tabel 2.3
Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2023

Kabupaten/Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Tapin	7,54	7,75	7,76	7,77	7,95	8,05
Provinsi Kalimantan Selatan	8,00	8,20	8,29	8,34	8,46	8,55

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 cenderung meningkat. Pada Tahun 2023 Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Tapin adalah 8,05 Tahun artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Tapin bersekolah sampai 8,05 tahun atau setingkat Kelas dua Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Sementara itu angka rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Tapin selama periode tahun 2018-2023. Data tahun 2023 angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 8,55 tahun sedangkan Kabupaten Tapin sebesar 8,05 tahun. Pada tahun 2023 berada di urutan ke Enam dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Setingkat dari tahun 2021-2022

3) Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

AHH pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

Tabel 2.4
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tapin dan
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2023

Kabupaten/Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Tapin	69,98	70,23	70,40	70,57	70,88	71,16
Provinsi Kalimantan Selatan	68,23	68,49	68,66	68,83	69,13	69,42

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

AHH Kabupaten Tapin selama periode tahun 2018-2023 lebih tinggi dibandingkan dengan AHH Provinsi Kalimantan Selatan. Data terakhir tahun 2023 AHH Kabupaten Tapin sebesar 71,16 tahun, sedangkan AHH Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 69,42 tahun. Pada tahun 2023 berada di urutan ke 4 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

b. Angka Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dan lain-lain.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis

Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang banyak di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang. Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan.

Tabel 2.5
Perkembangan Angka Kemiskinan Kab. Tapin Tahun 2018-2023

Tahun	Variabel Kemiskinan				
	Garis Kemiskinan	Jml Penduduk Miskin	% Penduduk Miskin (P0)	Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)
2018	405.591	6.979	3,70	0,35	0,06
2019	406.367	6.507	3,41	0,46	0,09
2020	446.577	5.899	3,06	0,45	0,12
2021	459.160	6.925	3,60	0,28	0,04
2022	484.113	6.982	3,60	0,33	0,07
2023	516.532	6.224	3,19	0,31	0,08

Sumber : BPS Kabupaten Tapin

Berdasarkan Tabel, garis kemiskinan Kabupaten Tapin tahun 2023 sebesar 516.532 rupiah per kapita per bulan. Hal ini berarti seorang penduduk dikatakan miskin apabila rata-rata pengeluaran makanan dan non makanannya kurang dari Rp. 459.160 per bulan atau Rp 15.305 per hari. Garis kemiskinan di Kabupaten Tapin tahun 2023 mengalami

peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2022. Garis kemiskinan tahun 2023 naik sekitar Rp. 32.419 Hal ini mengindikasikan bahwa adanya peningkatan standar hidup masyarakat di Kabupaten Tapin.

Garis Kemiskinan di kabupaten Tapin masih lebih rendah jika dibandingkan dengan garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 yang mencapai Rp 604.226 per kapita per bulan. Hal ini berarti seorang penduduk dikatakan miskin apabila rata-rata pengeluaran makanan dan non makanannya kurang dari Rp. 604.226 per bulan atau Rp 20.140 per hari. Kalimantan Selatan juga mengalami peningkatan garis kemiskinan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sekitar 51.153 rupiah.

Berdasarkan Tabel di atas persentase penduduk miskin di Kabupaten Tapin pada Tahun 2023 adalah 3,19 persen, sedangkan persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2023 mencapai 4,29 persen. Angka ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Tapin jauh lebih rendah jika dibandingkan kemiskinan di Kalimantan Selatan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, ada kenaikan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tapin sebesar 0,41 persen poin. Ini berarti usaha pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tapin untuk terus mengentaskan kemiskinan makin menunjukkan hasil positif.

Namun, persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Tetapi juga ada dimensi lain yang perlu diperhatikan yakni tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan, Indeks Keparahannya Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai

penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2023, tingkat kedalaman kemiskinan (P1) di Kabupaten Tapin sebesar 0,31 persen. Angka ini turun sebesar 0,02 point dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 3,33 persen. Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di kabupaten Tapin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Berbeda dengan P1, tingkat keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten menunjukkan penurunan sebesar 0,01 persen poin dibandingkan Tahun 2022 menjadi 0,08. Penurunan angka ini mengindikasikan bahwa adanya penurunan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di kabupaten Tapin.

c. Angka Pengangguran

Jumlah Pengangguran adalah jumlah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, jumlah mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja .

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Pengangguran terbuka terdiri dari orang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari kerja; orang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha; orang yang memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena

merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; orang yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Tabel 2.6
Perkembangan Angka Pengangguran
Kab. Tapin Tahun 2018-2023

Tahun	Angka Pengangguran	
	Jumlah Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2018	3.931	4,02
2019	3.586	3,79
2020	3.760	3,73
2021	5.078	4,96
2022	4289	4,15
2023	3997	3,93

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka, BPS

Berdasarkan tabel di atas, Angka Pengangguran Kabupaten Tapin tahun 2023 sebesar 3997 orang, jika dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 4289 hal ini mengalami penurunan sebesar 292 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tapin pada Tahun 2023 Sebesar 3,93 persen, hal ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,22 point dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 4,15 persen. Sedangkan TPT Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2023 mencapai 4,31 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Tapin lebih rendah 0,38 point jika dibandingkan pengangguran di Kalimantan Selatan. Berdasarkan Fahri, dkk (2019) kenaikan angka pengangguran ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah banyaknya perusahaan-perusahaan yang menutup atau ditutup operasionalnya, sehingga mendorong perusahaan melakukan PHK. Selain itu adanya pembatasan pergerakan masyarakat membuat usaha ekonomi banyak yang tutup.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan, Tingkat Pengangguran paling tinggi untuk

Kab/Kota di Kalsel adalah Kota Banjarmasin sedangkan TPT Kab/Kota terendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Balangan. TPT Kota Banjarmasin Tahun 2023 mencapai 6,70 persen dan TPT Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Balangan tahun 2023 sebesar 2,12 persen. Kemungkinan banyaknya pengangguran di Kota Banjarmasin dikarenakan banyaknya orang dari dalam daerah maupun luar daerah yang ke Banjarmasin untuk mencari pekerjaan karena Banjarmasin adalah Kota besar.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara/daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan aktivitas produksi barang dan jasa dalam suatu wilayah. Untuk memperoleh nilai pertumbuhan ekonomi ini, indikator yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan atau dalam nilai riilnya. PDRB riil ini sudah menghilangkan unsur perubahan harga atau inflasi, sehingga hanya menunjukkan adanya perubahan kapasitas produksi. Nilai positif dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menunjukkan bahwa kondisi ekonomi wilayah tersebut semakin membaik. Sebaliknya, nilai pertumbuhan ekonomi yang bertanda negatif menunjukkan adanya penurunan produktivitas ekonomi wilayah tersebut.

Tabel 2.7
Pertumbuhan Ekonomi ADHK tahun 2019-2023 Kabupaten Tapin

No	Lapangan Usaha	2019**	2020**	2021**	2022	2023
1	Petanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	5,36	-4,34	-1,57	-0,36	3,60
2	Pertambangan dan penggalian	3,00	-2,04	5,82	7,84	5,89
3	Industri pengolahan	4,29	-4,29	4,37	2,69	1,24
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,14	4,38	4,27	7,40	9,41
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,15	-0,33	3,48	4,03	6,53
6	Konstruksi	4,73	-0,68	2,40	4,56	4,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,38	-0,23	1,27	7,55	6,17
8	Transportasi dan Pergudangan	4,89	-1,60	4,68	6,62	5,77
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,93	-0,87	5,62	6,49	6,61
10	Informasi dan Komunikasi	4,52	7,42	7,32	5,31	6,03
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,05	5,85	-1,34	-1,60	7,58
12	Real Estate	3,68	2,97	3,09	5,71	4,40
13	Jasa Perusahaan	4,81	-2,64	5,54	6,19	6,26
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	4,81	0,96	3,21	2,23	2,62
15	Jasa Pendidikan	3,98	-0,38	4,59	4,62	3,06
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,66	2,11	9,13	3,65	6,22
17	Jasa Lainnya	1,64	-0,68	1,30	5,22	6,99
PDRB		4,24	-1,49	3,41	4,91	4,88

Sumber : KDA Kab. Tapin, BPS Tahun 2021 (*Angka Sementara / Preliminary Figure)
(* ** Angka Sangat Sementara / Very Preliminary Figure)

Berdasarkan tabel di atas, Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapin Tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2022 sekitar 0,03 dari tahun yang awalnya tahun 2022 dari 4,91 menjadi 4,88 di tahun 2023.

Penurunan ini yang signifikan terlihat di lapangan usaha diantaranya yang mengalami penurunan di jenis usaha pertambangan dan penggalian di tahun 2022 7,84 persen di tahun 2023 ini hanya 5,89 persen. Dari sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor dari tahun 2022 adalah 7,55 menjadi 6,17 persen mengalami penurunan sebesar 1,38 persen

e. Pendapatan Perkapita

Selama Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, PDRB perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Tapin rata – rata semakin meningkat setiap tahunnya dari 42,305 juta rupiah pada tahun 2018 menjadi 69.701 juta rupiah pada tahun 2023 sedangkan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) rata – rata semakin meningkat setiap tahunnya dari 32, 705 juta rupiah pada tahun 2018 menjadi 36,826 juta rupiah pada tahun 2023 tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 33,652 juta rupiah.

Tabel 2.8
Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

	Tahun					
	2018	2019	2020*	2021**	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PDRB ADHB (Juta Rp.)	7.999.159,37	8.438.249,39	8.393.891,50	9.047.327,43	12.771,26	13.694,18
PDRB ADHK 2010 (Juta Rp.)	6.192.446,99	6.454.990,15	6.358.489,90	6.575.521,31	6.898,88	7.235,23
PDRB perkapita (ADHB) (Rupiah)	42.305.463,63	44.547.827,02	44.424.582,05	47.170.387,18	65,825.78	69,701.82
PDRB perkapita (ADHK) (Rupiah)	32.750.234,00	33.077.658,98	33.652.240,56	34.283.039,79	35,558.32	36,826.52
Laju Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK 2010 (%)	3,67	4,05	-1,25	1,87	3,55	3,57

Keterangan : *) = angka sementara; **) angka sangat sementara

Sumber : BPS Kabupaten Dalam Angka 2023 (diolah)

f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Pengelompokan nilai Koefisien Gini adalah:

- $G < 0,3$ = ketimpangan rendah
- $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang
- $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi

Dalam menghitung nilai koefisien gini, maka dibutuhkan data-data seperti Jumlah rumah tangga atau penduduk dan rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya. Perbandingan Koefisien Gini Kabupaten Tapin dan Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Perkembangan Angka Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

Kabupaten/Provinsi	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Tapin	0,268	0,274	0,289	0,291	0,281
Provinsi Kalimantan Selatan	0,334	0,332	0,330	0,317	0,313

Sumber : BPS Kab. Tapin Tahun 2024

Berdasarkan tabel, rasio gini di Kabupaten Tapin pada Tahun 2023 sebesar 0,281, sedangkan persentase rasio gini di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2023 mencapai 0,313 persen. Angka ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Tapin jauh lebih merata jika dibandingkan distribusi pendapatan di Kalimantan Selatan. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi Penurunan gini ratio di Kabupaten Tapin sebesar 0,01 poin. Ini berarti bahwa distribusi pendapatan di tahun 2023 lebih merata jika dibandingkan dengan distribusi pendapatan tahun 2022

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

1.) Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD				
1	Jumlah Satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi	163 orang	DISDIK	
2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang	120 orang	DISDIK	



	Menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah daerah			
3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	6341	DISDIK	
4	Jumlah Kebutuhan minimal Pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	371 orang	DISDIK	
5	Jumlah Pendidik Paud (Negeri dan Swasta)	466 orang	DISDIK	
6	Jumlah Pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma (D-IV) atau serjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan setifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	S1= 254 Sertifikasi =82 orang	DISDIK	
7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1 sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD non formal dari lembaga pemerintah	SI= 131 Sertifikat= 65 STTPL= 60 orang	DISDIK	
Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar				
1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	SD 177 SMP 26	DISDIK	
2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	752	DISDIK	
3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	17658	DISDIK	
4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah	3988	DISDIK	



	dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan			
5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3988	DISDIK	
6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	18	DISDIK	
7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	80	DISDIK	
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1510	DISDIK	
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	318	DISDIK	
10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	224	DISDIK	
11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	34	DISDIK	
12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	310	DISDIK	
13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	74	DISDIK	
14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	S1 1397 SERTIFIKASI=703	DISDIK	
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah	S1 = 309 SERTIFIKASI =	DISDIK	



	menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	146		
16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	S1 = 159 SERTIFIKASI = 151 STTPL = 150	DISDIK	
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	S1 = 25 SERTIFIKASI = 22 STTPL = 22	DISDIK	S1 = 19, SERTIFIKAT = 17, STTPL = 17
18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	277	DISDIK	
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	70	DISDIK	
Tingkat partisipasi warga negara usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama				
1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	SD 177 SMP 26	DISDIK	SD 173 & SMP 26
2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	752	DISDIK	
3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar	17658	DISDIK	



	peserta didik dari Pemerintah Daerah			
4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3988	DISDIK	
5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3988	DISDIK	
6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	18	DISDIK	
7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	80	DISDIK	
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1510	DISDIK	
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	318	DISDIK	
10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	224	DISDIK	
11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	34	DISDIK	
12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	310	DISDIK	
13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	74	DISDIK	
14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV)	S1 1397 SERTIFIKASI=703	DISDIK	S1 = 1.002, SERTIFIKAT = 660



	atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik			
15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	S1 = 309 SERTIFIKASI = 146	DISDIK	S1 = 336, SERTIFIKAT = 182
16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	S1 = 159 SERTIFIKASI = 151 STTPL = 150	DISDIK	S1 = 166, SERTIFIKAT = 151, STTPL = 137
17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	S1 = 25 SERTIFIKASI = 22 STTPL = 22	DISDIK	S1 = 19, SERTIFIKAT = 17, STTPL = 17
18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	277	DISDIK	
19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	70	DISDIK	
Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	12	DISDIK	
2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima	199	DISDIK	Surat Keterangan



	perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah			
3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	3404	DISDIK	TAHAP 1= 1.627, TAHAP 2= 1.485, PD =1.588
4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	169	DISDIK	
5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	141	DISDIK	
6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	S1 = 129	DISDIK	
7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	STTPL = 150 SERTIFIKASI = 151 S1 = 159	DISDIK	
8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	14	DISDIK	

2.) Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan				
1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	2	DINKES	SK Rumah Sakit Rujukan yaitu Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi				
1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan	1	DINKES	



	akreditasinya			
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	17930	DINKES	Data dukung Validasi dari Dinkes
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenal	436	DINKES	Data dukung Validasi dari Dinkes
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan				
1	Jumlah dukungan logistic kesehatan yang tersedia	7302	DINKES	Data dukung Validasi dari Dinkes
2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	436	DINKES	Data dukung Validasi dari Dinkes
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	10968	DINKES	Data dukung Validasi dari Dinkes
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	436	DINKES	Data dukung Validasi dari Dinkes
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				
1.	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	87973	DINKES	Data dukung Validasi dari Dinkes
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	438	DINKES	Data dukung Validasi dari Dinkes
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	75294		Data dukung Validasi dari Dinkes
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	438		Data dukung Validasi dari Dinkes
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2303		Data dukung Validasi dari Dinkes
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	65		Data dukung Validasi dari Dinkes
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar				



1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	18171		Data dukung Validasi dari Dinkes
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	499		Data dukung Validasi dari Dinkes
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	13		Data dukung Validasi dari Dinkes
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	65		Data dukung Validasi dari Dinkes
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	153		Data dukung Validasi dari Dinkes
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	65		Data dukung Validasi dari Dinkes
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	13		Data dukung Validasi dari Dinkes
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	31		Data dukung Validasi dari Dinkes
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	1100		Data dukung Validasi dari Dinkes
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	83		Data dukung Validasi dari Dinkes
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				
1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	192		
2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	83		



3.) Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota (CIPTA KARYA)				
1	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	Ada	PUPR	
2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA provinsi	Ada	PUPR	Suket Kadis
3	Jumlah BUMD dan atau UPTD provinsi penyelenggaraan SPAM	Ada	PUPR	Tidak Ada
4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Surat Keterangan	PUPR	Tidak Ada
5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Surat Keterangan	PUPR	Tidak Ada
Rasio kemandapan jalan (BINA MARGA)				
1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan provinsi	617,15 KM	PUPR	ada
2	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan kabupaten	0	PUPR	Tidak Ada
3	Panjang jalan yang dibangun	24,206 KM	PUPR	Tidak Ada
4	Panjang jembatan yg dibangun	985 M	PUPR	Tidak Ada
5	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	0	PUPR	Tidak Ada
6	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	16 M	PUPR	Tidak Ada
7	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	201,606 KM	PUPR	Tidak Ada
8	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0	PUPR	Tidak Ada
9	Panjang jalan yang dipelihara	0	PUPR	Tidak Ada
10	Panjang jembatan yang dipelihara	0	PUPR	Tidak Ada
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (SDA)				
1	Luas kawasan permukiman	83.418,21	PUPR	Rekapitulasi



	rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)			Data Kecamatan Rawan Banjir
2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	37.666,13	PUPR	Rekapitulasi Data Kecamatan Panjang Sungai
3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	PUPR	Surat Keterangan
4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	PUPR	Surat Keterangan
5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada	PUPR	Surat Keterangan (Menyusul)
6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada	PUPR	Surat Keterangan (Menyusul)
7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Bangunan Perkuatan Tebing (m) = 6.668,03, Tanggul Sungai (m) = 822.118,60, Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir (unit) = 18	PUPR	KIB D dan Data Dak
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota (SDA)				
1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	83.418,21	PUPR	Tidak Ada
2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	37.666,13	PUPR	Tidak Ada
3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang	0	PUPR	Surat Keterangan



	rawan abrasi erosi dan akresi di WS Kewenangan Kabupaten(Ha)			(menyusul)
4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)	0	PUPR	Surat Keterangan (menyusul)
5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	Ada	PUPR	Surat Keterangan
6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	Ada	PUPR	Surat Keterangan
7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	Bangunan Perkuatan Tebing (m) = 6.668,03, Tanggul Sungai (m) = 822.118,60, Pintu Air/ Bendung Pengendali Banjir (unit) = 18	PUPR	Surat Keterangan
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (SDA)				
1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	0	PUPR	Surat Keterangan
2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	0,02	PUPR	KIB D DAN EPAKSI
3	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	17,25	PUPR	KIB D DAN EPAKSI
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota CIPTA KARYA)				
1	Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota	Ada	PUPR	RISPAM
2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota	Ada	PUPR	
3	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM	Ada	PUPR	
4	Jumlah izin yang	Surat	PUPR	



	diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Keterangan		
5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Surat Keterangan	PUPR	
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (CIPTA KARYA)				
1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	60799	PUPR	ADA, DATA PRIMER
2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Surat Keterangan	PUPR	
3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	60799	PUPR	
4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Surat Keterangan	PUPR	
5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	Surat Keterangan	PUPR	
6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Surat Keterangan	PUPR	
7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	89,39%	PUPR	
8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	Surat Keterangan	PUPR	
9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	Surat Keterangan	PUPR	
10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Surat Keterangan	PUPR	
11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Surat Keterangan	PUPR	
12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Surat Keterangan	PUPR	



13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Surat Keterangan	PUPR	
14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Surat Keterangan	PUPR	
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (BINA MARGA)				
1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	617,15 km	PUPR	SK BUPATI
2	Panjang jalan yang dibangun	24,206 KM	PUPR	KIB D BIDANG BINA MARGA
3	Panjang jembatan yg dibangun	985 M	PUPR	KIB D BIDANG BINA MARGA
4	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	17795 m	PUPR	KIB D BIDANG BINA MARGA
5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	16 M	PUPR	KIB D BIDANG BINA MARGA
6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	201,606 KM	PUPR	KIB D BIDANG BINA MARGA
7	Panjang jembatan yang direhabilitasi	0 m	PUPR	KIB D BIDANG BINA MARGA
8	Panjang jalan yang dipelihara	0km	PUPR	Suket Kepala Dinas
9	Panjang jembatan yang dipelihara	0 m	PUPR	KIB D BIDANG BINA MARGA
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)				
	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	97,38%	PUPR	
	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	Surat Keterangan	PUPR	
	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada	PUPR	
	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Surat Keterangan	PUPR	
	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Surat Keterangan	PUPR	
	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Surat Keterangan	PUPR	
	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah	2341	PUPR	



	Kab/Kota			
	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	2341	PUPR	
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (Jaskon)				
1	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	1	PUPR	Ada
2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	115	PUPR	Ada
3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	115	PUPR	Ada
4	Terselenggaranya Sistem Informasi pembina jasa konstruksi cakupan kabupaten kota yang aktif dengan data termuktakhir	Surat Keterangan	PUPR	Surat keterangan
5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Surat Keterangan	PUPR	Surat keterangan
6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Surat Keterangan	PUPR	Surat keterangan
7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Surat Keterangan	PUPR	Surat keterangan
8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaskanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Surat Keterangan	PUPR	Surat keterangan
9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	Ada, Struktur Organisasi	PUPR	Surat keterangan
	Tersedianya data dan	Ada	PUPR	Surat keterangan



10	informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.			
11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Ada	PUPR	Data Dukung Rekapitulasi Sertifikasi, Operator dan Teknisi
12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	Ada	PUPR	Data Dukung Rekapitulasi Sertifikasi, Operator dan Teknisi
13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	Surat Keterangan	PUPR	Surat Keterangan
14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Surat Keterangan	PUPR	Surat Keterangan
15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Surat Keterangan	PUPR	Surat Keterangan
16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	PUPR	Surat Keterangan
17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha,	Surat Keterangan	PUPR	Surat Keterangan



	bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Surat Keterangan	PUPR	Surat Keterangan
19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	Surat Keterangan	PUPR	Surat Keterangan
20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	Surat Keterangan	PUPR	Surat Keterangan
21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	Surat Keterangan	PUPR	Surat Keterangan
22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Surat Keterangan	PUPR	Rekap Data IUJK
23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Surat Keterangan	PUPR	Surat Keterangan
24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada	PUPR	Surat Keterangan
25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Surat Keterangan	PUPR	Surat Keterangan

4.) Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota				
1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	1494	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan Berdasarkan survey 2020 dan belum ada rencana penanganan
2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	3	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	3	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	2	Dinas Perkimtan	
5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	1	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	3	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota				
1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan (Tidak terdapat Masyarakat yang terdampak)
2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan (Tidak terdapat Masyarakat yang terdampak)



3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan (Tidak terdapat Masyarakat yang terdampak)
4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perkimtan	
6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani				
1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	146,5	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	23	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	0,251	Dinas Perkimtan	
		0,416317	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
4	Jumlah rumah di kab/kota	55883	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
5	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	527	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
6	Jumlah rumah tidak layak huni	5761	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
8	Rasio rumah dan KK	1,24	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
9	Jumlah rumah pembangunan baru	19	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)				
1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	17	Dinas Perkimtan	
2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	2319	Dinas Perkimtan	
3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	2124	Dinas Perkimtan	



4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	2319	Dinas Perkimtan	
5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0	Dinas Perkimtan	
6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	788	Dinas Perkimtan	
7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	0	Dinas Perkimtan	
8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	0	Dinas Perkimtan	
9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	0	Dinas Perkimtan	
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan				
1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	0	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN
2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	Dinas Perkimtan	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN
3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah kelebihan Maksimum / Absentee	0	Dinas Perkimtan	Tidak ada pembayaran ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee
4	Dokumen Izin membuka tanah	0	Dinas Perkimtan	Tidak ada permohonan atas dokumen izin membuka tanah
5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	0	Dinas Perkimtan	Tidak ada dokumen penetapam site lokasi pembangunan fisik



5.) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat,

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				
1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	66	POLPP	
2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	745	POLPP	
3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	29	POLPP	
4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	12	POLPP	
5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	1	POLPP	
6	Tersedianya sarana prasarana minimal	16	POLPP	
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	110	POLPP	
2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	1	POLPP	Foto Markas Damkar Satpol PP & Kebakaran Kab. Tapin
3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan		POLPP	Jadwal Piket Posko Damkar
4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/ prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	1	POLPP	Foto Markas Damkar Satpol PP & Kebakaran Kab. Tapin
5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	10	POLPP	Daftar Sarana dan Prasarana Pencegahan Kebakaran dan



				Penyelamatan Dakmar Satpol PP & Kebakaran Kab. Tapin
6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	7	POLPP	Daftar Anggota Pemadam Kebakaran yang Memiliki Standar Kualifikasi
7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	1238	POLPP	Surat Keterangan
8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran		POLPP	Daftar anggota pemadam yang memiliki standar kualifikasi
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana				
1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	1%	BPBD	Telah diverifikasi/ validasi
2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	3836%	BPBD	Telah diverifikasi/ validasi
3	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	1%	BPBD	Telah diverifikasi/ validasi
4	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	1%	BPBD	Telah diverifikasi/ validasi
5	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	70%	BPBD	Telah diverifikasi/ validasi
6	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	45%	BPBD	Telah diverifikasi/ validasi
7	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	7178%	BPBD	Telah diverifikasi/ validasi
8	Persentase kecepatan respon kurang 24 jam untuk setiap status KLB	1	BPBD	Telah diverifikasi/ validasi



9	Persentase kecepatan respon kurang 24 jam untuk setiap status darurat bencana	1	BPBD	Telah diverifikasi/ validasi
10	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	42	BPBD	Telah diverifikasi/ validasi
11	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	87	BPBD	Telah diverifikasi/ validasi

6.) Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber data	Ket
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan/pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)				
1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1	DINSOS	
2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	497	DINSOS	
3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	0	DINSOS	
4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	1208	DINSOS	
5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	1	DINSOS	
6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	920	DINSOS	
7	Jumlah rumah singgah/shelter /tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	0	DINSOS	
8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	115	DINSOS	
9	Jumlah penyandang	25	DINSOS	



	disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu			
10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	0	DINSOS	
11	Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	0	DINSOS	
12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	DINSOS	
13	Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	DINSOS	
14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	259	DINSOS	
15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	35	DINSOS	
16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	3	DINSOS	
17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	13	DINSOS	
18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	0	DINSOS	



19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	6	DINSOS	
20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	4	DINSOS	
21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	5	DINSOS	
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota				
1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	104	DINSOS	
2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	65	DINSOS	
3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	DINSOS	
4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	0	DINSOS	
5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	0	DINSOS	
6	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	33	DINSOS	

7.) Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja				
1	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.	1	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	-11	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait



3	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten / kota	16	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				
1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaste	100	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	71,43	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	3,2	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
4	Persentase LPK yang terakreditasi	16	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	100	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
6	Jumlah penganggur yang dilatih	432	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	99,07	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
8	Persentase penyerapan lulusan	34,95	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
9	Lulusan bersertifikat kompetensi	123	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	18	Disnaker	Surat Keterangan Kadis
11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	5	Disnaker	Surat Keterangan Kadis
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja				
1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	100%	Disnaker	Surat Keterangan Kadis
2	Data tingkat produktivitas total	0	Disnaker	Data bukan urusan tenaga kerja
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	99	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
2	Persentase perusahaan yang	5	Disnaker	Dibuktikan



	telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)			dengan dokumen terkait
3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	5	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
4	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	28,45	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	100	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	7,76	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
7	Jumlah mogok kerja	0	Disnaker	Surat Keterangan Kadis (Belum Ada)
8	Jumlah penutupan perusahaan	2	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
9	Jumlah perselisihan kepentingan	1	Disnaker	Surat Keterangan Kadis (Belum Ada)
10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	0	Disnaker	Surat Keterangan Kadis (Belum Ada)
11	Jumlah perselisihan PHK	11	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
12	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	844	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	11	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten / kota yang diberdayakan	0	Disnaker	Surat Keterangan Kadis (Belum Ada)
15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	9	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota				
1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah	72	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen



	kabupaten / kota			terkait
2	Jumlah pencari kerjayang terdaftar di kab/kota	1776	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	3	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten / kota	0	Disnaker	Surat Keterangan Kadis
5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	3	Disnaker	Surat Keterangan Kadis
6	Jumlah Penempatan Lembaga Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	0	Disnaker	Surat Keterangan Kadis
7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab / Kota	2471	Disnaker	Surat Keterangan Kadis
8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	1260	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia(CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	14	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	14	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	2	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	18	Disnaker	Surat Keterangan Kadis
13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	12	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	0	Disnaker	Dibuktikan dengan dokumen terkait
15	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	0	Disnaker	Surat Keterangan Kadis



16	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	0	Disnaker	Surat Keterangan Kadis
17	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	0	Disnaker	Surat Keterangan Kadis

8.) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
Persentase ARG pada belanja langsung APBD				
1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	35 SKPD		<ul style="list-style-type: none"> • Daftar SKPD yang telah dilatih PUG • Undangan • Daftar hadir • dokumentasi
2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	70 PROGRAM		Khusus SKPD kecamatan program/kegiatan yang sama tidak dihitung
Persentase ARG pada belanja langsung APBD				
1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	6 Media		<ol style="list-style-type: none"> 1. Media yang bekerja sama : Mata Banua Online 2. Instagram Diskominfo Kab. Tapin. 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Setda Kabupaten Tapin melalui videotron dalam wilayah Kabupaten Tapin. 4. Tapin TV. 5. Instagram Uptd-ppa.kab-tapin 6. Facebook uptd-ppa.kab-tapin 7. Kumparan.com 8. Kompasiana.com



2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	9 Lembaga		<ol style="list-style-type: none"> 1. UPTD PPA DP3A Kabupaten Tapin 2. Puspaga DP3A Kabupaten Tapin. 3. Unit PPA Polres Tapin. 4. RSUD Datu Sanggul Rantau. 5. 13 Puskesmas se Kab. Tapin. 6. 37 Tim PATBM Desa dan Kelurahan se Kab. Tapin, dengan jumlah Kader 450 orang. 7. Panti Asuhan budi Taqwa 8. Panti Asuhan Budi Ahlaqul Karimah. 9. LKSA Budi Utomo (khusus anak disabilitas)
3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	100%		
4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	2 lembaga		<ol style="list-style-type: none"> 1. Satgas PPA Kecamatan se Kab. Tapin 2. PATBM Desa Bitahan Baru.
5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)	2 lembaga		Tapin ada 2 Buah yaitu : UPTD PPA dan Puspaga
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk perempuan)				
1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	1 lembaga		Media yang bekerja sama : <ol style="list-style-type: none"> 1. Relawan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Tapin.



2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	320 orang		Undangan Bimtek dan Daftar Hadir
3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	2 lembaga		<ul style="list-style-type: none">• SK Bupati Tapin No. 188.45/018/KU M/2020 tentang Pusat Pembelajaran Keluarga Kab. Tapin• Sertifikat Webinar sebagai Puspaga Terbaik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI tentang Rencana Aksi Perlibatan Anak dan Keluarga Sebagai 2P dalam Upaya Penurunan Stunting melalui "Pemahaman Manajemen Kesehatan Reproduksi"
4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	2 lembaga		<ul style="list-style-type: none">• SK Bupati Tapin No. 188.45/018/KU M/2020 tentang Pusat Pembelajaran Keluarga Kab. Tapin• DPA DPPA Program : Kualitas Keluarga, Kegiatan : Gerakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak
5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah	3 Program		<ol style="list-style-type: none">1. Program Perlindungan Perempuan.2. Program Perlindungan



	dievaluasi			Khusus Anak 3. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak.
6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	2 lembaga		1. UPTD PPA DP3A Kabupaten Tapin 2. Unit PPA Polres Tapin.
7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	100%		(3 Perempuan korban kekerasan yang dilayani / 3 perempuan korban kekerasan, termasuk TPPO tahun 2023) x 100 = 100 %

9.) Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)				
1	Tersedianya infrastruktur perudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	ADA	Dinas Ketahanan Pangan	Tersedianya Lumbung Pangan Masyarakat
2	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	ADA	Dinas Ketahanan Pangan	Tersalurkannya Pangan pokok pada ke keluarga balita stunting
3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	ADA	Dinas Ketahanan Pangan	Rekapitulasi Harga Pangan Hasil Monitoring Pasar Kecamatan
4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	ADA	Dinas Ketahanan Pangan	Lomba AKU HATINYA PKK Tingkat Kabupaten, Pembinaan Lomba AKU HATINYA PKK Tingkat Provinsi, PKKD (Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah), Bantuan Benih Sayuran,



				Pupuk, dan Polybag untuk Penanganan Stunting, Pendampingan Konsumsi Gizi Seimbang dan Bantuan Sayuran dan Buah-buahan untuk sasaran penanganan stunting
5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	Dinas Ketahanan Pangan	Bukti dukung berupa peta ketahanan dan kerentanan pangan
6	Tertanganinya kerawanan pangan	1 Laporan Kegiatan	Dinas Ketahanan Pangan	Bantuan bibit Tanaman beserta bahan kontruksinya dan Penyaluran Bantuan Ternak Itik
7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	ADA	Dinas Ketahanan Pangan	Bantuan Pangan Beras ke daerah rawan Pangan
8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	ADA	Dinas Ketahanan Pangan	Uji Keamanan Pangan Sampel Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

10.) Urusan Pertanahan

No	Indikator Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	0%	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN
2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0%	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN



3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah kelebihan Mkasimum / Absentee	0%	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN	Tidak ada pembayaran ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee
4	Dokumen Izin membuka tanah	0%	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN	Tidak ada permohonan atas dokumen izin membuka tanah
5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	100%	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN	Tidak ada dokumen penetapam site lokasi pembangunan fisik

11.) Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota				
1	Hasil perhitungan provinsi terhadap :	IKA = 56,67	DLH	Penjelasan dan data dukung perhitungan
	a. Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)			
	b. Indeks tutupan hutan (ITH)	IKU = 93,48		
	c. IndeksTutupan Hutan (ITH)	IKL = 31,02		
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota				
1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/ kota	Ada	DLH	Ket IKK output table 1 dan 2
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota				
1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota	0	DPMPSTP/ DLH	
2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/ kota	3,85	DLH	Surat Pernyataan



3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten / Kota	28,57	DLH	Surat Pernyataan
4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	100%	DLH	Surat Pernyataan
5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	0	DLH	Surat Pernyataan
			DLH	
6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota yang ditangani	100%	DLH	Laporan Pelaksanaan Pos Pengaduan Penanganan Kasus Lingkungan Hidup Tahun 2023

12.) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Perekaman KTP Elektronik				
1	Penerbitan akta perkawinan	54,36%	DISDUKCAPIL	Ada
2	Penerbitan akta perceraian	31,83%	DISDUKCAPIL	Ada
3	Penerbitan akta kematian	100%	DISDUKCAPIL	Ada
4	Penyajian data kependudukan	100%	DISDUKCAPIL	Ada

13.) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
Persentase pengentasan desa tertinggal				
1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	12 Kecamatan 126 Desa	DPMD	Surat Pernyataan
2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Tahun 2023 = 6 Bumdesma Tahun 2022 = 5 Bumdesma 1 Bumdesma	DPMD	Surat Pernyataan



3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Lembaga Kemasyarakatan Posyandu Aktif = 223 Posyandu Lansia = 117 KPM = 126 LPM = 126 PKK Aktif = 126	DPMD	Sudah dilengkapi dengan data dukung
4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	126 Bumdes 35 TTG	DPMD	Sudah dilengkapi dengan data dukung
Persentase peningkatan status desa mandiri				
1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	12 Kecamatan 126 Desa	DPMD	Surat Pernyataan
2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Tahun 2023 = 6 Bumdesma Tahun 2022 = 5 Bumdesma 1 Bumdesma	DPMD	Surat Pernyataan
3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	Lembaga Kemasyarakatan Posyandu Aktif = 223 Posyandu Lansia = 117 KPM = 126 LPM = 126 PKK Aktif = 126	DPMD	Sudah dilengkapi dengan data dukung
4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	126 Bumdes 35 TTG	DPMD	Sudah dilengkapi dengan data dukung



14.) Urusan Pengendalian Perempuan dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
TFR (Angka Kelahiran Total)				
1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada	DPPKB	Belum dalam bentuk perda tetapi sudah diuat dalam bentuk buku grand design pembangunan kependudukan (terlampir)
3	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	27	DPPKB	Pendataan keluarga tahun 2015 dari BKKBN
4	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	17	DPPKB	Pendataan keluarga tahun 2015 dari BKKBN
5	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	61,38	DPPKB	
6	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	62	DPPKB	
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)				
1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	17 faskes	DPPKB	
2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2051	DPPKB	
3	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	939	DPPKB	
4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	68,7	DPPKB	
Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)				
1	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	35	DPPKB	
2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	11,16	DPPKB	

**15.) Urusan Perhubungan**

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Untuk Tahun 2023 tidak dapat dinilai karena terminal tidak beroperasi karena sejak akhir 2019 terjadi sengketa kepemilikan tanah dan sampai sekarang belum terbit putusan hukum yang berkekuatan tetap.	-	
2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sejak 16 Agustus 2018 sementara tidak beroperasi karena belum memiliki sarana dan prasana yang memenuhi standar	Ada	
3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Belum dapat dinilai karena Dinas Perhubungan belum menetapkan tarif angkutan	-	
4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalann Kab atau Kota	49,92%		

**16.) Urusan Komunikasi dan Informatika**

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo				
1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	11%	Tidak Ada	Surat Keterangan Kadis
2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	100%	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	YA	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi				
1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	100%	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	90,74 %	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	90,74 %	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan)	100%	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung



	yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik			terkait
5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	100%	Belum memanfaatkan SE	Surat Keterangan Kadis
6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	100%	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	90,74 %	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	90,74%	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	90,74 %	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	100%	Tidak Ada	Surat keterangan Kadis
12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	92,59%	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	100%	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e- government	ada	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota				
1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah	100%	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait



2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	100%	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	100%	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

17.) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas				
1	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	-	Terdapat Surat Pernyataan
2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	-	Terdapat Surat Pernyataan
3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	3,95%	Ada	Bukti Dukung Terlampir
4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	-	Terdapat Surat Pernyataan
5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	28,95%	Ada	Bukti Dukung Terlampir
6	Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	1,31%	Ada	Bukti Dukung Terlampir (msh kurang 2 org untuk bukti dukung)



7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	-	Terdapat Surat Pernyataan
8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	0,82%	-	Tidak perlu diisi
9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	Ada	Bukti Dukung Terlampir
10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0!	-	Terdapat Surat Pernyataan
11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0%	-	Terdapat Surat Pernyataan
12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kielembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	39,47%	Ada	Bukti Dukung Terlampir
13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	0	-	Terdapat Surat Pernyataan
Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha				
1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	63%	Ada	Bukti Dukung Terlampir
2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	8,19%	Ada	Bukti Dukung Terlampir
3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	10,35%	-	Terdapat Surat Pernyataan
4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produkusaha	0%	-	Terdapat Surat Pernyataan
5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0%	-	Terdapat Surat Pernyataan



6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0%	Ada	Bukti Dukung Terlampir
7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan	2,10%	Ada	Bukti Dukung Terlampir

18.) Urusan Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	PERDA mengenai pemberian fasilitas / intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten / kota	ADA	DPMPTSP	
2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas / insentif penanaman modal	ADA	DPMPTSP	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas / insentif penanaman modal	1 LAPORAN	DPMPTSP	Surat keterangan Kadis
4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	2 LAPORAN	DPMPTSP	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
5	Kegiatan pameran penanaman modal	3 LAPORAN	DPMPTSP	Surat keterangan Kadis
6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	DPMPTSP	Surat keterangan Kadis
7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	78 ORANG	DPMPTSP	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	2886 IZIN	DPMPTSP	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
9	Laporan realisasi penanaman modal	1313325635250	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait



10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten / kota	4 ORANG	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	16 PELAKU USAHA/ PERUSAHAAN	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten / kota	9 PERMINTAAN DATA	Ada	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait

19.) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.				
1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	40	DISPORA	Dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Dinas
Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial				
1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	0	DISPORA	Dibuktikan dengan bukti dukung terkait
2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	40	DISPORA	Dibuktikan dengan bukti dukung terkait
Mengukur peningkatan prestasi olahraga				
1	Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi disatuan satuan pendidikan	0	DISPORA	Dibuktikan dengan bukti dukung terkait
2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	170	DISPORA	Dibuktikan dengan bukti dukung terkait

**20.) Urusan Statistik**

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				
1	Tersedianya buku profil daerah	ada	DISKOMINFO	
2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	387	DISKOMINFO	
3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	387	DISKOMINFO	
4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	387	DISKOMINFO	
5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	387	DISKOMINFO	
6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	100%	DISKOMINFO	
7	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	100%	DISKOMINFO	

21.) Urusan Persandian

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
Tingkat keamanan informasi pemerintah				
1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	DISKOMINFO	Telah di verifikasi dan validasi
2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah.	46,67%	DISKOMINFO	Telah di verifikasi dan validasi



3	Persentase sistem elektronik/ aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	100%	DISKOMINFO	Telah di verifikasi dan validasi
4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	100%	DISKOMINFO	Telah di verifikasi dan validasi

22.) Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Terlestarikannya Cagar Budaya				
1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	26	Disbudpar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	11	Disbudpar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkat kan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	31	Disbudpar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	50	Disbudpar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	2	Disbudpar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
6	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	27	Disbudpar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
7	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	0	Disbudpar	Surat Keterangan
8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	0	Disbudpar	Surat Keterangan
9	Pemanfaatan cagar budaya	27	Disbudpar	Dibuktikan



	Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)			dengan dokumen pendukung terkait
10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Disbudpar	Surat Keterangan
11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	0	Disbudpar	Surat Keterangan
12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	0	Disbudpar	Surat Keterangan
13	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	0	Disbudpar	Surat Keterangan
14	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	1	Disbudpar	Surat Keterangan
15	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	0	Disbudpar	Surat Keterangan
16	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	Disbudpar	Surat Keterangan
17	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	1	Disbudpar	Surat Keterangan
18	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	0	Disbudpar	Surat Keterangan
19	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	Disbudpar	Surat Keterangan
20	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Disbudpar	Surat Keterangan

23.) Urusan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat				
1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	0,28%	Dinas Perpustakaan Dan kearsipan	
2	Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	71,90%	Dinas Perpustakaan Dinas Perpustakaan	
3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0.2%	Dinas Perpustakaan Dinas	



			Perpustakaan	
4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	1.8%	Dinas Perpustakaan Dinas Perpustakaan	Surat Keterangan
5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	9223	Dinas Perpustakaan	
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				
1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Perpustakaan	Surat keterangan
2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dan kearsipan	Surat keterangan
3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	274	Dinas Perpustakaan	Dokumen Terlampir

24.) Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan				
1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	
2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	100%	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	
3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	100%	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	
4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0,15	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	Surat Keterangan
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat				
1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	ada	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	4 Berita Acara Pemusnahan
2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	ada	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	Surat Keterangan
3	Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau	ADA	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	Daftar Arsip (Badan Narkotika Kab.Tapin, Sekretariat



	dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi			KORPRI dan Dinas Pendapatan Daerah Kab.Tapin)
4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK	ADA	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	Daftar Alih Media Arsip (Bagian Prokopim Setda Kabupaten Tapin dan Dispustarsip Kab.Tapin)
5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	Tidak ada	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	Surat Keterangan
6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	14	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	

25.) Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Mengukur total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten /Kota di wilayah Provinsi				
1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	0	DISKAN	Surat Keterangan
2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	0	DISKAN	Surat Keterangan
3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0	DISKAN	Surat Keterangan
4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses/teknik dan informasi/ dan penguatan kelembagaan)	178	DISKAN	Rekap Pembudidaya Ikan Yang Memperoleh Kegiatan Pemberdayaan
5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	2.110.700	DISKAN	Rekap Produksi BenihTahun

**26.) Urusan Pariwisata**

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan				
1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	28 Buah	Disbudpar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	303 Buah	Disbudpar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota	250 Sub jenis	Disbudpar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	82	Disbudpar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	20	Disbudpar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0	Disbudpar	Surat Keterangan
7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	4	Disbudpar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	0,51	Disbudpar	Surat Keterangan
9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	103,75%	Disbudpar	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	28 Desa	Disbudpar	Surat Keterangan

27.) Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Produktivitas pertanian per hektar per tahun				
1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	59	Dinas Pertanian	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
2	Prasaran pertanian yang digunakan	188	Dinas Pertanian	Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait
3	Penerbitan izin usaha pertanian	0	Dinas Pertanian	Surat keterangan
4	Persentase prasarana yang digunakan	100	Dinas Pertanian	Dibuktikan dengan dokumen



				pendukung terkait
5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	0	Dinas Pertanian	Surat keterangan
Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular				
1	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	-	Dinas Pertanian	Surat Keterangan
2	Tersedia nya dokumen rencana pengelolaan Tahura	-	Dinas Pertanian	Surat Keterangan
3	Pemberda-yaan masyarakat di daerah penyangga	-	Dinas Pertanian	Surat Keterangan
4	Pemulihan ekosistem pada Tahura	-	Dinas Pertanian	Surat Keterangan
5	Menurun nya gangguan kawasan TAHURA	-	Dinas Pertanian	Surat Keterangan

28.) Urusan Kehutanan

Untuk urusan kehutanan bukan kewenangan Kabupaten Tapin karena urusan kehutanan di ambil alih oleh provinsi dibuktikan dengan surat keterangan Oleh Dinas Pertanian

29.) Urusan Energi Sumberdaya Mineral

Untuk Urusan Sumberdaya Mineral bukan kewenangnya Kabupaten Tapin dibuktikan dengan Surat Keterangan Oleh Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu

30.) Urusan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)				
1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :	0%	DISDAG	Surat keterangan
	a. Pusat perbelanjaan			
	b. Toko swalayan	0%	DISDAG	Ada
2	Persentase penerbitan TDG	100%	DISDAG	Ada
3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	33,33 %	DISDAG	Ada
4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :		DISDAG	
	a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	0	DISDAG	Surat keterangan
	b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri		DISDAG	Surat keterangan
5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan	0	DISDAG	Surat keterangan



	distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota			
6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0	DISDAG	Surat keterangan
7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	92,3	DISDAG	Surat keterangan
8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	0,06%	DISDAG	Surat keterangan
Persentase kinerja pupuk				
1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	6.367,36	DISDAG	Ada
Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku				
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	36,88 %	DISDAG	Ada
2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	21,35	DISDAG	Surat Keterangan

31.) Urusan Perindustrian

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten / Kota				
1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	100%		
2	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	100 %		
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
1	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	0%	Ada	
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				



1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	0%	Ada	
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini				
1	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	0,01231060606%		

32.) Urusan Transmigrasi

Untuk Urusan Transmigrasi ini bukan kewenangannya Kabupaten Tapin dibuktikan dengan Surat Keterangan

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

1.) Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tingkat partisipasi warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	82,09%	Dinas Pendidikan Dan Disdukcapil	Daftar rincian terlampir
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	93,21%	Dinas Pendidikan Dan Disdukcapil	Daftar rincian jumlah dan data jumlah Penduduk terlampir
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	73,09%	Dinas Pendidikan Dan Disdukcapil	Daftar rincian jumlah dan data jumlah Penduduk terlampir
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	114,75%	Dinas Pendidikan Dan Disdukcapil	Daftar rincian jumlah dan data jumlah Penduduk terlampir

**2.) Urusan Kesehatan**

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	6,67%	Dinas Kesehatan	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	Dinas Kesehatan	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	Dinas Kesehatan	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	Dinas Kesehatan	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	Dinas Kesehatan	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	108,61%	Dinas Kesehatan	
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	134.31%	Dinas Kesehatan	
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	



3.) Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota (CIPTA KARYA)	74,66%	PUPR	SUKET
2	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional (CIPTA KARYA)	89,39%	PUPR	SUKET
3	Rasio kemantapan jalan (BINA MARGA)	70,19	PUPR	
4	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (SDA)	0.71%	PUPR	Rekapitulasi dan KIB
5	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kabupaten/kota (SDA)	0%	PUPR	Surat Keterangan (Menyusul)
6	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (SDA)	64,72%	PUPR	Rekapitulasi
7	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (CIPTA KARYA)	74.66%	PUPR	Rekap Rumah Tangga yang Memiliki Akses air Minum
8	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (CIPTA KARYA)	89.39%	PUPR	Rekap Rumah Tangga yang Memiliki Akses air Limbah
9	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (BINA MARGA)	70,19%	PUPR	
10	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang	92%	PUPR	Rekap Tenaga Operator dan



	memiliki sertifikat kompetensi (Jaskon)			Rekap Tenaga Sertifikasi
11	Mengukur rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (Jaskon)	100%	PUPR	Rekapitulasi Paket Perkerjaan Dinas PUPR Kab. Tapin

4.) Urusan Perumahan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	100%	PERKIMTAN	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100%	PERKIMTAN	
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	0,01%	PERKIMTAN	
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	10,33%	PERKIMTAN	
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	31,48%	PERKIMTAN	

5.) Urusan Trantibunlinmas

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	Dinas Pol PP Dan Damkar	
2	Mengukur persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	Dinas Pol PP Dan Damkar	
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Dinas Pol PP Dan Damkar	
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	10,61 menit	Dinas Pol PP Dan Damkar	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	BPBD	
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	BPBD	
7	Jumlah warga negara yang	100%	BPBD	



	memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			
--	---	--	--	--

6.) Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100%	Dinas Sosial	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	100%	Dinas Sosial	

7.) Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %	Dinas Tenaga Kerja	Data Dukung Terlampir
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	92,45%	Dinas Tenaga Kerja	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	82,232,402%	Dinas Tenaga Kerja	Data Dukung Terlampir
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	85,34%	Dinas Tenaga Kerja	Data Dukung Terlampir
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	70,95%		



8.) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	7.61%	DP3A	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	2.1%	DP3A	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 Penduduk perempuan)	3.0%	DP3A	

9.) Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	0,74%	DKP	Analisis dan data Ketersediaan Pangan utama 2023

10.) Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0%	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN	
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN	Data dan Surat Pernyataan Terlampir
3	Persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	0%	Disperkim	Surat Keterangan
4	Persentase tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah kelebihan maksimum dan tanah Absentee	42,67%	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN	
5	Persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat	0%	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN	



6	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	Data dari Disperkimtan yang didapat dari BPN	
---	---	------	--	--

11.) Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota	65,96	DLH	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	73,99%	DLH	
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	30,77%	DLH	

12.) Urusan Administrasi Penduduk

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Perekaman KTP Elektronik	99,51%	DISDUKCAPIL	
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1(satu) hari yang memiliki KIA	79,48%	DISDUKCAPIL	
3	Mengukur tingkat kepemilikan akte kelahiran	98,53%	DISDUKCAPIL	
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	100%	DISDUKCAPIL	

13.) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	100%	DPMPD	
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	87,30%	DPMPD	

**14.) Urusan Pengendalian Penduduk dan KB**

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	17%	DPPKB	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	79,28%	DPPKB	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	5,51%	DPPKB	

15.) Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Mengukur rasio konektivitas Kabupaten / Kota	0,416	DISHUB	Surat pernyataan Kepala Dinas
2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	49,92	DISHUB	Surat pernyataan Kepala Dinas

16.) Urusan Kominfo

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100%	DISKOMINFO	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	DISKOMINFO	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ kota	100%	DISKOMINFO	

17.) Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Mengukur peningkatan	14,47%	Dinas	



	koperasi yang berkualitas		Perindustrian	
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	54,66%	Dinas Perindustrian	

18.) Urusan Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	44.73%	DPMPTSP	

19.) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	2,62%	DISPORA	Surat pernyataan tidak dilaksanakan
2	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial (OR)	23,07%	DISPORA	
3	Mengukur peningkatan prestasi olahraga	121	DISPORA	Surat pernyataan tidak dilaksanakan

20.) Urusan Statistik

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	DISKOMINFO	
2	Mengukur persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	DISKOMINFO	

**21.) Urusan Persandian**

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	64,81%	DISKOMINFO	SUKET

22.) Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Mengukur tingkat pelestarian cagar budaya	18,18%	DISBUDPAR	

23.) Urusan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	50,87	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
2	Mengukur indeks pembangunan literasi masyarakat	80,16%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

24.) Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	75,04	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
2	Mengukur tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	69,67%	Dinas Perpustakaan dan Arsip	

**25.) Urusan Kelautan Perikanan**

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Mengukur total produksi perikanan dari seluruh Kabupaten /Kota di wilayah Provinsi	97.21	Dinas Perikanan	

26.) Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	331,58%	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	45,48%	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	
3	Tingkat Hunian Akomodasi	44,51%	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,90%	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	6,27%	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	

27.) Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Mengukur tingkat produktivitas pertanian	51,280%	Dinas Pertanian	
2	Mengukur tingkat penurunan kejadian penyakit hewan menular	100%	Dinas Pertanian	

28.) Urusan Kehutanan

Untuk urusan kehutanan di Kabupaten Tapin tidak dilaksanakan karena di ambil oleh provinsi.

29.) Urusan Sumberdaya Mineral

Untuk Urusan Sumberdaya Mineral bukan



kewenangannya Kabupaten Tapin dibuktikan dengan Surat Keterangan.

30.) Urusan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	83,81%	Dinas Perdagangan	
2	Persentase kinerja pupuk	52,04 %	Dinas Pertanian	
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	75,66 %	Dinas Perdagangan	

31.) Urusan Perindustrian

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	1,24%	Dinas Perindustrian	
2	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten / Kota	0	Dinas Perindustrian	Suket
3	Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	100%	Dinas Perindustrian	(RPIK Kabupaten Tapin masih dalam proses penyelesaian Perda sehingga apa yang diamanatkan dalam RIPIN dan RPIP belum sepenuhnya bisa dilaksanakan secara penuh)
4	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan	0%	Dinas Perindustrian	



	jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait			
5	Mengukur persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%		Suket
6.	Mengukur ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini	95%		Suket

32.) Urusan Transmigrasi

Untuk Urusan Transmigrasi ini bukan kewenangannya Kabupaten Tapin dibuktikan dengan Surat Keterangan

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1.) Fungsi Penunjang Perencanaan dan Keuangan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Mengukur rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	9,72%	BKAD	
2	Mengukur tax ratio atau kemampuan daerah dalam mengumpulkan pajak dari potensi pajak daerah	5,55%	BKAD	
3	Mengukur efisiensi belanja operasi di luar transfer expenditures atau rasio belanja operasi dalam APBD di luar transfer expenditure	61.37%	BKAD	
4	Opini Laporan Keuangan	9 WTP 1 WDP		
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	LEVEL 3		
6	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	LEVEL 3		

**2.) Fungsi Penunjang Pengadaan**

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0%	BPBJ	
2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	57,06%	BPBJ	
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	41,54%	BPBJ	
4.	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	49.90%	BPBJ	

3.) Fungsi Penunjang Kepegawaian

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Mengukur rasio pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	72,42%	BKPSDM	
2	Melihat jumlah pegawai fungsional PNS di luar guru dan tenaga kesehatan	25,50 %	BKPSDM	
3	Melihat pegawai fungsional bersertifikat kompetensi, di luar tenaga guru dan kesehatan	48,04%	BKPSDM	

4.) Fungsi Penunjang Manajemen Keuangan

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	27,28%	BKAD	
2	Deviasi realisasi PAD	21,72%	BKAD	



	terhadap anggaran PAD dalam APBD			
3	Assets Management	ya	BKAD	
		ya	BKAD	
		ya	BKAD	
		ya	BKAD	
4	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	-12,61 %	BKAD	

5.) Fungsi Penunjang Transparansi dan Partisipasi Publik

No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	Mengukur akses publik terhadap informasi keuangan daerah	84,27%	Diskominfo	
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100%		

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapin tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam sebuah Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan tersebut harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk sebuah pertanggungjawaban publik.

Pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara realisasi tahun berjalan versus realisasi n-1, realisasi tahun berjalan versus target pada RPJMD, persentase capaian versus standar yang berlaku, termasuk dengan standar nasional yang terkait. Hasil pengukuran kinerja disajikan menurut kelompok Kinerja Utama yang bersifat makro dan capaian sasaran organisasi secara keseluruhan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi:

Indikator bermakna positif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Indikator bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome).

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran. Indikator sasaran dilengkapi dengan Target Kualitatif dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Kabupaten Tapin yang diperjanjikan pada Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.10
Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
Meningkatkan kualitas pembangunan dan daya saing masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	71,43
Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	0,603
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	0,710
Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,5
Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah yang berkelanjutan	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	1
	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.	Persen	2,95
	LPE Kategori Industri Pengolahan	Persen	3,35
	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	Persen	5,74
Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	Poin	3,59
Meningkatnya taraf hidup keluarga	PDRB per Kapita	J u t a Rp/Kapita	50,55
Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	Poin	0,346
Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah	Tingkat Pengangguran terbuka	Poin	4,13
Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	55,00
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Poin	70,72
	Nilai LPPD	Poin	3,550
Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	80
Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran, efektifitas pencegahan korupsi dan pemetaan risiko korupsi,	Survei Penilaian Integritas	Poin	78
Meningkatnya kualitas	Survey Kepuasan	Poin	75,5



Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Target
pelayanan public dan pemerintahan berbasis elektronik	Masyarakat		
	Indeks SPBE.	Poin	3,0
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan pengembangan wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	0
Meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur	Poin	-
	Tingkat Penurunan Emisi GRK.	Persen	9
	Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	0,18

Sumber : LKJIP Kab. Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

B. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target

Perjanjian Kinerja

Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara realisasi tahun berjalan versus realisasi n-1, realisasi tahun berjalan versus target di RKPD, persentase capaian versus standar yang berlaku, termasuk dengan standar nasional yang terkait.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2023 merupakan kinerja tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Tapin 2018-2023.

Hasil Pengukuran secara mandiri (self assessment) terhadap 5 (lima) Tujuan, 11 (sebelas) Sasaran Strategis Daerah dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Sasaran, yang dapat dirincikan bahwa dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis, 6 (enam) Sasaran Strategis dikategorikan dengan capaian kinerja sangat baik dengan rata-rata capaian pada interval > 90%, sedangkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis



dikategorikan baik dengan rata-rata capaian pada interval > 75% - 90% dan 5 (lima) Sasaran Strategis yang berkategori cukup dengan capaian pada interval 50% - 75%.

Dan dari 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Sasaran, sebanyak 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Sasaran masuk dalam kategori sangat baik dengan capaian kinerja berada pada interval > 90%, 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang capaian kinerjanya berada pada interval $76\% \leq 90\%$ 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran yang berkategori kurang dengan rata-rata capaian pada interval di bawah 50%.

Capaian indikator kinerja tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen dan perangkat daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Pengungkapan capaian kinerja sasaran dilakukan secara berurutan seperti urutan pada RPJMD dan RKPD, yaitu mulai dari misi, tujuan, sasaran, dan program prioritas. Hasil capaian pengukuran terhadap 11 sasaran strategis dan 23 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tapin pada tahun 2023 ini sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.11
Pengukuran Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas Pembangunan dan daya saing masyarakat				
Sasaran : Meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia	71,43	72,00	101,79
	2. Indeks Pendidikan	0,603	0,611	101,13
Sasaran : Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat	3. Indeks Kesehatan	0,710	0,711	100,14
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju dan berkelanjutan				
Sasaran : Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah yang berkelanjutan	4. Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,5	4,91	109,11
	5. LPE Katagori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1	0,36	36,0
	6. LPE Katagori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan	2,95	7,55	255,93



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA %
	Sepeda Motor			
	7. LPE Katagori Industri Pengolahan	3,35	2,69	80,2
	8. Kontibusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	5,74	1,90	33,10
Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat				
Sasaran : Meningkatnya Taraf Hidup Keluarga	9. Tingkat Kemiskinan	3,59	3,19	88,85
	10. PDRB per Kapita	50,55	12,24	24,21
Sasaran : Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	11. Indeks Gini	0,346	0,29	83,81
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan Daerah	12. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,13	3,93	95,15
Tujuan 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik				
Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	13. Indeks Reformasi Birokrasi	55,00	73,89	134,34
	14. Nilai SAKIP	70,72	69,02	97,59
	15. Nilai LPPD	3,550	3,4575	97,46
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	16. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80	64,96	81,2
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran, efektifitas Pencegahan Korupsi dan Pemetaan Resiko Korupsi	17. Survey Penilaian Integritas	78	73,92	94,76
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT	18. Survey Kepuasan Masyarakat.	75,5	88,90	177,48
	19. Indeks SPBE	2,6	3,09	188,46
Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah				
Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan	20. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	0	0	0
	21. Indesk Infrastruktur	0	0	0
	22. Tingkat Penurunan Emisi GRK	9	23,10	256,66
	23. Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	0,18	1,09	605,55

Sumber : LKJIP Kab. Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi



C. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun sebelumnya

Hasil capaian pengukuran terhadap 34 (tiga puluh empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tapin pada tahun 2023 ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tapin
Tahun 2022 dengan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Capaian Kinerja tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	Meningkatkan kualitas Pembangunan dan daya saing masyarakat	a. Indeks Pembangunan Manusia	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	100,45	101,79
2	Meningkatnya kualitas Pendidikan Masyarakat	b. indesk Pendidikan	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Ket: HLS = Harapan Lama Sekolah HLS maks = 18; HLS min = 0 RLS = Rata-rata Lama Sekolah RLS maks = 15; RLS min = 0</p>	0	101,13
3	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	c. Indeks Kesehatan	$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$	0	0





No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Capaian Kinerja tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
4	Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t = tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya	62,96	109.11
5	Meningkatnya pembangunan sektor unggulan daerah yang berkelanjutan	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	$\frac{PDRB_{(PKP)t} - PDRB_{(PKP)t-1}}{PDRB_{(PKP)t-1}} \times 100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya P= Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	64,41	36,0
6		LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	$\frac{PDRB_{(IP+Pd)t} - PDRB_{(IP+Pd)t-1}}{PDRB_{(IP+Pd)t-1}} \times 100\%$ Ket: PDRB atas dasar harga konstan T = tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya IP = Kategori Industri Pengolahan Pd = Kategori Perdagangan	0	255,93



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Capaian Kinerja tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023
7		LPE Kategori Industri Pengolahan	$\frac{PDRB_{(IP)t} - PDRB_{(IP)t-1}}{PDRB_{(IP)t-1}} \times 100\%$ <p>Ket: PDRB atas dasar harga konstan t= tahun berjalan t-1= tahun sebelumnya IP= Kategori Industri Pengolahan</p>	87,44	80,2
8		Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	66,49	46,86
9	Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	95,65	88,85
10	Meningkatnya taraf hidup keluarga	PDRB per Kapita	$\frac{PDRB \text{ adh Berlaku}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$	0	0
11	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini	$G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana: Pi : persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</p> <p>Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi</p>	99,66	83,81

12	Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah	Tingkat Pengangguran Terbuka	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menganggur}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$	77,94	95,15
13	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi		75	134,34
14.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Penilaian LPPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	0	78,30



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Capaian Kinerja tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023																																								
15		Nilai SAKIP	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Sistem AKIP</th> <th>FORMAL</th> <th>KUALITAS</th> <th>PEMANFAATAN</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perencanaan Kinerja</td> <td>6 %</td> <td>15 %</td> <td>9 %</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>Pengukuran Kinerja</td> <td>5 %</td> <td>12,5 %</td> <td>7,5 %</td> <td>25%</td> </tr> <tr> <td>Pelaporan Kinerja</td> <td>3 %</td> <td>7,5 %</td> <td>4,5 %</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>Evaluasi Kinerja</td> <td>2 %</td> <td>5 %</td> <td>3 %</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">} 80%</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CAPAAN KINERJA</th> <th>OUTPUT</th> <th>OUTCOME</th> <th>LAINNYA</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>5%</td> <td>5%</td> <td>10%</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>	Sistem AKIP	FORMAL	KUALITAS	PEMANFAATAN	TOTAL	Perencanaan Kinerja	6 %	15 %	9 %	30%	Pengukuran Kinerja	5 %	12,5 %	7,5 %	25%	Pelaporan Kinerja	3 %	7,5 %	4,5 %	15%	Evaluasi Kinerja	2 %	5 %	3 %	10%	} 80%					CAPAAN KINERJA	OUTPUT	OUTCOME	LAINNYA	TOTAL		5%	5%	10%	20%	80	97,59
Sistem AKIP	FORMAL	KUALITAS	PEMANFAATAN	TOTAL																																									
Perencanaan Kinerja	6 %	15 %	9 %	30%																																									
Pengukuran Kinerja	5 %	12,5 %	7,5 %	25%																																									
Pelaporan Kinerja	3 %	7,5 %	4,5 %	15%																																									
Evaluasi Kinerja	2 %	5 %	3 %	10%																																									
} 80%																																													
CAPAAN KINERJA	OUTPUT	OUTCOME	LAINNYA	TOTAL																																									
	5%	5%	10%	20%																																									
16	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	<p>Penentuan bobot Dimensi IPKD adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (15) Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD (20) Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (15) Penyerapan anggaran (20) Kondisi keuangan daerah (15) Opini BPK atas LKPD (15) 	100	81,2																																								
17	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran, efektifitas pencegahan korupsi dan pemetaan risiko korupsi,	Survey Penilaian Integritas	<p>Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang diselenggarakan oleh KPK</p> <p>Survei Penilaian Integritas (SPI) dibagi menjadi 3 (tiga) jenis responden yaitu Internal (Pegawai ASN/Non-ASN), Eksternal (Masyarakat Pengguna Layanan), dan Ekspert Pakar/Ahli/Stakeholder).</p>	0	94,76																																								





No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Capaian Kinerja tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023																																																								
18	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemerintahan berbasis elektronik	Survey Kepuasan Masyarakat	<p>Analisa Perhitungan : $SKM = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Responden Per Parameter}}{\text{Total Parameter Yang Terisi}} \times \text{Bobot}$</p> <p>Bobot = 1 / Jumlah Parameter = (1/9) = 0,111</p> <p style="text-align: center;">IKM Unit Pelayanan x 25</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval</th> <th>Nilai Interval Konversi</th> <th>Kategori Mutu Pelayanan</th> <th>Mutu Pelayanan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 1,75</td> <td>25,00 - 64,99</td> <td>D</td> <td>Tidak Baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,76 - 2,50</td> <td>65,00 - 76,60</td> <td>C</td> <td>Kurang Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,51 - 3,25</td> <td>76,61 - 88,30</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,26 - 4,00</td> <td>88,31 - 100</td> <td>A</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> </tbody> </table> <p>Keterangan :</p> <p>a. Parameter Pelayanan : Faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada pemohon sebagai variable penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat.</p> <p>b. Kuesioner : Suatu daftar pertanyaan untuk diisi/ dijawab oleh pemohon layanan.</p>	Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Kategori Mutu Pelayanan	Mutu Pelayanan	1	1,00 - 1,75	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik	2	1,76 - 2,50	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik	3	2,51 - 3,25	76,61 - 88,30	B	Baik	4	3,26 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik	100,58	177,48																															
Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Kategori Mutu Pelayanan	Mutu Pelayanan																																																									
1	1,00 - 1,75	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik																																																									
2	1,76 - 2,50	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik																																																									
3	2,51 - 3,25	76,61 - 88,30	B	Baik																																																									
4	3,26 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik																																																									
19		Indeks SPBE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Domain dan Aspek Penilaian</th> <th>Bobot</th> <th colspan="3">Predikat Indeks SPBE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Domain 1 - Kebijakan SPBE</td> <td>13%</td> <td rowspan="2">NO</td> <td rowspan="2">NILAI INDEKS</td> <td rowspan="2">PREDIKAT</td> </tr> <tr> <td>Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</td> <td>13%</td> </tr> <tr> <td>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</td> <td>25%</td> <td>1</td> <td>4,2 - 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>Aspek 2 - Perencanaan Strategis</td> <td>10%</td> <td>2</td> <td>3,5 - < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi</td> <td>10%</td> <td>3</td> <td>2,6 - < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE</td> <td>5%</td> <td>4</td> <td>1,8 - < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>Domain 3 - Manajemen SPBE</td> <td>16,5%</td> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE</td> <td>12%</td> <td colspan="3" rowspan="3">*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)</td> </tr> <tr> <td>Aspek 6 - Audit TIK</td> <td>4,5%</td> </tr> <tr> <td>Domain 4 - Layanan SPBE</td> <td>45,5%</td> </tr> <tr> <td>Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</td> <td>27,5%</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Aspek 8 - Layanan Publik</td> <td>18%</td> <td colspan="3"></td> </tr> </tbody> </table>	Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE			Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%	Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%	1	4,2 - 5,0	Memuaskan	Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%	2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik	Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	3	2,6 - < 3,5	Baik *)	Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%	4	1,8 - < 2,6	Cukup	Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%	5	< 1,8	Kurang	Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%	*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)			Aspek 6 - Audit TIK	4,5%	Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%	Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%				Aspek 8 - Layanan Publik	18%				100	188,46
Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																																																											
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																																																									
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																																																												
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%	1	4,2 - 5,0	Memuaskan																																																									
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%	2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik																																																									
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%	3	2,6 - < 3,5	Baik *)																																																									
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%	4	1,8 - < 2,6	Cukup																																																									
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%	5	< 1,8	Kurang																																																									
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%	*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)																																																											
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																																																												
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																																																												
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																																																												
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																																																												

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Capaian Kinerja tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023						
20	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan pengembangan wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat	0	0						
21	Meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan	Indeks Infrastruktur	<p>Indeks Infrastruktur = $0,3255 \times \text{jalan} + 0,3343 \times \text{air} + 0,5133 \times \text{sanitasi} + 0,5033 \times \text{pkpl} + 0,5153 \times \text{xi_kom_inv}$</p> <p>Variabel Indeks Infrastruktur :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #d9ead3;"> <th style="text-align: center;">Definisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>% Kondisi jalan dalam keadaan mantab tahun-x</td> </tr> <tr> <td>% Keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun-x</td> </tr> <tr> <td>% Keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun-x</td> </tr> <tr> <td>% Keluarga Pengguna Listrik PLN dan non PLN</td> </tr> <tr> <td>Telekomunikasi (Tingkat mengukur sinyal telepon dan sinyal internet di suatu daerah)</td> </tr> </tbody> </table>	Definisi	% Kondisi jalan dalam keadaan mantab tahun-x	% Keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun-x	% Keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun-x	% Keluarga Pengguna Listrik PLN dan non PLN	Telekomunikasi (Tingkat mengukur sinyal telepon dan sinyal internet di suatu daerah)	0	0
Definisi											
% Kondisi jalan dalam keadaan mantab tahun-x											
% Keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun-x											
% Keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun-x											
% Keluarga Pengguna Listrik PLN dan non PLN											
Telekomunikasi (Tingkat mengukur sinyal telepon dan sinyal internet di suatu daerah)											
22		Tingkat penurunan emisi GRK	$\text{Persentase Penurunan Emisi GRK} = \frac{\text{Emisi GRK}_{(n)} - \text{Emisi GRK}_{(n-1)}}{\text{Emisi GRK}_{(n-1)}} \times 100\%$ <p>Ket: n= tahun berjalan n-1= tahun sebelumnya</p>	0	255,66						





23	Persentase peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$\frac{IKLH_{(n)} - IKLH_{(n-1)}}{IKLH_{(n-1)}} \times 100\%$ <p>Ket: n= tahun berjalan n-1= tahun sebelumnya IKLH= ANGKA IKLH</p>	262,00	605,55
----	---	--	--------	--------

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023



D. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.13
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD Misi 1

Misi 1	Mewujudkan Masyarakat Tapin Yang Religius, Berakhlak Dan Berbudaya						
Tujuan 1	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Dan Daya Saing Masyarakat						
Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat						
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi					Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia	68,7	69,2	69,7	70,2	70,7	70,7	71,2
Indeks Pendidikan	0	0	0	0	0	0,591	0,603
Sasaran 2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat						
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi					Target RPJMD	
	2018	2019	2021	2021	2022	2022	2023
Indeks Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0,710
Sasaran 3	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat						
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi					Target RPJMD	
	2018	2019	2021		2021	2022	2023

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023

Tabel 2.14
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD Misi 2

Misi 2	Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berkelanjutan						
Tujuan 1	MENINGKATKAN KUALITAS PEREKONOMIAN YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN						
Sasaran 1	MENINGKATNYA PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH						
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi					Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi	0	4,25	1,5	3,4	3,4	5,3	5,6



LPE Katagori Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	0	0	0	0	0	0	0
LPE Katagori Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	0	0	0	0	0	0	0
LPE Katagori Industri Pengolahan	0	0	0	0	0	0	0
Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	0	5,95	5,76	2,46	2,46	3,7	4

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023

Tabel 2.15
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD Misi 3

Misi 3	Memajukan Perekonomian Daerah Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berkelanjutan						
Tujuan 1	Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat						
Sasaran 1	Meningkatnya Taraf Hidup Keluarga						
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi					Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Tingkat Kemiskinan	0	3,41	3,06	3,6	3,9	3,45	3,35
PDRB Perkapita	0	12,08	11,84	11,95	12,24	12,85	13,23
Sasaran 2	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat						
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi					Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Indeks Gini	0	0,3	0,3	0,29	0,291	0,29	0,28
Sasaran 3	Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan Daerah						
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi					Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Tingkat pengangguran terbuka	0	3,65	3,73	4,96	4,15	3,4	3,2

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023

Tabel 2.16
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD Misi 4

Misi 4	Memujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Berbiwibawa.						
Tujuan 1	Memujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik						
Sasaran 1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah						
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi					Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	0	53,02	53,12	53,94	55,00	70	71
Nilai Sakip	60,21	67,21	67,23	69,69	68,93	70	70,72
Nilai LPPD	3,161	3,529.7	0	0	0	3,529	3,550
Sasaran 2	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah						
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi					Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	0	0	0	0	0
Sasaran 3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran, Efektifitas Pencegahan Korupsi Dan Pemetaan Resiko Korupsi						
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi					Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Survey Penilaian Integritas	0	0	0	0	0	73,92	78
Sasaran 4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Pemerintahan Berbasis Eletronik						
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi					Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	0	75	82,4	96,25	83,48	83	83
Indeks SPBE (Poin)	0	0	0	0	0	0	3,0

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023

Tabel 2.17
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD Misi 5

Misi 5	Memantapkan Pengelolaan Infrastruktur Dan Lingkungan Secara Berkelanjutan
Tujuan 1	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Dan



	Pengembangan Wilayah						
Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kewilayahan Yang Berwawasan Lingkungan						
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi					Target RPJMD	
	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023
Indeks Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0
Tingkat Penurunan Emisi GRK	0	0	0	0	0	0	9
Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	0	0	0	0	0	0	0,18

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai

Hasil Pengukuran secara mandiri (self assessment) terhadap 5 (lima) Tujuan, 11 (sebelas) Sasaran Strategis Daerah dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Sasaran, yang dapat dirincikan bahwa dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis, 4 (empat) Sasaran Strategis dikategorikan dengan capaian kinerja sangat baik dengan rata-rata capaian pada interval $> 90\%$, sedangkan 2 (dua) Sasaran Strategis dikategorikan baik dengan rata-rata capaian pada interval $> 75\% - 90\%$ dan 5 (lima) Sasaran Strategis yang berkategori cukup dengan capaian pada interval $0\% - 75\%$.

Dan dari 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Sasaran, sebanyak 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Sasaran masuk dalam kategori sangat baik dengan capaian kinerja berada pada interval $> 90\%$, 4 (empat) Indikator Kinerja Sasaran yang capaian kinerjanya berada pada interval $76\% \leq 90\%$ 9 (sembilan) Indikator Kinerja Sasaran yang berkategori kurang dengan rata-rata capaian pada interval di bawah 50% . Capaian indikator kinerja tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen dan perangkat daerah yang dimiliki oleh

Pemerintah Kabupaten Tapin. Uraian capaian tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 2.18
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 1

Misi 1	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing			
Tujuan 1	Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin			
Sasaran 1	Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan			
Indikator Kinerja Strategis	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Keterangan
Indeks Pembangunan Manusia	71,43	72,00	100,79	
Indeks Pendidikan	0.603	0.611	100,13	
Sasaran 2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			
Indikator Kinerja Strategis	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Keterangan
Indeks Kesehatan	0,710	0,711	100,14	

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023

Tabel 2.19
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 2

Misi 2	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan			
Tujuan 1	Meningkatkan Kualitas Perekonomian Yang Maju Dan Berkelanjutan			
Sasaran 1	Meningkatkan Kualitas Perekonomian Yang Maju Dan Berkelanjutan			
Indikator Kinerja Strategis	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Keterangan
Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,5	4,91	109,1	
LPE katagori Pertanian, Kehutanan dan perikanan	1	0,36	36	
LPE katagori perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,95	7,55	255,93	
LPE Katagori Industri Pengolahan	3,35	2,89	86,26	

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023

Tabel 2.20
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 3

Misi 3	Memujudkan Perekonomian Daerah Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berkelanjutan			
Tujuan 1	Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat			
Sasaran 1	Meningkatnya Taraf Hidup Keluarga			
Indikator Kinerja Strategis	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan



	2023	2023	%	
Tingkat Kemiskinan	3,59	3,19	88,85	
PDRB perkapita	50,55	12,24	24,21	
Sasaran 2	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat			
Indikator Kinerja Strategis	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Keterangan
Indeks Gini	0,346	0,29	83,81	
Sasaran 3	Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan Daerah			
Indikator Kinerja Strategis	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Keterangan
Tingkat Pengangguran terbuka	4,13	3,93	95,15	

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023

Tabel 2.21
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 4

Misi 4	Memujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Berbiwibawa.			
Tujuan 1	Memujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
Sasaran 1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			
Indikator Kinerja Strategis	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Keterangan
Indeks Reformasi Birokrasi	55	73,89	100,34	
Nilai Sakip (Poin)	70,72	69,02	97,59	
Nilai LPPD (Poin)	3,55	2,78	78,3	
Sasaran 2	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah			
Indikator Kinerja Strategis	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Keterangan
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80	64,96	81,2	
Sasaran 3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran, Efektifitas Pencegahan Korupsi Dan Pemetaan Resiko Korupsi			
Indikator Kinerja Strategis	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Keterangan
Survey Penilaian Integritas	78	73,92	94,76	
Sasaran 4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Pemerintahan Berbasis Eletronik			
Indikator Kinerja Strategis	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Keterangan
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin)	75,5	86,9	115,09	
Indeks SPBE (Poin)	3	3,09	103	

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023

Tabel 2.22
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi 5

Misi 5	Memantapkan Pengelolaan Infrastruktur Dan Lingkungan Secara Berkelanjutan			
Tujuan 1	Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Dan			



Pengembangan Wilayah				
Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kewilayahan Yang Berwawasan Lingkungan			
Indikator Kinerja Strategis	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian %	Keterangan
Indeks Infrastruktur	0	0	0	
Tingkat Penurunan Emisi GRK	9	23,1	256,66	
Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	0,18	1,09	605,55	

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023

F. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja

Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja dapat dari realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Tapin yang dalam pelaksanaannya digunakan untuk memenuhi kinerja organisasi perangkat daerah dalam hal pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2023. Secara rinci akan dijabarkan sebagai berikut:



Tabel 2.23
Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2023	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN (%)
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1	Indeks Pembangunan Manusia	72,00	Program Pengelolaan Pendidikan	70.541.679.530,00	43.412.963.352,00	61,54
		2	Indeks Pendidikan	0,611	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	113.405.926,00	98.342.800,00	86,72
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3	Indeks Kesehatan	0,711	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	137.973.067.426,00	132.205.174.974,00	95,82
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.113.460.840,00	6.605.052.600,00	92,85
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	756.139.798,00	633.386.700,00	83,77
3	Meningkatnya Pembangunan Sektor Unggulan Daerah	4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,91	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	38.243.988.726,00	14.982.643.831,00	39,18
		5	LPE Katagori Pertanian, Kehutanan dan	0,36	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	30.030.077.804,00	17.408.722.345,00	57,97



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2023	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN
	Perikanan		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.434.734.717,00	1.061.213.035,00	73,97
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	827.501.251,00	576.230.511,00	69,64
			Program Perizinan Usaha Pertanian	118.085.084,00	48.415.000,00	41,00
			Program Penyuluhan Pertanian	1.721.932.104,00	1.627.307.762,00	94,50
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	208.094.402,00	191.771.925,00	92,16
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.962.003.287,00	2.382.325.833,00	80,43
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	402.947.318,00	388.892.367,00	96,51
	6 LPE Katagori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,55	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	48.892.072,00	47.485.750,00	97,12
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.379.709.938,00	3.299.182.772,90	75,33



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2023	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	69.356.882,00	60.935.500,00	87,86
					Program Pengembangan Ekspor	102.706.431,00	102.478.000,00	99,78
					Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	173.179.700,00	168.981.879,00	97,58
					Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	444.259.665,00	240.840.550,00	54,21
		7	LPE Katagori Industri Pengolahan	2,69	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.158.904.215,00	605.055.651,00	52,21
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	134.975.646,00	130.300.350,00	96,54
					Program Pengembangan Umkm	67.831.725,00	10.106.000,00	14,90
		8	Kontibusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	1,90	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.517.151.643,00	1.084.244.100,00	71,47
					Program Pemasaran Pariwisata	1.044.888.274,00	902.883.500,00	86,41



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI SASI 2023	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	483.552.809,00	291.325.664,00	60,25
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	76.572.549,00	75.764.452,00	98,94
4	Meningkatnya Taraf Hidup Keluarga	9	Tingkat Kemiskinan	3,19	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.778.018.609,00	1.254.162.030,00	70,54
		10	PDRB per Kapita	12,24				
5	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	11	Indeks Gini	0,29	Program Penataan Desa	454.272.853,00	431.816.000,00	95,06
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.082.040.405,00	1.910.333.343,00	91,75
					Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.778.018.609,00	1.254.162.030,00	70,54
					Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.470.248.054,00	2.304.451.800,00	93,29



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2023	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN			
6	Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan Daerah	12	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,93	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	914.466.926,00	758.774.600,00	82,97			
					Program Penempatan Tenaga Kerja	6.668.701.073,00	5.407.204.617,00	81,08			
					Program Hubungan Industrial	777.026.096,00	748.869.970,00	96,38			
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	13	Indeks Reformasi Birokrasi	73,89	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.671.756.225,00	2.192.031.100,00	82,04			
					14	Nilai Sakip (Poin)	69,02	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	916.828.958,00	748.064.000,00	81,59
					15	Nilai LPPD (Poin)	3,46	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.976.959.080,00	9.313.779.859,00	84,85
8	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	16	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	64,96	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	299.646.462.155,00	121.659.912.878,00	40,60			
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.773.323.300,00	1.296.877.907,00	73,13			
9	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah	17	Survey Penilaian Integritas	73,92	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.129.903.060,00	2.904.171.406,00	70,32			



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2023	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN
	Berkualitas				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.101.364.203,00	424.270.625,00	38,52
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Pemerintahan Berbasis Eletronik	18	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin)	86,90	Program Pencatatan Sipil	390.819.781,00	386.897.671,00	99,00
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	349.066.593,00	343.407.400,00	98,38
					Program Pendaftaran Penduduk	341.725.312,00	331.001.306,00	96,86
		19	Indeks SPBE (Poin)	3,09	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1.604.792.274,00	1.597.967.574,00	99,57
					Program Aplikasi Informatika	4.680.496.153,00	3.313.037.392,00	70,78
11	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kewilayahan Yang Berwawasan Lingkungan	20	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	0				
		21	Indeks Infrastruktur	0	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	12.561.370.904,00	3.420.566.377,00	27,23
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	5.588.389.790,00	2.729.785.901,00	48,85
		22	Tingkat Penurunan Emisi GRK	23,10	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.226.394.129,00	748.792.600,00	61,06



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI SASI 2023	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN
					Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.203.989.275,00	1.698.903.259,00	77,08
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	48.788.462,00	37.525.000,00	76,91
		23	Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1,09	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	9.796.121,00	2.899.500,00	29,60

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023



- Misi 1 : Mewujudkan Masyarakat Tapin Yang Religius, Berakhlak Dan Berbudaya**
- Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Dan Daya Saing Masyarakat**
- Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat**

Dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat didukung oleh program sebagai berikut:

Tabel 2.24
Anggaran dan Realisasi Keuangan

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	70.541.679.530	43.412.963.352	61,54
2	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	113.405.926	98.342.800	86,72

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pendidikan masyarakat tersebut diatas sebagaimana terinci sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Realisasi kinerja keuangan program Pengelolaan Pendidikan Tahun 2023 adalah sebesar Rp.43.412.963.352,00 atau 62,54% dari anggaran sebesar Rp.70.541.679.530,00. Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.25
Realisasi Anggaran

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Rp	10.092.854.868
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp	22.470.616.195
3	Pengelolaan Pendidikan sekolah Menengah Pertama	Rp	7.081.747.989

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi



2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Realisasi kinerja keuangan program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 98.342.800,00 atau 86,72% dari anggaran sebesar Rp. 113.405.926,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.26
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Rp.	98.342.800,00

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat didukung oleh program sebagai berikut:

Tabel 2.27
Realisasi Program Anggaran

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	137.973.067.426	132.205.174.974	95,82
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.113.460.840	6.605.052.600	92,85

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Realisasi kinerja program ini pada tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 132.205.174.974,00 atau 95,82% dari anggaran sebesar Rp. 137.973.067.426,00 Realisasi tersebut merupakan



realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.28
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota	Rp	15.942.153.180
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	115.877.797.917

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Realisasi kinerja keuangan program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp 6.605.052.600,00 atau 92,85% dari anggaran sebesar Rp 7.113.460.840,00 . Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.29
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp	5.885.945.900

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

3. Program pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan

Realisasi kinerja keuangan program pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan Tahun 2023 adalah sebesar Rp 633.386.700,00 atau 83,77% dari anggaran sebesar Rp. 756.139.798,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:



Tabel 2.30
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Advokasi, pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	239.694.700
2	Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	139.294.500

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

- Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berkelanjutan**
- Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Perekonomian Yang Maju Dan Berkelanjutan**
- Sasaran 1 : Meningkatnya Pembangunan Sektor Unggulan Daerah**

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Pembangunan sektor unggulan daerah didukung oleh program sebagai berikut:

Tabel 2.31
Realisasi Program Anggaran

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	38.243.988.726	14.982.643.831	39,18
2	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	30.030.077.804	17.408.722.345	57,97
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.434.734.717	1.061.213.035	73,97
4	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana	827.501.251	576.230.511	69,64



No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	Pertanian			
5	Program Perizinan Usaha Pertanian	118.085.084	48.415.000	41,00
6	Program Penyuluhan Pertanian	1.721.932.104	1.627.307.762	94,50
7	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	208.094.402	191.771.925	92,16
8	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.962.003.287	2.382.325.833	80,43
9	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	402.947.318	388.892.367	96,51
10	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	48.892.072	47.485.750	97,12
11	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.379.709.938	3.299.182.772	75,33
12	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	69.356.882	60.935.500	87,86
13	Program Pengembangan Ekspor	102.706.431	102.478.000	99,78
14	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	173.179.700	168.981.879	97,58
15	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	444.259.665	240.840.550	54,21
16	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.158.904.215	605.055.651	52,21
17	Program	134.975.646	130.300.350	96,54



No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional			
18	Program Pengembangan Umkm	67.831.725	10.106.000	14,90
19	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.517.151.643	1.084.244.100	71,47
20	Program Pemasaran Pariwisata	1.044.888.274	902.883.500	86,41
21	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	483.552.809	291.325.664	60,25

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

Realisasi kinerja keuangan Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Tahun 2023 adalah sebesar Rp14.982.643.831,00 atau 39,18% dari anggaran sebesar Rp38.243.988.726,00. Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.32
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp	11.993.302.752
2	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	302.677.889
3	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.686.663.190

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi



2. Program penyediaan dan pengembangan Prasarana pertanian
- Realisasi kinerja keuangan Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian Tahun 2023 adalah sebesar Rp17.408.722.345,00 atau 57,97% dari anggaran sebesar Rp 30.030.077.804,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.33
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	94.215.000
2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp	17.314.507.345

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

3. Program pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner

Realisasi kinerja keuangan Program pengendalian hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner Tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.061.213.035,00 atau 73,97% dari anggaran sebesar Rp 1.434.734.717,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.34
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Rp	228.747.000
2	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	9.239.800
3	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah	Rp	175.685.800
4	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	647.540.435

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

4. Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
- Realisasi kinerja keuangan Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Tahun 2023 adalah sebesar Rp 576.230.511,00 atau 69,64% dari anggaran sebesar Rp 827.501.251,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.35
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp	576.230.511

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

5. Program perizinan usaha pertanian
- Realisasi kinerja keuangan Program perizinan usaha pertanian Tahun 2023 adalah sebesar Rp 48.415.000,00 atau 41,00% dari anggaran sebesar Rp 118.085.084,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.36
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	48.415.000

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

6. Program penyuluhan pertanian
- Realisasi kinerja keuangan Program penyuluh pertanian Tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.627.307.762,00 atau 94,50% dari anggaran sebesar Rp 1.721.932.104,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:



Tabel 2.37
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp	1.627.307.762

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

7. Program pengelolaan perikanan tangkap

Realisasi kinerja keuangan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 191.771.925,00 atau 92,16% dari anggaran sebesar Rp. 208.094.402,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.38
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	151.824.375
2.	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	39.947.550

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Realisasi kinerja keuangan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.382.325.833,00 atau 80,43 % dari anggaran sebesar Rp 2.962.003.287,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.39
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Rp	22.676.000
2	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Rp	2.359.649.833

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

**9. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

Realisasi kinerja keuangan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2023 adalah sebesar Rp 388.892.367,00 atau 96,51% dari anggaran sebesar Rp 402.947.318,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.40
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Rp	36.000.000
2	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Rp	349.442.367
3	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Rp	3.450.000

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

10. Program perizinan dan pendaftaran perusahaan

Realisasi kinerja keuangan Program perizinan dan pendaftaran Tahun 2023 adalah sebesar Rp 47.483.750,00 atau 97,12% dari anggaran sebesar Rp 48.892.072,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.41
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Rp	47.485.750

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

11. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan

Realisasi kinerja keuangan Program peningkatan sarana distribusi perdagangan Tahun 2023 adalah sebesar Rp 3.299.182.772,90 atau 75,33% dari anggaran sebesar Rp 4.379.709.938,00



Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.42
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	1.114.583.153
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp	2.077.615.919

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

12. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Realisasi kinerja keuangan Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting Tahun 2023 adalah sebesar Rp 60.935.500,00 atau 87,86% dari anggaran sebesar Rp 69.356.882,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.43
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rp	46.025.500
2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Rp	11.750.000

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

13. Program pengembangan ekspor

Realisasi kinerja keuangan Program pengembangan ekspor Tahun 2023 adalah sebesar Rp 102.478.000,00 atau 99,78% dari anggaran sebesar Rp 102.706.431,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :



Tabel 2.44
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp	102.478.000
2	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Rp	8.425.000

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

14. Program standarisasi dan perlindungan konsumen

Realisasi kinerja keuangan Program standarisasi dan perlindungan konsumen Tahun 2023 adalah sebesar Rp 168.981.879,00 atau 97,58% dari anggaran sebesar Rp 173.179.700,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.45
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Rp	144.640.829

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

15. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri

Realisasi kinerja keuangan Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri Tahun 2023 adalah sebesar Rp 240.840.550,00 atau 54,21% dari anggaran sebesar Rp 444.259.665,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.46
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Rp	240.840.550

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi



16. Program perencanaan dan pembangunan industri

Realisasi kinerja keuangan Program perencanaan dan Pembangunan industry Tahun 2023 adalah sebesar Rp 605.055.651,00 atau 52,21% dari anggaran sebesar Rp 1.158.904.215,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.47
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp	605.055.651

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

17. Program pengelolaan sistem informasi industry nasional

Realisasi kinerja keuangan Program pengelolaan sistem informasi industry nasional Tahun 2023 adalah sebesar Rp 130.300.350,00 atau 96,54% dari anggaran sebesar Rp 134.975.646,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.48
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	130.300.350

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

18. Program pengembangan UMKM

Realisasi kinerja keuangan Program pengembangan UMKM Tahun 2023 adalah sebesar Rp 10.106.000,00 atau 14,90% dari anggaran sebesar Rp 67.831.725,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :



Tabel 2.49
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Rp	10.106.000

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

19. Program peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata

Realisasi kinerja keuangan Program peningkatan daya Tarik pariwisata Tahun 2023 adalah sebesar Rp 1.084.244.100,00 atau 71,47% dari anggaran sebesar Rp 1.517.151.643,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.50
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Rp	5.860.000
2	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp	661.384.100

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

20. Program pemasaran pariwisata

Realisasi kinerja keuangan Program pemasaran pariwisata Tahun 2023 adalah sebesar Rp 902.883.500,00 atau 86,41% dari anggaran sebesar Rp 1.044.888.274,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.51
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp	902.883.500
2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Rp	544.740.000

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi



21. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif

Realisasi kinerja keuangan Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif Tahun 2023 adalah sebesar Rp 291.325.664,00 atau 60,25% dari anggaran sebesar Rp 483.552.809,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.52
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Rp	270.324.870

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

Misi 3 : **Memujudkan Perekonomian Daerah Yang Sejahtera, Mandiri Dan Berkelanjutan**

Tujuan 1 : **Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat**

Sasaran 1 : **Meningkatnya Taraf Hidup Keluarga**

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Daya Beli Masyarakat didukung oleh program sebagai berikut:

Tabel 2.53
Program Anggaran dan Realisasi

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.778.018.609	1.254.162.030	70,54

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

1. Program perekonomian dan pembangunan

Realisasi kinerja keuangan Program perekonomian dan pembangunan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 254.162.030,00 atau 70,54% dari anggaran sebesar Rp 1.778.018.609,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :



Tabel 2.54
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp	356.125.000
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp	47.655.000
3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	823.632.030
4	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp	26.750.000

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

Sasaran 2 : Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat didukung oleh program sebagai berikut:

Tabel 2.55
Program dan Alokasi Anggaran

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Penataan Desa	454.272.853	431.816.000	95,06
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.082.040.405	1.910.333.343	91,75
3	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.778.018.609	1.254.162.030	70,54
4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.470.248.054	2.304.451.800	93,29

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

1. Program penataan desa

Realisasi kinerja keuangan Program penataan desa Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 431.816.000,00 atau 95,06% dari anggaran sebesar Rp 454.272.853,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :



Tabel 2.56
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Penataan Desa	Rp	431.816.000

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

2. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat

Realisasi kinerja keuangan Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.910.333.343,00 atau 91,75% dari anggaran sebesar Rp 2.082.040.405,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.57
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp	255.990.832

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

3. Program perekonomian dan pembangunan

Realisasi kinerja keuangan Program perekonomian dan pembangunan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.254.162.030,00 atau 70,54% dari anggaran sebesar Rp1.778.018.609,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.58
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp	25.400.000

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

4. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks). Realisasi kinerja keuangan Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks). Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.304.451.800,00,00 atau 93,29% dari anggaran sebesar Rp. 2.470.248.054,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.59
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rp	54.176.900

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan Daerah

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya kualitas ketenagakerjaan daerah didukung oleh program sebagai berikut:

Tabel 2.60
Program dan Alokasi Anggaran

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	914.466.926	758.774.600	82,97
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	6.668.701.073	5.407.204.617	81,08
3	Program Hubungan Industrial	777.026.096	748.869.970	96,38

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

1. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja. Realisasi kinerja keuangan Program pelatihan kerja dan produktivitas kerja Tahun 2023 adalah sebesar



Rp. 758.774.600,00 atau 82,97% dari anggaran sebesar Rp. 914.466.926,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.61
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Rp	745.078.600

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

2. Program penempatan tenaga kerja.

Realisasi kinerja keuangan Program penempatan tenaga kerja Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 5.407.204.617,00 atau 81,08% dari anggaran sebesar Rp. 6.668.701.073,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.62
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Perluasan Kesempatan Kerja	Rp	5.040.994.027,00

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

3. Program hubungan industrial.

Realisasi kinerja keuangan Program hubungan industrial Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 748.869.970,00 atau 96,38% dari anggaran sebesar Rp. 777.026.096,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.63
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	145.380.600,00

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi



- Misi 4 : Memujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Berbiwibawa.**
- Tujuan 1 : Memujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**
- Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah**

Dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah didukung oleh program sebagai berikut:

Tabel 2.64
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.671.756.225	2.192.031.100	82,04
2	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	916.828.958	748.064.000	81,59
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.976.959.080	9.313.779.859	84,85

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah.

Realisasi kinerja keuangan Program perencanaan, pengendalian dan Pembangunan daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.192.031.100,00 atau 82,04% dari anggaran sebesar Rp. 2.671.756.225,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :



Tabel 2.65
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Rp	1.519.617.100,00

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah.

Realisasi kinerja keuangan Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 748.064.000 ,00 atau 81,59 % dari anggaran sebesar Rp. 916.828.958 ,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.66
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp	77.162.000,00

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
Realisasi kinerja keuangan Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 9.313.779.859,00 atau 84,85% dari anggaran sebesar Rp. 10.976.959.080,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.67
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	39.349.800,00

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

Sasaran 2 : MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH

Dalam pencapaian sasaran strategis meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan daerah didukung oleh program sebagai berikut:

Tabel 2.68
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	299.646.462.155	121.659.912.878	40,60
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.773.323.300	1.296.877.907	73,13

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

1. Program pengelolaan keuangan daerah.

Realisasi kinerja keuangan Program pengelolaan keuangan daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 121.659.912.878,00 atau 40,60% dari anggaran sebesar Rp. 299.646.462.155,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.69
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp	994.090.500

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

2. Program pengelolaan barang milik daerah.

Realisasi kinerja keuangan Program pengelolaan barang milik daerah Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.296.877.907,00 atau 73,13% dari anggaran sebesar Rp. 1.773.323.300,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :



Tabel 2.70
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Rp	104.118.400

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran, Efektifitas Pencegahan Korupsi Dan Pemetaan Resiko Korupsi

Dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya pengelolaan keuangan daerah berkualitas didukung oleh program sebagai berikut:

Tabel 2.71
Program dan Alokasi Anggaran

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.129.903.060	2.904.171.406	70,32
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.101.364.203	424.270.625	38,52

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

1. Program penyelenggaraan pengawasan.

Realisasi kinerja keuangan Program penyelenggaraan pengawasan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.904.171.406,00 atau 70,32% dari anggaran sebesar Rp. 4.129.903.060,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.72
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Rp	2.017.648.105

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi



2. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi.

Realisasi kinerja keuangan Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 424.270.625,00 atau 38,52% dari anggaran sebesar Rp. 1.101.364.203,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.73
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Rp	8.005.750

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Pemerintahan Berbasis Eletronik

Dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik didukung oleh program sebagai berikut:

Tabel 2.74
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Pencatatan Sipil	390.819.781	386.897.671	99,00
2	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	349.066.593	343.407.400	98,38
3	Program Pendaftaran Penduduk	341.725.312	331.001.306	96,86

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

1. Program pencatatan sipil.

Realisasi kinerja keuangan Program pencatatan sipil Tahun 2023 adalah sebesar Rp.386.897.671,00 atau 99,00% dari anggaran sebesar Rp. 390.819.781,00 Realisasi tersebut merupakan

realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.75
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Rp	252.335.421

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

2. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Realisasi kinerja keuangan Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 343.407.400,00 atau 98,38% dari anggaran sebesar Rp. 349.066.593,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.76
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Rp	120.262.000

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

3. Program pendaftaran penduduk.

Realisasi kinerja keuangan Program pendaftaran penduduk Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 331.001.306,00 atau 96,86 % dari anggaran sebesar Rp. 341.725.312,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.77
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Rp	322.321.806

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi



4. Program informasi dan komunikasi publik.

Realisasi kinerja keuangan Program informasi dan komunikasi publik Tahun 2023 adalah sebesar Rp.1.597.967.574,00 atau 99,57% dari anggaran sebesar Rp. 1.604.792.274,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.78
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.597.967.574

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

5. Program aplikasi informatika.

Realisasi kinerja keuangan Program aplikasi informatika Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.313.037.392,00 atau 70,78% dari anggaran sebesar Rp. 4.680.496.153,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.79
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp	2.267.123.177

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

- Misi 5 : Memantapkan Pengelolaan Infrastruktur Dan Lingkungan Secara Berkelanjutan**
- Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah**
- Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Kewilayahan Yang Berwawasan Lingkungan**

Dalam pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur kewilayahan yang berwawasan lingkungan di dukung oleh program sebagai berikut :



Tabel 2.80
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)
1	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	12.561.370.904	3.420.566.377	27,23
2	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	5.588.389.790	2.729.785.901	48,85
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.226.394.129	748.792.600	61,06
4	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.203.989.275	1.698.903.259	77,08
5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	48.788.462	37.525.000	76,91
6	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	9.796.121	2.899.500	29,60

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

1. Program penataan bangunan dan lingkungan.

Realisasi kinerja keuangan Program penataan bangunan dan lingkungan Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 3.420.566.377,00 atau 27,23% dari anggaran sebesar Rp. 12.561.370.904,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :



Tabel 2.81
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Rp	3.420.566.377
2	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Rp	520.463.880

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

2. Program penyelenggaraan penataan ruang.

Realisasi kinerja keuangan Program penyelenggaraan penataan ruang Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.729.785.901,00 atau 48,85 % dari anggaran sebesar Rp.5.588.389.790,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.82
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Rp	1.441.965.239

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023

3. Program perencanaan lingkungan hidup.

Realisasi kinerja keuangan Program perencanaan lingkungan hidup Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 748.792.600,00 atau 61,06% dari anggaran sebesar Rp.1.226.394.129 ,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.83
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Rp	702.606.700
2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Rp	46.185.900

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi



4. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Realisasi kinerja keuangan Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 1.698.903.259 ,00 atau 77,08% dari anggaran sebesar Rp.2.203.989.275,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.84
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp	1.447.719.659
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp	113.752.084

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi

5. Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.

Realisasi kinerja keuangan Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 37.525.000,00 atau 76,91% dari anggaran sebesar Rp. 48.788.462,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.85
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp	321.781.200

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi



6. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup.

Realisasi kinerja keuangan Program penanganan pengaduan lingkungan hidup Tahun 2023 adalah sebesar Rp.2.899.500,00 atau 29,60% dari anggaran sebesar Rp. 9.796.121,00 Realisasi tersebut merupakan realisasi belanja modal dan belanja barang/jasa dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.86
Realisasi Belanja Modal Dan Belanja Barang/Jasa

NO	KEGIATAN	Rp	REALISASI ANGGARAN
1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Rp	2.899.500,00

Sumber : LKJIP Kabupaten Tapin Tahun 2023, Bagian Organisasi



BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dengan alokasi dana berasal dari pemberi tugas, yang dilaksanakan oleh daerah atau desa. Strategi pembangunan dalam kaitan Tugas Pembantuan adalah untuk mencapai keberhasilan pembangun sebagaimana yang diharapkan dalam visi dan misi kepala daerah.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan mempunyai tujuan dalam pencapaian efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan dan Pembangunan. Sesuai dengan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di Daerahnya.

1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

- a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang -undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan;
- f. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan



Undang - undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- g. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Alokasi dana tugas pembantuan kepada Kabupaten merupakan bagian anggaran Kementerian/Lembaga yang diberikan sesuai dengan beban dan jenis penugasan, dengan kewajiban Kabupaten melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Kementerian / lembaga yang memberikan penugasan. Kementerian / Lembaga yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin pada tahun 2023 adalah :

1) Dinas Pertanian Kabupaten Tapin,

- Tugas Pembantuan pusat yang dilaksanakan (Tugas Pembantuan Provinsi) dari Kementerian Pertanian RI dan melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi (TP-Provinsi) (melalui Provinsi Kalimantan Selatan);
- Bantuan Langsung Pusat;
- Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten (Bantuan APBD Provinsi)
- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA. 2023



- 2) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin melaksanakan tugas Pembantuan dengan Instansi pemberi tugas pembantuan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

a) Dinas Pertanian

Besarnya dana Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Pertanian pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4,961,650,000.00 dengan realisasi Rp. 4,864,550,000.00 dengan persentase capaian kegiatan adalah 100 persen.

Adapun capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pemerintah Kabupaten Tapin yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel Realisasi Bantuan APBN dan APBD Provinsi Tahun 2023 sebagaimana berikut:

Tabel 3.1.
Realisasi Bantuan APBN dan APBD Provinsi Tahun 2023 (Dinas Pertanian)

No	Nama Pagu Anggaran	Bantuan				Realisasi				Realisasi Fisik	Sumber
		Jenis Bantuan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Barang (volume)	Satuan	Realisasi Anggaran (Rp)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DEKOSENTRASI (TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN)											
1	Direktorat Jendral Tanaman Pangan										
1	Budidaya Padi Rawa	Barang	500	ha	860.000.000	500	ha	860.000.000	0	100,00	APBN
2	Bantuan Benih Padi Inbrida	Barang	2750	ha	708.124.000	2750	ha	708.124.000	0	100,00	APBN
3	Pengembangan Padi Rawa	Barang	500	ha	860.000.000	500	ha	860.000.000	0	100,00	APBN
4	Bantuan Benih Jagung Hibrida	Barang	300	Kg	198.000.000	300	Kg	198.000.000	0	100,00	APBN
5	Fasilitasi Sarana Produksi Budidaya Kedelai Monokultur	Barang	154	Ltr	221.991.000	154	Ltr	221.991.000	0	100,00	APBN
6	Fasilitasi Bantuan Penanggulangan Dampak El Nino	Barang	222	Ha	0	222	Kg	0	0	100	APBN
7	Mandiri Benih Tanaman Pangan (Mantap)	Uang	20	Ha	33.500.000				0	100	APBN
8	Display Varietas	Benih Padi	1	Unit	0	1			0	100	APBN
2	Direktorat Jenderal Hortikultura										
1	Bantuan Bangunan Bangsal Pascapanen Hortikultura	Barang	1	Paket	215.000.000	1	Paket	215.000.000	0	100	APBN
2	Pengembangan bawang merah	Barang	3	Ha	24.000.000	3	Ha	24.000.000	0	100	APBN
3	Pengembangan jeruk	Barang	20	Ha	218.000.000	20	Ha	218.000.000	0	100	APBN
4	Bantuan cabai rawit	Barang	10	Ha	120.000.000	10	Ha	120.000.000			
5	Bantuan Jahe	Barang	10	Ha	0	10	Ha	0			
4	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan										
	Fasilitas Inseminasi Buatan (IB)	Barang	7400	dosis	0	7400	dosis	0		100	APBN



No	Nama Pagu Anggaran	Bantuan				Realisasi				Realisasi Fisik	Sumber
		Jenis Bantuan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Barang (volume)	Satuan	Realisasi Anggaran (Rp)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Direktorat Jendral Perkebunan										
1	Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet	Barang	100	Paket	1.113.435.000		Paket	0	0		APBN
2	Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	Dokumen	430	Persil	0	0	Persil	0	0		APBN
6	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP)										
1	Fasilitasi Honor dan biaya operasional penyuluh (BOP) P3K dan THL-TB PP	Dana	12	Bln	380.000.000	12	Bln	241.600.000	100,00	100,00	APBN
2	Honorarium petugas Verifikasi dan Validasi Data SIMLUHTAN	Dana	12	Bln	9.600.000	12	Bln	84.400.000	100,00	100,00	APBN
II	BANTUAN LANGSUNG KEMENTERIAN										
1	Bantuan Langsung Kementerian										
1	Direktorat Jendral Sarana dan Prasarana										
2	Pupuk Havati Cair	Barang	83	Poktan	0	83	Poktan	0	0,00	100,00	APBN
III	DANA APBD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN										
1	Bidang Tanaman Pangan										
1	Bantuan Padi Inbrida	Barang	100	Ha	0	100	Ha	0	0	100	APB PROV
2	Padi Apung	Barang	500	styrofoam	0	500	styrofoam	0	0	100	APB PROV
3	Pengembangan Porang	Barang	8	Ha	0	8	Ha	0	0	100	APB PROV
4	Pengembangan Jagung Hibrida	Barang	100	Ha	0	100	Ha	0	0	100	APB PROV
5	Pengembangan Penangkaran Benih Padi	Barang	125	Ha	0	125	Ha	0	0	100,00	APB PROV





No	Nama Pagu Anggaran	Bantuan				Realisasi				Realisasi Fisik	Sumber
		Jenis Bantuan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Barang (volume)	Satuan	Realisasi Anggaran (Rp)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bantuan Bahan Pengendali Organisme Pengganggu	Barang	5	Paket	0	5	Paket	0	0	100,00	APB PROV
7	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (Pompa)	Barang	2	Unit	0	2	Unit	0	0	100	APB PROV
8	Fasilitasi Budidaya Kacang Tanah	Barang	1	Klp	0	1	Klp	0	0	100,00	APB PROV
9	Bantuan Alat Mesin Pasca Panen	Barang	3	Unit	0	3	Unit	0	0	100,00	APB PROV
2	Hortikultura										
1	Pengembangan Durian	Barang	10	Ha	0	10	Ha	0	0	100,00	APB PROV
2	Pengembangan tanaman Jeruk siam	Barang	10	Ha	0	15	Ha	0	0	100,00	APB PROV
3	Pengembangan tanaman jahe	Barang	5	Ha	0	5	Ha	0	0	100,00	APB PROV
4	Pompa air	Barang	1	Unit	0	1	Unit	0	0	100,00	APB PROV
5	Pengendalian OPT Cabe	Barang	1	Paket	0	1	Unit	0	0	100,00	APB PROV
3	Perkebunan										
1	Pengembangan Tanaman Kopi Robusta	Barang	10	Ha	0	10	Sertifikat	0	0	100,00	APBD PROV
	JUMLAH TOTAL				4,961,650,000.00			4,864,550,000.00	100,00	100,00	

**b) Dinas Ketahanan Pangan**

Realisasi Anggaran untuk Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 28.290.000,- untuk sisa pagu sebesar Rp. 15.430.000,- atau 35,29% realisasi.

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2023

No.	Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kab/Kota		Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Bahan	Rapat/Pertemuan Koordinasi	Rp. 7.500.000	Rp. 0
2.	Belanja Honor Output Kegiatan	Honor Tim FSVA	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
3.	Belanja Persediaan Barang Konsumsi	- ATK dan Komputer	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
		- Supplies Pencetakan	Rp. 1.000.000	Rp. 0
4.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan	Rp. 8.000.000	Rp. 1.140.000
JUMLAH			Rp. 23.500.000	Rp. 8.140.000
No.	Kegiatan data dan informasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota.		Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Bahan	Rapat/Pertemuan Koordinasi	Rp. 900.000	Rp. 900.000
2.	Belanja Honor Output Kegiatan	Honor Tim SKPG	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
3.	Belanja Persediaan Barang Konsumsi	- Penjilidan Laporan dan Percetakan	Rp. 1.180.000	Rp. 0
4.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Transpot Lokal	Rp. 3.000.000	Rp. 0
JUMLAH			Rp. 9.500.000	Rp. 5.400.000
No.	Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Nasional		Anggaran	Realisasi
1.	Belanja	Rapat/Pertemuan	Rp. 1.500.000	Rp. 750.000



	Bahan	Koordinasi		
2.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi dan dan Sinkronisasi ke Provinsi	Rp. 1.640.000	Rp. 1.140.000
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Transpot Lokal	Rp. 7.500.000	
JUMLAH			Rp. 10.640.000	Rp. 1.890.000

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapin

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

3.1.1 Target Kinerja

a) Dinas Pertanian

Pada Tahun 2023 Dinas Pertanian melaksanakan kegiatan dari Tugas Pembantuan pusat yang dilaksanakan (Tugas Pembantuan Provinsi) dari Kementerian Pertanian RI dan melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi (TP-Provinsi) (melalui Provinsi Kalimantan Selatan) dan APBD Provinsi. Adapun Program dan Kegiatan yang diterima adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Melalui Provinsi Kalimantan Selatan)

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.343.709.000,00. Alokasi Bantuan Sarana Produksi Kegiatan Lahan Pertanian berupa Herbisida, Dolomit Pembenah Tanah, Pupuk Organik Cair, NPK dialokasikan di daerah melalui dana Tugas Pembantuan.

1. PENGEMBANGAN PADI RAWA

Kegiatan Budidaya Padi Rawa dana APBN Satker Kementerian Pertanian di Kabupaten Tapin mendapat alokasi seluas 500 Ha yang berlokasi di 2 Desa Kecamatan Candi Laras Utara



- a. Bantuan Padi Sawah Inbrida
Kegiatan bantuan pengembangan Padi Sawah Inbrida dari dana APBN Satker Provinsi alokasi di Kabupaten Tapin adalah seluas 2.750 Ha berlokasi di 7 kecamatan.
- b. Kegiatan Budidaya Padi Rawa
Kegiatan Budidaya Padi Rawa dana APBN Satker TP Provinsi di Kabupaten Tapin mendapat alokasi seluas 500 Ha yang berlokasi di 4 Desa Kecamatan Candi Laras Utara.
- c. Kegiatan Fasiltasi Sarana Produksi Budidaya Kedelai Monokultur
Kegiatan Fasilitasi Produksi Budidaya Kedelai di Kabupaten Tapin seluas 245 Ha.
- d. Bantuan Benih Jagung Hibrida
Kegiatan bantuan benih jagung hibrida (jagung pakan) dari dana APBN Satker Provinsi seluas 250 ha.
- e. Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan (Mantap) Tahun Anggaran 2023
Untuk memperbesar kapasitas penyediaan benih melalui sistem formal, produksi benih melalui pengembangan penangkaran benih insitu merupakan salah satu strategi yang ditempuh Kementerian Pertanian. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui kegiatan di Direktorat Perbenihan telah menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti Pemberdayaan Penangkar Benih, Desa Mandiri Benih (DMB), Korporasi Perbenihan, Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan (P3BTP) dan Kerja sama produksi benih sumber. Komoditas yang diproduksi benihnya juga bermacam-macam seperti padi inbrida, padi hibrida, jagung hibrida, jagung



komposit, kedelai, kacang hijau, kacang tanah dan sorgum. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat direplikasikan oleh provinsi masing-masing untuk pengembangan di waktu yang akan datang.

Pada tahun 2023, diselenggarakan kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan (MANTAP). Kegiatan ini merupakan kegiatan padat karya dengan memberdayakan kelompok tani sebagai penangkar benih. Kelompok tani pelaksana bermitra dengan produsen benih (offtaker) yang akan mengokup calon benih yang dihasilkan oleh kelompok tani.

f. Fasilitasi Bantuan Penanggungan Dampak El Nino

Kegiatan ini merupakan program yang diluncurkan Kementerian Pertanian melalui Program Gerakan Nasional Penanggulangan Dampak El Nino untukantisipasi gagal panen di beberapa daerah dan terjadinya lonjakan harga gabah padi dan beras. Kabupaten Tapin mendapat alokasi seluas 222 Ha di 4 kecamatan.

g. Display Varietas

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan varietas unggul baru padi. Harapannya melalui kegiatan display varietas akan memberikan gambaran kepada petani pengguna benih tentang keunggulan dari varietas padi tersebut, sehingga petani dapat melihat langsung keragaan pertumbuhan tanaman padi sebelum memutuskan untuk memilih varietas yang paling diminati dan sesuai dengan lingkungan setempat untuk diadopsi.

2. Direktorat Jenderal Hortikultura (Melalui Provinsi Kalimantan Selatan)

a. Bantuan Bangunan Bangsal Pascapanen Hortikultura



b. Pengembangan bawang merah

3. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian

a. Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet

Pada Tahun 2023 Kabupaten Tapin dapat Alokasi bantuan 100 Ha Peremajaan Tanaman Karet.

b. Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) Dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kegiatan untuk Honor Mantri Statistik Perkebunan

c. Kegiatan Rintisan Penerbitan STDB Kelapa Sawit Rakyat

4. Bantuan Langsung Pusat

Bantuan Langsung dari Pemerintah Pusat dari Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana berupa Penyerahan hibah bantuan Pupuk Hayati Cair sebanyak 7.735 liter yang merupakan hibah dari APBN Kementerian Pertanian. Jumlah volume sebanyak 83 Poktan.

5. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA. 2023

1) Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) / Hortikultura

Merupakan program pengembangan model rumah pangan yang dibangun dalam suatu kawasan (desa atau kecamatan) dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga melalui penyediaan aneka sayur dan buah serta sumber protein.

Kegiatan P2L ini adalah merupakan kegiatan dari DAK NON FISIK pemerintah yang dilimpahkan ke dinas terkait untuk melaksanakannya. Untuk tahun 2023 kegiatan P2L dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tapin yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan. P2L di Kabupaten Tapin berjumlah 5 P2L yang berlokasi di 5 Desa / kecamatan.



Dana yang digulirkan langsung ke rekening masing-masing P2L dan bersifat swakelola.

- Pagu anggaran untuk 5 P2L sebesar Rp. 375.000.000,-
- Pagu anggaran untuk satu P2L adalah Rp. 75.000.000,-

2) DAK Non Fisik Pendataan Pertanian (Bidang Penyuluhan).

Total pagu kegiatan DAK Non Fisik 12 BPP sebesar Rp 138.000.000,-

3.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan:

a) Dinas Pertanian

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

1.1 Bantuan Padi Sawah Inbrida

Kegiatan bantuan pengembangan Padi Sawah Inbrida dari dana APBN Satker Provinsi alokasi di Kabupaten Tapin adalah seluas 2.750 Ha berlokasi di 7 kecamatan, yaitu :

- | | | |
|---------------------------|---|----------|
| - Kecamatan Bungur | : | 326 ha |
| - Kecamatan Bakarangan | : | 110 ha |
| - Kecamatan Tapin Selatan | : | 1.091 ha |
| - Kecamatan Binuang | : | 96 ha |
| - Kecamatan Lokpaikat | : | 55 ha |
| - Kecamatan Tapin Tengah | : | 842 ha |
| - Kecamatan Hatungun | : | 230 ha. |

Paket bantuan berupa benih padi varietas unggul mekongga sebanyak 25 kg/ha dan sharing dana APBD Provinsi dengan bantuan Pupuk Hayati Cair 4 ltr/ha.

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya target tanam di Kecamatan 7 Kecamatan dengan capaian Tanam masing-masing 100% dari sasaran. Kegiatan ini baru mulai tanam bulan November – Desember 2023 dan diperkirakan



akan mulai panen pada bulan Februari – Maret 2024 (over carry).



1.2 Kegiatan Budidaya Padi Rawa

Kegiatan Budidaya Padi Rawa dana APBN Satker TP Provinsi di Kabupaten Tapin mendapat alokasi seluas 500 Ha yang berlokasi di 4 Desa Kecamatan Candi Laras Utara, yaitu :

- Desa Rawana Hulu 220 ha,
- Desa Rawana Hilir 80 ha,
- Desa Pariok 40 ha, dan
- Desa Batalas 60 ha.

Paket bantuan per hektar berupa benih unggul varietas mekongga 50 kg/ha, pupuk NPK 100 kg/ha, pupuk hayati 6 sacheet/ha dan fungisida 1 bungkus.

Realisasi tanam (fisik) seluas 500 Ha atau 100%.



1.3 Kegiatan Fasilitasi Sarana Produksi Budidaya Kedelai Monokultur

Kegiatan Fasilitasi Produksi Budidaya Kedelai di Kabupaten Tapin seluas 154 Ha yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Tapin Selatan 55 ha, Bungur 5 ha dan Hatungun 94 ha, terealisasi tanam 154 Ha atau 100% dengan bantuan paket benih kedelai varietas anjasmoro 50 kg/ha, NPK 50 Kg, insektisida 1 ltr/ha dan pupuk hayati 2 ltr/ha.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini ada kendala di lapangan yang menyebabkan hasil output tidak maksimal dikarenakan musim tanam bertepatan dengan Iklim El Nino panjang sehingga hampir semua lahan kekeringan dan pertumbuhan kurang maksimal. Produktivitas yang dihasilkan juga relatif rendah yaitu rata-rata 1,1 ton/ha.

Hasil fisik yang dicapai dari kegiatan peningkatan produksi kedelai adalah terlaksananya kegiatan peningkatan produksi kedelai dengan capaian luas tanam 154 ha, dan untuk menunjang kegiatan ini telah dilaksanakan 2 kali pertemuan antara perwakilan kelompok tani pelaksana dan pengusaha tahu-tempe yang bersedia membeli hasil panen kedelai, namun karena hasil produksi yang masih sangat rendah, kerjasama ini belum terealisasi dan diharapkan tahun-tahun berikutnya kerjasama dapat terealisasi.



1.4 Bantuan Benih Jagung Hibrida

Kegiatan bantuan benih jagung hibrida (jagung pakan) dari dana APBN Satker Provinsi mendapat alokasi seluas 300 ha di 3 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Hatungun 50 ha, Tapin Selatan 230 ha dan Bungur 20 ha dengan bantuan benih jagung hibrida varietas NK 22 sebanyak 15 kg/ha. Dari kegiatan seluas 300 capaian tanam 100% dengan luas panen 300 ha, produktivitas rata-rata 51,96 dan produksi 1.559 ton.

Kendala kegiatan ini adanya iklim El Nino menyebabkan banyak pertanaman yang mengalami kekeringan sehingga hasil panen kurang maksimal. Namun walau hasil panen kurang maksimal harga jual di tingkat petani cukup tinggi berkisar Rp. 5.500/kg basah dan Rp. 7.000/kg pipilan kering. Salah satu rangkaian mendukung kegiatan ini telah dilaksanakan panen jagung bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten di Desa Tandui sebagai bentuk apresiasi dan dorongan kepada kelompok tani untuk tetap semangat dan terus menanam jagung pakan.





1.5 Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan (Mantap) Tahun Anggaran 2023

Untuk memperbesar kapasitas penyediaan benih melalui sistem formal, produksi benih melalui pengembangan penangkaran benih insitu merupakan salah satu strategi yang ditempuh Kementerian Pertanian. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui kegiatan di Direktorat Perbenihan telah menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti Pemberdayaan Penangkar Benih, Desa Mandiri Benih (DMB), Korporasi Perbenihan, Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan (P3BTP) dan Kerja sama produksi benih sumber. Komoditas yang diproduksi benihnya juga bermacam-macam seperti padi inbrida, padi hibrida, jagung hibrida, jagung komposit, kedelai, kacang hijau, kacang tanah dan sorgum. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat direplikasikan oleh provinsi masing-masing untuk pengembangan di waktu yang akan datang.

Pada tahun 2023, diselenggarakan kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan (MANTAP). Kegiatan ini merupakan kegiatan padat karya dengan memberdayakan kelompok tani sebagai penangkar benih. Kelompok tani pelaksana bermitra dengan produsen benih (offtaker) yang akan meng-opkup calon benih yang dihasilkan oleh kelompok tani.

Di Kabupaten Tapin, kegiatan MANTAP dilaksanakan di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, kelompok tani Sumber Mulya.



Bantuan diberikan berupa uang tunai ke rekening petani sejumlah Rp.33.500.000,- untuk luasan 20 ha. Yang dimanfaatkan untuk pembelian benih, pupuk dan obat-obatan.

Benih padi ditanam 3 varietas, yaitu Mekongga, Inpari 9 dan Inpari Gemah, semuanya berupa benih dasar (label putih), mulai ditanam pada tanggal 28 November 2023.



1.6 Fasilitasi Bantuan Penanggulangan Dampak El Nino

Kegiatan ini merupakan program yang diluncurkan Kementerian Pertanian melalui Program Gerakan Nasional Penanggulangan Dampak El Nino untukantisipasi gagal panen di beberapa daerah dan terjadinya lonjakan harga gabah padi dan beras. Kabupaten Tapin mendapat alokasi seluas 222 Ha di 4 kecamatan, yaitu :

- Kecamatan Bungur 25 ha,
- Kecamatan Tapin Selatan 20 ha,
- Kecamatan Candi Laras Selatan 147 ha, dan
- Kecamatan Salam Babaris 30 ha.

Paket bantuan kegiatan ini benih padi varietas mekongga dan sebagian inpari 42 sebanyak 25 kg/ha, pupuk NPK 50 kg/ha, pembenah tanah 10 kg/ha dan POC 3 ltr/ha.

Realisasi tanam kegiatan ini mulai bulan November – Desember terlaksana 100%, diperkirakan akan panen pada bulan Februari – Maret 2024 (over cary).



1.7 Display Varietas

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan varietas unggul baru padi. Harapannya melalui kegiatan display varietas akan memberikan gambaran kepada petani pengguna benih tentang keunggulan dari varietas padi tersebut, sehingga petani dapat melihat langsung keragaan pertumbuhan tanaman padi sebelum memutuskan untuk memilih varietas yang paling diminati dan sesuai dengan lingkungan setempat untuk diadopsi.

Kegiatan Display Varietas di Kabupaten Tapin di laksanakan di dua lokasi sebagai berikut:

Tabel 4.3
Lokasi Kegiatan Display Varietas di Kab. Tapin

No.	Kab	Kecamatan	Desa	Kel. Tani	Ketua Kel Tani
1.	Tapin	Bungur	Bungur Baru	Sumber Harapan	Napiah
2.	Tapin	Tapin Tengah	Andika	Sinar Maju	Muhammad Amrullah

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin





1. Bantuan bawang merah 3 Ha di kelompoktani Mekar Bersama 2 Desa Purut Kecamatan Bungur dengan Varietas Bima Brebes.



2. Bantuan untuk pengembangan jeruk 20 ha di kelompoktani Bersama Desa Batalas (10 ha) dan Tani Membangun Desa Taluk Haur (10 ha) Kecamatan Candi Laras Utara.

Bibit dan saprodi yang diberikan sudah diterima dengan baik oleh penerima manfaat.





3. Bantuan cabai rawit APBN provinsi sekitar 10 ha yang diberikan kepada Kelompoktani Pengampungan 1 Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah sekitar 5 ha, Poktan Sido Muncul Desa Sido Muncul Kecamatan Salam Babaris sekitar 1 ha, Poktan Karya Bersama Desa Salam Babaris Kecamatan Salam Babaris sekitar 1 ha, Poktan Makmur Desa Kambang Habang Baru Kecamatan Salam Babaris sekitar 1 ha, Poktan Harapan Kita Desa Salam Babaris Kecamatan Salam Babaris sekitar 0,5 ha, Poktan Bangun Rejo Desa Salam Babaris Kecamatan Salam Babaris sekitar 0,75 ha, Poktan Karya Sadar Desa Salam Babaris Kecamatan Salam Babaris sekitar 0,75 ha.





4. Bantuan pengembangan tanaman jahe dari apbn provinsi sekitar 10 ha di Kelompoktani Sungai Bamban 1 Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat (5 ha), Kelompoktani Sido Muncul Desa Sido Muncul Kecamatan Salam Babaris (5 ha).



3. Direktorat Jenderal Perkebunan (melalui Provinsi Kalimantan Selatan)

3.1 Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet

Kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.841/270/BUN-1/II/2023, tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet Di Kabupaten Balangan, Hulu



Sungai Tengah dan Tapin Dana Tugas Pembantuan APBN
Direktorat Jenderal Perkebunan (05).

Tabel 3.4
Kelompok Kerja Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet

No	Nama Petugas/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan Dalam Dinas Kabupaten	Kedudukan dalam Tim Teknis	Dinas Provinsi/ Kabupaten
1.	Ruri Rabiati, SP/19810220 2009042 001	Penata/ IIIc	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota	Dinas Pertanian Kabupaten Tapin
2.	Nani Hayati, SP/ -	-	Petugas Teknis Tanaman Tahunan dan Penyegar	Anggota	Dinas Pertanian Kabupaten Tapin
3.	Firman Zuhri/-	-	Petugas Teknis Pengemba ngan Kawasan Tanaman Semusi dan Rempah	Anggota	Dinas Pertanian Kabupaten Tapin

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin

Kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.841/269/BUN-1/II/2023, tentang Penunjukan Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet Di Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Tengah dan Tapin Dana Tugas Pembantuan APBN Direktorat Jenderal Perkebunan (05).

Tabel 3.5
Penanggungjawab Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet

No	Nama Petugas/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan Dalam Dinas Kabupaten
1.	Ikyani, S.Pt/19730506 199903 1 003	Pembina / IV.a	Kepala Bidang Perkebunan

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin

Pada Tahun 2023 Kabupaten Tapin dapat Alokasi bantuan 100 Ha Peremajaan Tanaman Karet :

Tabel 3.6
Kelompok Tani Penerima Bantuan
Peremajaan Tanaman Karet

NO	NAMA KELOMPOK TANI	DESA / KEC	JUMLAH (Ha)	BANTUAN YANG DITERIMA	
				Bibit Karet (Phn)	Pupuk NPK (Kg)
1.	Anggrek Jingga	Paring Guling/Bungur	26	11.440	2.600
2.	Sumber Sejahtera	Suato Lama/Salam Babaris	28,5	12.540	2.850
3.	Harapan Indah	Suato Lama/Salam Babaris	29	12.760	2.900
4.	Bina Bersama	Ayunan Papan/Lokpaikat	16,5	7.260	1.650
JUMLAH			100	44.000	10.000

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin



3.2 Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) Dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kegiatan untuk Honor Mantri Statistik Perkebunan

1. Kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.842.1/346/Sekr-1/II/2023, tentang Penetapan Penetapan Nama dan Jabatan untuk Pengelola Data (Petugas Statistik) Mantribun Kabupaten/Kota dan Kecamatan Lingkup Dinas yang Membidangi Fungsi Perkebunan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.



Tabel 3.7
Pengelola Data Mantribun Kabupaten dan Kecamatan Lingkup Dinas yang Membidangi Fungsi Perkebunan Kab.Tapin

No	Nama/NIP	Gol	Jabatan Dalam Dinas Kabupaten	Insentif Tidak Tetap
Petugas Kabupaten				
1.	Hamdah, A.Md	-	Petugas Statistik Perkebunan	150.000
Petugas Kecamatan				
1.	Maslan, SP /19670902 198803 1 008	IV	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Tapin Selatan	150.000
2.	Hj. Ani Rahmawati, S.Pt.MMA /19740512 200604 2 007	IV	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Tapin Utara	150.000
3.	Salasiah, S. PKP /19640503 198803 2 014	IV	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Lokpaikat	150.000
4.	Junaidi, S.Pt /19700824 199303 1 006	IV	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Tapin Tengah	150.000
5.	Supinanti, SP /19701010 200003 2 008	III	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Bungur	150.000
6.	Hanil /19770910 202121 1 002	V	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Bakarangan	150.000
7.	Rahma Maulida Arsyad, SP /19851119 201001 2019	III	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Binuang	150.000
8.	Muliono, SP /19840401 202121 1 002	IX	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Hatungun	150.000
9.	Khairansyah, SP /19900118 202121 1 001	IX	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Salam Babaris	150.000
10.	Metri Teguh. Hadoyanto /19850518 201706 1 001	II	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Candi Laras Selatan	150.000
11.	Sapto Nurmiati, SP /19771510 200604 2006	III	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Salam Candi Laras Utara	150.000
12.	Usa Reinaldo, SST /19950325 202202 100	III	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Salam Piani	150.000

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin

- Kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.842.1/1210/Sekr-1/VIII/2023, tentang Perubahan



Pertama Penetapan Penetapan Nama dan Jabatan untuk Pengelola Data (Petugas Statistik) Mantribun Kabupaten/Kota dan Kecamatan Lingkup Dinas yang Membidangi Fungsi Perkebunan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.8
Pengelola Data Mantribun Kabupaten dan Kecamatan Lingkup Dinas yang Membidangi Fungsi Perkebunan Kab. Tapin

No	Nama/NIP	Gol	Jabatan Dalam Dinas Kabupaten	Insentif Tidak Tetap
Petugas Kabupaten				
1.	Hamdah, A.Md	-	Petugas Statistik Perkebunan	150.000
Petugas Kecamatan				
1.	Maslan, SP /19670902 198803 1 008	IV	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Tapin Selatan	150.000
2.	Hj. Ani Rahmawati, S.Pt.MMA /19740512 200604 2 007	IV	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Tapin Utara	150.000
3.	Salasiah, S. PKP /19640503 198803 2 014	IV	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Lokpaikat	150.000
4.	Junaidi, S.Pt /19700824 199303 1 006	IV	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Tapin Tengah	150.000
5.	Supinanti, SP /19701010 200003 2 008	III	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Bungur	150.000
6.	Hanil /19770910 202121 1 002	V	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Bakarangan	150.000
7.	Rahma Maulida Arsyad, SP /19851119 201001 2019	III	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Binuang	150.000
8.	Muliono, SP /19840401 202121 1 002	IX	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Hatungun	150.000
9.	Khairansyah, SP /19900118 202121 1 001	IX	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Salam Babaris	150.000
10.	Metri Teguh. Hadoyanto /19850518 201706 1 001	II	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Candi Laras Selatan	150.000
11.	Sapto Nurmiati, SP /19771510 200604 2006	III	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Candi Laras Utara	150.000
12.	Usa Reinaldo, SST /19950325 202202 100	III	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Piani	150.000

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin



Tabel 3.9

Daftar Draf Laporan Kegiatan Usaha Perkebunan (LKUP) Masuk Dinas Pertanian Bidang Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun 2023

No	Tanggal Pengirim	Pengirim	Nama Dokumen
1	31 Agustus 2023	PT. Kharisma Inti Usaha (PT.KIU)	LKUP PT. KIU Semester I Tahun 2023
2	31 Agustus 2023	PT. Kharisma Inti Usaha (PT.KIU)	LKUP PT. KIU Triwulan II Tahun 2023
3	30 Juni 2023	PT. Kharisma Inti Usaha (PT.KIU)	LKUP PT. KIU Triwulan I Tahun 2023
4		PT. Kharisma Inti Usaha (PT.KIU)	LKUP PT. KIU Semester II Tahun 2023
5		PT. Kharisma Inti Usaha (PT.KIU)	LKUP PT. KIU Triwulan III Tahun 2023
6	22 November 2023	PT. Kharisma Inti Usaha (PT.KIU)	LKUP PT. KIU Triwulan IV Tahun 2023
7	20 Juli 2023	PT.Putra Bangun Bersama (PT. PBB)	LKUP PT. PBB Semester I Tahun 2023
8	7 Juni 2023	PT.Putra Bangun Bersama (PT. PBB)	LKUP PT. PBB Triwulan I Tahun 2023
9	6 November 2023	PT.Putra Bangun Bersama (PT. PBB)	LKUP PT. PBB Triwulan III Tahun 2023
10	15 Januari 2024	PT.Putra Bangun Bersama (PT. PBB)	LKUP PT. PBB Semester II Tahun 2023
11		PT. Hasnur Citra Terpadu (PT. HCT)	LKUP PT. HCT Triwulan II Tahun 2023
12	31 Maret 2023	PT. Hasnur Citra Terpadu (PT. HCT)	LKUP PT. HCT Triwulan I Tahun 2023
13	11 Januari 2024	PT. Hasnur Citra Terpadu (PT. HCT)	LKUP PT. HCT Triwulan IV Tahun 2023
14	5 Oktober 2023	PT. Hasnur Citra Terpadu (PT. HCT)	LKUP PT. HCT Triwulan III Tahun 2023
15	17 Juli 2023	PT.Plantindo Agro Subur (PT. PAS)	LKUP PT. PAS Semester I Tahun 2023
16	17 Juli 2023	PT.Plantindo Agro Subur (PT. PAS)	LKUP PT. PAS Triwulan II Tahun 2023
17	4 Mei 2023	PT.Plantindo Agro Subur (PT. PAS)	LKUP PT. PAS Triwulan I Tahun 2023
18	10 Januari 2024	PT.Plantindo Agro Subur (PT. PAS)	LKUP PT. PAS Semester II Tahun 2023
19	10 Januari 2024	PT.Plantindo Agro Subur (PT. PAS)	LKUP PT. PAS Triwulan IV Tahun 2023
20	6 November 2023	PT.Plantindo Agro Subur (PT. PAS)	LKUP PT. PAS Triwulan III Tahun 2023
21	18 Juli 2023	PT. Tribuana Mas (PT. TBM)	LKUP PT. TBM Semester I Tahun 2023
22	18 Juli 2023	PT. Tribuana Mas (PT. TBM)	LKUP PT. TBM Triwulan II Tahun 2023
23	18 Juli 2023	PT. Tribuana Mas (PT. TBM)	LKUP PT. TBM Triwulan I Tahun 2023
24		PT. Tribuana Mas (PT. TBM)	LKUP PT. TBM Semester II Tahun 2023
25		PT. Tribuana Mas (PT. TBM)	LKUP PT. TBM Triwulan IV Tahun 2023
26	6 November 2023	PT. Tribuana Mas (PT. TBM)	LKUP PT. TBM Triwulan III Tahun 2023
27	13 Juli 2023	PT. Kharisma Alam Persada (PT. KAP)	LKUP PT. KAP Triwulan II Tahun 2023
28	13 Juli 2023	PT. Kharisma Alam Persada (PT. KAP)	LKUP PT. KAP Triwulan I Tahun 2023
29	22 November 2023	PT. Kharisma Alam Persada (PT. KAP)	LKUP PT. KAP Triwulan III Tahun 2023
30	14 Juli 2023	PT. Arief Nirwana Utama (PT. ANU)	LKUP PT. ANU Semester I Tahun 2023



No	Tanggal Pengirim	Pengirim	Nama Dokumen
31	14 Juli 2023	PT. Arief Nirwana Utama (PT. ANU)	LKUP PT. ANU Triwulan I Tahun 2023
32	14 Juli 2023	PT. Arief Nirwana Utama (PT. ANU)	LKUP PT. ANU Triwulan II Tahun 2023
33	18 Juli 2023	PT. Analisa Mulia Bersama (PT. AMB)	LKUP PT. AMB Semester I Tahun 2023
34	18 Juli 2023	PT. Analisa Mulia Bersama (PT. AMB)	LKUP PT. AMB Triwulan I Tahun 2023
35		PT. Analisa Mulia Bersama (PT. AMB)	LKUP PT. AMB Triwulan III Tahun 2023

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin

3.3 Kegiatan Rintisan Penerbitan STDB Kelapa Sawit Rakyat

1) Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)

Kegiatan Rintisan Penerbitan STDB Kelapa Sawit Rakyat merupakan kegiatan dari APBN yang memberikan bantuan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) kelapa sawit yang terdapat di Kabupaten Tapin. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk sumber data dan referensi dalam membuat kebijakan untuk pengembangan kelapa sawit, informasi data yang akurat terkait dengan kebun-kebun sawit petani. Kegiatan bantuan tersebut di laksanakan pada Bulan April sampai Desember tahun 2023 dengan jumlah persil yang diterbitkan sebanyak 430 pekebun pada Koperasi Serba Usaha Binuang Maju Bersama dan Koperasi Satya Mandiri Sejahtera Pulau Pinang (Plasma PT. Kharisma Inti Usaha), UPS. Sehati 94 Pulau Pinang (Plasma PT. Hasnur Citra Terpadu). Kelompok Tani Maju Bersama Desa Sungai Salai Hilir Kec. Candi Laras Utara, dan Kelompok Tani Giat Membangun Desa Marampiaou Hilir Kec. Candi Laras Selatan.





3.4 Dana Dekonsentrasi Penyuluh Pertanian

Instansi Pemberi	:	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian
SKPD Penanggung Jawab/Satker	:	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan
Sumber Anggaran	:	APBN
Program	:	Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian

a. Biaya Operasional Penyuluhan (BOP) dan Pulsa Penyuluh Pertanian PNS, PPPK, dan THL TBPP

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan (Januari sampai dengan Desember 2023).

Realisasi : Rp 380.000.000,-

b. Honorarium petugas Verifikasi dan Validasi Data SIMLUHTAN

Dilaksanakan oleh 1 orang admin SIMLUHTAN Kabupaten 12 orang admin SIMLUHTAN Kecamatan berupa kegiatan verifikasi dan validasi data ketenagaan, kelembagaan penyuluhan pertanian pada aplikasi SIMLUHTAN di Kabupaten dan 12 BPP kecamatan se Kabupaten Tapin sebanyak 4 (empat) kali

Realisasi : Rp 9.600.000,-

4. Bantuan Langsung Pusat

Telah dilaksanakan penyerahan hibah bantuan Pupuk Hayati Cair sebanyak 7.735 liter yang merupakan hibah dari APBN Kementrian Pertanian. Hibah tersebut diterima oleh 83 kelompok tani dari 2 kecamatan yakni Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan. Bantuan ini merupakan kegiatan saprodi



peningkatan produksi tanaman pangan untuk pertanaman padi lahan rawa oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. Berikut adalah dokumentasi pembagian Pupuk Hayati Cair yang telah dilaksanakan :



5. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023

1) Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) / Hortikultura

Adapun Realisasi dari Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) / Hortikultura, yaitu : Pagu anggaran untuk 5 P2L sebesar Rp. 375.000.000,- Anggaran terserap sebesar Rp. 375.000.000,- atau sebesar 100 %.

Pagu anggaran untuk satu P2L adalah Rp. 75.000.000,- Anggaran terserap sebesar Rp 75.000.000,- atau sebesar 100 %. Dengan capaian fisik 100%.

Berikut KWT yang melaksanakan kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L)/Hortikultura :



a) KWT SELEDRI berlokasi di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur



b) KWT MELATI berlokasi di Desa Timbaan Kecamatan Tapin Selatan





c) KWT KETUMBAR berlokasi di desa Bitahan baru Kecamatan Lokpaikat



d) KWT DEWI SRI berlokasi di Desa Mandurian Kecamatan Tapin Tengah





e) KWT SHINTA berlokasi di desa A. Yani Pura Kecamatan Binuang



2) DAK Non Fisik Pendataan Pertanian (Bidang Penyuluhan).

Total pagu kegiatan DAK Non Fisik 12 BPP sebesar Rp 138.000.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100%.

Pemanfaatan DAK Non Fisik Pendataan Pertanian oleh BPP di Tingkat Kecamatan Tahun 2023 dilaksanakan oleh 12 BPP yang ada di Kabupaten Tapin terdiri dari 3 Komponen Kegiatan yaitu :

- 1) Bantuan Paket Data bagi Penyuluh Pertanian di BPP 144 OB sebesar Rp 250.000,- per bulan dan total Rp 3.000.000,- per BPP

Dengan adanya Pendataan Pertanian, pemutakhiran, data komoditas strategis pertanian tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP yang dilakukan oleh Penyuluh BPP melalui aplikasi daring dan/atau luring maka penyediaan data pertanian dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

- 2) Sosialisasi Gospasial di BPP yang terdiri dari Belanja Makan minum, bantuan transport dan ATK dengan total Rp 4.400.000,- per BPP.

Sosialisasi pengukuran geospasial lahan pertanian dilakukan untuk menyebarkan informasi dan edukasi kepada Penyuluh, perwakilan Poktan, Perwakilan Gapoktan, dan/atau Perwakilan P4S terkait metode pengukuran Geospasial lahan pertanian.





- 3) Pelatihan Pertanian Tematik dengan Tema Pelatihan Pertanian Organik dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.100.000,- per BPP dengan komponen belanja : uang saku peserta, makan minum peserta dan bahan alat bahan praktek.
- 4) Pelatihan tematik pertanian yang diperuntukkan bagi Penyuluh, perwakilan Poktan, perwakilan Gapoktan, dan/atau Perwakilan P4S dalam rangka peningkatan kapasitas baik dalam hal pengetahuan maupun keterampilan, pengenalan sistem usaha tani secara efisiensi, optimalisasi dan meminimalkan terhadap dampak lingkungan. Materi pelatihan tematik pertanian dengan tema pertanian organik sesuai dengan spesifik lokalita 12 BPP yang ada di Kabupaten Tapin yaitu pelatihan pembuatan jamu ternak dan pupuk organik.





3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten (Bantuan APBD Provinsi)

1. Target Kinerja

a) Dinas Pertanian

1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada Tahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Tapin mendapat beberapa kegiatan dari anggaran APBD Provinsi melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu :

1. Kegiatan Bantuan Padi Inbrida;
2. Padi Apung;
3. Pengembangan Porang;
4. Pengembangan Jagung Hibrida;
5. Pengembangan Penangkaran Benih Padi;
6. Bantuan Bahan Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan;
7. Penanganan Dampak Perubahan Iklim di Kab. Tapin;
8. Fasilitasi Budidaya Kacang Tanah;
9. Bantuan Alat Mesin Pasca Panen.

2) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.

1. Pengembangan Tanaman Kopi Robusta.

3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Bidang Hortikultura) Provinsi Kalimantan Selatan.

1. Pengembangan Durian;
2. Bantuan untuk Pengembangan Tanaman Jeruk Siam Banjar sekitar 10 Ha;
3. Pengembangan Tanaman Jahe;
4. DPI (Pompa Air);
5. Pengendali OPT Cabai;



b) Dinas Ketahanan Pangan

Target kinerja Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten/Kota ialah tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA). Targe kegiatan Data Dan Informasi Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi Kabupaten/Kota ialah tersajinya informasi data sistem kewaspadaan pangan dan gizi di Kabupaten Tapin. Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Nasional targetnya terpenuhinya penguatan cadangan pangan.

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

a) Dinas Pertanian

1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun Realisasi Program dan Kegiatan dari anggaran APBD Provinsi melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu :

1. Kegiatan Bantuan Padi Inbrida

Kegiatan fasilitasi bantuan padi inbrida dari APBD Provinsi berlokasi di Kecamatan Tapin Tengah Desa Suka Ramai seluas 150 ha kepada 10 kelompok tani, yaitu :

- Kelompok Tani Suka Damai I 15 ha,
- Kelompok Tani Suka Damai II 15 ha,
- Kelompok Tani Suka Damai III 15 ha,
- Kelompok Tani Suka Damai IV 15 ha,
- Kelompok Tani Suka Maju 15 ha,
- Kelompok Tani Sabar Menanti 15 ha,
- Kelompok Tani Harapan Masa I 15 ha,
- Kelompok Tani Membangun 15 ha,
- Kelompok Tani Fajar Menyingsing 15 ha, dan



- Kelompok Tani Harapan Baru 15 ha.

Paket bantuan berupa benih padi varietas mekongga 25 kg/ha, pupuk NPK 100 kg/ha dan Pupuk Hayati Cair 4 ltr/ha. Kegiatan ini terealisasi tanam 100 ha pada bulan Oktober – November dan akan dipanen awal tahun 2024.



2. Padi Apung

Kegiatan fasilitasi bantuan padi apung dari APBD Provinsi berlokasi di Kelompok Tani Mekar Sari A Kelurahan Raya Belanti Kecamatan Binuang sebanyak 500 lembar styrofoam, benih dan paket lainnya. Kegiatan padi apung merupakan uji coba inovasi untuk permasalahan pertanaman padi di daerah-daerah rawa, lahan tergenang dan rawan banjir yang masih sulit ditanami padi. Kegiatan ini akan dilaksanakan pertanaman pada bulan Februari 2024 disaat air biasanya dalam, akan dikawal dan disiapkan untuk agenda panen sebagai media ekspos agar kegiatan padi apung ini bisa ditiru dan diterapkan oleh para petani lain sehingga walau kondisi air dalam masih bisa tanam padi.



3. Pengembangan Porang

Kegiatan fasilitasi budidaya porang dari APBD Provinsi berlokasi di Desa Asam Randah Kecamatan Hatungun pada 2 Kelompok Tani, yaitu :

- Kelompok Tani Sentosa ; 4 Ha, dan
- Kelompok Tani Harapan Indah ; 4 Ha

Paket bantuan yang diberikan adalah benih 75/Ha, pupuk organik padat 500 kg/ha dan pupuk hayati cair 4 ltr/ha. Realisasi fisik tanam sudah 8 Ha (100%) dan masih dalam masa pemeliharaan.



4. Pengembangan Jagung Hibrida

Kegiatan bantuan benih jagung hibrida (jagung pakan) dari dana APBD Provinsi seluas 100 Ha di 5 kecamatan, yaitu ;

- Kecamatan Tapin Selatan ; 10 Ha,
- Kecamatan Benuang ; 30 Ha,
- Kecamatan Hatungun ; 30 Ha,
- Kecamatan Salam Babaris ; 10 Ha
- Kecamatan Bungur ; 20 Ha

Paket bantuan benih jagung varietas RK 19 15 kg/ha, pupuk NPK 100 kg/ha dan pupuk hayati cair 3 ltr/ha. Dari kegiatan 100 Ha dapat tertanam 100% walaupun sebagian pertanaman tidak tumbuh maksimal karena terdampak kemarau panjang el nino. Dari sampel ubinan pada pertanaman yang tumbuh baik diperoleh provitas



51,11 ku/ha, namun beberapa spot-spot pertanaman yang kurang tumbuh baik provitas rata-rata dibawah 45 ku/ha. Capaian produksi diperkirakan mencapai kurang lebih 450 ton dari luasan panen 100 ha.



5. Pengembangan Penangkaran Benih Padi

Pengembangan benih padi APBD Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan pada lokasi kelompok tani berikut:

Tabel 3.10
Daftar Penerima Bantuan Bahan Pengendali OPT (Padi Sawah)

No.	Kab	Kec	Desa	Kel. Tani	Ketua Kel. Tani	Luas	Varietas	Vol	Jadwal Tanam
1.	Tapin	Tapin Tengah	Pandulangan	Berkat Bimbingan	Anwar	25	Mekongga/ Inpari	625	Maret/ Aprill
2.	Tapin	Tapin Tengah	Labung	Teluk Bayur	M. Arifin	10	Mekongga/ Inpari	250	Maret/ Aprill
3.	Tapin	Bungur	Bungur Baru	Tani Membangun	Gazali Rahman	25	Mekongga/ Inpari	625	Maret/ Aprill
4.	Tapin	Lokpaikat	Binderang	Sumber Rezeki	Jubair	25	Mekongga/ Inpari	625	Maret/ Aprill
5.	Tapin	Salam Babaris	Suato Lama	Sido Muncul	Suparian	15	Mekongga/ Inpari	375	Maret/ Aprill
Jumlah Tapin						100		2500	

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin

Tabel 3.11
Daftar Penerima Bantuan Bahan Pengendali OPT (Padi Kering)

No.	Kab	Kec	Desa	Kel. Tani	Ketua Kel. Tani	Luas	Varietas	Jadwal Tanam
1.	Tapin	Hatungun	Matang Batas	KT. Sopyonyono	Ahmad Vihri	25	Situ Patenggang	Oktober
Jumlah Tapin						25		

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin

Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan penangkaran padi APBD I:



Penanaman padi penangkaran APBD I di Kabupaten Tapin terhambat oleh kondisi kekeringan lahan akibat Elnino, sehingga petani baru bisa menanam pada bulan November dan Desember 2023.



6. Bantuan Bahan Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan

Bantuan yang diberikan berupa Insektisida sebanyak 20 botol per kelompok tani, dan rodentisida sebanyak 20 kg per kelompok tani. Berikut daftar penerima bantuan bahan pengendali OPT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan di kabupaten Tapin.

Tabel 3.12
Daftar Penerima Bantuan Bahan Pengendali OPT

No.	Kecamatan	Desa	Kel. Tani	Ketua Kel. Tani	Luas	Komoditi
1.	Tapin Selatan	Harapan Masa	Harapan Masa I	Simun	25	Pangan dan Hortikultura
2.	Tapin Selatan	Suato Tatakan	Sinar Harapan	Mafuliyannoor Kawakif	25	Pangan dan Hortikultura
3	Tapin Selatan	Tatakan	Harapan Bersama I	Husni Mustamil	25	Pangan dan Hortikultura
4	Tapin Selatan	Sawang	Bina Tani	Achmad Guzaini	25	Pangan dan Hortikultura
5	Tapin Selatan	Timbaan	Penerus	Ali Napiah	25	Pangan dan Hortikultura

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin

7. Penanganan Dampak Perubahan Iklim di Kabupaten Tapin

Bantuan pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tapin tahun 2023 berupa pompa air untuk 2 kelompok tani berikut:

1. Kelompok tani Harapan, desa Pabaungan Hilir, Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
2. Kelompok tani Harapan Maju, desa Andhika, Kecamatan Tapin Tengah.



8. Fasilitasi Budidaya Kacang Tanah



9. Bantuan Alat Mesin Pasca Panen

Pada tahun 2023 dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Tapin memberikan bantuan kepada Kelompok Tani sesuai dengan Alokasi Anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung penanganan pascapanen di tingkat petani.

a. Power Thresher/Perontok Padi,

Alsin power thresher 3 (tiga) unit, masing-masing pada Poktan Harapan Masa Desa Sungai Bahalang Kecamatan Tapin Tengah, Poktan Harapan Baru Desa Sungai Bahalang Kecamatan Tapin Tengah dan Poktan Mandiri Kel. Raya Belanti Kecamatan Benuang.



b. UV Dryer (Pengeringan Hasil Panen)

UV Dryer (pengeringan hasil panen) 1 (satu) paket bangunan pada lokasi Gapoktan Gotong Royong Desa Bakarangan Kecamatan Bakarangan



Dalam upaya pengembangan pengolahan hasil pertanian, dengan karakteristik usaha berskala kecil dengan berbagai keterbatasannya, memerlukan kebijakan pengembangan yang memiliki keunggulan, salah satu pendekatan terintegrasi yang dipandang sesuai adalah pendekatan kelompok yang memiliki jaringan usaha yang terkait dengan fasilitas peralatan pengolahan yang cukup memadai serta SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan

Hasil dari kegiatan dan bantuan ini, diharapkan dari semua bantuan sarana bermanfaat bagi kelompok tani maupun gabungan kelompok tani penerima dan di sekitarnya sehingga periode ketahanan penyimpanan produk pertanian tanaman pangan bisa bertahan lebih lama untuk tunda jual dan nilai jual produk pertanian tidak turun drastis pada musim panen sehingga memberikan dampak positif langsung kepada kesejahteraan petani secara luas.



2) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan

a) Pengembangan Tanaman Kopi Robusta

Kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.800/551/BUN-1/IV/2023, tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan Pengembangan Tanaman Kopi Robusta pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran -Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Tabel 3.13
Kelompok Kerja Pengembangan Tanaman Kopi Robusta

No	Nama Petugas/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan Dalam Dinas Kabupaten	Kedudukan dalam Tim Teknis	Dinas Provinsi/ Kabupaten
1.	Ruri Rabiati, SP/19810220 200904 2 001	Penata/ Ilc	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota	Dinas Pertanian Kab. Tapin
2.	Wahyu Hedayanti/ -	-	Petugas Teknis Penerapan Tekhnologi, Pemberdayaan Tanaman Tahunan, dan Penyegar, Semusim dan Rempah	Anggota	Dinas Pertanian Kabupaten Tapin
3.	Muliono, SP /1984040 1 202121 1 002	Sarjana Linier/ I X	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota	Dinas Pertanian Kabupaten Tapin

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin

Kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.800/550/BUN-1/IV/2023, tentang Penetapan Penanggung Jawab Kegiatan Pengembangan Tanaman Kopi Robusta pada



Dokumen Pelaksanaan Anggaran -Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Tabel 3.14
Penanggungjawab Kegiatan Pengembangan Tanaman Kopi Robusta

No	Nama Petugas/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan Dalam Dinas Kabupaten
1.	Ikyani, S.Pt/197305061999031003	Pembina / IV.a	Kepala Bidang Perkebunan

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin

Pada Tahun 2023 Kabupaten Tapin dapat Alokasi bantuan 10 Ha Pengembangan Kopi :

Tabel 3.15
Alokasi Bantuan Pengembangan Tanaman Kopi Robusta

NO.	NAMA KELOMPOK TANI	DESA / KEC	JUMLAH (Ha)	BANTUAN YANG DITERIMA		
				Bibit Kopi (Phn)	Herbisida (Ltr)	Pupuk NPK (Kg)
1.	Budi Bakti	Matang Batas /Hatungun	6	7.998	24	799,8
2.	Baru Muncul	Asam Randah /Hatungun	4	5.332	16	533,2
JUMLAH			10	13.330	40	1.333

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin





3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Bidang Hortikultura) Provinsi Kalimantan Selatan.

a. Pengembangan Durian

Bantuan dari APBD provinsi tahun ini mendapatkan sekitar 10 ha. Diberikan kepada kelompok tani Teratai Desa Batu Ampar Kecamatan Piani.



b. Bantuan Untuk Pengembangan Tanaman Jeruk Siam Banjar Sekitar 10 Ha

5 ha ke kelompok tani Sungai Baru Desa Sungai Salai Kecamatan Candi Laras Utara. 5 ha ke kelompok tani Sei. Berangas Desa Sungai Salai Hilir Kecamatan Candi Laras Utara.



c. Pengembangan Tanaman Jahe

Untuk tahun ini pengembangan tanaman jahe di kelompok tani Telaga pangan Desa Miawa Kecamatan Piani sekira 5 ha.



d. DPI (Pompa Air)

Bantuan ini berupa fasilitasi untuk aliran penyiraman tanaman komoditas hortikultura berupa alat / mesin penyedot dan tempat air/tandon. Diberikan kepada kelompoktani Bengkuang Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat.

**e. Pengendalian OPT Cabai**

Untuk kegiatan ipengendalian OPT cabai ini dilaksanakan di kelompoktani Maju Bersama Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat.

**b) Dinas Ketahanan Pangan**

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.

1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan



Intansi pemberi tugas pembantu dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan

Tabel 3.16
Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan Tugas Pembantuan Pusat

Kegiatan	Output	Rincian Kegiatan
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kab/Kota	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	- Belanja Bahan - Belanja Honor Output Kegiatan - Belanja Persediaan Barang Konsumsi - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Kegiatan data dan informasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Data Informasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	- Belanja Bahan - Belanja Honor Output Kegiatan - Belanja Persediaan Barang Konsumsi - Belanja Perjalanan Dinas dalam kota
Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Nasional	Kuatnya Cadangan Pangan Nasional	- Belanja Bahan - Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin 2023

3. Tempat dan Lokasi

Tempat dan lokasi pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran bersumber dari Dana Dekonsentrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan yang mana jumlah pagu sebesar Rp. 43.720.000,-.



5. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran untuk Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 15.430.000,- untuk sisa pagu sebesar Rp.28.290.000,-, atau 35,29%

6. Realisasi Capaian Kegiatan

Realisasi Anggaran untuk Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 15.430.000,- untuk sisa pagu sebesar Rp.28.290.000,-, atau 35,29%

Kegiatan Fasilitasi penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) Kab/Kota Bersumber dari dana Dekonsentrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan anggaran sebesar Rp. 23.500.000,- yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember, maksud dan tujuan Kegiatan ini untuk memberikan informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi, realisasi anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 8.140.000,- (34,63%).

Kegiatan Data dan informasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kab/Kota Bersumber dari dana Dekonsentrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan anggaran sebesar Rp. 9.580.000,- yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember, maksud dan tujuan Kegiatan ini untuk menyediakan informasi secara berkesinambungan tentang situasi pangan dan Gizi suatu wilayah untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di bidang pangan sebagai upaya kewaspadaan pangan dan Gizi untuk mengantisipasi



terjadinya kerwanan Pangan dan Gizi tingkat kabupaten, realisasi anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 5.400.000,- (56,37%).

Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Nasional Bersumber dari dana Dekonsentrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan anggaran sebesar Rp. 10.640.000,- yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember, Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat sehingga terpantaunya jumlah stok pangan di gudang cadangan pangan pemerintah dan lumbung pangan masyarakat, realisasi anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.890.000,- (17,76%).

4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintahan dibawahnya

Pada pelaksanaan tahun anggaran 2023 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin tidak ada menerima Tugas Pembantuan yang diberikan, sehingga pelaksanaan tugas bantuan berupa kegiatan dari tugas pembantuan yang diterima.

3.3 Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

a) Dinas Pertanian

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan (anggaran dekonsentrasi provinsi Kalimantan Selatan)/APBN pada Dinas Pertanian selama tahun 2023 relatif tidak mengalami kendala berarti, perencanaan telah dilakukan sejak tahun sebelumnya baik melalui Rakontek Tingkat Provinsi Bersama Bidang Teknis di Provinsi Kalimantan Selatan hingga dibawa Rakornas dan diinput ke dalam aplikasi Eproposal Kementerian Pertanian hingga dan dilakukan secara bertingkat, dan pelaksanaan



dilapangan karena telah dilakukan survey terhadap Calon Penerima/Calon Lokasi pada tahun sebelum pelaksanaan maka pelaksanaan pun berjalan lancar.

b) Dinas Ketahanan Pangan

Permasalahan dan kendala yang dihadapi tiga kegiatan diatas relative sama yaitu kendala kegiatan ini anggaran terserap rendah karena waktu pelaksanaan yang singkat dan penentuan jadwal dengan pengurus lumbung yang padat tidak bisa melaksanakan sehingga anggaran terserap rendah.

3.4 Upaya Penyelesaian

a) Dinas Pertanian

Dengan Koordinasi yang intensif dan lebih baik maka diharapkan pelaksanaan ini akan semakin Baik.

b) Dinas Ketahanan Pangan

Dengan hasil kegiatan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kab/Kota Rincian Kegiatan : pengambil keputusan dapat merencanakan program , penentuan target serta intervensi kerawanan pangan dan Gizi di tingkat kabupaten.

Dengan hasil kegiatan Data dan informasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kab/Kota pengambil keputusan dapat merencanakan program, penentuan target serta intervensi kerawanan pangan dan Gizi di tingkat kabupaten.

Berdasarkan hasil kegiatan penguatan cadangan pangan nasional menyarankan tentang pelaksanaan dimulai dari triwulan III sehingga dapat mengatur jadwal dengan pengurus lumbung pangan sehingga dapat melaksanakan rapat evaluasi dan melaksanakan kegiatan penguatan cadangan pangan.



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Bidang Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat salah satunya adalah pelayanan Pendidikan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 32 tahun 2022 tentang tentang standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dasar di Kabupaten/Kota bahwa standar pelayanan minimal.

Standar pelayanan Minimal pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip :

- 1) Kesesuaian kewenangan,
- 2) Ketersediaan,
- 3) Keterjangkauan,
- 4) Kesiambungan,
- 5) Keterukuran dan
- 6) Ketepatan sasaran.

Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah Kabupaten Tapin terdiri atas :

- a. Pendidikan anak usia dini,
- b. Pendidikan dasar dan
- c. Pendidikan Kesetaraan.

Penerima Pelayanan Dasar SPM pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Dan Penerima Pelayanan Dasar SPM pendidikan pada pendidikan dasar merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, serta



penerima Pelayanan Dasar SPM pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan anak usia dini meliputi :

- a. Buku gambar
- b. Alat mewarnai

Adapun Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar peserta didik sebagai berikut :

- a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per peserta didik per semester
- b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 warna dalam kondisi baru per peserta didik per semester.

Dan Perlengkapan dasar peserta didik pada sekolah dasar meliputi :

- a. Buku teks pelajaran
- b. Perlengkapan belajar

Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar peserta didik sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per peserta didik per tahun dan
- b. 1 (satu) set alat perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester.

Sedangkan Perlengkapan dasar peserta didik pada sekolah menengah pertama meliputi :

- a. Buku teks pelajaran
- b. Perlengkapan belajar

Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar peserta didik sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per peserta didik per tahun dan
- b. 1 (satu) set alat perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester.



Kemudian Perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan kesetaraan meliputi :

- a. Modul belajar
- b. Perlengkapan belajar

Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar peserta didik sebagai berikut :

- a. 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per peserta didik per tahun dan
- b. 1 (satu) set alat perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester.

4.1.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Sebagai strategi mewujudkan wajib belajar pendidikan secara maksimal, agar jangan sampai ada anak sekolah yang tidak sekolah baik pada jenjang pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Dan juga ada anak usia sekolah yang sudah sekolah tapi rentan atau berpotensi putus sekolah karena kemiskinan dan belum mendapat KIP, PKH dan sebagainya maka pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan melaksanakan penerapan Standar pelayanan Minimal bidang pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022. Adapun target untuk tahun 2023 adalah pada tabel berikut ini :

TABEL 4.1
TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR CAPAIAN	TAHUN 2022			TAHUN 2023		Keterangan (permasalahan)
		Jumlah penduduk usia sekolah	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendidikan	Capaian = $(4):(3) \times 100\%$	Jumlah penduduk usia sekolah	Target Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan pendidikan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	31.387 Orang	26.062 Orang	83,03 %	31.603 Orang	31.603 Orang	
2. Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	8.137 Orang	4.650 Orang	57,15 %	39.946 Orang	39.946 Orang	
3. Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	6.587 Orang	4.910 Orang	74,54 %	6.249 Orang	6.249 Orang	

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin





4.1.3. Realisasi

Realisasi SPM bidang pendidikan oleh kabupaten dapat dilihat target yang telah dicapai pada pendidikan dasar ada sejumlah 4 sasaran dalam penerapan SPM pendidikan diharapkan Ketercapaian target tersebut didukung karena adanya beberapa kegiatan seperti penanganan anak tidak bersekolah pada tahun 2023 ini dengan melaksanakan pendataan anak tidak sekolah dan anak putus sekolah, dan bantuan untuk siswa miskin dengan penyediaan perlengkapan dasar peserta didik PAUD penerima SPM, penyediaan perlengkapan dasar peserta didik Sekolah dasar (SD), penerima SPM penyediaan perlengkapan dasar peserta didik SMP penerima SPM sedangkan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan dengan pelaksanaan kegiatan seperti Pelaksanaan Sertifikasi Guru, Penilaian Angka kredit jabatan fungsional serta kegiatan pengembangan keprofesian guru Guru Penggerak).

Namun masih banyak kendala yang ditemui dilapangan untuk memenuhi standar yang diharapkan disamping biaya atau anggaran yang masih minim sehingga masih ada sasaran yang belum sesuai penerapan standar pelayanan minimal khususnya pada penyediaan pelayanan dasar peserta didik.

Berikut ini adalah realisasi pencapaian SPM bidang pendidikan pada tahun 2023, dimana pada jenis pelayanan dasar dengan indikator jumlah warga negara usia 7 – 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) terdapat capaian 100 persen dimana ada sebanyak 31.603 orang yang bersekolah pada jenjang sekolah dasar dan jenjang sekolah menengah pertama dan untuk jenis pelayanan dasar Pendidikan Kesetaraan dengan indikator jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan terdapat capaian 100 % atau dengan kata lain ada sejumlah anak yang bersekolah pada pendidikan kesetaraan, Pondok Pesantren (Kemenag) dan yang masih belum tamat sekolah



usia 7-18 Tahun sebanyak 39.946 orang sedangkan untuk jenis pelayanan dasar Pendidikan anak usia dini dengan indikator jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun dengan capaian 100 persen sebanyak 6.249 orang bersekolah pada jenjang PAUD. Capaian 100 persen ini didapat dari hasil keputusan bersama Pejabat eselon 2 dan Kepala Bidang yang menangani penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan.

TABEL 4.2
REALISASI PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM TAHUN 2023

NO.	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (DEMAND)			CAPAIAN PENYEDIAAN LAYANAN DASAR			CAPAIAN SPM	KATEGORI
		JUMLAH ANAK USIA SEKOLAH	JUMLAH SISWA BERSEKOLAH/TAMAT	CAPAIAN (%)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Dasar (Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs))	6.249	6.249	100,00%	500	500	100%	100,00%	Sangat Tinggi
2	Pendidikan Kesetaraan (Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.)	31.603	31.603	100,00%	1.128	1.128	100%	100,00%	Sangat Tinggi
3	Pendidikan Anak Usia Dini (Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD)	39.946	39.946	100,00%	199	199	100%	100,00%	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin





Daftar penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan Daerah Kabupaten Tapin sebagai berikut :

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Daftar Siswa Kurang Mampu Penerima Alat Tulis Sekolah Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2023 :

TABEL 4.3
DAFTAR SISWA KURANG MAMPU PENERIMA ALAT TULIS SEKOLAH
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2023

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	JENIS BARANG
1	MUHAMMAD AMIN ANNIS	L	TK KARTINI	BUNGUR	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
2	JHAMMAD KARIM	L	TK KENANGA	BUNGUR	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
3	NAURA AZRELIA	P	TK AL-MUKHLISIN	BUNGUR	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
4	M. AL GHANY	L	TK RADHATAL ATFAL	BUNGUR	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
5	NOR AIDA	P	TK DAHLIA	BUNGUR	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
6	SITI BILQIS	P	TK MELATI	BUNGUR	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
7	M. ZAINI	L	TK MAWAR PUTIH	BUNGUR	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
8	MUHAMMAD HIDAYATULLAH	L	TK NURUL MUHIBBIN	BUNGUR	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
9	ISMAIL	L	TK ANGGREK	BUNGUR	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
10	NUSA ALHAFI	L	TK SEROJA	BUNGUR	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
11	GIDEON HARVENO GIOFANI	L	TK ARRAUDAHA	BUNGUR	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
12	MUHAMMAD FIQRI RAMADHAN	L	TK BUNGA TANJUNG	BUNGUR	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
13	DEWI ARIANI	P	TK TERATAI	BUNGUR	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
14	AINAYA PATTIYATUL RAHMAH	P	TK KAMBOJA	BUNGUR	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
15	AHMAD RIFQI	L	TK MURAI	CLS	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
16	SITI RAHMAH	P	TK MURAI	CLS	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
17	MUHAMMAD YOGA	L	TK MURAI	CLS	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
18	AHMAD WILDAN SALMAN	L	TK MURAI	CLS	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
19	MUHAMMAD RAHMANI	L	TK MURAI	CLS	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
20	NAHDATUSSALAMA H	P	TK AMANAH	CLS	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
21	RUQAYYAH	P	TK RAUDHATUL JANAHAH	CLS	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna



NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	JENIS BARANG
22	MUHAMMAD FAQIH	L	TK RAUDHATUL JANAHAH	CLS	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
23	MUHAMMAD SALMAN	L	TK RAUDHATUL JANAHAH	CLS	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
24	MUHAMMAD YUSUF	L	TK CENDRAWASIH	CLS	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
25	ZAINI	L	TK CENDRAWASIH	CLS	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
26	NURHANA MENTARI	P	TK CENDRAWASIH	CLS	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
27	RABIYATUL HUSNA	P	TK HARAPAN BUNDA	CLS	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
28	ANNISA ROZQIYA	P	TK TUNAS BANGSA	CLU	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
29	MUHAMMAD BAKHEIT	L	TK TUNAS BANGSA	CLU	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
30	JUHAIIRIAH	P	TK TUNAS BANGSA	CLU	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
31	MUHAMMAD NAZRIL	L	TK TUNAS BANGSA	CLU	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
32	HALIMATU ZAHRA	P	TK TUNAS BANGSA	CLU	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
33	ABDULLAH AL	L	TK KASIH SAYANG	CLU	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
34	MAYSARAH	P	TK TRISULA	CLU	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
35	MUHAMMAD APDAILANI	L	TK RAUDATUSSIBYAN	CLU	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
36	LAILATUL NAFISAH	P	TK TUNAS HARAPAN	CLU	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
37	AHMAD ZAKI	L	TK MEKAR SARI	CLU	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
38	FAHRIAN	L	TK MAWAR	CLU	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
39	MUHAMMAD AL MADANI	L	TK MASTIKA	CLU	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
40	MUHAMMAD ZAINI	L	TK HARAPAN JAYA	CLU	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
41	MUHAMMAD MUNZIR	L	TK PERTIWI	CLU	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
42	MUHAMMAD RAIHAN	L	TK CEMPAKA	CLU	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
43	SITI HADIJAH	P	TK BINA INSANI	CLU	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
44	SYIFA FATIMATUZZAHRA	P	TK PAHLAWAN BANGSA	CLU	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
45	MUHAMMAD AKBAR	L	TK KEMUNING	CLU	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
46	MUHAMMAD AZMI	L	TK KARTINI	HATUNGUN	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
47	MUHAMMAD ROKIB	L	TK TUNAS HARAPAN	HATUNGUN	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
48	RICKY PRATAMA	L	TK EKA BANUA BASTARI	HATUNGUN	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
49	ZULFA	P	TK KASIH IBU	HATUNGUN	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
50	NURUL HIDAYAH	P	TK ANGGREK	HATUNGUN	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
51	RIDHA AULIA	P	TK HARAPAN BUNDA	HATUNGUN	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna



NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	JENIS BARANG
52	Muhammad Ali ilham	L	TK Budi Mulia	LOKPAIKAT	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
53	Muhammad Ami	L	TKN Pembina 1 Lokpaikat	LOKPAIKAT	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
54	Muhammad Rifansyah	L	Tk Raudhatul Jannah	LOKPAIKAT	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
55	Tasya Azizah	P	TK Aisyiyah Bustanul Athfal	LOKPAIKAT	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
56	SALMA AZIZAH	P	TK LESTARI	LOKPAIKAT	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
57	M. Rahmadi	L	TKN Pembina 2 Lokpaikat	LOKPAIKAT	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
58	Desi Narisa	P	TK Bina Putra	SALAM BABARIS	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
59	Annisa Putri	P	TK Pembina 1	SALAM BABARIS	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
60	Adeeva Kirana Mahesti	P	TK Handayani	SALAM BABARIS	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
61	Muhammad Azzam Khalid Kurniawan	L	TK Handayani	SALAM BABARIS	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
62	Muhammad Ilham	L	TK Tunas Bangsa	SALAM BABARIS	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
63	Muhammad Al - Ghifari	L	TK Sejahtera	TAPIN SELATAN	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
64	Marhamah	P	TK Terpadu Nusa Indah	TAPIN SELATAN	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
65	Nur Layla	P	TK Nusa Indah	TAPIN SELATAN	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
66	Muhammad Azka	L	TK Pelangi	TAPIN SELATAN	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
67	Akhmad Nor Fahreza	L	TK Tunas Karya	TAPIN SELATAN	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
68	Nor Azizah Afifah	P	TK Rita Sawang	TAPIN SELATAN	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
69	Muhammad Rizky Ramadhan	L	TK Kencana	TAPIN SELATAN	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
70	Muhammad Maliki Ataya	L	TK Teratai 2	TAPIN SELATAN	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
71	Muhammad Hafi Ramadhansah	L	TK Cempaka Putih	TAPIN SELATAN	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
72	Fatimatuz Zahra	P	TKN Pembina 1 Tap sel	TAPIN SELATAN	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
73	Muhammad Albianor	L	TK Siti Khadijah	TAPIN SELATAN	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
74	Muhammad Padlulah	L	TK Permata Bunda	TAPIN SELATAN	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
75	Mariyam Eliya	P	TK Anggrek	TAPIN SELATAN	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
76	Muhammad Fahmi	L	TK Seroja	TAPIN SELATAN	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
77	MUHAMMAD NOR RAHMAN	L	TK HARAPAN KAMI	TAPIN TENGAH	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
78	MUHAMMAD MAULIDI SANDIKA	L	TK PENERUS BANGSA 2	TAPIN TENGAH	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
79	AHMAD MASYHURI	L	TK PENERUS BANGSA 1	TAPIN TENGAH	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
80	SITI AMIRA	L	TK HARAPAN BANGSA	TAPIN TENGAH	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
81	MUHAMMAD RIDUAN	L	TK PESAYANGAN	TAPIN TENGAH	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna



NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	JENIS BARANG
82	AINUN NIMAH	P	TK TUNAS HARAPAN	TAPIN TENGAH	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
83	MUHAMMAD FIQRI	L	TK AL HUSNA	TAPIN TENGAH	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
84	MUHAMMAD NOOR AZMI	L	TKN PEMBINA 2	TAPIN TENGAH	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
85	NATASYA AULIYA	P	TK KARYA BARU	TAPIN TENGAH	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
86	SITI PATIMAH	P	TK MELATI	TAPIN TENGAH	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
87	SALMA KAUSAR	P	TK IT ANNUR	TAPIN TENGAH	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
88	AHMAD DI	L	TKN PEMBINA 1	TAPIN TENGAH	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
89	KHAIFA AQILA	P	RAUDHATUSSLAM	TAPIN TENGAH	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
90	Muhammad Irfan	L	TK Idhata	TAPIN UTARA	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
91	M. Rayhan Fazar	L	TK Mekar sari	TAPIN UTARA	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
92	Ahmad Nazmi	L	TK Surgirama	TAPIN UTARA	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
93	M. Ridho Fadillah	L	TK Harapan Bunda	TAPIN UTARA	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
94	Muhammad Noor	L	TK Trisula	TAPIN UTARA	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
95	Naila	P	TK Trisula	TAPIN UTARA	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
96	Muhammad Lutfhi	L	TK Belanga Mas	TAPIN UTARA	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
97	Ziadatul Husna	L	TK Belanga Mas	TAPIN UTARA	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
98	Muhammad Zakaria	L	TK Harapan ibu	BAKARANGAN	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
99	Muhammad Riza	L	TK Satu Atap Parigi Simbar	BAKARANGAN	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
100	Amilina	P	TK Kasih Ibu	BAKARANGAN	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
101	Arnaf Suhaiby	L	TKN Pembina 1 Bakaragan	BAKARANGAN	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
102	M. Shalahuddin	L	TK Al-Irsyad	BINUANG	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
103	Raisya Amira	P	TK Aster	BINUANG	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
104	M. Zaky	L	TK Tunas Harapan	BINUANG	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
105	Veronika BR Manalu	P	TK Merpati	BINUANG	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
106	M. Fikrul Hasan Khan	L	TK Husnul Khotimah	BINUANG	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
107	Salsa Maulida	P	TK Harapan	BINUANG	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
108	Siti Aisyah	P	TKN Pembina Binuang	BINUANG	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
109	Rinita	P	TK Assyifa	BINUANG	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
110	M. Rayyan Afandi	L	TK Dharma Wanita Al-Amin	BINUANG	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
111	M. Al Khadavi	L	TK Kartika V-32	BINUANG	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna



NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAMA LEMBAGA	KECAMATAN	JENIS BARANG
112	Muhammad Rahim Maulana	L	Tk Melati	PIANI	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
113	Muhammad sairaji	L	Tk Mutiara Harapan	PIANI	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
114	Danisha fatma sania	P	Tk Mustika	PIANI	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
115	Sartika Dewi	P	TK Mustika	PIANI	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
116	Siti Hadijah	P	TK Melati	PIANI	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
117	Muhammad Azmi	L	Tk Mutiara Harapan	PIANI	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
118	Muhammad Mullkani Arifin	L	TK Mustika	PIANI	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
119	Siti Fatimah	P	Tk Melati	PIANI	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna
120	Lutfi Azizah	P	Tk Mutiara Harapan	PIANI	12 Buku Gambar + 2 Pak Pensil Warna

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin

b. Pendidikan Dasar

Penerima Bantuan Alat Tulis Sekolah Kegiatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Untuk Siswa Kurang Mampu Berprestasi Jenjang SD Tahun 2023 :

TABEL 4.4
DAFTAR SISWA KURANG MAMPU PENERIMA BANTUAN ALAT TULIS SEKOLAH
JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) TAHUN 2023

NO	NAMA SISWA	NIK	ASAL SEKOLAH	KELAS	JENIS KELAMIN		JUMLAH TERIMA
					L	P	
1	MUHAMMAD AMIN	6304051905120001	SDN KUPANG 2	II	1		1 Paket
2	RAHMAH	6305014805120002	SDN KUPANG 2	IV		1	1 Paket
3	MUHAMMAD LUTFI	6305042210110002	SDN RANTAU KANAN 1	V	1		1 Paket
4	MUHAMMAD SAMAN	6305042110130002	SDN RANTAU KIWA 2	II	1		1 Paket
5	RABIATUL ADAWIYAH	6305046003110001	SDN RANGDA MALINGKUNG 1	V		1	1 Paket
6	HIDAYAT	6305040909120002	SDN RANGDA MALINGKUNG 3	IV	1		1 Paket
7	ALFIANOOR	6304152203130002	SDN RANGDA MALINGKUNG 4	IV	1		1 Paket
8	MUHAMMAD ZAINI	6372022001130002	SDN RANGDA MALINGKUNG 5	IV	1		1 Paket
9	M. ABU BAKAR	6305041005120001	SDN RANTAU KIWA 1	IV	1		1 Paket
10	MUHAMMAD KHATIF	6305043105150001	SDN RANTAU KANAN 2	I	1		1 Paket
11	MUHAMMAD AMIN	6303042003110004	SDN RANTAU KANAN 3	IV	1		1 Paket
12	SITI ASMAUL HUSNA	6305035304140004	SDN ANTASARI HILIR	II		1	1 Paket
13	NORHALIMAH ANIS	6305014107140002	SDN ANTASARI	II		1	1 Paket
14	NOOR ASYFFA YUSTINA	6305046904160001	SDN PERINTIS RAYA	I		1	1 Paket
15	M. RIFA'I	6305041007090001	SDN KUPANG 1	IV	1		1 Paket



NO	NAMA SISWA	NIK	ASAL SEKOLAH	KELAS	JENIS KELAMIN		JUMLAH TERIMA
					L	P	
16	M. ALIEF REZKI	6305040504150002	SDN KUPANG 1	II	1		1 Paket
17	M.RIZKY	6303091611120002	SDN BANUA HALAT KANAN	II	1		1 Paket
18	ZULAIKHA	6305043110120001	SDN BANUA HALAT KANAN	IV		1	1 Paket
19	M. ATTAILAH	6305042207150001	SDN BANUA HANYAR HULU	I	1		1 Paket
20	M. SAUFI	6305040609110001	SDN BANUA HANYAR HULU	V	1		1 Paket
21	MUHAMMAD RISALDI	6309022909090002	SD IT AN-NUR	5	1		1 Paket
22	MUHAMMAD SUHRAWARDI	6305031409150003	SDN ANDHIKA	1	1		1 Paket
23	NORSALSA BELLA	6371055708140002	SDN HIYUNG 1	1		1	1 Paket
24	ZAINOR RIDHA	6305031508140002	SDN HIYUNG 2	2	1		1 Paket
25	SITI ZAINAB	6305034504160002	SDN KEPAYANG	1		1	1 Paket
26	AHMAD	6305030810150002	SDN LABUNG 1	1	1		1 Paket
27	AHMAD SYAFI'I	6305031407120001	SDN LABUNG 2	4	1		1 Paket
28	M. RAYYAN	6305031804130000	SDN MANDURIAN	3	1		1 Paket
29	NAILA MUNA	6305035301010001	SDN MANDURIAN HILIR	1		1	1 Paket
30	SITI HADIJAH	6205055301150001	SDN PANDAHAN 1	2		1	1 Paket
31	QURRATUL AIN	6305045711150003	SDN PANDAHAN 2	1		1	1 Paket
32	AHMAD RIYANI	6305031608110001	SDN PANDULANGAN 1	5	1		1 Paket
33	RAMI AZMIA	6305035604150001	SDN PANDULANGAN 2	2		1	1 Paket
34	AHMAD RIZKI REZNANDI	6305032412120001	SDN PEMATANG KARANGAN	4	1		1 Paket
35	AHMAD SAIRY	6305030208110001	SDN PEMATANG KARANGAN HILIR	5	1		1 Paket
36	MUHAMMAD ASRAP	6305030508140001	SDN PEMATANG KARANGAN HULU	1	1		1 Paket
37	ERMA PUTRI	6305035906130001	SDN RAWA MUNING 1	4		1	1 Paket
38	NOR RAHIMAH	6305035010120001	SDN RAWA MUNING 2	4		1	1 Paket
39	MUHAMMAD ZIDAN	6305031509140001	SDN SERAWI	3	1		1 Paket
40	NOVAL	6371042006130002	SDN SUNGAI BAHALANG	4	1		1 Paket
41	SAFA AYRA PUTRI	6305035901150001	SDN TIRIK	2		1	1 Paket
42	NAEMA ALIFA NAUFALYN	6305026110130001	SDN TAMBARANGAN 1	3		1	1 Paket
43	MUHAMMAD RASYID	6305021405150001	SDN TAMBARANGAN 2	1	1		1 Paket
44	M.IMAM NAUFAL	6305020706120001	SDN TAMBARANGAN 3	5	1		1 Paket
45	NURLAILA ALFI SYAHRINI	6305024109120001	SDN TATAKAN 1	4		1	1 Paket
46	M AJIANOR	6310083011110001	SDN TATAKAN 2	4	1		1 Paket
47	RAHMAH	6305025912150001	SDN TATAKAN 3	1		1	1 Paket
48	ZULWAFI	6305022608140000	SDN TIMBAAN 1	1	1		1 Paket
49	M,RIZKI RAMADHAN	6305020805120017	SDN TIMBAAN 2	1	1		1 Paket
50	MUHAMMAD ANSHAR	6305022012130001	SDN RUMINTIN 1	3	1		1 Paket
51	NOR ASYIFA	6305025711150002	SDN RUMINTIN 2	1		1	1 Paket
52	ZAHRA	6305024311110002	SDN RUMINTIN 3	4		1	1 Paket
53	NIHAYATUL AZZAHRA	6305027505150001	SDN SAWANG	1		1	1 Paket



NO	NAMA SISWA	NIK	ASAL SEKOLAH	KELAS	JENIS KELAMIN		JUMLAH TERIMA
					L	P	
54	MARSELA	6357601711290001	SDN SWATO TATAKAN 1	5b		1	1 Paket
55	SITI NURHALIZA	6305025810140001	SDN SWATO TATAKAN 2	2		1	1 Paket
56	MUHAMMAD	6305021408160000	SDN TANDUI 1	1	1		1 Paket
57	SITI MAULIDAH	6305025601150001	SDN TANDUI 2	2		1	1 Paket
58	M.LUPPI RAMADANI	6305021107120002	SDN LAWAHAN 1	4	1		1 Paket
59	APRILIA	6305026204150001	SDN LAWAHAN 2	2		1	1 Paket
60	NOOR AIDA	6305020206130002	SDN LAWAHAN CEMPAKA	2		1	1 Paket
61	MUHAMMAD SEMMAN	6305022909120001	SDN HARAPAN MASA 1	4	1		1 Paket
62	AZIZAH	6307335512110001	SDN HARAPAN MASA 2	1		1	1 Paket
63	MUHAMMAD HARIS	6305073112140001	SDN BAKARANGAN 1	3	1		1 Paket
64	SITI MARDIYANTI	6305074208120001	SDN BAKARANGAN 1	5		1	1 Paket
65	MUHAMMAD WILDAN	6305071708130001	SDN BAKARANGAN 2	2	1		1 Paket
66	ESTIANA NOR HALIDA	6305074111150001	SDN BAKARANGAN 2	1		1	1 Paket
67	NORIZATIL HASANAH	6305076703160002	SDN GADUNG HILIR	1		1	1 Paket
68	MUHAMMAD RAFA	6303020904130002	SDN GADUNG HILIR	2	1		1 Paket
69	MUHAMMAD HAFIZ FADLI	6305071310150001	SDN PAUL	1	1		1 Paket
70	M. SEMAN ALMADANI	6303152801150001	SDN PAUL	2	1		1 Paket
71	PATIMAH	6305076807150000	SDN PARIGI SIMBAR	1		1	1 Paket
72	M. FAHRIZI HABIBI	6305072512130000	SDN PARIGI SIMBAR	3	1		1 Paket
73	MUHAMMAD NAUVAL	6305082906140001	SDN TANGKAWANG	3	1		1 Paket
74	ANGGI NOYA AL HALAJ	6305077001140003	SDN TANGKAWANG	3		1	1 Paket
75	MARIA ULFAH	6305074905120000	SDN WARINGIN DALAM	1		1	1 Paket
76	ABDURAHMAN	6305070712160001	SDN PARIGI KACIL	1	1		1 Paket
77	NOOR KHALIFA SAGIRA	6305075606150001	SDN BUNDUNG 1	2		1	1 Paket
78	M. RISKI	6305070810150001	SDN BUNDUNG 1	1	1		1 Paket
79	AKHMAD NOOR RIZKI	6305072110150001	SDN BUNDUNG 2	1	1		1 Paket
80	AHMAD ZAINI	6305071501130001	SDN BUNDUNG 2	3	1		1 Paket
81	MUHAMMAD RISIZKY AKBAR	6305072711140002	SDN GADUNG KERAMAT	2	1		1 Paket
82	FATHIA NOOR ALISA	6201016502140001	SDN GADUNG KERAMAT	3		1	1 Paket
83	NOR AINA	6305084107100002	SDN MIAWA	3		1	1 Paket
84	LINDA	6305084506120001	SDN MIAWA	3		1	1 Paket
85	NORLAILA	6305084301130001	SDN BATUNG	2		1	1 Paket
86	ARDIANOR	6305080602130001	SDN BATUNG	4	1		1 Paket
87	NURY SAPALIZA	6305084311160001	SDN LALAPIN	1		1	1 Paket
88	RIA	6305084704150001	SDN LALAPIN	2		1	1 Paket
89	LISTI ULITIA	6305084708150001	SDN BALAWAIAN HILIR	3		1	1 Paket
90	MUHAMAD RIZA	6305082008130001	SDN BALAWAIAN HILIR	3	1		1 Paket
91	MAHYODI	6305080105140002	SDN BALAWAIAN		1		1 Paket
92	SRI NOVITA	6305084202150001	SDN BALAWAIAN			1	1 Paket
93	RICO VERAL	6305081212130002	SDN HARAKIT	3	1		1 Paket



NO	NAMA SISWA	NIK	ASAL SEKOLAH	KELAS	JENIS KELAMIN		JUMLAH TERIMA
					L	P	
94	ARGA	6305080502140001	SDN HAKAKIT	2	1		1 Paket
95	JUHAI RI	6305042408130001	SDN BARAMBAN	2	1		1 Paket
96	DWI WAHYUDI	-	SDN BARAMBAN	2	1		1 Paket
97	DOMI	6213056602100000	SDN PIPITAK JAYA 1	5	1		1 Paket
98	DION	6305082108120000	SDN PIPITAK JAYA 1	4	1		1 Paket
99	AHMAD RIFANI	6305082909120001	SDN PIPITAK JAYA 2	4	1		1 Paket
100	MIFTAHUL HUDA	6305084402130001	SDN PIPITAK JAYA 2	4		1	1 Paket
101	NAJWA	6303046604100001	SDN BATU AMPAR	5		1	1 Paket
102	SALMA	6305008500630001	SDN BATU AMPAR	4		1	1 Paket
103	MUHAMMAD LUTFI	-	SDN RANTAU BUJUR 2	1	1		1 Paket
104	M. MIRVA	-	SDN RANTAU BUJUR 2	2	1		1 Paket
105	SYARWANI ABDAN	6305091101140001	SDN KALUMPANG 1	2	1		1 Paket
106	ELMI ARIF	6305091808120001	SDN KALUMPANG 1	3	1		1 Paket
107	MAISYARA SALSABILA	6305095609140001	SDN BUNGUR	2		1	1 Paket
108	AHMAD ANSARI	6305092504140001	SDN HANGUI 1	2	1		1 Paket
109	AHMAD ZAMZAMI	6305091708140001	SDN HANGUI 1	2	1		1 Paket
110	MUHAMMAD ANSARI RAHMAN	6305092308130001	SDN LINUH 2	3	1		1 Paket
111	NURUL UZMA	6305095701130002	SDN LINUH 2	3		1	1 Paket
112	ADE HERMAWAN	-	SDN KALUMPANG 2	4	1		1 Paket
113	MUHAMMAD JALI	1310031710120002	SDN BANUA PADANG	3	1		1 Paket
114	GEORGINO ABRAHAM	6305092505130001	SDN SABAH	3	1		1 Paket
115	ANGGUN SABILA	6305095509120001	SDN SABAH	3		1	1 Paket
116	AINUN	6305095207140001	SDN TIMBUNG	2		1	1 Paket
117	M. MAIDI	6305092105110001	SDN TIMBUNG	2	1		1 Paket
118	SITI ADELIA	6305097005150003	SDN BUNGUR BARU	2		1	1 Paket
119	AKHMAD RIYADI	6305091207110002	SDN BUNGUR BARU	5	1		1 Paket
120	NOR HAYATI	-	SDN PARING GULING	3		1	1 Paket
121	RAHMAH	-	SDN KALUMPANG 3	1		1	1 Paket
122	NUR ALFIAH	-	SDN RANTAU BUJUR 1	4		1	1 Paket
123	NABILA EZZA HERKA PUTRI	6402136312100001	SDN BITAHAN 1	V B		1	1 Paket
124	SYAMSUNI	6306072510110001	SDN BITAHAN 1	V A	1		1 Paket
125	FENDI ALDIAN	6305101608110002	SDN BITAHAN 1	IV A	1		1 Paket
126	SHAFA NURSIDIQA	6305105005140001	SDN BITAHAN 1	II A		1	1 Paket
127	NORHIDAYAH	6305105412150002	SDN BITAHAN 2	I		1	1 Paket
128	MUHAMMAD RIFKI	6305031611140001	SDN BITAHAN 2	II	1		1 Paket
129	TURQI IBRAHIM ALI	6305100305140002	SDN BITAHAN BARU	III	1		1 Paket
130	M.FARIZ NAUFAL	6305100212140001	SDN BITAHAN BARU	II	1		1 Paket
131	AHMAD KASRAN	6305101211150001	SDN BINDERANG	I	1		1 Paket
132	RAIHAN ACHIAR RADITYA	3504010305130002	SDN BINDERANG	III B	1		1 Paket
133	RIFA YASMIN	630510680214000	SDN BINDERANG	III B		1	1 Paket
134	AHMAD ANSARI NURDIN	6306073105120001	SDN BINDERANG	IV A	1		1 Paket



NO	NAMA SISWA	NIK	ASAL SEKOLAH	KELAS	JENIS KELAMIN		JUMLAH TERIMA
					L	P	
135	SAYYIDHATUL LAILY	6305106902160001	SDN LOKPAIKAT 1	I		1	1 Paket
136	PUTRI KASIH	6306055506120001	SDN LOKPAIKAT 1	IV		1	1 Paket
137	ZAHRANA AQILA KANZA	6305104907130001	SDN LOKPAIKAT 3	III		1	1 Paket
138	ANDIKA SAFRUDIN ANWAR	6301050201130001	SDN LOKPAIKAT 3	IV	1		1 Paket
139	RAHMAD DANI	6305102709150001	SDN PUNCAK HARAPAN	I	1		1 Paket
140	SINBIYATUN NAFISAH	3509086408100006	SDN PUNCAK HARAPAN	V		1	1 Paket
141	AHMAD REHAN PERESA	63050617030001	SDN AYUNAN PAPAN	II	1		1 Paket
142	M.LIONARDO	6305101504130001	SDN AYUNAN PAPAN	III	1		1 Paket
143	ZAKIRA BILQIS AZ ZAHRA	3528017108130025	BERINGIN 2	3		1	1 Paket
144	MUHAMMAD ARSYAD	6305052903140002	SUNGAI RUTAS 2	1	1		1 Paket
145	MUZDALIFAH	6305056304130001	BERINGIN B	4		1	1 Paket
146	M.RIZKY MAULANA	6471061806130003	CANDI LARAS	4	1		1 Paket
147	RIZKY RAMADHANI	6306071207140003	MARAMPIAU	1	1		1 Paket
148	MAULIDA ROHMA	6305057001130001	PABAUNGAN HILIR 1	4		1	1 Paket
149	MUHAMMAD IRFANI	6305052504140000	BERINGIN 1	3	1		1 Paket
150	NOR BAITI	6305054406120001	MARAMPIAU HILIR	5		1	1 Paket
151	M.MAULIDIN	6305060701140001	MARGASARI ULU	3	1		1 Paket
152	SYARIFAH SIEWUN ARRUMI	6305055109130001	MARGASARI ULU	3		1	1 Paket
153	AULIA ZAHRA	6305056008130001	SUNGAI RUTAS 1	3		1	1 Paket
154	MUHAMMAD REZKY ANUGRAH	6305050602110002	SUNGAI RUTAS 1	4	1		1 Paket
155	M.RIZKY	6305050801120001	PABAUNGAN HULU	5	1		1 Paket
156	M IQBAL	6303182601120001	PABAUNGAN HULU	4	1		1 Paket
157	MUHAMMAD SYAHID	6305050603150001	BAULIN	1	1		1 Paket
158	MUHAMMAD ADIB	6305053107140001	BAULIN	1	1		1 Paket
159	MUHAMMAD RIZA	6305050106130001	PABAUNGAN PANTAI	4	1		1 Paket
160	NORHANIFAH	6305056804110001	PABAUNGAN PANTAI	5		1	1 Paket
161	MUHAMMAD ANNAS	6305052705110001	PABAUNGAN HILIR 2	5	1		1 Paket
162	MUHAMMAD SIRAJ	6305052204150001	PABAUNGAN HILIR 2	2	1		1 Paket
163	MUHAMMAD AQLI	6305061512130001	SDN BATALAS	2	1		1 Paket
164	AHMAD ABIDIN AL KHALIK	6305062707110001	SDN TELUK HAUR	5	1		1 Paket
165	M.RAHMAN	6308022306120002	SDN SAWAJA	4	1		1 Paket
166	NORALISA	6305060305160001	SDN PARIOK 1	3		1	1 Paket
167	MUHAMMAD AFRIZAL	6305050205110001	SDN MARGASARI ILIR 2	5	1		1 Paket
168	KHALIFAH	6305066605140002	SDN PARIOK 2	1		1	1 Paket
169	SORIANAH	6305064406110001	SDN SUNGAI SALAI HILIR	5		1	1 Paket
170	MUHAMMAD BAKRI	6305062211120002	SDN MARGASARI ILIR 1	4	1		1 Paket
171	AMRULLAH	6305061301130001	SDN RAWANA HILIR	2	1		1 Paket
172	M.RAMADAN	630802207120000	SDN BUAS BUAS HILIR	3	1		1 Paket



NO	NAMA SISWA	NIK	ASAL SEKOLAH	KELAS	JENIS KELAMIN		JUMLAH TERIMA
					L	P	
173	SARIATU	6305064806140001	SDN KALADAN 2	1		1	1 Paket
174	MUHAMMAD FIJAR	6305060503130001	SDN SUNGAI SALAI	3	1		1 Paket
175	NOR AZIZAH	6305066112130001	SDN BUAS BUAS 1	2		1	1 Paket
176	MUHAMMAD HAFIZ	6305062102120001	SDN BUAS BUAS 2	5	1		1 Paket
177	MUHAMMAD NASIR	6305062512120000	SDN KALADAN 1	4	1		1 Paket
178	MUHAMMAD NOVAL MAULANA	6305062004160001	SDN RAWANA HULU	1	1		1 Paket
179	RAHMAN	6305060604110004	SDN SUNGAI PUTTING	4	1		1 Paket
180	SITI ZAHRA	6305065903130001	SDN BUAS BUAS 2	1		1	1 Paket
181	SITI AISYAH	6305065210110001	SDN BATALAS	5		1	1 Paket
182	AHMAD MAULANA IBRAHIM	6305061901160001	SDN MARGASARI ILIR 2	1	1		1 Paket
183	AHMAD RIJALI	6305010610150002	SDN BINUANG 1	1	1		1 Paket
184	MUHAMMAD AKBAR	6305010604120002	SDN BINUANG 2	5	1		1 Paket
185	NORDALIFAH	6305014504130001	SDN BINUANG 3	3		1	1 Paket
186	DHAVIX TOVANNI HERMAWAN	6305011710110001	SDN BINUANG 4	5	1		1 Paket
187	AHMAD ADITYA NOVAL	-	SDN BINUANG 5	2	1		1 Paket
188	ARKAN ATAYA RAMADHAN	6305011007140001	SDN BINUANG 6	2	1		1 Paket
189	MUHAMMAD ASQALANI	6305010707110001	SDN BINUANG 7	5	1		1 Paket
190	NORLAILA	6305014406130003	SDN BINUANG 8	1		1	1 Paket
191	SITI ROHANI	6305015305110001	SDN BINUANG 9	4		1	1 Paket
192	MUHAMMAD HAPIS	6305013003110002	SDN BINUANG 10	4	1		1 Paket
193	MUHAMMAD RIZKI ADITYA	6305012203130002	SDN TUNGKAP 1	1	1		1 Paket
194	M. ARBAIN	6305012008130002	SDN TUNGKAP 2	3	1		1 Paket
195	MOCH. ADITYA ZAINI ROZY	6305011801100001	SDN A.YANI PURA 1	5	1		1 Paket
196	M. ZULFA INSYAR	6305010812140001	SDN A.YANI PURA 2	2	1		1 Paket
197	RATU AULIA MAYLITHA	3275095605120002	SDN PUALAM SARI 1	4		1	1 Paket
198	RATU PRATAMA NINGSIH	6308066202150003	SDN PUALAM SARI 2	2		1	1 Paket
199	AHMAD SAPUTRA	6305012907120002	SDN PUALAM SARI 3	4	1		1 Paket
200	AKHMAD MUAMAR	6305011307110001	SDN PULAU PINANG 1	4	1		1 Paket
201	MUHAMMAD ARJUNA	6305012910150002	SDN PULAU PINANG 2	1	1		1 Paket
202	SITI RUSDIANA	630501420150001	SDN PULAU PINANG UTARA	1		1	1 Paket
203	JUMALI	6305011107120001	SDN GUNUNG BATU	4	1		1 Paket
204	ESTA AGORA	1406041407100023	SDN PADANG SARI	1	1		1 Paket
205	MUHAMMAD BAIHAQI	6305110210150001	SDN HATUNGUN 2	I	1		1 Paket
206	WARHAMNA WAHDAH	6305026104150001	SDN HATUNGUN 2	II		1	1 Paket
207	SA'DIAH	6305116909120001	SDN TARUNGIN 1	III		1	1 Paket
208	NOR HANIFAH	6305124912120001	SDN TARUNGIN 1	III		1	1 Paket
209	FATIH MUSARI RASID	6305110101160002	SDN TARUNGIN 2	I	1		1 Paket
210	ANISA	3509125506130002	SDN TARUNGIN 2	IV		1	1 Paket
211	DHANI	6305112406150001	SDN BATU HAPU 1	I	1		1 Paket



NO	NAMA SISWA	NIK	ASAL SEKOLAH	KELAS	JENIS KELAMIN		JUMLAH TERIMA
					L	P	
212	LUTFI TAUFIKURRAHMAN	6305112608140001	SDN BATU HAPU 1	II	1		1 Paket
213	ADDIFA ZWENA FATHIA	6305116704120002	SDN BATU HAPU 2	V		1	1 Paket
214	RAUDAHTUL JANNAH	6305115511110001	SDN BATU HAPU 2	V		1	1 Paket
215	JUMIATI	6305125411120001	SDN BAGAK	I		1	1 Paket
216	SETIWATI	6305116210100001	SDN BAGAK	II		1	1 Paket
217	RAMADHANI	6305111308120000	SDN ASAM RANDAH	IV	1		1 Paket
218	MUHAMMAD HAFIZ	6305120210140000	SDN ASAM RANDAH	II	1		1 Paket
219	SODIKIN	-	SDN BURAKAI	II	1		1 Paket
220	FAUZI RAHMAN	-	SDN BURAKAI	II	1		1 Paket
221	WULAN	6305115612130001	SDN MATANG BATAS	III		1	1 Paket
222	MUHAMMAD ALFI	6305112310120001	SDN MATANG BATAS	III	1		1 Paket
223	CINTA SABILA	6305114102120001	SDN KEMBANG KUNING	V		1	1 Paket
224	AFGAN AKBAR	6303160607140001	SDN KEMBANG KUNING	II	1		1 Paket
225	KHOIRUN NISSA	6305125810110001	SDN SALAM BABARIS 1	3		1	1 Paket
226	MAULIDA AZZAHRA	6305123008110001	SDN SALAM BABARIS 1	4		1	1 Paket
227	M. RAMADHANI	63051262111 0002	SDN SALAM BABARIS 2	5	1		1 Paket
228	MIFTAKHULUDDIN NOFAL PRATAMA	6305125711150001	SDN SALAM BABARIS 2	5	1		1 Paket
229	NORMALA	6304153112130000	SDN SALAM BABARIS 3	2		1	1 Paket
230	ERLIANA JASMIN	6351407630910004	SDN SALAM BABARIS 4	3		1	1 Paket
231	NABILA	6305122504150001	SDN SALAM BABARIS 4	2		1	1 Paket
232	AHMAD HAFIDZ ASRORUL HAQ	6305124301150001	SDN PANTAI CABE	1	1		1 Paket
233	MAULIDA NUR RAHMAH	6305124804150000	SDN PANTAI CABE	2		1	1 Paket
234	ALIYA ZAHRA	6305124205140001	SDN SWATO 1	1		1	1 Paket
235	ARZAQINA RAHMAH	6305120911100001	SDN SWATO 1	2		1	1 Paket
236	AHMAD FAHMI ARDAN	6305126707120001	SDN SWATO 2	5	1		1 Paket
237	NURHANIFAH RAMADANI	6305125406140001	SDN SWATO 2	4		1	1 Paket
238	ZIDNA ILMA AMALIA	6305121612150000	SDN SWATO 3	2		1	1 Paket
239	M. PRASETYO	6305120912120000	SDN SWATO BARU	1	1		1 Paket
240	RIKY ARISANDI	6305125108120001	SDN SWATO BARU	4	1		1 Paket
241	NIHAYATUR ROHMAH	6305125204130000	SDN KEMBANG HABANG 1	4		1	1 Paket
242	ARINKA ALYATUS HUMAIRA	6305122908110001	SDN KEMBANG HABANG 1	4		1	1 Paket
243	ARI AGUSETIAWAN	6305120907130001	SDN KEMBANG HABANG 2	5	1		1 Paket
244	AHMAD HAFIZH SYAHBANA	6305022906140001	SDN KEMBANG HABANG 2	3	1		1 Paket
245	MUHAMMAD LUTHFI	6305125610100001	SDN KEMBANG HABANG 3	3	1		1 Paket
246	SITI RAHAYU	6305125610100001	SDN KEMBANG HABANG 3	6		1	1 Paket
	J U M L A H				142	104	246 Paket

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin



Penerima Bantuan Alat Tulis Sekolah Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Untuk Siswa Kurang Mampu Berprestasi Jenjang SMP Tahun 2023 :

TABEL 4.5
DAFTAR SISWA KURANG MAMPU BERPRESTASI
PENERIMA ALAT TULIS SEKOLAH
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TAHUN 2023

No	Nama Siswa	Asal sekolah	Kelas	Yang diterima		
				Buku	Pensil	Penghapus
1	AULIA ZAHRA	SMPN 1 Rantau	VII B	1	1	1
2	M.SULTON MAULANA	SMPN 1 Rantau	VII B	1	1	1
3	JAHNATUL MA'WA	SMPN 1 Rantau	VII B	1	1	1
4	FATIMAH AZAHRA	SMPN 1 Rantau	VII C	1	1	1
5	HABIBAH NUR RAHMA	SMPN 1 Rantau	VII C	1	1	1
6	KIKIT PUSPITA RINI	SMPN 1 Rantau	VII C	1	1	1
7	M ALI	SMPN 1 Rantau	VII C	1	1	1
8	ADZAM ABDILAH	SMPN 1 Rantau	VII D	1	1	1
9	PUTRI NADYA	SMPN 1 Rantau	VII D	1	1	1
10	FATIMAH AZAHRA	SMPN 1 Rantau	VII D	1	1	1
11	M EFENDI	SMPN 1 Rantau	VII D	1	1	1
12	M HAFIZ ANSARI	SMPN 1 Rantau	VII E	1	1	1
13	FAHMI	SMPN 1 Rantau	VII E	1	1	1
14	NORHANANI	SMPN 1 Rantau	VII E	1	1	1
15	OKTAVIA SERLIANA	SMPN 1 Rantau	VII E	1	1	1
16	HADI RAHMAN	SMPN 1 Rantau	VIII A	1	1	1
17	M RAYHAN	SMPN 1 Rantau	VIII A	1	1	1
18	ROSIDIN	SMPN 1 Rantau	VIII A	1	1	1
19	HADI RAHMAN	SMPN 1 Rantau	VIII B	1	1	1
20	M MASRIANSYAH	SMPN 1 Rantau	VIII B	1	1	1
21	SELVIA HADIJA	SMPN 1 Rantau	VIII B	1	1	1
22	M ZAINI	SMPN 1 Rantau	VIII C	1	1	1
23	M ADITYA	SMPN 1 Rantau	VIII C	1	1	1
24	KHUMAIRA A.H	SMPN 1 Rantau	VIII C	1	1	1
25	M MAULIDI FAHMI	SMPN 1 Rantau	VIII C	1	1	1
26	SABRINA NAURA	SMPN 1 Rantau	VIII D	1	1	1
27	JULIA N.S	SMPN 1 Rantau	VIII D	1	1	1
28	NUR ISMA GLADYS	SMPN 1 Rantau	VIII D	1	1	1
29	SHELA AGUSTINA	SMPN 1 Rantau	VIII D	1	1	1
30	NUR IZATIL HIKMAH	SMPN 1 Rantau	VIII D	1	1	1
31	Andhika Yudhistira	SMPN 2 Rantau	VII A	1	1	1
32	M.Ridho	SMPN 2 Rantau	VII A	1	1	1
33	M.Reyhan Saputra	SMPN 2 Rantau	VII A	1	1	1



No	Nama Siswa	Asal sekolah	Kelas	Yang diterima		
				Buku	Pensil	Penghapus
34	Ahmad Kifli	SMPN 2 Rantau	VII B	1	1	1
35	Sabrina Maulida	SMPN 2 Rantau	VII B	1	1	1
36	Zieah Wendia Sari	SMPN 2 Rantau	VII B	1	1	1
37	Abdul ghani	SMPN 2 Rantau	VII C	1	1	1
38	Raihan	SMPN 2 Rantau	VII C	1	1	1
39	Muhammad Riduan	SMPN 2 Rantau	VII C	1	1	1
40	Akhmad Andriansyah	SMPN 2 Rantau	VII D	1	1	1
41	M. Wildan	SMPN 2 Rantau	VII D	1	1	1
42	M. Iqbal fadillah	SMPN 2 Rantau	VII D	1	1	1
43	Noor Asyla Alifah	SMPN 2 Rantau	VIII A	1	1	1
44	Siti Amelia	SMPN 2 Rantau	VIII A	1	1	1
45	Nifa	SMPN 2 Rantau	VIII B	1	1	1
46	Muhammad Rifqi	SMPN 2 Rantau	VIII B	1	1	1
47	Khadi Hanif	SMPN 2 Rantau	VIII C	1	1	1
48	Muhammad Fadlan	SMPN 2 Rantau	VIII C	1	1	1
49	M Aqri	SMPN 2 Rantau	VIII D	1	1	1
50	Dennys F.	SMPN 2 Rantau	VIII D	1	1	1
51	Muhammad Rafe	SMPN 1 Tapin Tengah	VII A	1	1	1
52	Yadi	SMPN 1 Tapin Tengah	VII A	1	1	1
53	Sarifah	SMPN 1 Tapin Tengah	VII A	1	1	1
54	Salsabella	SMPN 1 Tapin Tengah	VII B	1	1	1
55	Muhamad Firman	SMPN 1 Tapin Tengah	VII B	1	1	1
56	M. Musyaffha R.	SMPN 1 Tapin Tengah	VII B	1	1	1
57	M. Amrullah	SMPN 1 Tapin Tengah	VII C	1	1	1
58	Muhammad Fadillah	SMPN 1 Tapin Tengah	VII C	1	1	1
59	Rusma Yanti	SMPN 1 Tapin Tengah	VII C	1	1	1
60	Siti Humaira	SMPN 1 Tapin Tengah	VIII A	1	1	1
61	Abdul Mannan	SMPN 1 Tapin Tengah	VIII A	1	1	1
62	Nur Azizah	SMPN 1 Tapin Tengah	VIII B	1	1	1
63	Siti Nor Haipa	SMPN 1 Tapin Tengah	VIII B	1	1	1
64	Ari Angra	SMPN 1 Tapin Tengah	VIII B	1	1	1
65	M. Ali Junaidi	SMPN 1 Tapin Tengah	VIII C	1	1	1
66	Hayatun Nafisah	SMPN 1 Tapin Tengah	VIII C	1	1	1
67	Sadah	SMPN 1 Tapin Tengah	IX A	1	1	1
68	Noorhalisah	SMPN 1 Tapin Tengah	IX A	1	1	1
69	Siti Noor Hasanah	SMPN 1 Tapin Tengah	IX B	1	1	1
70	Hannan Zaina	SMPN 1 Tapin Tengah	IX B	1	1	1
71	AHMAD HUSAINI	SMPN 2 Tapin Tengah	VII A	1	1	1
72	M. MAULIDI RIZKY	SMPN 2 Tapin Tengah	VII A	1	1	1
73	SITI HADIJAH	SMPN 2 Tapin Tengah	VII A	1	1	1



No	Nama Siswa	Asal sekolah	Kelas	Yang diterima		
				Buku	Pensil	Penghapus
74	NOR HAFIZAH	SMPN 2 Tapin Tengah	VII A	1	1	1
75	NOR HALISA	SMPN 2 Tapin Tengah	VII B	1	1	1
76	SITI KHADIJAH A	SMPN 2 Tapin Tengah	VII B	1	1	1
77	M. UMAR HAMDAN	SMPN 2 Tapin Tengah	VII B	1	1	1
78	M. ABDUL GANI	SMPN 2 Tapin Tengah	VII B	1	1	1
79	AHMAD RIFAI'I	SMPN 2 Tapin Tengah	VII B	1	1	1
80	RAHMAD HIDAYAT	SMPN 2 Tapin Tengah	VII B	1	1	1
81	USWATUN H.	SMPN 2 Tapin Tengah	VII C	1	1	1
82	ZASTIKA PUTRI	SMPN 2 Tapin Tengah	VII C	1	1	1
83	M. REZKY R.	SMPN 2 Tapin Tengah	VII C	1	1	1
84	NOR SAIDAH	SMPN 2 Tapin Tengah	VII C	1	1	1
85	NAJWA	SMPN 2 Tapin Tengah	VII C	1	1	1
86	M. RIFQI ADITYA	SMPN 2 Tapin Tengah	VII C	1	1	1
87	IKHWANUL YUB'AFI	SMPN 2 Tapin Tengah	VIII B	1	1	1
88	M. NORKHALIS	SMPN 2 Tapin Tengah	VIII B	1	1	1
89	M. REZKY	SMPN 2 Tapin Tengah	VIII A	1	1	1
90	SITI ZAHRAH	SMPN 2 Tapin Tengah	VIII A	1	1	1
91	Noviana H.N	SMPN 1 Bakarangan	VII A	1	1	1
92	Abdul Majid	SMPN 1 Bakarangan	VII A	1	1	1
93	Akhmad Saipul M.	SMPN 1 Bakarangan	VII A	1	1	1
94	Hasby Yazida ma'rifa	SMPN 1 Bakarangan	VII A	1	1	1
95	Siti fatimah	SMPN 1 Bakarangan	VII B	1	1	1
96	Norsaidah	SMPN 1 Bakarangan	VII B	1	1	1
97	Normakiah	SMPN 1 Bakarangan	VII B	1	1	1
98	Novy aulia	SMPN 1 Bakarangan	VII B	1	1	1
99	M. Riski	SMPN 1 Bakarangan	VII B	1	1	1
100	M. Aini	SMPN 1 Bakarangan	VII B	1	1	1
101	Haibatun Nahara H	SMPN 1 Bakarangan	VII C	1	1	1
102	Nor sipa Ramadani	SMPN 1 Bakarangan	VII C	1	1	1
103	Pitriya Rahmah	SMPN 1 Bakarangan	VII C	1	1	1
104	Siti fatimah	SMPN 1 Bakarangan	VII C	1	1	1
105	Siti Mahfujah	SMPN 1 Bakarangan	VII C	1	1	1
106	Hana	SMPN 1 Bakarangan	VII C	1	1	1
107	Norma	SMPN 1 Bakarangan	VIII B	1	1	1
108	Nor Iklima W	SMPN 1 Bakarangan	VIII B	1	1	1
109	M. Nor Alif	SMPN 1 Bakarangan	VIII A	1	1	1
110	Akhmad Zainie	SMPN 1 Bakarangan	VIII A	1	1	1
111	Ahmad Mudjahid	SMPN 2 Bakarangan	7	1	1	1
112	Mutia Rahma	SMPN 2 Bakarangan	7	1	1	1
113	Muhammad Ikkal	SMPN 2 Bakarangan	7	1	1	1



No	Nama Siswa	Asal sekolah	Kelas	Yang diterima		
				Buku	Pensil	Penghapus
114	Muhammad Samman	SMPN 2 Bakarangan	7	1	1	1
115	Nor Annisa	SMPN 2 Bakarangan	7	1	1	1
116	A. Khairil Mustafa	SMPN 2 Bakarangan	8	1	1	1
117	Ahmad Ariyadi	SMPN 2 Bakarangan	8	1	1	1
118	Muhammad Amin	SMPN 2 Bakarangan	8	1	1	1
119	Muhammad Rasyid	SMPN 2 Bakarangan	8	1	1	1
120	M. Hafiz Ridha	SMPN 2 Bakarangan	8	1	1	1
121	Rahmani	SMPN 1 Candi Laras Selatan	7	1	1	1
122	Rizky Hapi	SMPN 1 Candi Laras Selatan	7	1	1	1
123	Muhammad Ali	SMPN 1 Candi Laras Selatan	7	1	1	1
124	Nor Akhyadi	SMPN 1 Candi Laras Selatan	7	1	1	1
125	Aisyah	SMPN 1 Candi Laras Selatan	7	1	1	1
126	Muhammad Yusup	SMPN 1 Candi Laras Selatan	7	1	1	1
127	Arrayan	SMPN 1 Candi Laras Selatan	7	1	1	1
128	Nor Hapizah	SMPN 1 Candi Laras Selatan	7	1	1	1
129	Liana	SMPN 1 Candi Laras Selatan	7	1	1	1
130	Hapizah	SMPN 1 Candi Laras Selatan	7	1	1	1
131	Muhammad Rizky	SMPN 1 Candi Laras Selatan	8	1	1	1
132	Muhammad Kazwani	SMPN 1 Candi Laras Selatan	8	1	1	1
133	Muhammad Firdaus	SMPN 1 Candi Laras Selatan	8	1	1	1
134	Misbah	SMPN 1 Candi Laras Selatan	8	1	1	1
135	Pitriatun	SMPN 1 Candi Laras Selatan	8	1	1	1
136	Yusuf Khair	SMPN 1 Candi Laras Selatan	8	1	1	1
137	Muhammad Ikram	SMPN 1 Candi Laras Selatan	8	1	1	1
138	Saskia Ustabiyah	SMPN 1 Candi Laras Selatan	8	1	1	1
139	Siti Ajizah	SMPN 1 Candi Laras Selatan	8	1	1	1
140	Siti Aulia	SMPN 1 Candi Laras Selatan	8	1	1	1
141	ATIATUL MUNA	SMPN 2 Candi Laras Selatan	VII	1	1	1
142	MUHAMMAD ABRAR	SMPN 2 Candi Laras Selatan	IX	1	1	1
143	SITI NURHALIZA	SMPN 2 Candi Laras Selatan	VII	1	1	1
144	M.BAQIR MUSTAPA	SMPN 2 Candi Laras Selatan	VII	1	1	1
145	AURIL SALSABILA	SMPN 2 Candi Laras Selatan	VII	1	1	1
146	MUHAMMAD HASAN	SMPN 2 Candi Laras Selatan	VIII	1	1	1
147	MUHAMMAD RIPAI	SMPN 2 Candi Laras Selatan	VIII	1	1	1
148	IBRAHIM KHALID	SMPN 2 Candi Laras Selatan	VIII	1	1	1
149	MUHAMMAD FIRDI	SMPN 2 Candi Laras Selatan	VIII	1	1	1
150	ARBAISAL	SMPN 2 Candi Laras Selatan	VIII	1	1	1
151	Aulia	SMPN 1 Candi Laras Utara	VIII	1	1	1
152	Fatimah Zahrah	SMPN 1 Candi Laras Utara	VIII	1	1	1
153	Hakimah Mawadah	SMPN 1 Candi Laras Utara	VIII	1	1	1



No	Nama Siswa	Asal sekolah	Kelas	Yang diterima		
				Buku	Pensil	Penghapus
154	Maulida	SMPN 1 Candi Laras Utara	VIII	1	1	1
155	Maulina	SMPN 1 Candi Laras Utara	VIII	1	1	1
156	Muhammmad Ramadhan	SMPN 1 Candi Laras Utara	VIII	1	1	1
157	Muhamad Rasyid	SMPN 1 Candi Laras Utara	VIII	1	1	1
158	Muhammad Rifani	SMPN 1 Candi Laras Utara	VIII	1	1	1
159	Nor Halimah	SMPN 1 Candi Laras Utara	VIII	1	1	1
160	Siti Fatimah	SMPN 1 Candi Laras Utara	VIII	1	1	1
161	ALISA	SMPN 2 Candi Laras Utara	VII	1	1	1
162	MONA SYIFA	SMPN 2 Candi Laras Utara	VII	1	1	1
163	AKHMAD NOOR	SMPN 2 Candi Laras Utara	VII	1	1	1
164	MAKIYAH	SMPN 2 Candi Laras Utara	VIII	1	1	1
165	M. BAHRUL I.	SMPN 2 Candi Laras Utara	VIII	1	1	1
166	YAHYA	SMPN 2 Candi Laras Utara	VIII	1	1	1
167	AHMAD WILDAN	SMPN 2 Candi Laras Utara	VIII	1	1	1
168	FADILLAH	SMPN 2 Candi Laras Utara	VIII	1	1	1
169	MAWADDAH	SMPN 2 Candi Laras Utara	VIII	1	1	1
170	SITI MUTIAH	SMPN 2 Candi Laras Utara	VIII	1	1	1
171	Rahmah	SMPN 3 Candi Laras Utara	VII	1	1	1
172	Ratmi	SMPN 3 Candi Laras Utara	VII	1	1	1
173	Siti Marsila	SMPN 3 Candi Laras Utara	VII	1	1	1
174	Syahidin Noor	SMPN 3 Candi Laras Utara	VII	1	1	1
175	Abdul Gani	SMPN 3 Candi Laras Utara	VIII	1	1	1
176	Jumratul Adawiyah	SMPN 3 Candi Laras Utara	VIII	1	1	1
177	M. Rudiannor	SMPN 3 Candi Laras Utara	VIII	1	1	1
178	Murni	SMPN 3 Candi Laras Utara	VII	1	1	1
179	Noor Latifah	SMPN 3 Candi Laras Utara	VIII	1	1	1
180	Siti Hadijah	SMPN 3 Candi Laras Utara	VIII	1	1	1
181	Nabella Salwa	SMPN 1 Tapin Selatan	VII A	1	1	1
182	Muhammad Nazmi	SMPN 1 Tapin Selatan	VII A	1	1	1
183	Leyla Setyawati	SMPN 1 Tapin Selatan	VII A	1	1	1
184	Nor Amira Dwi P.	SMPN 1 Tapin Selatan	VII A	1	1	1
185	M. Ihsan Raihan	SMPN 1 Tapin Selatan	VII A	1	1	1
186	Yolanda Tendean	SMPN 1 Tapin Selatan	VII B	1	1	1
187	Diska	SMPN 1 Tapin Selatan	VII B	1	1	1
188	Jumainah	SMPN 1 Tapin Selatan	VII B	1	1	1
189	A. Rifa'i	SMPN 1 Tapin Selatan	VII C	1	1	1
190	Putri Jameela	SMPN 1 Tapin Selatan	VII C	1	1	1
191	M. Noval Riandi	SMPN 1 Tapin Selatan	VII C	1	1	1
192	Aminah	SMPN 1 Tapin Selatan	VII C	1	1	1



No	Nama Siswa	Asal sekolah	Kelas	Yang diterima		
				Buku	Pensil	Penghapus
193	Siti Inayah	SMPN 1 Tapin Selatan	VIII A	1	1	1
194	M. Tabrani	SMPN 1 Tapin Selatan	VIII A	1	1	1
195	Rusaria Ananda Putri	SMPN 1 Tapin Selatan	VIII A	1	1	1
196	Khairudin Fadillah	SMPN 1 Tapin Selatan	VIII A	1	1	1
197	Syifa Maulida	SMPN 1 Tapin Selatan	VIII A	1	1	1
198	Halimatus Sa'diah	SMPN 1 Tapin Selatan	VIII B	1	1	1
199	Ahmad Aditia	SMPN 1 Tapin Selatan	VIII B	1	1	1
200	Riva Liyana	SMPN 1 Tapin Selatan	VIII B	1	1	1
201	M. Fadil Afian	SMPN 1 Salam Babaris	7A	1	1	1
202	M. Reja Ramadhan	SMPN 1 Salam Babaris	7A	1	1	1
203	Agus Ardiansyah	SMPN 1 Salam Babaris	7B	1	1	1
204	Nordiansyah	SMPN 1 Salam Babaris	7B	1	1	1
205	Ifander Almadi	SMPN 1 Salam Babaris	7C	1	1	1
206	M. Abdul Rifansyah	SMPN 1 Salam Babaris	8A	1	1	1
207	Halimatus Sa'diah	SMPN 1 Salam Babaris	8A	1	1	1
208	M. Surya Siddiq	SMPN 1 Salam Babaris	8B	1	1	1
209	M. Akbar Widiyanto	SMPN 1 Salam Babaris	8C	1	1	1
210	M. Ramadhan	SMPN 1 Salam Babaris	7C	1	1	1
211	Aira Ramadhani	SMPN 1 Salam Babaris	7A	1	1	1
212	M. Mahfudz Amin	SMPN 1 Salam Babaris	7B	1	1	1
213	Dinda Kurnia Ramadhani	SMPN 1 Salam Babaris	7C	1	1	1
214	Layna Evita Andiana	SMPN 1 Salam Babaris	8A	1	1	1
215	Muhammad Fikriyani	SMPN 1 Salam Babaris	8B	1	1	1
216	Laila Romadona Hidatayul	SMPN 1 Salam Babaris	8C	1	1	1
217	Lutfiah Andani Nisa	SMPN 1 Salam Babaris	7B	1	1	1
218	M. Nabil Firdaus	SMPN 1 Salam Babaris	8A	1	1	1
219	Fatimah Tuljahra	SMPN 1 Salam Babaris	7A	1	1	1
220	Ahmad Fajeri	SMPN 1 Salam Babaris	8C	1	1	1
221	FIRMAN MAULIDI SIDIQ	SMPN 1 Binuang	VII	1	1	1
222	HERIANSYAH	SMPN 1 Binuang	VII	1	1	1
223	JONI IMANUEL	SMPN 1 Binuang	VII	1	1	1
224	M. ADITYA BUSIRI	SMPN 1 Binuang	VII	1	1	1
225	TAMA NURLIANA	SMPN 1 Binuang	VII	1	1	1
226	CUCU SITI ANDRIANI	SMPN 1 Binuang	VII	1	1	1
227	SITI HALIDAH ATAYA	SMPN 1 Binuang	VII	1	1	1
228	AHMAD FEBRIANTO	SMPN 1 Binuang	VIII	1	1	1
229	M. FADHIL ARDANI	SMPN 1 Binuang	VIII	1	1	1
230	FELICHA OKTA MARIA	SMPN 1 Binuang	VIII	1	1	1
231	KARINA CLAUDIA P.	SMPN 1 Binuang	VIII	1	1	1



No	Nama Siswa	Asal sekolah	Kelas	Yang diterima		
				Buku	Pensil	Penghapus
232	M. RIDHO N.M	SMPN 1 Binguang	VIII	1	1	1
233	M. FIRDIYANOR	SMPN 1 Binguang	VIII	1	1	1
234	RATU ABRAR NF	SMPN 1 Binguang	VIII	1	1	1
235	MUHAMMAD FADIL	SMPN 1 Binguang	VIII	1	1	1
236	SITI MAISARAH	SMPN 1 Binguang	VIII	1	1	1
237	AMAT KURNIAWAN	SMPN 1 Binguang	IX	1	1	1
238	ALFARO ARISTA K.	SMPN 1 Binguang	IX	1	1	1
239	ROSIANA	SMPN 1 Binguang	IX	1	1	1
240	SITI NURAUHASARI	SMPN 1 Binguang	IX	1	1	1
241	AMELIA ANGGRAINI	SMPN 1 Binguang	IX	1	1	1
242	ACCAAYA BP	SMPN 1 Binguang	IX	1	1	1
243	MUHAMMAD HARIS	SMPN 1 Binguang	IX	1	1	1
244	M. AMIRUDIN	SMPN 1 Binguang	IX	1	1	1
245	M. ILHAM PUTRA RA.	SMPN 1 Binguang	IX	1	1	1
246	NADIA	SMPN 1 Binguang	IX	1	1	1
247	RISA	SMPN 1 Binguang	IX	1	1	1
248	AHMAD RIANDI	SMPN 1 Binguang	IX	1	1	1
249	HESTERFILE RP	SMPN 1 Binguang	IX	1	1	1
250	SUDARMANTO S.	SMPN 1 Binguang	IX	1	1	1
251	Ahmad Hafi	SMP Negeri 2 Binguang	7	1	1	1
252	Aisyah Rahma	SMP Negeri 2 Binguang	7	1	1	1
253	Aulia Zaky Wibowo	SMP Negeri 2 Binguang	7	1	1	1
254	Dina Fitriani	SMP Negeri 2 Binguang	7	1	1	1
255	Fanny Agustina	SMP Negeri 2 Binguang	7	1	1	1
256	Irma Wati	SMP Negeri 2 Binguang	7	1	1	1
257	Lisda Amilia	SMP Negeri 2 Binguang	7	1	1	1
258	M. Jho'is Pratama	SMP Negeri 2 Binguang	7	1	1	1
259	Muhammad Jaini	SMP Negeri 2 Binguang	7	1	1	1
260	M. Muhidin	SMP Negeri 2 Binguang	7	1	1	1
261	M. Nur Kholis	SMP Negeri 2 Binguang	7	1	1	1
262	M.Revi Alfianor	SMP Negeri 2 Binguang	7	1	1	1
263	Muhammad Riski	SMP Negeri 2 Binguang	7	1	1	1
264	Niken Larasati	SMP Negeri 2 Binguang	7	1	1	1
265	Ririn Maulida	SMP Negeri 2 Binguang	7	1	1	1
266	Siti Patimah	SMP Negeri 2 Binguang	7	1	1	1
267	Jainah	SMP Negeri 2 Binguang	8	1	1	1
268	Liana Octavia	SMP Negeri 2 Binguang	8	1	1	1
269	Muhammad Hafiz	SMP Negeri 2 Binguang	8	1	1	1
270	Rahmaniah	SMP Negeri 2 Binguang	8	1	1	1
271	Intan Dini Novianti	SMPN 1 Hatungun	VII A	1	1	1



No	Nama Siswa	Asal sekolah	Kelas	Yang diterima		
				Buku	Pensil	Penghapus
272	Khodijah	SMPN 1 Hatungun	VII A	1	1	1
273	Dewi Saroh	SMPN 1 Hatungun	VII B	1	1	1
274	M. Bagas B.	SMPN 1 Hatungun	VII B	1	1	1
275	Silfiyah	SMPN 1 Hatungun	VII B	1	1	1
276	A. Indra Maulana	SMPN 1 Hatungun	VII A	1	1	1
277	Ayu Wulandari	SMPN 1 Hatungun	VIII A	1	1	1
278	Melati	SMPN 1 Hatungun	VIII B	1	1	1
279	Misfiyah	SMPN 1 Hatungun	VIII B	1	1	1
280	Rustam	SMPN 1 Hatungun	VIII B	1	1	1
281	M. Naufal Akbar	SMPN 1 Lokpaikat	VII A	1	1	1
282	Jauharatul Lathifah	SMPN 1 Lokpaikat	VII A	1	1	1
283	Maulida Rahmah	SMPN 1 Lokpaikat	VII A	1	1	1
284	M. Yazid Zaini	SMPN 1 Lokpaikat	VII A	1	1	1
285	Salsabila	SMPN 1 Lokpaikat	VII A	1	1	1
286	M. Zaifani	SMPN 1 Lokpaikat	VII B	1	1	1
287	M. Fikri	SMPN 1 Lokpaikat	VII B	1	1	1
288	Noor Annisa Ws	SMPN 1 Lokpaikat	VII B	1	1	1
289	Tri Indah Novitasari	SMPN 1 Lokpaikat	VII B	1	1	1
290	Abdul Muid	SMPN 1 Lokpaikat	VIII A	1	1	1
291	Rahmat Cahaya W.	SMPN 1 Lokpaikat	VIII A	1	1	1
292	Noja Rafifah	SMPN 1 Lokpaikat	VIII A	1	1	1
293	Raisa Rahmah	SMPN 1 Lokpaikat	VIII A	1	1	1
294	M. Sarmani Abdan	SMPN 1 Lokpaikat	VIII A	1	1	1
295	Andika Pratama	SMPN 1 Lokpaikat	VIII A	1	1	1
296	M. Lutfi Raihan	SMPN 1 Lokpaikat	VIII B	1	1	1
297	M. Yasha S.	SMPN 1 Lokpaikat	VIII B	1	1	1
298	Riana Rahmawati	SMPN 1 Lokpaikat	VIII B	1	1	1
299	Ubaydillah	SMPN 1 Lokpaikat	VIII B	1	1	1
300	M. Luthfi Ch	SMPN 1 Lokpaikat	VIII B	1	1	1
301	ALFINA ROSALINA	SMPN 2 Piani	7 A	1	1	1
302	RISKA AULIA	SMPN 2 Piani	7 A	1	1	1
303	INDRA	SMPN 2 Piani	7 A	1	1	1
304	MUSLIMIN AKBAR	SMPN 2 Piani	7 B	1	1	1
305	ULIVIA	SMPN 2 Piani	7 B	1	1	1
306	ZAHRA	SMPN 2 Piani	7 B	1	1	1
307	M. OKTAVIA Mp	SMPN 2 Piani	7 B	1	1	1
308	LAILA ANGGRAINI	SMPN 2 Piani	8	1	1	1
309	RINO	SMPN 2 Piani	8	1	1	1
310	TIARA NANDA	SMPN 2 Piani	8	1	1	1
311	EVA HAFIZAH	SMPN 2 Bungur	VII	1	1	1



No	Nama Siswa	Asal sekolah	Kelas	Yang diterima		
				Buku	Pensil	Penghapus
312	MUHAMMAD FAUZI	SMPN 2 Bungur	VII	1	1	1
313	MUHAMMAD MADANI	SMPN 2 Bungur	VII	1	1	1
314	MUHAMMAD ZAKI	SMPN 2 Bungur	VII	1	1	1
315	MUHAMMAD RIZKY M.	SMPN 2 Bungur	VII	1	1	1
316	AULIA AHRYAN SAIDI	SMPN 2 Bungur	VIII	1	1	1
317	M.MULHAM	SMPN 2 Bungur	VIII	1	1	1
318	SITI ULPAH M.	SMPN 2 Bungur	VIII	1	1	1
319	YULIANDA	SMPN 2 Bungur	VIII	1	1	1
320	SITI MARIAM	SMPN 2 Bungur	VIII	1	1	1
321	Taufiqur Rahmat	SMP Islam Darul Muhibbien	VII A	1	1	1
322	Muhammad Nabel	SMP Islam Darul Muhibbien	VII B	1	1	1
323	Amelia Habibah	SMP Islam Darul Muhibbien	VII C	1	1	1
324	Raysa Fitriana Ak	SMP Islam Darul Muhibbien	VII C	1	1	1
325	Aufa Ni'mah	SMP Islam Darul Muhibbien	VII C	1	1	1
326	Khotijah	SMP Islam Darul Muhibbien	VII D	1	1	1
327	Assyifa Rahmi	SMP Islam Darul Muhibbien	VII D	1	1	1
328	Siti Kamariah	SMP Islam Darul Muhibbien	VII D	1	1	1
329	Syifa	SMP Islam Darul Muhibbien	VII D	1	1	1
330	Muhammad Amin	SMP Islam Darul Muhibbien	VIII A	1	1	1
331	Abdullah	SMP Islam Izzulhasan	VIII	1	1	1
332	Muhammad Dava	SMP Islam Izzulhasan	VII	1	1	1
333	M. Nur Vansyah	SMP Islam Izzulhasan	IX	1	1	1
334	Muhammad Fahmi	SMP Kartika V-4	VII	1	1	1
335	Ahmad Fauzan	SMP Kartika V-4	VII	1	1	1
336	Bulan Lestari	SMP Kartika V-4	VIII	1	1	1
337	Aditya Rahmanda Abimanyu	SMP IT An - Nur	VIII	1	1	1
338	Amin Subekti	SMP IT An - Nur	VII	1	1	1
339	Ferni Madalena Pdj	SMP IT An - Nur	VIII	1	1	1
340	Safiq Abdur Rozzak	SMP IT An - Nur	VII	1	1	1
341	Tiara Cintia	SMP IT An - Nur	VII	1	1	1
342	M. NOR J	SMPN 1 Bungur	VII	1	1	1
343	ABDUL KARIM	SMPN 1 Bungur	VII	1	1	1
344	KHOIRITA M.	SMPN 1 Bungur	VII	1	1	1
345	MAISAH	SMPN 1 Bungur	VII	1	1	1
346	M. AKBAR F.	SMPN 1 Bungur	VII	1	1	1
347	SAUDAH	SMPN 1 Bungur	VIII	1	1	1
348	M. INSAN B.	SMPN 1 Bungur	VIII	1	1	1
349	M. RIDHO M	SMPN 1 Bungur	VIII	1	1	1
350	HUZAIFI	SMPN 1 Bungur	VIII	1	1	1



No	Nama Siswa	Asal sekolah	Kelas	Yang diterima		
				Buku	Pensil	Penghapus
351	M. RIFANI	SMPN 1 Bungur	VIII	1	1	1
352	ALFENDA HRH	SMPN 2 Salam Babaris	VII A	1	1	1
353	ANDHIKA PP	SMPN 2 Salam Babaris	VII A	1	1	1
354	M. BINTANG MA	SMPN 2 Salam Babaris	VII A	1	1	1
355	M. NOOR	SMPN 2 Salam Babaris	VII A	1	1	1
356	M. NOVAL	SMPN 2 Salam Babaris	VII A	1	1	1
357	M. RAJIDIN	SMPN 2 Salam Babaris	VII A	1	1	1
358	M. SURIYANI	SMPN 2 Salam Babaris	VII A	1	1	1
359	RATIH AULIA	SMPN 2 Salam Babaris	VII A	1	1	1
360	RANI S.R	SMPN 2 Salam Babaris	VII A	1	1	1
361	MUNA N.P	SMPN 2 Salam Babaris	VII A	1	1	1
362	ALFANDI S.	SMPN 2 Salam Babaris	VII B	1	1	1
363	M. RIZKI A.	SMPN 2 Salam Babaris	VII B	1	1	1
364	M. NUR	SMPN 2 Salam Babaris	VII B	1	1	1
365	ZULFADLI G.	SMPN 2 Salam Babaris	VII B	1	1	1
366	TITIS H.A.V	SMPN 2 Salam Babaris	VII B	1	1	1
367	RIZKY R.	SMPN 2 Salam Babaris	VII B	1	1	1
368	NURYANA S.	SMPN 2 Salam Babaris	VII B	1	1	1
369	RISKA N.	SMPN 2 Salam Babaris	VII B	1	1	1
370	NURSAFAAH	SMPN 2 Salam Babaris	VII B	1	1	1
371	M. RIZAL	SMPN 2 Salam Babaris	VII B	1	1	1
372	AULIA M.	SMP Muhammadiyah	VII	1	1	1
373	NUR AINA ATILA	SMP Muhammadiyah	VII	1	1	1
374	M. ARIADI	SMP Muhammadiyah	VII	1	1	1
375	SITI RAHMAWATI	SMP Muhammadiyah	VII	1	1	1
376	SITI FATIMAH	SMP Muhammadiyah	VII	1	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin

4.1.4. Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari: APBD, DAK Fisik APBN dan Sumber dana lain yang sah.



TABEL 4.6
ALOKASI ANGGARAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.576.655
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.694.370
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	204.880.778.278
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.716.485
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.009.366
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.261.612
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	259.147.803
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	401.914.950
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.406.697
Penyediaan Bahan/Material	5.711.952
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.813.068.000
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	53.506.876
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	676.321.964
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.243.048
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.531.732
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.979.164.128
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.231.576
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	



Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
Penambahan Ruang Kelas Baru	600.000.000
Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	589.994.204
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	341.990.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12.330.525.733
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	6.148.730.584
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	584.070.174
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	399.988.315
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	868.596.676
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	299.988.307
Pengadaan Mebel Sekolah	199.998.145
Pengadaan Perlengkapan Siswa	224.995.352
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	59.999.413
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	250.000.000
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	9.163.870
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	25.800.587
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	470.000.000
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	127.508.912
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	17.263.520.000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	96.276.955
Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	468.686.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	269.933.000
Pembangunan Laboratorium	1.265.678.000
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.427.733.593
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	205.699.894
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	200.000.000
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	399.988.083
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	612.788.743
Pengadaan Perlengkapan Siswa	128.878.704
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	82.000.035
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	110.525.074



Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	65.183.842
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	154.351.971
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	4.833.360.000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	11.108.916
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	205.702.154
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	199.988.315
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	917.347.401
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.772.889.533
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	599.921.356
Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	282.134.850
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	179.997.341
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3.015.000.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	170.645.045
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	233.788.516
Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.014.529.000
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	49.997.320
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	100.000.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	165.000.140
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	46.780.677
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	31.778.400
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6.284.400
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.422.832.000
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	109.999.994



Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota Tahun Berjalan 2023
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.405.932
JUMLAH	282.306.370.948

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin

Pembiayaan Pendidikan secara garis besar berasal dari APBN, dan APBD Kabupaten, untuk APBD Kabupaten Tapin belanja anggaran Dinas Pendidikan dengan rincian belanja operasi dengan anggaran sebesar Rp. 282.306.370.948 dengan realisasi anggaran ditahun 2023 sebesar Rp. 225.407.187.926 atau sebesar 79,84 persen dengan jumlah belanja Pembiayaan pendidikan digunakan untuk pembangunan disektor pendidikan, pengadaan fisik, pengadaan fisik dan non fisik. Sumber pembiayaan pembangunan pendidikan SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin tahun anggaran 2023 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tahun 2023 ada 3 program dan 11 Kegiatan yang tersebar pada 73 sub kegiatan dengan sumber dana APBD II termasuk didalamnya ada dana DAK. Adapun khusus untuk kegiatan penerapan SPM pendidikan PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan penerima SPM dengan anggaran sebesar Rp. 15.235.687.160 dengan terealisasi 79,42 persen.



TABEL 4.7
ALOKASI ANGGARAN DAN PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PENDIDIKAN

No	SPM Bidang Pendidikan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran Renja PD
1	Penanganan anak tidak bersekolah (ATS)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Rp. 100.000.000
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Rp. 165.000.140
2	Bantuan untuk siswa miskin yang belum terlayani	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Rp. 282.134.850
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Rp. 179.997.341
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Rp. 224.995.352
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rp. 59.999.413
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Rp. 128.878.704
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rp. 82.000.035



No	SPM Bidang Pendidikan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran Renja PD
3	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Rp. 109.999.994
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Rp. 3.405.932
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Rp. 3.015.000.000
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Rp. 170.645.045
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 470.000.000
4	Peningkatan mutu satuan pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rp. 917.347.401
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang	Rp. 599.921.356



No	SPM Bidang Pendidikan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran Renja PD
			(PAUD)	Kelas/Ruang Guru PAUD	
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp. 233.788.516
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp. 49.997.320
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	Rp. 600.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rp. 6.148.730.584
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Rp. 250.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp. 127.508.912
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp. 205.699.894
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp. 154.351.971
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal / Kesetaraan	Rp. 6.284.400
TOTAL					Rp. 14.285.687.160

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin

**4.1.5. Dukungan Personil**

Dinas Pendidikan terdiri dari jabatan 1 kepala dinas (pejabat eselon II.b), 1 sekretaris (eselon III.a), 4 kepala bidang (eselon III.b), 10 kepala sub bagian dan seksi (eselon IV.a) dan 3 JFT.

Data Jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin :

TABEL 4.8
APARATUR SIPIL NEGARA DINAS PENDIDIKAN

NO	URAIAN	JUMLAH	
A	KEPALA DINAS		1
	1 KEPALA DINAS	1	
	JUMLAH	1	
B	SEKRETARIAT		11
	1. SEKRETARIS	1	
	2. SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN	1	
	3. SUB BAGIAN KEUANGAN	1	
	4. SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN PEMBANTUAN	1	
	1. JFU / PELAKSANA	7	
	JUMLAH	11	
C	BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF		4
	1.KEPALA BIDANG BINA PAUD DAN PNF	1	
	2.SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	1	
	3.SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	1	
	4.JFT ANALIS PENGEMB. PENILAIAN PENDIDIKAN	0	
	5.JFU / PELAKSANA	1	
	JUMLAH	4	
D	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH DASAR		6
	1.KEPALA BIDANG BINA SD	1	
	2.SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	1	
	3.SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	1	
	4.JFT ANALIS PENGEMB. PENILAIAN PENDIDIKAN	1	
	5.JFU / PELAKSANA	2	
	JUMLAH	6	
E	BIDANG PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH		4



NO	URAIAN	JUMLAH	
	PERTAMA		
	1.KEPALA BIDANG BINA SMP	1	
	2.SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	0	
	3.SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	1	
	4.JFT ANALIS PENGEMB. PENILAIAN PENDIDIKAN	1	
	5.JFU / PELAKSANA	1	
	JUMLAH	4	
F	BIDANG KETENAGAAN		5
	1.KEPALA BIDANG KETENAGAAN	1	
	2.SEKSI PENDIDIK & TENAGA KEPEND. PAUD & PNF	1	
	3.SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN SD	1	
	4.JFT ANALIS PENGEMB. PENILAIAN PENDIDIKAN	1	
	5.JFU / PELAKSANA	1	
	JUMLAH	5	
	JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA DISDIK TAPIN		31

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian SPM bidang pendidikan dasar pada tahun ini baik itu yang menyangkut pelayanan dasar oleh Kabupaten maupun pelayanan dasar oleh satuan pendidikan adalah keterbatasan anggaran APBD Kabupaten Tapin untuk memenuhi semua target indikator SPM tersebut sehingga untuk tahun berikutnya lebih berusaha secara intensif mencari terobosan bantuan dana dari APBN terutama yang terkait dengan penyediaan perlengkapan dasar peserta didik PAUD, SD, SMP kekurangan buku teks untuk setiap siswa, buku pengayaan dan alat praktek dan peraga siswa serta bantuan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru SD/MI dan SMP/MTs. Dengan adanya Permendagri yang baru nomor 59 tahun 2021 dan Permendikbudristek nomor 32 tahun 2022 untuk bidang teknis KETENAGAAN, SD, SMP, PAUD dan PNF yang menangani SPM, menginginkan adanya sosialisasi dan bimbingan teknis Sumber Daya Manusia tentang pengisian/penghitungan Data SPM khususnya bidang pendidikan



yang diminta pada permendagri nomor 59 tahun 2021 dan Permendikbudristek nomor 32 tahun 2022 tersebut.

Selain itu untuk pencapaian SPM bidang pendidikan dasar melibatkan lembaga di bawah kewenangan Kementerian Agama yaitu MI dan MTs sehingga membutuhkan koordinasi yang baik antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama serta komitmen bersama untuk mempertahankan ketercapaian SPM bidang pendidikan dasar sebesar 100%.

Adapun permasalahan lain yang timbul dari pencapaian SPM bidang pendidikan tahun ini adalah masih minimnya anggaran untuk penerapan SPM Pendidikan dan masih ada sub kegiatan yang belum terealisasi anggarannya dikarenakan penggantian kepala bidang PAUD dan PNF. Perencanaan kebutuhan anggaran SPM bidang Pendidikan terkadang tidak sebanding dengan anggaran yang disetujui atau di terima dan juga masih rendahnya Standar Satuan Pendidikan dan Standar biaya pribadi Peserta Didik. Untuk itu dibutuhkan komitmen pemangku kebijakan di daerah untuk lebih meningkatkan monitoring dan evaluasi tentang penerapan SPM pendidikan di Kabupaten Tapin. Dan dalam pengumpulan data SPM sub bagian pelaporan masih kesulitan mengumpulkan data yang diminta, karena bidang-bidang teknis kadang-kadang terlambat mengumpulkan data dan bukti dukungannya dari waktu yang telah ditentukan.

Dengan adanya tabulasi permasalahan dan rencana solusi yang akan diambil diharapkan dapat mencapai target pencapaian SPM pada tahun berikutnya.

4.2. Bidang Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten /Kota, Indikator yang harus dicapai dalam satu tahun adalah sebagai berikut :



1.1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

a. Pernyataan Standar

Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

1) Pelayanan antenatal yang sesuai standar yang meliputi ;

- Standar kuantitas.
- Standar kualitas.

2) Mekanisme Pelayanan

- Penetapan sasaran ibu hamil di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/ riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- Standar kuantitas adalah Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4) dengan ketentuan:
 - a. Satu kali pada trimester pertama.
 - b. Satu kali pada trimester kedua.
 - c. Dua kali pada trimester ketiga.

3) Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T, meliputi

4) Yang disebut dengan standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T yaitu:

- Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;
- Ukur tekanan darah;
- Nilai status gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA)
- Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri)
- Tentukan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);



- Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi Tetanus Toksoid (TT) bila diperlukan;
- Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
- Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah (Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya), pemeriksaan protein urin (bila ada indikasi); yang pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan.
- Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan;
- Temu wicara (konseling)

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

<p>Presentase ibu hamil mendapatkan Pelayanan ibu hamil</p>	<p>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta</p> <p>= $\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta}}{\text{Jumlah semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$</p>
---	--

1.2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

a. Pernyataan standar

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.



b. Pengertian

- 1) Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi.
- 2) Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Polindes, Poskesdes, Puskesmas, bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta.
- 3) Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Adapun untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\begin{array}{l}
 \text{Presentase ibu} \\
 \text{Bersalin} \\
 \text{Mendapatkan} \\
 \text{Pelayanan persalinan}
 \end{array}
 = \frac{\text{Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standart di fasilitas kesehatan bersalin}}{\text{Jumlah semua ibu bersalin di wilayah kabupaten / kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$



1.3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

a. Pernyataan Standar

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

- Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).
- Pelayanan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Polindes, Poskesdes, Puskesmas, Bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta), Posyandu dan atau kunjungan rumah

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

- Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.



d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\text{Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir} = \frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar}}{\text{Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$$

1.4. Pelayanan kesehatan balita

a. Pernyataan standart

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

- Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.
- Pelayanan kesehatan, meliputi :
 - 1) Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun
 - 2) Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun.
 - 3) Pemberian imunisasi dasar lengkap.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.



d. Rumus Perhitungan Kinerja

Presentase anak usia 0-59 Bulan Yang mendapatkan pelayanan balita sesuai standart	=	$\frac{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standart dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
---	---	---

1.5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

a. Pernyataan Standar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjangingan kesehatan kepada anak usia pendidikan dasar di wilayah kabupaten/kota tersebut pada waktu kelas 1 dan kelas 7.

b. Pengertian

- Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjangingan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas.
- Standar pelayanan penjangingan kesehatan adalah pelayanan yang meliputi :
 - a. Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia);
 - b. Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas);
 - c. Penilaian kesehatan gigi dan mulut;
 - d. Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen;
 - e. Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garputala;



- Semua anak usia pendidikan dasar di wilayah kabupaten/kota adalah semua peserta didik kelas 1 dan kelas 7 di satuan pendidikan dasar yang berada di wilayah kabupaten/kota.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

d. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l}
 \text{Presentase anak usia} \\
 \text{pendidikan dasar yang} \\
 \text{mendapatkan skrining} \\
 \text{kesehatan sesuai} \\
 \text{standart}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas} \\ \text{1 dan 7 yang mendapatkan pelayanan} \\ \text{skrining di satuan pendidikan dasar} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah semua anak usia pendidikan} \\ \text{dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah} \\ \text{kerja kabupaten / kota tersebut dalam} \\ \text{kurun waktu satu tahun ajaran} \end{array}} \times 100\%$$

1.6. Pelayanan kesehatan usia produktif

a. Pernyataan standart

Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standart pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

1) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun sesuai estándar

- Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun diberikan sesuai kewenangannya oleh:
 - Dokter;
 - Bidan;
 - Perawat;



- Nutrisionis/Tenaga Gizi.
 - Petugas Pelaksana Posbindu PTM terlatih
 - Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
 - Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun minimal dilakukan satu tahun sekali.
 - Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun meliputi :
 - Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkaran perut.
 - Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer.
 - Deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan tes cepat gula darah.
 - Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku.
 - Pemeriksaan ketajaman penglihatan
 - Pemeriksaan ketajaman pendengaran
 - Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30–59 tahun
- 2) Pengunjung yang ditemukan menderita kelainan wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya
- c. Definisi Operasional Capaian Kinerja
- Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia 15–59 tahun dinilai persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.



d. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l}
 \text{Presentase warga} \\
 \text{negara usia 15-59 tahun} \\
 \text{mendapatkan skrining} \\
 \text{kesehatan sesuai} \\
 \text{standar}
 \end{array}
 =
 \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun} \\
 \text{mendapatkan pelayanan skrining} \\
 \text{kesehatan sesuai standar dalam kurun} \\
 \text{waktu satu tahun}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah warga negara usia 15-59 tahun} \\
 \text{yang ada di wilayah kerja dalam kurun} \\
 \text{waktu satu tahun yang sama}
 \end{array}}
 \times 100\%$$

1.7. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut

a. Pernyataan Standart

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

- Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun diberikan sesuai kewenangannya oleh:
 - Dokter;
 - Bidan;
 - Perawat;
 - Nutrisionis/Tenaga Gizi.
 - Kader Posyandu lansia Posbindu
- Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan pemerintah daerah.
- Pelayanan skrining kesehatan minimal dilakukan sekalisetahun.
- Lingkup skrining adalah sebagai berikut :
 - Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah.



- Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadargula darah
 - Deteksi kadar kolesterol dalam darah
 - Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan Mini Cog atau Mini Mental Status Examination (MMSE)/Test Mental Mini atau Abreviated Mental Test (AMT) dan Geriatric Depression Scale (GDS).
- Pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini
 - Pengunjung yang ditemukan menderita penyakit wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\begin{array}{l}
 \text{Presentase warga usia} \\
 \text{60 tahun keatas} \\
 \text{mendapatkan skrining} \\
 \text{kesehatan sesuai} \\
 \text{standar}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah pengunjung berusia 60 tahun} \\
 \text{keatas yang mendapat skrining} \\
 \text{kesehatan sesuai standar minimal 1 kali} \\
 \text{dalam kurun waktu satu tahun}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah semua penduduk berusia usia} \\
 \text{60 tahun keatas yang ada di wilayah} \\
 \text{kabupaten / kota tersebut dalam kurun} \\
 \text{waktu satu tahun perhitungan}
 \end{array}} \times 100\%$$



1.8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

a. Pernyataan Standar

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

b. Pengertian

- 1) Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas
- 2) Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upayapromosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
- 3) Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyaikompetensi untuk penanganan komplikasi.
- 4) Standar.layanan kesehatan penderita hipertensi adalah:
 - Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di FKTP
 - Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi di FKTP.
 - Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik, dan pengelolaan farmakologis
 - Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 th dan <150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis.
 - Selama menjalani pelayanan kesehatan sesuai standar, jika tekanan darah penderita hipertensi tidak



bisa dipertahankan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya atau mengalami komplikasi, maka penderita perlu dirujuk ke FKTL yang berkompeten

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{aligned} & \text{Presentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kabupaten / kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama}} \times 100\% \end{aligned}$$

1.9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

a. Pernyataan Standart

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

b. Pengertian

- Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kerja kabupaten/kota.
- Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.



- Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.
- Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya oleh :
- Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut:
- Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C.
- Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Penghitungan Kinerja:

$$\begin{array}{l}
 \text{Presentase penyandang} \\
 \text{DM yang mendapatkan} \\
 \text{pelayanan kesehatan} \\
 \text{sesuai standar}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah penyandang DM yang} \\
 \text{mendapatkan pelayanan kesehatan} \\
 \text{sesuai standar dalam kurun waktu satu} \\
 \text{tahun}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah penyandang DM berdasarkan} \\
 \text{angka prevalensi DM nasional di wilayah} \\
 \text{kerja dalam kurun waktu satu tahun pada} \\
 \text{tahun yang sama}
 \end{array}} \times 100\%$$



1.10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat

a. Pernyataan Standar

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah:

- 1) Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan
- 2) Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya.
- 3) Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:
 - Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau
 - Tindakan kebersihan diri ODGJ berat
- 4) Dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan materi KIE dan Buku Kerja sederhana.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ODGJ berat dinilai dengan jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.



d. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l}
 \text{Presentase ODGJ berat} \\
 \text{yang mendapatkan} \\
 \text{pelayanan kesehatan} \\
 \text{jiwa sesuai standar}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah} \\
 \text{kerja kabupaten / kota yang} \\
 \text{mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa} \\
 \text{promotive preventif sesuai standar dalam} \\
 \text{kurun waktu satu tahun}
 \end{array}}{\begin{array}{l}
 \text{Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada} \\
 \text{di wilayah kerja kabupaten / kota dalam} \\
 \text{kurun waktu satu tahun yang sama}
 \end{array}} \times 100\%$$

1.11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)

a. Pernyataan Standar

Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya.

b. Pengertian

1) Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah

2) Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TB yang berlaku antara lain :

- Penegakan diagnosis TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya.
- Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan.

3) Gejala Utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk



darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktifitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan.

- 4) Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan
- 5) Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau “TOSS TB” (Temukan, Obati Sampai Sembuh).

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan orang dengan TB dinilai dari persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

d. Rumus Perhitungan Kinerja

$$\begin{array}{l}
 \text{Persentase Orang} \\
 \text{terduga TBC} \\
 \text{mendapatkan pelayanan} \\
 \text{TBC sesuai}
 \end{array}
 = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah orang terduga TBC yang} \\ \text{dilakukan pemeriksaan penunjang dalam} \\ \text{kurun waktu satu tahun} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah orang yang terduga TBC dalam} \\ \text{kurun waktu satu tahun yang sama} \end{array}} \times 100\%$$

1.12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV

a. Pernyataan Standart

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar



b. Pengertian

- Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta dilapas/rutan narkotika
- Pelayanan Kesehatan meliputi:
 - a) Upaya pencegahan pada orang yang memiliki risiko terinfeksi HIV
 - b) Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang berisiko dimulai dengan:
 - Pemberian informasi terkait HIV-AIDS
 - Pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan
 - Orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya
 - Orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah tiga (3) bulan, enam (6) bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko



terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun

d. Rumus Penghitungan Kinerja

$$\text{Presentase orang HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV di fasyankes sesuai standar} = \frac{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar berisiko terinfeksi dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$$

4.2.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Indikator dan target capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9

Indikator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

INDIKATOR	TARGET
JENIS PELAYANAN : PELAYANAN KESEHATAN DASAR	
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%
4. Pelayanan Kesehatan Balita	100%
5. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan Dasar	100%
6. Pelayanan Kesehatan Pada usia produktif	100%
7. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	100%
8. Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	100%
9. Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Militus	100%
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan jiwa	100%
11. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	100%
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	100%

Ket.

Target Kabupaten berdasarkan Penetapan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Tapin

4.2.3. Realisasi

Pelaksanaan kegiatan selama satu tahun, dan perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui pencapaian indikator SPM Bidang Kesehatan yang diterapkan di Kabupaten Tapin tahun 2023. Dari 12 indikator yang ada, akan disajikan satu per satu perjenis layanan, Indikator dan Nilai capaian per indikator SPM.

Tabel 4.10
Realisasi SPM Dinas Kesehatan Sampai Dengan Desember 2023

Nama Indikator	Target	Sasaran	Realisasi	Persen (%)
Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	2705	2705	100%
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%	2434	2434	100%
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	2547	2547	100%
Pelayanan kesehatan balita	100%	14987	14097	94,06%
Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	19025	18703	98,31%
Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	98511	56397	57,25%
Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	25179	18145	72,06%
Pelayanan kesehatan pada Hipertensi	100%	20409	17025	83,42%
Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Meilitus (DM)	100%	3204	3480	108,61%
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	274	368	134,31%
Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkolosis (TB)	100%	1699	1699	100%
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan manusia (HIV)	100%	4062	3522	86,71%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tapin

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk pencapaian pada tahun 2023 sampai dengan bulan Desember rata – rata sudah mencapai diatas 50% untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak rata –

rata pencapaian sudah diatas 80% tetapi jika dibandingkan dengan target nasional masih perlu dilakukan akselerasi karena target SPM bidang kesehatan adalah 100%. Namun, beberapa indikator yang melebihi 100% seperti pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus dan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, hal ini dikarenakan realisasi di lapangan melebihi angka sasaran yang telah ditetapkan.

Beberapa pelayanan kesehatan mencapai 100% antara lain pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, dan pelayanan kesehatan orang dengan tuberculosi.

Untuk pelayanan kesehatan usia produktif dan pelayanan kesehatan usia lanjut mencapai angka masing-masing sebesar 57,25% dan 72,06% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Kondisi ini dikarenakan kesadaran masyarakat dalam kesehatan masih rendah sehingga jumlah masyarakat yang melakukan skrining kesehatan masih rendah. Dukungan dana untuk posbindu dari sebagian desa masih rendah serta pelayanan PANDU PTM belum optimal. Kendala lainnya antara lain jarak antar rumah dengan lokasi posyandu dan kurangnya pengetahuan dan dukungan keluarga, sarana prasarana kunjungan kegiatan posyandu.

4.2.4. Alokasi Anggaran

Untuk dapat mencapai target maka perlu di sediakan alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan, data tentang alokasi anggaran untuk mencapai SPM dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.11
Indikator, kegiatan pendukung dan realisasi anggaran SPM
Tahun 2023

No.	Nama Indikator	Kegiatan pendukung	Pagu Anggaran
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Peningkatan dan pengembangan kesehatan ibu, bayi, balita dan reproduksi	180.841.662
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jaminan persalinan	30.518.050
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Penanggulangan Kurang Energi (KEP), Anemia gizi besi,	43.348.558



No.	Nama Indikator	Kegiatan pendukung	Pagu Anggaran
		Gangguan akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	
4	Pelayanan kesehatan balita	Pemberdayaan masyarakat melalui kelompok kerja 2	40.319.438
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Pengembangan UKS	150.779.437
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	244.640.560
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	38.704.800
8	Pelayanan kesehatan pada Hipertensi	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Khusus	30.208.650
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Meilitus (DM)	Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	239.208.650
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)	Pemeliharaan Dan Pemulihan Kesehatan	51.731.740
11	Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB)	Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Tuberkulosis (TB)	86.347.726
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular HIV / AIDS	56.008.500

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tapin

4.2.5. Dukungan Personil

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat & Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional, sebagai berikut :

Tabel 4.12
Dukungan Personil SPM Dinas Kesehatan
Kabupaten Tapin Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	No	Pangkat/Gol	Jumlah
1	SD	-	1	Pembina Utama / IV. e	-
2	SLTP	-	2	Pembina Utama Muda / IV. c	4
3	SLTA	5	3	Pembina TK. I / IV. B	6
4	Diploma 1	1	4	Pembina / IV. A	21
5	Diploma II	-	5	Penata Tk. I/ III d	79



No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	No	Pangkat/Gol	Jumlah
6	Diploma III	4	6	Penata / III c	77
7	Diploma IV	1	7	Penata Muda Tk. I / III b	143
8	S-1	12	8	Penata Muda / III a	88
9	S-2	7	9	Pengatur Tk. I / II d	23
10	S-3	1	10	Pengatur / II c	25
11	Dokter Umum	24	11	Pengatur Muda Tk. I / II b	-
12	Dokter Gigi	10	12	Pengatur Muda / II d	-
13	Apoteker	6	13	Juru Tk. I / I d	-

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tapin

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Adapun penjelasan dari masing – masing layanan akan dijelaskan dalam uraian berikut ini :

Tabel 4.13
Permasalahan dan solusi SPM tahun 2023

Indikator Kerja	Permasalahan	Solusi
Pelayanan kesehatan ibu hamil	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitas ANC masih rendah - Abortus ibu hamil - Mobilitas sasaran (pindah & pendatang) 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas bidan - USG di puskesmas - Kelas ibu hamil - Pendataan dan Sweeping
Pelayanan kesehatan ibu bersalin	<ul style="list-style-type: none"> - Masih adanya persalinan Non-nakes - 3 Terlambat 4 Terlalu - Persalinan tidak di fasilitas kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kemitraan dukun kampung dengan bidan - Kelas Ibu Hamil - Penyuluhan dan sosialisasi - Kerjasama lintas sektor untuk poskesdes
Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	<ul style="list-style-type: none"> - Masih ada bayi baru lahir yang belum sempat mendapatkan pelayanan kesehatan paripurna dan pelayanan SHK 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan kelas ibu hamil - Penyuluhan dan edukasi
Pelayanan kesehatan balita	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya indikator untuk pelayanan anak balita sesuai standar yang ada. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kegiatan kader ibu balita diposyandu



Indikator Kerja	Permasalahan	Solusi
		<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan dan edukasi
<p>Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran pemeriksaan berkala dan penjangkaran masih dua kali setahun 	<ul style="list-style-type: none"> - Penambahan anggaran menjadi empat kali setahun
<p>Pelayanan kesehatan pada usia produktif</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran masyarakat - Dukungan dana masih rendah pada sebagian desa - Pelayanan PANDU PTM belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalkan Promkes - Optimalkan peran kader - Advokasi ke kepala desa - Maksimalkan petugas yang terlatih
<p>Pelayanan kesehatan pada usia lanjut</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jarak rumah dengan lokasi posyandu kurangnya pengetahuan dan dukungan keluarga, sarana prasarana kunjungan kegiatan posyandu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi program posyandu lansia dan masyarakat guna meningkatkan pengetahuan lansia dan keluarga
<p>Pelayanan kesehatan pada Hipertensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Rekap data belum maksimal - Kepatuhan minum obat pasien masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan kerjasama terhadap fasilitas kesehatan lain - Edukasi dan konseling kepada pasien
<p>Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Meilitus (DM)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan melalui aplikasi ASIK dan SIPTK oleh puskesmas belum maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan pembinaan ke puskesmas
<p>Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaporan melalui aplikasi SIMKESWA oleh puskesmas belum maksimal - Kurang dukungan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan refreshing input data - Edukasi keluarga dan pasien ODGJ
<p>Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan ACF (Active Case Finding) belum maksimal - Investigasi kontak belum maksimal pada semua index kasus - kekosongan bahan pemeriksaan mikroskopis TB berupa reagen ZN - belum terlibatnya klinik dan rumah sakit swasta dalam pelayanan dan pelaporan kasus TBC. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan kegiatan investigasi kontak dan skrining TBC di tempat khusus seperti lapas, pondok pesantren, dan panti/asrama - memastikan ketersediaan logistik cukup - melaksanakan MoU dengan klinik dan rumah sakit swasta yang ada di kabupaten Tapin dalam



Indikator Kerja	Permasalahan	Solusi
		pelayanan program TBC.
Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	<ul style="list-style-type: none"> - Belum menjangkau secara luas ke sasaran populasi kunci (LSL, pasien IMS, dan ibu hamil), - Tingkat kepatuhan pengobatan pasien HIV yang masih rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemetaan untuk populasi kunci - Skrining pada ibu hamil pada saat kelas ibu hamil - Edukasi dan konseling kepada pasien dan keluarga pasien dengan melakukan kunjungan ke rumah pasien

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tapin

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dukungan personil untuk kegiatan dalam hal pencapaian kinerja masih kurang kuantitas dan kualitasnya untuk itu perlu dilakukan penambahan dan juga seleksi yang ketat sehingga petugas yang melakukan pelayanan di tingkat bawah dapat memiliki kompetensi yang diharapkan oleh undang – undang. Kerjasama lintas sektor juga perlu terus dikembangkan sehingga kinerja kesehatan dapat berjalan dengan lebih baik, karena program kesehatan tidak hanya dapat dilaksanakan oleh petugas kesehatan saja tetapi juga oleh SKPD lain yang terkait dengan kesehatan.

4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin berdasarkan Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan Umum adalah:

Tabel 4.14
Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	2 %	Setiap Tahun
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	5 %	Setiap Tahun

Sumber : Dinas PUPR Kab. Tapin

Berdasarkan RPJMD, target air minum sebesar 2% untuk capaian tiap tahun dan air limbah sebesar 5% untuk capaian tiap tahun.

Sedangkan Sasaran strategis yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin adalah :

Tabel 4.15
Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Nilai	Batas Waktu Capaian
Meningkatnya infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	1	Prosentase infrastruktur dasar Pelayanan Air Minum	64 %
	2	Prosentase infrastruktur dasar Pelayanan Air Limbah	90 %

Sumber : Dinas PUPR Kab. Tapin, Tahun 2023

4.3.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target Pencapaian Standart Pelayanan Minimum yang ditetapkan daerah dalam tiap tahun adalah terjadi peningkatan sebesar 2% untuk infrastruktur dasar Pelayanan Air Minum dan untuk Prosentase infrastruktur dasar Pelayanan Air Limbah adalah sebesar 5%.

4.3.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin melalui Bidang Cipta Karya selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin yang terdapat dalam RPJMD 2018-2023 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.16
Realisasi Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target 2021 (%)	Realisasi 2021 (%)	Prosentase (%)
Meningkatnya infrastruktur dasar (air minum dan air limbah) yang dapat diakses oleh masyarakat	1	Prosentase infrastruktur dasar Pelayanan Air Minum	2	4,52	74,66 %
	2	Prosentase infrastruktur dasar Pelayanan Air Limbah	5	1,31	89,39 %

Sumber : Dinas PUPR Kab. Tapin

Dalam pelaksanaan kegiatan diatas untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air minum yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin dibagi menjadi dua yaitu pembangunan sarana dan prasarana air minum dan air limbah. Pembangunan sarana dan prasarana air minum dan air limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin dilaksanakan oleh pihak ketiga dan swakelola oleh masyarakat.

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah beserta realisasinya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :



**Tabel 4.17
Alokasi Anggaran**

Uraian	Anggaran	Realisasi					Sisa Anggaran
		Pegawai	Barang & Jasa	Modal	Total	Persen	
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	24.178.416.073,00	178.980.000,00	7.382.603.919,00	10.028.823.000,00	17.590.406.919,00	72,75	6.588.009.154
Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	1.614.850.000,00	178.980.000,00	383.373.900,00	0,00	562.353.900,00	34,82	1.052.496.100
Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan(DAK Fisik Bidang Air Minum Penugasan)	12.262.863.000,00	0,00	1.347.532.160,00	10.028.823.000,00	11.376.355.160,00	92,77	886.507.840
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	10.300.703.073,00	0,00	5.651.697.859,00	0,00	5.651.697.859,00	54,87	4.649.005.214



Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	10.616.379.724,00	73.405.000,00	6.597.821.153,00	0,00	6.671.226.153,00	62,84	3.945.153.571
Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	913.902.500,00	73.405.000,00	269.758.000,00	0,00	343.163.000,00	37,55	570.739.500
Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat (DAK Fisik Bidang Sanitasi Penugasan)	5.851.117.000,00	0,00	5.849.962.000,00	0,00	5.849.962.000,00	99,98	1.155.000
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.851.360.224,00	0,00	478.101.153,00	0,00	478.101.153,00	12,41	3.373.259.071
Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	3.851.360.224,00	0,00	478.101.153,00	0,00	478.101.153,00	12,41	3.373.259.071



4.3.5. Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM, di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Bidang Cipta Karya terdiri dari jabatan 1 kepala dinas (pejabat eselon IIb), dan 1 kepala bidang Cipta Karya (eselon IIIb) dengan dibantu 1 kepala seksi (eselon IVa) beserta pejabat pelaksana lainnya.

Data ini menyajikan jumlah personil yang melaksanakan Program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana air minum dan air limbah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Bidang Cipta Karya.

Tabel 4.18
Jumlah Personil

No	Nama	Golongan Jabatan
1.	Akhmad Rahimansyah, S.T., M.M. 19740711 200003 1 007 Penata TK. 1 (III/d)	Kepala Bidang Cipta Karya
2.	Rhama Juni Saputra, ST	Analisis Perencanaan)
	19830628 201503 1 001	Penata Muda Tk 1 (III/b
3.	Agus Patahilah, S.T	Penata Penyehatan Lingkungan Pemukiman
	19890819 201503 1 002	III/c (Penata)
4.	Norsan Heriyanto	II/d (Pengatur TK.1)
	19821026 200904 1 004	

Sumber : Dinas PUPR Kab. Tapin

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal yang dihadapi antara lain bahwa dalam penerapan dan pencapaian SPM ini masalah utamanya adalah dana baik dana yang bersumber dari APBD maupun dari APBN melalui dana DAK. Dana yang dialokasikan untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal porsinya masih sangat kecil dibanding dengan kegiatan lain diluar Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan di



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin. Permasalahan yang lain yaitu :

1. Pengumpulan data untuk Data BNBA memerlukan waktu yang relatif lama dalam pengumpulannya
2. Kendala dalam penyusunan rencana terdapat dalam ketersediaan lahan yang tidak memadai beserta besaran anggaran yang relative terbatas
3. Database yang akurat dan terperinci pada setiap penerapan dan pencapaian SPM belum ada
4. Monitoring dan evaluasi untuk menghasilkan data capaian SPM setiap tahunnya masih sangat minim.
5. Kurangnya SDM yang berkompetensi dalam menangani SPM

Langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh antara lain adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran dan menambah SDM yang berkompetensi ditahun anggaran yang akan datang sehingga Standar Pelayanan Minimum yang harus dilaksanakan menjadi fokus kegiatan utama bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.

4.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten/Kota mencakup 2 (dua) jenis pelayanan dasar, terdiri dari:

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat



yang terkena realokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

4.4.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target capaian Standar Pelayanan Minimal Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.19
Target dan Realisasi SPM
Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Target SPM 2023
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100 %

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Tapin

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.

Pada tahun 2022 dan 2023 di wilayah pemerintah kabupaten tidak terdapat bencana yang bersifat masif, dan di tahun 2023 hanya terjadi bencana skala kecil yang ditangani oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebanyak 3 unit rumah dalam bentuk 2 unit rehabilitasi dan 1 unit pemindahan lokasi.

Capaian SPM 100% dikarenakan di tahun 2023 dengan realisasi 3 unit penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.20
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

NO	JENIS BENCANA	TAHUN TERJADINYA BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	NAMA KEPALA KELUARGA	NIK	KONDISI EKONOMI KELUARGA			TINGKAT KERUSAKAN RUMAH			STATUS KEPEMILIKAN RUMAH			KEGIATAN PELAYANAN YANG AKAN DIBERIKAN			
							MBR	NON MBR		RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	MILIK	SEWA	LAINNYA	REHABILITASI	PEMBANGUNAN KEMBALI	SUBSIDI UANG SEWA	RELOKASI/ PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5	9	10	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	TANAH LONGSOR	2023	BUNGUR	BUNGUR BARU	MUHAMMAD FERDY AL GIFARI	6305041208020002	1,00			1,00		1,00							1,00
2	ANGIN PUTING BELIUNG	2023	TAPIN SELATAN	HARAPAN MASA	ARIE HIDAYAT	6305020502790002		1,00		1,00		1,00			1,00				
3	ANGIN PUTING BELIUNG	2023	TAPIN TENGAH	PEMATANG KARANGAN	MUHAMMAD SALIHIN	6305030312990003	1,00			1,00		1,00			1,00				

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Tapin



2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pada tahun 2023 tidak ada rencana relokasi program pemerintah sehingga tidak ada realisasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten / kota.

Rincian target relokasi dalam kurun waktu tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.21
Rincian Target Relokasi Tahun Anggaran 2023

LOKASI	TARGET (UNIT)	TOTAL	REALISASI (Unit)	CAPAIAN (%)
	2023		2023	2023
$\frac{\text{Jumlah rumah yang tertangani (Realisasi)}}{\text{Jumlah target penerima layanan (Target)}} \times 10$				
Kabupaten Tapin	1	1	1	100
TOTAL	1	1	1	100

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Tapin

4.4.3. Realisasi

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota layak huni dan terjangkau

Jenis Pelayanan dasar ini direalisasikan melalui sumber dana APBD dengan capaian realisasi sebagai berikut :

Tabel 4.22
Realisasi Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Layak Huni Dan Terjangkau

PERHITUNGAN	TARGET (UNIT)	REALISASI		CAPAIAN
		UNIT	%	
$\frac{\text{Jumlah rumah yang tertangani (realisasi)}}{\text{Jumlah target penerima pelayanan (target)}} \times 100$	100	3	100%	100%
TOTAL	100	3	100%	100%

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Tapin

Capaian SPM 100% di tahun 2023 diperoleh dari penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana yaitu pada bencana tanah longsor yang berdampak pada 1 unit rumah di desa



Bungur Baru Kecamatan Bungur, bencana angin puting beliung di desa Harapan Masa Kecamatan Tapin Selatan 1 unit rumah dan Desa Pematang Karang Kecamatan Tapin Tengah sebanyak 1 unit rumah.

2. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Capaian Jenis Pelayanan Dasar ini tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.23
Realisasi Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten Tapin

LOKASI	TARGET (UNIT)	TOTAL	REALISASI (Unit)	CAPAIAN (%)
	2023		2023	2023
$\frac{\text{Jumlah rumah yang tertangani (Realisasi)}}{\text{Jumlah target penerima layanan (Target)}} \times 10$	1	1	1	100
Kabupaten Tapin	1	1	1	100
TOTAL	1	1	1	100

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Tapin, Tahun 2023

4.4.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.67.842.227.287,00 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 32.703.905.403,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 35.138.321.884,00. Adapun anggaran yang disediakan untuk penerapan SPM tahun 2023 sampai dengan perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 283.907.500,00 atau 0,42%% dari total anggaran SKPD TA 2023.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 56.646.387.714,00 terdiri dari Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.29.817.787.646,00 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 26.828.600.068,00. Rincian Anggaran dan Alokasi Program, Kegiatan dan Sub kegiatan SPM dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4.24
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2023
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

KODE	URAIAN	DPA	DPPA	PERUBAHAN	SUMBER DANA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		473.007.500,00	283.907.500,00	(189.100.000,00)	APBD
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		473.007.500,00	283.907.500,00	(189.100.000,00)	APBD
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	218.007.500,00	207.407.500,00	(10.600.000,00)	APBD
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau	127.077.500,00	127.077.500,00	0,00	APBD
1.04.02.2.01.05	Identifikasi Lahan-LahanPotensial sebagai LokasiRelokasi	90.930.000,00	80.330.000,00	(10.600.000,00)	APBD
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi		0,00	0,00	APBD
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi				APBD
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	255.000.000,00	76.500.000,00	(178.500.000,00)	APBD
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	255.000.000,00	76.500.000,00	(178.500.000,00)	APBD
JUMLAH		473.007.500,00	283.907.500,00	(189.100.000,00)	
PAGU SKPD TA 2022		26.358.483.287,00			
ALOKASI SPM		1,79%	0,42%		

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Tapin

4.4.5. Dukungan Personil

1. Jumlah Pegawai

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan seluruhnya berjumlah 15 orang yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.25
Rekapitulasi Pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	5
3	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	2
4	Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)	1
5	Bidang Pertanahan	1
6	Kelompok Jabatan Fungsional	5
Total		15

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Tapin



2. Kualifikasi Pendidikan

Tingkat pendidikan pegawai di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan bervariasi. Secara rinci komposisinya berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.26
Rekapitulasi Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara
Disperkimtan Kabupaten Tapin Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Jumlah
1	Strata 2 (S-2)	4
2	Strata 1 (S-1)	9
3	Sarjana Muda (D-3)	1
4	SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas)	1
5	SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama)	-
Total		15

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Tapin

Berdasarkan tabel komposisi pegawai Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin di atas menunjukkan bahwa pegawai yang berpendidikan strata 2 (S-2) sebanyak 4 orang. Pegawai yang berpendidikan pendidikan strata 1 (S-1) yakni sebanyak 9 orang. Sementara itu, pegawai yang berpendidikan sarjana muda/D3 ada sebanyak 1 orang.

Sisanya sebanyak 1 orang berpendidikan SLTA/SMK. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin berpendidikan jenjang atas. Meskipun telah memiliki jumlah pegawai yang cukup dengan pendidikan jenjang atas, namun pegawai yang berlatar belakang teknis Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan masih dianggap kurang, sehingga perlu dilakukan penambahan.

3. Pangkat dan Golongan

Daftar pangkat dan golongan PNS Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Tapin, tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :



Tabel 4.27
Rekapitulasi Pangkat dan Golongan Aparatur Sipil Negara
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Tapin Tahun 2023

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT/GOL	ES
1	YUMANTO, AP, M.AP	19750328 199311 1002	Kepala	Pembina Utama Muda (IV/c)	2B
2	FAHMI RIZAL, ST, MT	19780613 200501 1013	Sekretaris	Pembina Tk. 1 (IV/b)	3A
3	SUPIAN HADI, S.Sos	19770619 200701 1010	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Penata Tk. I (III/d)	4A
4	MUHAMAD JAZULI RAHMAN, ST	19820124 201503 1001	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Penata (III/c)	4A
5	KRISNA DARMAWAN, SE	19900225 202012 1003	Analisis Perencanaan dan Pelaporan	Penata Muda (III/a)	-
6	IKHSAN REZA FAKHLEVIE, SE	19930418 202012 1004	Pranata Barang dan Jasa	Penata Muda (III/a)	-
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
7	H. MUHAMMAD IRFAN ROSANDY, ST	19870110 201402 1004	Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penata (III/c)	3B
8	ERLIS AKHSAN FUAD, ST	19820728 201001 1019	JF. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda	Penata (III/c)	-
9	MUHAMMAD RAKHMAD RAUZIE	19740512 199503 1006	Pengawas Fisik Permukiman	Penata Muda Tk.I (III/b)	-

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Tapin, Tahun 2023

Jumlah Pejabat Struktural Disperkimtan Tapin yang terlibat dalam penerapan dan pelaksanaan SPM sebanyak 5 orang dari total 7 Jabatan Struktural. Jumlah Pejabat Fungsional sebanyak 1 orang dan staf (pelaksana) 1 orang.

4.4.6. Permasalahan dan Solusi

Masalah :

- Terbatasnya keahlian SDM aparatur.
- Kondisi data eksisting di lapangan yang sangat dinamis..

Solusi :

- Penambahan sumber daya manusia berupa tenaga ahli yang memiliki keahlian dibidang teknis maupun perencanaan akan dapat membantu memaksimalkan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin. Adapun di anggaran tahun 2023 telah dialokasikan tambahan tenaga ahli dan fasilitator untuk menunjang kinerja baik dalam hal



penerapan SPM maupun kegiatan teknis lainnya.

- Melakukan survey dan updating dan verifikasi kondisi eksisting di lapangan.

4.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat

a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021, maka Standar Pelayanan Minimal Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin, meliputi:

Tabel 4.28
Jenis Pelayanan Dasar Urusan Trantibumlinmas
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Kabupaten Tapin Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Ket
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perdata dan perkara Kabupaten/Kota	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 % yang dipenuhi	Setiap tahun	Indikator Dasar
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 % yang dipenuhi	Setiap tahun	

4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target capaian SPM, indikator capaian dan batas waktu yang mendukung pencapaian adalah sebagai berikut :



Tabel 4.29
Target Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Kabupaten Tapin Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

Sumber : Satpol PP dan Kebakaran Kab. Tapin

4.5.3. Realisasi

Tabel 4.30
Realisasi Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Kabupaten Tapin Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Capaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	100%
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%

Sumber : Satpol PP dan Kebakaran Kab. Tapin

4.5.4. Alokasi Anggaran

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kebakaran, pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan optimal ditengah masyarakat, dengan beberapa langkah kegiatan antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah
- b. Melakukan pendekatan terhadap masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran Perda



- c. Melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap pedagang kaki lima agar mentaati peraturan daerah
- d. menyebarkan pamflet mengenai penegakan perda, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat
- e. menyambut baik laporan mengenai gangguan lingkungan yang disampaikan masyarakat.
- f. Memberikan sikap sopan dan santun terhadap para pelanggar perda.
- g. memberikan sosialisasi mengenai proteksi dini bahaya kebakaran
- h. memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran terhadap kawasan yang terancam kebakaran.
- i. memasang spanduk atau papan pengumuman di daerah rawan pelanggaran perda dan daerah rawan kebakaran.
- j. melakukan pendekatan secara langsung terhadap pelanggar Perda.

Capaian anggaran untuk bidang Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kebakaran adalah :

Tabel 4.31
Anggaran SPM Urusan Trantibumlinmas
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran
Kabupaten Tapin Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kegiatan	Anggaran
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perdadan perkada Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.766.054.800
			Penengakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	95.919.500
2.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya	1.313.636.821



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kegiatan	Anggaran
		dan evakuasi korban kebakaran	Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber : Satpol PP dan Kebakaran Kab. Tapin

4.5.5. Dukungan Personil

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin selaku lembaga teknis yang menangani urusan wajib ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana kebakaran didukung oleh 127 personil khusus bidang pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan 13 personel khusus bidang penanggulangan bencana kebakaran.

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan Ketentraman umum, ketertiban masyarakat, perlindungan masyarakat antara lain :

- Sumber Daya Manusia yang masih belum memenuhi standar kualifikasi, baik dari personel bidang pemeliharaan Umum, Ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat maupun bidang penanggulangan bencana kebakaran.
- Minimnya anggaran untuk kegiatan penegakan perda dan pemeliharaan ketertiban umum, sehingga kegiatan belum berjalan secara optimal.
- kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki, bidang ketertiban umum maupun mpenanggulangan bencana kebakaran.
- minimnya sarana dan prasaran pemadam kebakaran yang dimiliki, mengingat jangkauan WMK di Kabupaten Tapin yang cukup luas.
- Sulitnya membangun kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan daerah.



b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditambah pula dengan peraturan terkait masing-masing kementerian, maka pemerintah daerah melalui perangkat daerah harus menerapkan SPM secara efektif. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menerapkan tiga jenis pelayanan dasar dalam penanggulangan bencana kepada setiap warga negara secara minimal, sebagai berikut :

Pertama, pelayanan informasi rawan bencana, yaitu pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana secara terperinci berbasis kajian risiko bencana kepada warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana yaitu untuk lebih memahami berbagai ancaman bencana yang ada di wilayahnya, bagaimana cara mengurangi ancaman (hazards) dan kerentanan (vulnerability) yang dimiliki, serta meningkatkan kemampuan (capacity) dalam menghadapi ancaman/dampak bencana.

Kedua, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan warga negara dalam menghadapi bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah pelaksanaan gladi kesiapsiagaan bencana bagi warga negara dalam bentuk simulasi dan gladi lapang sesuai dengan Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi yang telah disusun.

Ketiga, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat



kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Salah satu layanan yang dilakukan adalah memberikan layanan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

4.5.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah Sasaran atau batas ketentuan yang telah ditetapkan untuk dicapai yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM sub urusan Bencana selama 1 (satu) tahun. Dalam penerapan dan pencapaian SPM pemerintah daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, kementerian telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 4.32
Target Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana
Tahun Anggaran 2023

Sub Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target (%)
Jenis Pelayanan Dasar			
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		
A	Penyusunan kajian risiko bencana	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	100
B	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	100
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
A	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	100
B	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	100
C	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	100
D	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	100
E	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	100
F	Penyediaan peralatan	Tersedianya peralatan	100

	perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	perlindungan terhadap bencana	
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
A	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	100
B	Respon cepat darurat bencana	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	100
C	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	100
D	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	100

Sumber : BPBD Kab.Tapin

4.5.3. Realisasi

Realisasi Pencapaian adalah tindakan yang nyata atau adanya pergerakan dari rencana yang sudah dibuat atau dikerjakan dalam Pencapaian SPM sub urusan Bencana BPBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.33
Alokasi Anggaran dalam Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana
Tahun Anggaran 2023

Sub Kegiatan	Indikator Pencapaian	Target (%)	Realisasi (%)
Jenis Pelayanan Dasar			
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		
A	Penyusunan kajian risiko bencana	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	100
B	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	100
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
A	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	100
B	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	100
C	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana	100



Sub Kegiatan		Indikator Pencapaian	Target (%)	Realisasi (%)
		dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana		
D	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100
E	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100
F	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana	100	100
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
A	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	100	100
B	Respon cepat darurat bencana	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	100	100
C	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	100	100
D	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	100	100

Sumber : BPBD Kab.Tapin

4.5.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023, memiliki Alokasi Anggaran untuk melaksanakan Pencapaian SPM sub urusan Bencana sebagai berikut :

Tabel 4.34
Alokasi Anggaran dalam Pencapaian SPM Sub Urusan Bencana Tahun Anggaran 2023

Sub Kegiatan		Indikator Pencapaian	Anggaran (Rp)
Jenis Pelayanan Dasar			
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana		
A	Penyusunan kajian	Tersedianya data/informasi tentang	141.690.000



Sub Kegiatan		Indikator Pencapaian	Anggaran (Rp)
	risiko bencana	jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	
B	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Rawan Bencana	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	61.497.250
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		
A	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	0
B	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	0
C	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	39.370.500
D	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Terlatihnya Warga Negara dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencana	0
E	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	0
F	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana	498.820.000
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
A	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Terespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	0
B	Respon cepat darurat bencana	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	0
C	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	84.499.130
D	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	0

Sumber : BPBD Kab.Tapin

4.5.5. Dukungan Personil

Personil dalam penerapan SPM sub urusan Bencana dengan



personil ASN sebanyak 14 orang dibantu 6 orang tenaga kontrak Administrasi, 12 orang Satgas dan 6 orang Operator Pusdalops, 2 orang petugas keamanan kantor serta 2 orang petugas kebersihan. Untuk lebih jelasnya komposisi PNS BPBD dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.35
Jumlah Pegawai, Latar Belakang Pendidikan, Tingkat Pendidikan, Pangkat dan Golongan s/d akhir Desember 2023

No	Nama Pegawai	Latar Belakang Pendidikan	Tingkat Pendidikan	Pangkat dan Golongan
1	H. RANIANSYAH, S.Sos, M.AP 196411071987031009	Magister Administrasi Publik	S-2	Kepala Pelaksana / Pembina Utama Muda/IV.c
2	AHMAD RIZALI, ST 19730622 199803 1 012	Sarjana Teknik	S-1	Sekretaris/Pembina Tingkat I /IV.b
3	H. SYAHRADI, S.IP, MM 19720808 199203 1 006	Magister Manajemen	S-2	Kabid.Pencegahan dan Kesiapsiagaan/Pembina/IV.a
4	H. A. SYOFYAN, S.AP, MM 19770221 199803 1 009	Magister Manajemen	S-2	Kabid Kedaruratan dan Logistik/Pembina I/IV.a
5	ALPIAN ANSHARY, SE, MM 19720911 200604 1 005	Magister Manajemen	S-2	JF. Penata Penanggulangan Bencana/Pembina/IV.a
6	DIDIK SUGITO, S. Kom 19820309 200904 1 004	Sarjana Komputer	S-1	Kabid.Rehabilitasi dan Rekonstruksi/Penata Tingkat I /III.d
7	GITA RAMADHANA, S.Kom 19870508 200904 2 004	Sarjana Komputer	S-1	Kasubbag.Program dan Pelaporan /Penata Tingkat I /III.d
8	KHAIRANI, S.Sos 19710818 199203 1 012	Sarjana Sosial	S-1	JF. Penata Penanggulangan Bencana/Penata Tingkat I/III.d
9	Hj. HERLIANA, S.AP 19720402 200604 2 017	Sarjana Adm. Publik	S-1	Kasubbag.Umum dan Kepegawaian/Penata /III.c
10	YESTHITA A.W, ST 19841105 201503 2 001	Sarjana Teknik	S-1	Pranata Bencana / Penata Muda Tingkat I /III.b
11	RAHMAD FAJAR, S.T 19940721 201903 1 002	Sarjana Teknik	S-1	Plt.Kepala Sub Bagian Keuangan/Penata Muda / III.a
12	MUHAMMAD AINI 19740416 200604 1 008	SLTA	SLTA	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah/Penata Muda/III.a
13	RAMADHANI 19740914 200604 1 003	SLTA	SLTA	Bendahara Pengeluaran /Penata Muda/III.a
14	RUSDIANA 19741112 2007012 019	SLTA	SLTA	Pengelola Logistik/Pengatur Tingkat /III.a

Sumber : BPBD Kab.Tapin



Tabel 4.36
Jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) per Jabatan
s/d akhir Desember 2023

NO	NAMA	JABATAN
1	JAINI, ME	TENAGA ADMINISTRASI
2	WAHIDAH, S.Pd	TENAGA ADMINISTRASI
3	M. ALI NORDIN, S.Kom	TENAGA ADMINISTRASI
4	TAUPIK NOR RAHMAN, S. Kom	TENAGA ADMINISTRASI
5	SITI FATIMAH, S. Kom	TENAGA ADMINISTRASI
6	SITI KAMILA	TENAGA ADMINISTRASI
7	RAHMANI, S.Kom	TENAGA PUSDALOPS
8	M. NAJMI FADILAH, S.Kom	TENAGA PUSDALOPS
9	RAHMAT AMRULLAH, S. Kom	TENAGA PUSDALOPS
10	M. IKHSAN	TENAGA PUSDALOPS
11	SABIRIN	TENAGA PUSDALOPS
12	AHMAD DAHLAN	TENAGA PUSDALOPS
13	M. DHIKA ABDILAH	SATUAN PETUGAS
14	SYAFRUDIN	SATUAN PETUGAS
15	SYAHYUDIN NOOR	SATUAN PETUGAS
16	RIYANDIE PRANA BAKTI	SATUAN PETUGAS
17	M. SYAFWAN Z Aidan	SATUAN PETUGAS
18	M. AZRUL AZIS	SATUAN PETUGAS
19	JAILANI	SATUAN PETUGAS
20	M. USTAZA	SATUAN PETUGAS
21	TAUFIK RAHMAN	SATUAN PETUGAS
22	BAHRUDIN	SATUAN PETUGAS
23	M. MUGNI MARHABAN	SATUAN PETUGAS
24	MUHAMMAD AHYAT	SATUAN PETUGAS
25	M. HAIQAL AKBAR LUBIS	SATUAN PETUGAS
26	DAIDIN	PETUGAS KEBERSIHAN



NO	NAMA	JABATAN
27	RASYIDI	PETUGAS KEBERSIHAN
28	RISNADI	PETUGAS KEAMANAN

Sumber : BPBD Kab.Tapin

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Masih kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan penanggulangan urusan sub bencana.
- 2) Belum sinkronnya antara SPM dengan Renstra SKPD yang telah dibuat, sehingga masih belum terlaksananya SPM dengan maksimal.
- 3) Dukungan personil yang masih kurang serta peralatan yang belum memadai dalam pelaksanaan SPM sub urusan bencana.
- 4) Masih kurangnya koordinasi yang baik antar instansi terkait dengan dokumen yang telah dibuat oleh BPBD.

Solusi :

- 1) Dukungan penambahan anggaran dalam pelaksanaan memenuhi kebutuhan program kegiatan untuk memaksimalkan penerapan SPM sub urusan Bencana.
- 2) Mengadakan rapat rapat dan koordinasi lintas sektor berkaitan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk pelaksanaan SPM sub urusan Bencana di Kabupaten Tapin.
- 3) Penambahan personil yang memiliki keahlian dibidang teknis dan peralatan yang mendukung untuk pelaksanaan SPM sub urusan Bencana.

4.6. Bidang Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang



diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), jenis Pelayanan Dasar Bidang Sosial untuk daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti dilakukan dalam bentuk layanan Rehabilitasi Sosial dalam keluarga dan masyarakat dengan cara:

- a. Memberikan dukungan pelayanan/pendampingan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. Memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat.

Sedangkan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah dilakukan dalam bentuk layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Korban Bencana, dimana kebutuhan dasar disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan berdasarkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial

4.6.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.



Target pencapaian SPM Bidang Sosial untuk daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

Tabel 4.37
Target Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian			
		Penerima Layanan Dasar		Mutu Minimal Layanan Dasar	
		Indikator	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap Tahun
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap Tahun
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap Tahun
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap Tahun
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap Tahun

Sumber : Dinas Sosial Kab.Tapin

**4.6.3. Realisasi**

Hasil capaian adalah realisasi dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 tahun anggaran baik dari anggaran maupun penerima layanan.

Realisasi capaian anggaran dan penerima layanan SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Anggaran

Tabel 4.38
Realisasi Anggaran SPM Urusan Sosial Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Keluaran			Anggaran		
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
I	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
	A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
		1 Penyediaan Permakanan			
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	3,920,932,882	3,703,114,500	94,44
		2 Penyediaan Sandang			
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	33,778,720	27,610,000	81,74
		3 Penyediaan Alat Bantu			
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	39,347,340	30,100,000	76,50
		4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
		Terpenuhinya orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22,291,760	2,137,200	9,59
		5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spriritual, dan Sosial			
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spriritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	80,056,424	60,848,054	76,01
		6 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan	6,192,244	6,125,000	98,91



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Keluaran			Anggaran			
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
			Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			
		7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			
			Terpenuhinya orang yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan/Kota	14,320,000	0	0,00
		8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
			Terpenuhinya orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	6.000.000	0	0,00
		9	Pemberian Layanan Kedaruratan			
			Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	40,239,600	1,367,890	3,40
		10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			
			Terpenuhinya orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	30,028,400	2,203,250	7,34
		11	Pemberian Layanan Rujukan			
			Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	29,616,400	1.500.000	5,06
II PROGRAM PENANGANAN BENCANA						
	A	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
		1	Penyediaan Makanan			
			Terpenuhinya orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	111,245,960	110,860,000	99,65
		2	Penyediaan Sandang			
			Terpenuhinya orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	44,733,050	43,653,000	97,59
Jumlah				4.378.782.780	3.989.518.894	91,11

Sumber : Dinas Sosial Kab.Tapin



2. Realisasi Penerima Layanan

Tabel 4.39
Realisasi Penerimaan Layanan SPM Urusan Sosial Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Pencapaian (%)
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di luar panti	267	267	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di luar panti	444	444	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di luar panti	494	494	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di luar panti	3	3	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana kabupaten/kota yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana kabupaten/kota	104	104	100

Sumber : Dinas Sosial Kab.Tapin

4.6.4. Alokasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.40
Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Keluaran		Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
I	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
	A			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Keluaran		Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Penyediaan Permakanan			
	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	3,920,932,882	APBD
2	Penyediaan Sandang			
	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	33,778,720	APBD
3	Penyediaan Alat Bantu			
	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	39,347,340	APBD
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			
	Terpenuhinya orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	22,291,760	APBD
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	80,056,424	APBD
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			
	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	6,192,244	APBD
7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			
	Terpenuhinya orang yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan/Kota	Orang	14,320,000	APBD
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
	Terpenuhinya orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	6,000,000	APBD
9	Pemberian Layanan Kedaruratan			
	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40,239,600	APBD
10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Keluaran			Satuan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
		Terpenuhinya orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30,028,400	APBD
	11	Pemberian Layanan Rujukan			
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	29,616,400	APBD
II	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
	A	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			
	1	Penyediaan Makanan			
		Terpenuhinya orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	111,245,960	APBD
	2	Penyediaan Sandang			
		Terpenuhinya orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	44,733,050	APBD
Jumlah				4,378,782,780	

Sumber : Dinas Sosial Kab.Tapin

4.6.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.41
Dukungan Personil Tahun 2023

No.	Personil	Jumlah Populasi (Orang)
DINAS SOSIAL KABUPATEN TAPIN		
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretariat	
	ASN	8
	PTT	3
3	Bidang Rehabilitasi Sosial	
	ASN	3
	PTT	3
4	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	
	ASN	3
	PTT	3
5	Bidang Pemberdayaan Sosial	
	ASN	3



No.	Personil	Jumlah Populasi (Orang)
	PTT	3
	TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (TKS)	
6	Pendamping Rehabilitasi Sosial	2
7	Program Keluarga Harapan (PKH)	26
8	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	33
9	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	35
10	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	12
11	Karang Taruna (KT)	142
12	Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	43
13	Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)	128
	Jumlah	451

Sumber : Dinas Sosial Kab.Tapin

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.42
Permasalahan dan Solusi Tahun 2023

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Permasalahan	Solusi
1	Rehabiltiasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	-	-
2	Rehabiltiasi Sosial Dasar Anak Terlantar Terlantar di luar panti	-	-
3	Rehabiltiasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti	-	-
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti	-	-
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	-	-

Sumber : Dinas Sosial Kab.Tapin

4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

4.7.1. Bidang Urusan Pendidikan

Penerapan SPM Pendidikan pada tahun 2023 didukung dari dana APBD Kabupaten Tapin, dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 4.43
Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2023

No	SPM Bidang Pendidikan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran Renja PD
1	Penanganan anak tidak bersekolah (ATS)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Rp. 100.000.000
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan	Rp. 165.000.140
2	Bantuan untuk siswa miskin yang belum terlayani	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Rp. 282.134.850





No	SPM Bidang Pendidikan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran Renja PD
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Rp. 179.997.341
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Rp. 224.995.352
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rp. 59.999.413
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Rp. 128.878.704
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rp. 82.000.035



No	SPM Bidang Pendidikan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran Renja PD
3	Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Rp. 109.999.994
			Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Rp. 3.405.932
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Rp. 3.015.000.000



No	SPM Bidang Pendidikan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran Renja PD
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Rp. 170.645.045
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp. 470.000.000
4	Peningkatan mutu satuan pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rp. 917.347.401
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Rp. 599.921.356
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp. 233.788.516
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Rp. 49.997.320

No	SPM Bidang Pendidikan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran Renja PD
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	Rp. 600.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rp. 6.148.730.584
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Rp. 250.000.000
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp. 127.508.912
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Rp. 205.699.894
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp. 154.351.971
		PROGRAM PENGELOLAAN	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/	Pembinaan Kelembagaan dan	Rp. 6.284.400





No	SPM Bidang Pendidikan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran Renja PD
		PENDIDIKAN	Kesetaraan	Manajemen Sekolah Nonformal / Kesetaraan	
TOTAL					Rp. 14.285.687.160

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Tapin



4.7.2. Bidang Urusan Kesehatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Kesehatan Dasar

1.1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

a. Kendala

Kendala yang dihadapi terkait indikator ini adalah Kualitas ANC Masih rendah serta mobilitas sasaran (pindah & pendatang) ibu hamil yang ada.

b. Tindak Lanjut

Dalam memenuhi target dan perlu meningkatkan kualitas pelayanan Antenatal Care di antaranya Peningkatan Kapasitas bidan, melaksanakan kelas ibu hamil dan melakukan Pendataan dan Sweeping.

1.2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

a. Kendala

Sejak tahun 2015, penekanan persalinan yang aman adalah persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Adapun kendala yang dihadapi sekarang masih adanya persalinan Non-nakes, masih adanya faktor resiko 3 Terlambat 4 Terlalu yang terjadi pada ibu hamil, serta masih ada persalinan yang dilakukan oleh nakes di tempat yang bukan fasilitas kesehatan.

b. Tindak Lanjut

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan Kemitraan dukun kampung dengan bidan, dan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, dan bidan, serta diupayakan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Keberhasilan



program ini diukur melalui indikator persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (Cakupan PN) dan persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (cakupan PF).

Analisis kematian ibu yang dilakukan membuktikan bahwa kematian ibu terkait erat dengan penolong persalinan dan tempat / fasilitas persalinan. Persalinan yang ditolong tenaga kesehatan terbukti berkontribusi terhadap turunnya risiko kematian ibu. Demikian pula dengan tempat / fasilitas, jika persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, juga akan semakin menekan risiko kematian ibu. Namun demikian kompetensi petugas kesehatan perlu ditingkatkan dengan penunjukan 4 (empat) RS rujukan yang dilengkapi PONEK (pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) diharapkan bisa menekan angka kematian. Meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan oleh nakes terutama pada kelas ibu hamil, serta melakukan kerjasama lintas sektor untuk perbaikan dan penyediaan poskesdes di desa.

1.3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

a. Kendala

Neonatus adalah bayi baru lahir sampai dengan usia 28 hari. Pada masa tersebut terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul. Sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Adapun kendala yang dihadapi sekarang Masih ada bayi baru lahir yang belum sempat mendapatkan Pelayanan kesehatan paripurna dan pelayanan SHK (Skrining Hipotiroid Kongenital).

b. Tindak Lanjut

Kegiatan tindak lanjut yang dapat dilakukan adalah Penyuluhan



dan edukasi serta koordinasi lintas sektor tentang deteksi dini pelayanan kesehatan bayi baru lahir, dan juga pelaksanaan kelas hamil.

1.4. Pelayanan Anak Balita

a. Kendala

Kendala yang dihadapi terkait indikator cakupan pelayanan anak balita adalah pada kriteria penetapan targetnya. Penetapan target cakupan pelayanan anak balita berdasarkan permenkes No. 43 tahun 2016 adalah 100%. Kendala yang masih dihadapi Kurangnya Indikator untuk pelayanan anak balita sesuai standar yang ada.

b. Tindak lanjut

Tindak lanjut dari permasalahan di atas adalah dengan melakukan Peningkatan kegiatan kader ibu balita diposyandu dan melakukan Penyuluhan dan Edukasi.

1.5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

a. Kendala

Permasalahan kesehatan pada Anak Usia Sekolah tingkat dasar adalah anggaran pemeriksaan berkala dan penjangkaran masih dua kali dalam setahun.

b. Tindak Lanjut

Tindak lanjut untuk kendala tersebut adalah dengan penambahan anggaran untuk pemeriksaan kesehatan kesehatan empat kali dalam setahun.

1.6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

a. Kendala

Pelayanan kesehatan usia produktif selama ini hanya dilakukan untuk masyarakat usia produktif yang datang ke pelayanan kesehatan,ada pun kendala yang didapatkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan, kurangnya dukungan dana untuk posbindu PTM oleh sebagian desa, dan pelayanan PANDU PTM yang belum optimal.



b. Tindak lanjut

Ada beberapa hal yang dilakukan untuk menindaklanjuti hal tersebut mengoptimalkan peran promkes untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mengoptimalkan peran kader dalam pelaksanaan posbindu untuk meningkatkan jumlah sasaran baru, melakukan advokasi ke kepala desa untuk mendapat dukungan dana (insentif, pembelian alat, BMHP, dan cetak KMS), serta memaksimalkan petugas yang sudah dilatih PANDU PTM untuk melaksanakan PANDU PTM.

1.7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

a. Kendala

Indonesia termasuk negara berpenduduk struktur tua, karena persentase penduduk lanjut usia yang telah mencapai di atas 7% dari total penduduk. Keadaan ini berkaitan dengan adanya perbaikan kualitas kesehatan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Adapun kendala yang ditemukan diantaranya Jarak rumah lansia dengan lokasi posyandu, kurangnya pengetahuan dan dukungan keluarga serta sarana prasarana untuk kunjungan kegiatan posyandu.

b. Tindak Lanjut

Tindak lanjut untuk kendala tersebut adalah melaksanakan sosialisasi program posyandu lansia dan masyarakat guna meningkatkan pengetahuan lansia dan keluarga.



1.8. Pelayanan Kesehatan pada penderita Hipertensi

a. Kendala

Saat ini, rekap data capaian masih terfokus dari data puskesmas, sedangkan data dari rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lain seperti klinik belum terekap serta kepatuhan minum obat pasien masih rendah.

b. Tindak Lanjut

Upaya – upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain serta meningkatkan edukasi dan konseling ke pasien dari petugas kesehatan terkait kepatuhan minum obat

1.9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus

a. Kendala

Belum semua puskesmas melaksanakan pelaporan online baik melalui aplikasi ASIK maupun SIPTM.

b. Tindak Lanjut

Melakukan Koordinasi dan pembinaan ke Puskesmas terkait sistem pelaporan online.

1.10. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa

a. Kendala

Masih banyak puskesmas yang belum melaksanakan pelaporan terutama pelaporan melalui aplikasi SIMKESWA, skrining sudah dilaksanakan tapi terkendala input data online oleh petugas. Dan dukungan keluarga untuk pengobatan dan perawatan pasien ODGJ masih kurang.

b. Tindak Lanjut

Di Kabupaten Tapin untuk menyikapi masalah kesehatan jiwa yang ada dilaksanakan kegiatan refreshing input data melalui aplikasi SIMKESWA serta melakukan edukasi keluarga dan pasien melalui kunjungan rumah rutin.

1.11. Pelayanan kesehatan Orang Dengan Tuberculosis (TB)

a. Kendala

Beberapa kendala yang dihadapi tahun 2023 antara lain kegiatan ACF (*Active Case Finding*) belum terlaksana secara maksimal, investigasi kontak belum dilakukan maksimal pada semua index kasus, terjadinya kekosongan bahan pemeriksaan mikroskopis TB berupa reagen ZN pada tahun 2023, serta belum terlibatnya fasilitas kesehatan lain seperti klinik dan rumah sakit swasta dalam pelayanan dan pelaporan kasus TBC.

b. Tindak Lanjut

Strategi penanganan TB yang dilaksanakan meningkatkan kegiatan ACF (*Active Case Finding*) dengan memaksimalkan kegiatan investigasi kontak dan skrining TBC di tempat khusus seperti lapas, pondok pesantren, dan panti/asrama, memastikan ketersediaan logistik cukup untuk pelaksanaan program, serta melaksanakan MoU dengan klinik dan rumah sakit swasta yang ada di kabupaten Tapin dalam pelayanan program TBC.

1.12. Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko terinfeksi HIV

a. Kendala

Di Kabupaten Tapin masih terdapat kendala dalam pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV diantaranya pelayanan kesehatan ini belum menjangkau secara luas ke sasaran populasi kunci (LSL, pasien IMS, dan ibu hamil), serta tingkat kepatuhan pengobatan pasien HIV yang masih rendah.

b. Tindak lanjut

Melakukan pemetaan untuk populasi kunci agar dapat meningkatkan pelayanan kesehatan pada pasien HIV maupun orang yang berisiko terinfeksi HIV, melakukan skrining pada ibu hamil pada saat kelas ibu hamil, serta meningkatkan edukasi dan konseling kepada pasien dan keluarga pasien dengan melakukan kunjungan ke rumah pasien.

**4.7.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum**

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin adalah program-program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan 6 (enam) kegiatan diantaranya :

1. Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM
2. Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan (DAK Fisik Bidang Air Minum Penugasan)
3. Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
4. Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota
5. Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat (DAK Fisik Bidang Sanitasi Penugasan)
6. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

4.7.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1. **Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota**

Tabel 4.44
Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

KODE	URAIAN	DPA	DPPA	REALISASI				SISA
				FISIK	%	KEUANGAN	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		255.000.000	76.500.000	100	100	76.500.000	100	0
1. 04 .02. 2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	255.000.000	76.500.000	3	100	76.500.000	100	0
1. 04 .02. 2.03. 01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	255.000.000	76.500.000	3	100	76.500.000	100	0
JUMLAH		255.000.000	76.500.000		100	76.500.000	100	0

Sumber : Disperkimtan Kab.Tapin



2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Tabel 4.45
Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2023

KODE	URAIAN	DPA	DPPA	REALISASI				SISA
				FISIK	%	KEUANGAN	%	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		218.007.500,00	207.407.500,00	100,00	100,00	3.007.500,00	1,45	204.400.000,00
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	218.007.500,00	207.407.500,00	100,00	100,00	3.007.500,00	1,45	204.400.000,00
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	127.077.500,00	127.077.500,00	1,00	100,00	2.077.500,00	1,63	125.000.000,00
1.04.02.2.01.05	Identifikasi Lahan-LahanPotensial sebagai LokasiRelokasi Perumahan	90.930.000,00	80.330.000,00	1,00	100,00	930.000,00	1,16	79.400.000,00
JUMLAH		218.007.500,00	207.407.500,00		100,00	3.007.500,00	1,45	204.400.000,00

Sumber : Disperkimtan Kab.Tapin

4.7.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Perlindungan Masyarakat

a. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin Tahun 2023 adalah:

Tabel 4.46
Program dan Kegiatan Urusan Trantibunlinmas Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Dan Damkar Kabupaten Tapin

Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Anggaran	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya kapasitas kinerja ASN Satpol PP dan Kebakaran	7.824.409.515	7.520.955.442	96,12



Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Anggaran	Realisasi	Capaian
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.137.416	15.790.700	97,85
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	16.137.416	15.790.700	97,85
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan yang dikerjakan tepat waktu	5.562.284.837	5.395.913.875	97,01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.544.608.637	5.383.650.025	97,10
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan dok laporan keuangan akhir tahun skpd	9.546.600	6.784.350	71,07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	8.129.600	5.479.500	67,40
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	1.478.134.554	1.457.197.165	98,58
Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.291.638	16.257.000	99,79
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	waktu penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.100.160	99.157.200	96,18
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.583.076	88.788.000	89,16
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.586.560	27.575.200	99,96



Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Anggaran	Realisasi	Capaian
Fasilitasi Kunjungan Tamu	waktu penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.540.120	3.424.000	96,72
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	waktu penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.228.033.000	1.221.995.765	99,51
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	233.706.712	216.575.000	92,67
Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	189.586.712	186.575.000	98,41
Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	44.120.000	30.000.000	68,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tepat waktu	128.591.352	69.564.537	54,10
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.991.352	31.302.117	35,17
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	waktu penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.600.000	38.262.420	96,62
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasana aparatur dalam kondisi baik	405.554.644	365.914.165	90,23
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	waktu penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	382.958.644	350.584.165	91,55
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	waktu pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.400.000	15.330.000	68,44



Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Anggaran	Realisasi	Capaian
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196.000	-	-
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase peningkatan program ketenteraman dan ketertiban umum	4.766.054.800	4.724.094.600	99,12
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya Pelanggaran K3 di Kabupaten Tapin	4.766.054.800	4.629.233.900	97,13
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Waktu penyediaan gaji dasar dan jasa operasional tenaga pendukung Satpol PP dan Kebakaran	3.501.141.500	3.412.026.250	97,45
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	waktu pelaksanaan kegiatan penanganan dan Pencegahan Covid-19	780.036.800	753.380.500	96,58
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	waktu pelaksanaan pemberdayaan perlindungan masyarakat	367.098.000	365.292.150	99,51
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	waktu pelaksanaan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	112.641.000	93.615.000	83,11



Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Anggaran	Realisasi	Capaian
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	waktu penyediaan jasa Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.137.500	4.920.000	95,77
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Menurunnya Pelanggaran Perda dan Perkada di Kabupaten Tapin	95.919.500	94.860.700	98,90
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Waktu pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	33.046.000	32.855.200	99,42
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Waktu pelaksanaan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20.676.000	19.888.000	96,19
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Waktu Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	42.197.500	42.117.500	99,81

Sumber : Satpol PP Kab.Tapin

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelaksanaan Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin berkaitan dengan anggaran melalui Program dan Kegiatan Tahun 2023 ini sebagai berikut :



Tabel 4.47
Program dan Kegiatan Urusan Trantibunlinmas Tahun 2023
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
I	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persen	100
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi	Dokumen	1
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Desa	1
II	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persen	100
1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang	70
2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Kegiatan	2
3	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah kawasan yang dilakukan penguatan kapasitas untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Kawasan	1
III	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persen	100
1	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kegiatan	2
2	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	laporan	1
IV	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persen	100

Sumber : BPBD Kab.Tapin

**4.7.6. Bidang Sosial**

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pelaporan SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Tapin tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.48
Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2023

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Kinerja
I	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		
	A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
		1 Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota
		2 Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota
		3 Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota
		4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya orang yang mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
		5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spriritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spriritual, dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota
		6 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
		7 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya orang yang membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan/Kota
		8 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya orang yang mendapatkan Akses ke Layanan



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Kinerja
			Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota
	9	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota
	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya orang yang mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
	11	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota
II PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
	A	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
	1	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya orang yang mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota
	2	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya orang yang mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota

Sumber : Dinas Sosial Kab.Tapin



BAB V

PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022 ini telah dapat disusun, sebagai pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Tapin mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin selama 1 (satu) Tahun Anggaran kepada Pemerintah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari capaian kinerja makro, urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Kunci pada masing-masing urusan, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada urusan wajib pelayanan dasar, serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2023.

Secara Substansial LPPD Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang berupa informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin Kepada Pemerintah Pusat sebagai bahan evaluasi pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disampaikan, Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran Bumi Ruhui Rahayu tercinta.

PENJABAT BUPATI TAPIN,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M.Pd